



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN  
DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN BERKELANJUTAN**

**(Suatu Kajian Pemanfaatan Modal Sosial Masyarakat Sekitar Hutan,  
Studi Kasus di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Sukabumi,  
Perum Perhutani Wilayah Jawa Barat)**

**With a Summary in English**

**FOREST COMMUNITIES EMPOWERMENT MODEL  
IN SUSTAINABLE FOREST RESOURCES MANAGEMENT**

**(A Study to Utilize Social Capital Around Communities Forest, Study Case  
In Management Forest Unit (KPH) Sukabumi, Perum Perhutani, West Java Region)**

**DISERTASI**

**Sylvana Ratina  
NPM. 0706223160**

**JENJANG DOKTOR  
PROGRAM STUDI ILMU LINGKUNGAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
JAKARTA, JANUARI 2011**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN  
DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN BERKELANJUTAN**

**(Suatu Kajian Pemanfaatan Modal Sosial Masyarakat Sekitar Hutan,  
Studi Kasus di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Sukabumi,  
Perum Perhutani Wilayah Jawa Barat)**

**Disertasi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar**

**DOKTOR DALAM  
ILMU LINGKUNGAN**

**SYLVANA RATINA  
NPM. 0706223160**

**UNIVERSITAS INDONESIA  
JENJANG PENDIDIKAN DOKTOR  
PROGRAM STUDI ILMU LINGKUNGAN  
PROGRAM PASACASARJANA  
JAKARTA, JANUARI 2011**

## Halaman Pengesahan Disertasi Final

Judul Disertasi : MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN BERKELANJUTAN.

(Suatu Kajian Pemanfaatan Modal Sosial Masyarakat Sekitar Hutan, Studi Kasus di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Sukabumi, Perum Perhutani Wilayah Jawa Barat)”

Disertasi ini telah dipertahankan, disahkan, dan disetujui oleh Komisi Penguji Sidang Akademik Universitas Indonesia pada tanggal 13 Januari 2011, serta telah dinyatakan LULUS ujian komprehensif dengan YUDISIUM SANGAT MEMUASKAN

Jakarta, 13 Januari 2011

Menyetujui

Promotor

Prof. Dr. Paulus Wirutomo. M.Sc.

Ko-Promotor

Prof. Dr. Ir. Herman Haeruman. M.Sc

Ko-Promotor

Dr. dr. Tri Edhi Budhi Soesilo. M.Si

Mengetahui

Plh. Ketua Program Pascasarjana  
Universitas Indonesia

Prof. Dr. Chandra Wijaya, MSi. MM


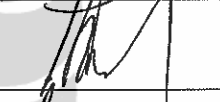



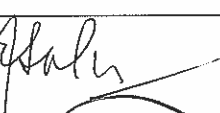
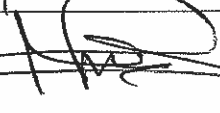
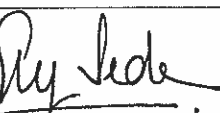

Ketua Program Studi  
Ilmu Lingkungan,

Dr. Ir. Setyo Moersidik, DEA

## Halaman Pengesahan Komisi Sidang Akademik Universitas Indonesia

Nama : Sylvana Ratina / NPM: 0706223160  
Bidang Ilmu : Interdisiplin  
Program Studi : Ilmu Lingkungan  
Judul Disertasi : MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN BERKELANJUTAN.  
(Suatu Kajian Pemanfaatan Modal Sosial Masyarakat Sekitar Hutan, Studi Kasus di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Sukabumi, Perum Perhutani Wilayah Jawa Barat)"

### Komisi Sidang Akademik

No.	Nama Lengkap	Keterangan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Chandra Wijaya, MSi. MM	Ketua Sidang	
2.	Prof. Dr. Paulus Wirutomo. MSc.	Promotor	
3.	Prof. Dr. Ir. Herman Haeruman. MSc	Ko-Promotor	
4.	Dr. dr. Tri Edhi Budhi Soesilo. Msi	Ko-Promotor	
5.	Dr. Ir. Setyo Moersidik. DEA	Ketua Penguji	
6.	Prof. Dr. Emil Salim	Penguji	
7.	Prof. Dr. Gusti Muhammad Hatta	Penguji	
8.	Francisia SSE Seda, Ph.D	Penguji	
9.	Dr. Ir. Boen Poernama	Penguji	

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Disertasi yang berjudul “MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN BERKELANJUTAN (Suatu Kajian Pemanfaatan Modal Sosial Masyarakat Sekitar Hutan, Studi Kasus di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Sukabumi, Perum Perhutani Wilayah Jawa Barat)” adalah disertasi hasil karya penulis sendiri, dan semua sumber, baik yang dikutip maupun dirujuk telah penulis nyatakan dengan benar

Jakarta, 13 Januari 2011



SYLVANA RATINA  
NPM: 0706223160

## BIODATA PENULIS

Penulis, **Sylvana Ratina** dilahirkan di Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada tanggal 13 Agustus 1961 dari orang tua bernama Bapak H. Abdul Wahid dan Ibu Hj. St. Nurhayati (alm). Masa SD sampai masa SMP dihabiskan di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, kemudian pada tahun 1979 tamat dari SMA Negeri 1 di Ujung Pandang. Penulis kemudian melanjutkan kuliahnya di Institut Pertanian Bogor dan tamat pada tahun 1984 di Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian. Pada tahun 2002. Kemudian penulis menyelesaikan studi program Magsiter (S2) di Jurusan Ekonomi Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan pada tahun 2007 penulis juga menyelesaikan studi Program Magister (S2) di Jurusan Publik Administrasi pada STIAMI (Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi) Jakarta. Pada tahun 2007 penulis mengikuti Program Doktor (S3) pada Program Pascasarjana Studi Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia, Jakarta.

Setelah selesai menempuh Strata I, penulis menikah dengan Ir. M. Yunus Sjamsoeddin pada tahun 1985, dan dikaruniai 4 orang putra dan 1 orang putri, yaitu (1) Yusran Aldila, 24 tahun; (2) Yuri Ardila, 21 tahun; (3) Yustian Abdila, 16 tahun, (4) Yusri Fadila, 11 tahun, dan (5) Melisa Aulia Ramadhini, 4 tahun. Selama berumah tangga penulis menetap di Jakarta.

Pada tahun 1986, Penulis memulai karir sebagai Pegawai Negeri Sipil di Departemen Pertanian, kemudian tahun 1988, penulis mutasi ke Departemen Kehutanan. Tahun 1988-1995, penulis menjadi kepala seksi di Biro Humas Departemen Kehutanan. Tahun 2002-2009, penulis menjadi kepala seksi Program dan Evaluasi Program Badan Planologi Kehutanan. Pada tahun 2009 penulis sebagai Kepala Sub Direktorat Informasi Wilayah Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan. Mulai 23 Desember 2010 Penulis mutasi lagi dan menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan pada Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan.

## KATA PENGANTAR

Penulis sangat bersyukur dan menghaturkan segala pujian kepada Allah Azza Wajalla, karena atas segala karunia, berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan disertasi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor di Bidang Studi Ilmu Lingkungan, Program Pascasarjana Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai selesainya penyusunan disertasi ini, sangatlah sulit untuk menyelesaikannya. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Paulus Wirutomo. MSc, selaku Promotor, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberi bimbingan dalam penyusunan disertasi ini
2. Prof. Dr. Ir. Herman Haeruman. MSc, selaku Ko-Promotor, yang penuh kesabaran memberi pengarahan-pengarahan dalam penyusunan disertasi ini
3. Dr. dr. Tri Edhi Budhi Soesilo. MSi, selaku Ko- Promotor, yang penuh antusias memberi bimbingan dan semangat dalam menyelesaikan disertasi ini.
4. Dr. Ir. Setyo Moersidik, DEA selaku Ketua Program PSIL yang penuh kesabaran mengarahkan penulis untuk tetap konsisten menyelesaikan disertasi ini.
5. Prof. Dr. Gusti Muhammad Hatta, Prof. Dr. Emil Salim, Francisia SSE Seda, PhD, dan Dr. Ir. Boen Purnama, MSc. Selaku para penguji, yang begitu antusias memberikan masukan-masukan yang sangat berharga pada peneliti.
6. Dr. Ir. Yetty Rusli, MSc, Ir. M. Ali Arsyad, MSc., dan Dr. Ir. Dwi Sudarto, MSc., yang telah memberi ijin dan rekomendasi kepada peneliti untuk melanjutkan pendidikan ke S3.
7. Ir. Deddy Supredy, MSi, Ir. Sriyono, MM., dan Ir. Hudoyo, MM. selaku atasan penulis (selama menempuh pendidikan), yang telah memberi ijin dan kesempatan untuk mengikuti seluruh kegiatan pendidikan S3 di PSIL Universitas Indonesia.
8. Direktur Perum Perhutani Wilayah III Jawa Barat dan Banten, Kepala KPH Sukabumi berserta seluruh jajarannya yang telah memberi kesempatan dan bantuan terlaksananya penelitian di lapangan sampai terselesainya disertasi ini.

9. Ir. M. Yunus Sjamsoeddin, suami penulis, yang penuh kesabaran dan terus memberi motivasi dan semangat kepada penulis, dan juga telah memberi keridhaannya untuk terabaikan sementara waktu karena penulis menyelesaikan disertasi ini.
10. Yusran Aldila, Yuri Ardila, Yustian Abdila, Yusri Fadila dan Melisa Aulia Ramadhini, putra putri penulis, yang telah rela dan ridho memberikan waktunya terpakai untuk penulis menyelesaikan disertasi ini.
11. Bpk H. Abdul Wahid dan Ibu Hj. St. Nurhayati (Almarhum), orang tua tercinta yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik penulis, sehingga penulis dapat mempunyai kesempatan untuk merasakan pendidikan jenjang yang lebih tinggi.
12. Seluruh keluarga dan sahabat yang telah memberi dukungan dan bantuan dalam pelaksanaan penelitian dan pengolahan data yang akhirnya disertasi ini selesai.
13. Rekan-rekan mahasiswa S3 Program Studi Ilmu Lingkungan angkatan VII, sebagai teman diskusi dan berbagi selama masa-masa kuliah dan penulisan disertasi ini.
14. Seluruh Staf di Sekretariat Pascasarjana Program Studi Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia, khususnya *mba* Erni, *mba* Irma, *Mas* Udin, yang telah memberi bantuan dan dukungan untuk kelancaran masa perkuliahan dan terlaksananya penelitian sampai selesainya disertasi ini.
15. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah turut membantu dalam penyelesaian disertasi ini.

Akhir kata, penulis berharap hanya Allah Yang Maha Pemberi Rahmat dan Rahim berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga disertasi ini membawa manfaat bagi pengembangan kajian ilmu lingkungan.

Jakarta, Januari 2011

Penulis



## ABSTRAK

Dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan yang bermaterikan kelestarian fungsi ekonomi, fungsi ekologi dan fungsi sosial dari sumber daya hutan maka kehidupan masyarakat sekitar hutan harus menjadi perhatian karena kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan yang membutuhkan pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan menjadi kebutuhan demi masyarakat sekitar hutan dan sekaligus pelaksanaan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Untuk keberhasilan pemberdayaan masyarakat, maka pemanfaatan modal sosial adalah suatu keharusan, karena modal sosial adalah suatu nilai norma-norma yang terbentuk yang dihasilkan dalam suatu interaksi yang cukup panjang dalam suatu masyarakat dan menjadi acuan dalam bersikap, berperilaku, berinteraksi, dan berinterelasi dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan.

**Tujuan Penelitian** adalah merumuskan konsep hipotetik model pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan dengan kajian pemanfaatan modal sosial masyarakat sekitar hutan. **Manfaat penelitian** adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang model pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan ditinjau dengan pendekatan dan kajian pemanfaatan faktor pembentuk modal sosial masyarakat sekitar hutan sehingga dapat menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan terhadap pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam rangka pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. **Metodologi penelitian** dilakukan dengan metode kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan dan pengujian konsep *Structural Equation Modelling*, *Cross Section* dan pembuatan Model Dinamis.

**Penelitian menghasilkan penemuan** rumusan konsep hipotetik Model pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan dengan memanfaatkan modal sosial masyarakat sekitar hutan, model tersebut memberi gambaran bahwa modal sosial berpengaruh langsung dan tidak langsung secara signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Modal sosial masyarakat sekitar hutan akan termanfaatkan secara optimal melalui pemanfaatan dan penguatan modal sosial masyarakat sekitar hutan yang dilakukan melalui mekanisme konsep timbal balik, konsep saluran informasi dan konsep ketaatan norma, adat dan nilai budaya.

**Kata kunci:**

Ekosistem Hutan, Pemberdayaan masyarakat, masyarakat sekitar hutan, modal sosial, pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan.

## ABSTRACT

In the frame of sustainable forest resources management , the consisting of economical function, ecological function and social function conservation from the forest resources, that livelihood community surrounding forest must be concerned because social economics conditions of community surrounding forest requires empowering. Empowerment of community surrounding forest is becoming from community surrounding forest and implementation of sustainable forest resources management. For successfully for empowerment of community, and then social capital utilization is must be, because social capital is a norm value that formed and resulted in interaction that is long enough in a community, and become a reference in having attitude, behaving, interacting, and interalating in society to achieve common goals in sustainable forest resources management.

Research objectives is to formulate hypothesis concept of forest communities empowerment model in sustainable forest resources management by utilizing social capital surrounding forest. Benefits of study are to enhance understanding about community empowerment model in sustainable forest resources management. It is review with the approach and study of taking advantage component factors of social capital. Therefore, it can be a reference in policy making toward forest communities empowerment model, in the frame of sustainable forest resources management. Research Methodology is conducted by using qualitative and quantitative method with concept test using structural equation modeling, cross section table and dynamic model.

Research finding resulted hypothesis concept formulation of community empowerment model in sustainable forest resources management by taking advantage capital social of forest communities. The model explained that social capitals of forest communities have significant impact toward community empowerment process and sustainable forest resources management both directly and indirectly. Social capital will be utilized optimally through utilization and strengthening social capital forest communities was conducted through mutual mechanism concept, concept of information channel and obedience of norm, tradition and culture value.

**Key word:**

Forest Ecosystem, Empowerment of community, forest communities, capital social, sustainable forest resources management.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK UJIAN PROMOSI .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vii
BIODATA PENULIS .....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
DAFTAR SINGKATAN .....	xxv
RINGKASAN.....	xxvii
<b>1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan masalah.....	15
1.3. Tujuan Penelitian.....	20
1.4. Manfaat Penelitian.....	21
<b>2. TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>23</b>
2.1. Kerangka Teori	
2.1.1. Ekosistem Hutan dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan .....	23
2.1.2. Hubungan Masyarakat Sekitar Hutan dan Sumber Daya Hutan..	34
2.1.3. Konsep Pemberdayaan Masyarakat dengan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan .....	40
2.1.4. Konsep Modal Sosial Sebagai Landasan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan .....	54
2.1.5. Keterkaitan Modal Sosial dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan .....	70
2.1.6. Model .....	76
2.2. Kerangka Berpikir .....	79
<b>3. METODOLOGI.....</b>	<b>93</b>
3.1. Metode Penelitian.....	93
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian.....	97
3.3. Populasi dan Sample Penelitian.....	97
3.4. Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional.....	99
3.5. Metode Pengumpulan dan Analisis Data.....	114

<b>4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>119</b>
4.1. Deskripsi Keadaan Umum Lokasi Penelitian.....	119
4.1.1. Deskripsi Geografi dan Demografi Kabupaten Sukabumi.....	119
4.1.2. Deskripsi Pengelolaan Hutan KPH Sukabumi Lokasi Penelitian.....	124
4.1.3. Deskripsi Responden Masyarakat Sekitar Hutan di KPH Sukabumi.....	134
4.2. Keterbatasan Penelitian .....	148
4.3. Perumusan Model Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Dengan Pemanfaatan Modal Sosial .....	148
4.3.1. Analisis Uji Validitas dan Reliabilitas .....	148
4.3.2. Analisis Statistik Inferensial .....	156
4.3.2.1. Hubungan Indeks Keseuaian Model .....	164
4.3.2.2. Analisis Pengujian Hipotesa Jalur .....	166
4.3.2.3. Analisis Pengaruh Modal Sosial .....	174
4.4. Analisis Perbandingan Pengaruh Kekuatan Modal Sosial Terhadap Proses Pemberdayaan Masyarakat Sekitar dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan Hutan.....	177
4.4.1. Pengaruh Modal Sosial pada Strategi Pemberdayaan Masyarakat .....	193
4.4.2. Pengaruh Modal Sosial pada Keterlibatan dan Dukungan <i>Stakeholders</i> Pemberdayaan Masyarakat .....	199
4.4.3. Pengaruh Modal Sosial Pada Keberdayaan Masyarakat .....	206
4.4.4. Pengaruh Modal Sosial pada Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan .....	210
4.4.5. Pengaruh Tidak Langsung Modal Sosial pada Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan melalui Strategi Pemberdayaan Masyarakat dan Keberdayaan Masyarakat .....	216
4.4.6. Pengaruh Tidak Langsung Modal Sosial pada Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan melalui Keterlibatan dan Dukungan <i>Stakeholders</i> Pemberdayaan Masyarakat dan Keberdayaan Masyarakat .....	225
4.4.7. Pengaruh Tidak Langsung Modal Sosial pada Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan melalui Keberdayaan Masyarakat .....	235
4.5. Perumusan Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan Dengan Pemanfaatan dan Penguatan Modal Sosial Secara Optimal .....	249
<b>5. KESIMPULAN .....</b>	<b>271</b>
5.1. Kesimpulan.....	271
5.2. Saran.....	273
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>275</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Model Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Yang Telah Dilakukan Perum Perhutani.....	10
Tabel 2.1.	Dimensi dan Indikator Pemberdayaan Masyarakat.....	45
Tabel 3.1.	Tujuan Penelitian dan Kebutuhan Data, Metode dan Analisa Yang Dilakukan .....	94
Tabel 3.2.	Klassifikasi Responden LMDH untuk Kajian Analisis Perbandingan .....	98
Tabel 3.3.	Justifikasi Teori Untuk Model Konseptual Penelitian.....	116
Tabel 4.1.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sukabumi Tahun 2000-2010.....	121
Tabel 4.2.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umum dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sukabumi Tahun 2007.....	121
Tabel 4.3.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Sekolah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sukabumi Tahun 2007.....	122
Tabel 4.4.	Pentahapan Keluarga Sejahtera Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 dan Tahun 2007.....	122
Tabel 4.5.	Pentahapan Keluarga Sejahtera Kecamatan 12 Desa LMDH Responden Tahun 2007.....	123
Tabel 4.6.	Jumlah Kepala Keluarga Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kabupaten Sukabumi.....	124
Tabel 4.7.	Pembagian Hutan KPH Sukabumi Berdasarkan Fungsi Hutan	126
Tabel 4.8.	Reboisasi Tanaman Tahun 2003-2007 (ha).....	127
Tabel 4.9.	Perkembangan Produksi Kayu Tahun 2003-2007.....	127
Tabel 4.10.	Perkembangan Produksi Kayu Bakar Tahun 2003-2007.....	128
Tabel 4.11.	Luas dan Produksi Hasil Hutan Non Kayu Tahun 2003-2007	128
Tabel 4.12.	Pendapatan, Pengeluaran dan Laba KPH Sukabumi.....	129
Tabel 4.13.	Kontribusi KPH Sukabumi Terhadap 12 LMDH Responden Tahun 2004-2009.....	131
Tabel 4.14.	Jumlah Penerimaan Kontribusi Per Tahun (2009) Dari Perum Perhutani Berdasarkan Urutan Jumlahnya .....	133
Tabel 4.15.	Data 12 LMDH Responden di KPH Sukabumi.....	135
Tabel 4.16.	Karakteristik Perumahan Responden.....	137
Tabel 4.17.	Kondisi Sarana Prasarana Yang Terdapat dalam Desa LMDH ....	138
Tabel 4.18.	Kondisi Eksisting Rata-rata Modal Sosial Masyarakat Sekitar Hutan pada LMDH Responden Keseluruhan (12 LMDH).....	142

Tabel 4.19.	Perbandingan Kondisi Modal Sosial Pada LMDH Maju dan Belum Maju .....	146
Tabel 4.20	Produksi Hutan Kayu LMDH Maju dan LMDH Belum Maju .....	147
Tabel 4.21.	Hasil Analisa Faktor Konfirmatori.....	158
Tabel 4.22.	Indeks Uji Kesesuaian Model.....	164
Tabel 4.23.	Pengujian Hipotesis Jalur .....	166
Tabel 4.24.	Pengaruh Modal Sosial Terhadap Keberdayaan Melalui Strategi Pemberdayaan Masyarakat.....	175
Tabel 4.25.	Pengaruh Modal Sosial Terhadap Keberdayaan Masyarakat Melalui Keterlibatan dan Dukungan Stakeholders .....	175
Tabel 4.26.	Pengaruh Modal Sosial Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan.....	176
Tabel 4.27.	Hasil Evaluasi Kondisi Existing Keberdayaan pada LMDH Responden.....	178
Tabel 4.28.	Perbandingan Dalam Hubungan Struktural Model Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Pada LMDH maju dan Belum Maju .....	185
Tabel 4.29.	Hubungan Pengukuran Pada Setiap Variabel dalam Model Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan .....	185
Tabel 4.30.	Perbandingan LMDH Maju dan LMDH Belum Maju Menurut Masing-Masing Komponen Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan di KPH Sukabumi .....	250

## DAFTAR GAMBAR

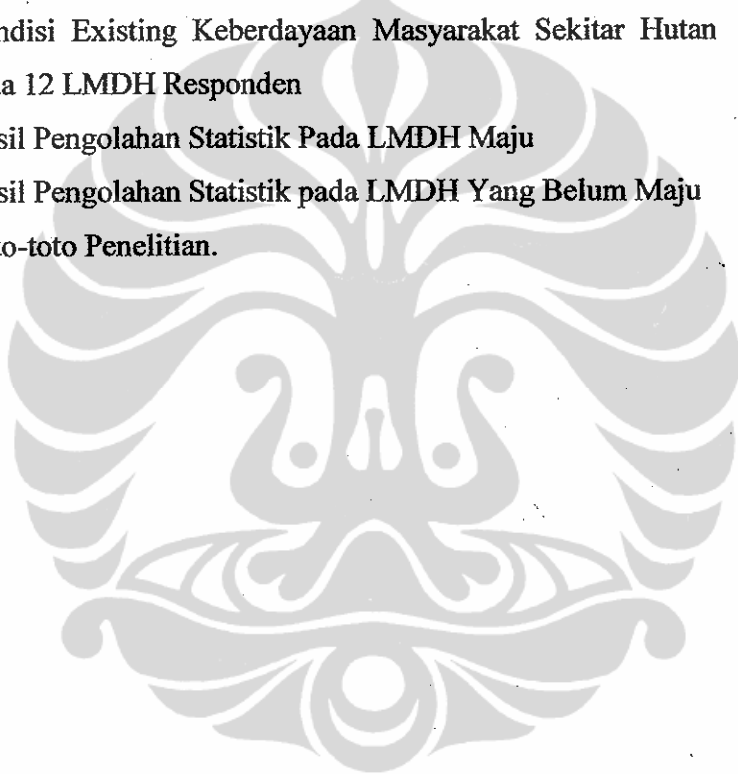
Gambar 1.1.	Lingkungan Hidup yang terdiri atas lingkungan hidup alam, lingkungan hidup buatan/binaan dan lingkungan sosial yang saling berkaitan dan saling menentukan corak atau kualitas lingkungan hidup secara keseluruhan untuk mencari keberlanjutan lingkungan	6
Gambar 1.2.	Peta Lokasi Penelitian Wilayah Kerja KPH Sukabumi.....	11
Gambar 2.1.	Ekosistem Hutan dengan Jejaring Kehidupan	24
Gambar 2.2.	Konsep Kerangka Kerja Untuk Penilaian Keberlanjutan.....	33
Gambar 2.3.	Model Fujikake Evaluasi Pemberdayaan Dengan Menggunakan 12 Indikator.....	46
Gambar 2.4.	Proses dan Keterkaitan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan.....	52
Gambar 2.5.	Kerangka Konsep Model Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan dengan Memanfaatkan Modal Sosial.....	83
Gambar 2.6.	Kerangka Konseptual Model Penelitian dengan <i>Structural Equation Modelling</i> (SEM).....	84
Gambar 4.1.	Model Pengukuran Terhadap Modal Sosial, Strategi Pemberdayaan, Keberdayaan Masyarakat, Keterlibatan Stakeholders, dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan Dengan Nilai Standardized .....	159
Gambar 4.2.	Model Pengukuran Terhadap Modal Sosial, Strategi Pemberdayaan, Keberdayaan Masyarakat, Keterlibatan Stakeholders, dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan Dengan Nilai CR.....	160
Gambar 4.3.	Model Struktural Pemberdayaan Masyarakat Dengan Nilai Standardized Regression Weight.....	162
Gambar 4.4.	Model Struktural Pemberdayaann Masyarakat Dengan Nilai CR.....	163
Gambar 4.5.	Model Struktural Modal Sosial Terhadap Strategi Pemberdayaan, Keterlibatan dan Dukungan Stakeholders, Keberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan.....	165
Gambar 4.6.	Model Struktural Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Dengan Nilai Standardized pada LMDH Maju.....	180
Gambar 4.7.	Model Struktural Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Dengan Nilai CR pada LMDH Maju.....	181

Gambar 4.8.	Model Struktural Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Dengan Nilai <i>Standardized</i> pada LMDH Belum Maju .....	183
Gambar 4.9.	Model Struktural Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Dengan Nilai <i>CR</i> pada LMDH Belum Maju .....	184
Gambar 4.10.	Hubungan Pengaruh Modal Sosial Terhadap Strategi Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan .....	198
Gambar 4.11.	Hubungan Modal Sosial Dengan Keterlibatan dan Dukungan Stakeholders.....	200
Gambar 4.12.	Hubungan Modal Sosial dengan Keberdayaan Masyarakat .....	206
Gambar 4.13.	Hubungan Modal Sosial dengan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan .....	210
Gambar 4.14.	Hubungan Tak Langsung Modal Sosial dnegan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan melalui Strategi Pemberdayaan dan Keberdayaam Masyarakat .....	216
Gambar 4.15.	Hubungan Tak Langsung Modal Sosial dnegan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan melalui Keterlibatan dan Dukungan Stakeholders Pemberdayaan Masyarakat dan Keberdayaam Masyarakat .....	225
Gambar 4.16.	Hubungan Tak Langsung Modal Sosial dnegan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan melalui Keberdayaan Masyarakat .....	235
Gambar 4.17.	Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan dengan Memanfaatkan Modal Sosial Masyarakat Sekitar Hutan saat ini dan Model Pemberdayaan Masyarakat Dengan Pemanfaatan dan Penguatan Modal Sosial.....	249
Gambar 4.18.	Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan dengan Pemanfaatan dan Penguatan Modal Sosial .....	251
Gambar 4.19.	Model Modal Sosial yang Memberi Manfaat melalui Tiga Konsep.....	254
Gambar 4.20.	Mekanisme Model Modal Sosial Yang Memberi Manfaat Bagi Masyarakat Dengan Pemanfaatan dan Penguatan Modal Sosial Masyarakat.....	255
Gambar 4.21.	Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan Melalui Pemanfaatan dan Penguatan Modal Sosial Secara Optimal .....	256



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2. Uji Reliabilitas dan Validitas Variabel
- Lampiran 3. Hasil Pengolahan Statistik Responden Keseluruhan
- Lampiran 4. Kondisi Existing Keberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan pada 12 LMDH Responden
- Lampiran 5. Hasil Pengolahan Statistik Pada LMDH Maju
- Lampiran 6. Hasil Pengolahan Statistik pada LMDH Yang Belum Maju
- Lampiran 7. Foto-toto Penelitian.



## DAFTAR SINGKATAN

DFID = Departemen for International Development  
CESS = Centre for Economic and Social Studies  
KPH = Kesatuan Pemangkuan Hutan  
WCED = World Commission on Environment and Development  
ITTO = International Tropical Timber Organization  
FSC = Forest Stewardship  
ATO = African Timber Organization  
LEI = Lembaga Ekolabel Indonesia  
CIFOR = Centre for International Forestry Reserach (CIFOR)  
PAR = Participatory Action Reserach  
APHI – Assosiasi Pengusaha Hutan Indoenesia  
CFSAs = Community Forest Stewardship Agreement  
CFP = Community Forest Program  
FPCS = Forest Protection Commiteesss  
IPM = Indeks Pembangunan Manusia  
SOCAT = Social Capital Assessment Tool  
SEM = Structural Equation Model  
LMDH = Lembaga Masyarakat Desa Hutan  
PP = Peraturan Pemerintah  
KSKPH = Kepala Sub Kesatuan Pemangkuan Hutan  
BKPH = Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan  
PHBM = Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat  
CFA = Confirmatory Faktor Analysis  
MSH = Masyarakat Sekitar Hutan  
SPM = Strategi Pemberdayaan Masyarakat  
KDS = Keterlibatan dan dukungan stakeholders  
PSDHB = Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan

## RINGKASAN

**Program Studi Ilmu Lingkungan  
Program Pascasarjana Universitas Indonesia  
Disertasi (Januari, 2011)**

Nama : Sylvana Ratina /NPM: 0706223160  
Program Studi : Ilmu Lingkungan  
Judul Disertasi : MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN BERKELANJUTAN.  
(Suatu Kajian Pemanfaatan Modal Sosial Masyarakat Sekitar Hutan, Studi Kasus di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Sukabumi, Perum Perhutani Wilayah Jawa Barat)”  
Jumlah halaman : Halaman permulaan 32, halaman isi 290, Tabel 30, Gambar 21,  
Isi Ringkasan :

### Latar Belakang

Dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan, manusia sebagai masyarakat adalah menjadi elemen integral yang sulit terpisahkan dari sumber daya hutan, sehingga kelestarian ekologi dan ekonomi hanya mungkin dicapai jika pengelolaan sumber daya hutan juga memperhatikan kelestarian fungsi sosial yang berkaitan dengan kehidupan dan penghidupan masyarakat sekitar hutan. Hal yang terpenting dalam penyelenggaraan kehutanan yang berkeadilan dan berkelanjutan adalah keterlibatan masyarakat sekitar hutan dalam mengelola sumber daya hutan yang dilakukan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah upaya pengentasan kemiskinan, karena kemiskinan masih menjadi persoalan yang sangat mendasar, sementara disisi lain, kawasan hutan Indonesia seluas 136 juta hektar pun terus mengalami kerusakan yang semakin besar (Mulyadi & David, 2008). Model-model pemberdayaan masyarakat yang selama ini telah dilakukan ternyata belum memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan juga pada kelestarian sumber daya hutan secara optimal, walaupun tidak sedikit manfaat yang telah dirasakan oleh masyarakat sekitar kawasan hutan. Model pemberdayaan yang diterapkan belum melihat perlunya memperhatikan pemanfaatan optimal potensi modal sosial masyarakat. Padahal berdasarkan beberapa hasil kajian dan penelitian, modal sosial adalah faktor yang sangat menentukan keberhasilan suatu pemberdayaan masyarakat. Modal sosial adalah suatu nilai norma-norma yang terbentuk dan menjadi acuan dalam bersikap, berperilaku, berinteraksi dan berinterelasi dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan.

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah: **“Model pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan yang diterapkan selama ini dalam rangka pengelolaan sumberdaya hutan berkelanjutan belum memperhatikan pemanfaatan potensi modal sosial masyarakat sekitar hutan secara optimal”**. Adapun tujuan penelitian adalah: (1) Merumuskan konsep (hipotetik) model pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan dengan memanfaatkan modal sosial masyarakat sekitar hutan; (2) Menganalisis pengaruh kekuatan modal sosial masyarakat terhadap pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan pada masyarakat maju dan belum maju; dan (3) Merumuskan konsep (hipotetik) Model Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan melalui pemanfaatan dan penguatan dan modal sosial secara optimal.

#### **Metodologi Penelitian:**

Penelitian diawali dengan membangun konsep hipotetik model pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi modal sosial. Rumusan model hipotetik tersebut akan diuji dengan *Structural Equation Modelling (SEM)*. Selanjutnya menganalisis pengaruh kekuatan modal sosial pada proses pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan dengan *cross section* tabel hasil SEM. Kemudian terakhir merumuskan konsep model hipotetik pemanfaatan dan penguatan modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan dengan pendekatan model sistem dinamis (*causal loop*).

Kegiatan penelitian dilakukan di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Sukabumi Perum Perhutani Wilayah III Jawa Barat, pada 12 desa sampel dengan 12 LMDH. Populasi penelitian adalah masyarakat sekitar hutan yang telah melalui proses pemberdayaan sebanyak 240 responden. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purpose sampling*.

**Variabel penelitian:** Modal Sosial terdiri atas: Kebersamaan (27 indikator), Kepercayaan (4 indikator), Jaringan Sosial dan Dukungan timbal balik (6 indikator), Keterlibatan/partisipasi (7 indikator), Kepemimpinan sosial (7 indikator), kelembagaan (15 indikator), Norma adat nilai budaya (8 indikator) dan kearifan dan pengetahuan lokal (7 indikator). **Proses Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan** terdiri atas: Strategi Pemberdayaan Masyarakat (9 indikator) dan Keterlibatan dan Dukungan Stakeholder (11 indikator); **Keberdayaan Masyarakat** terdiri atas: Pengembangan potensi dan Ketrampilan (7 indikator), partisipasi dalam pembangunan (4 indikator), kemandirian masyarakat (2 indikator). Dan **Pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan** terdiri atas: Kelestarian fungsi produksi/ekonomi (10 indikator), Kelestarian fungsi ekologi (10 indikator) dan Kelestarian fungsi sosial (8 indikator)

## Hasil Penelitian:

Hasil uji statistik secara keseluruhan dari model yang dibangun dan dirumuskan dari teori dan konsep menyatakan bahwa rumusan hipotetik konsep model pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan dengan memanfaatkan modal sosial masyarakat adalah model yang menggambarkan adanya hubungan pengaruh langsung dan tidak langsung yang signifikan dari modal sosial pada (1) strategi pemberdayaan masyarakat sekitar hutan (2) keterlibatan dan dukungan *stakeholders* pemberdayaan masyarakat sekitar hutan serta (3) keberdayaan masyarakat sekitar hutan dan (4) pengelolaan sumberdaya hutan berkelanjutan. Model hipotetik tersebut telah melalui uji model dan uji hipotesa pada jalur yang memberikan kesimpulan bahwa model yang dibangun tersebut adalah sesuai dan dapat diterima. Rumusan ini adalah merupakan penemuan penelitian yang menjadi *novelty* peneliti.

Berdasarkan hasil uji statistik dan hasil analisis pengaruh kekuatan modal sosial pada masyarakat LMDH yang maju dan LMDH belum maju, maka terlihat bahwa semakin kuat modal sosial suatu masyarakat, maka akan semakin kuat pengaruhnya terhadap kemudahan pelaksanaan proses pemberdayaan dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan, demikian pula sebaliknya, semakin lemah modal sosial suatu masyarakat, maka akan menyebabkan sulitnya pelaksanaan proses pemberdayaan dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Pembuktian ini merupakan penemuan dan menjadi *novelty* peneliti.

Modal sosial masyarakat menjadi sebab yang pertama terhadap semua hal yang bersangkutan dengan masyarakat sekitar hutan termasuk keberdayaan masyarakat serta pengelolaan sumberdaya hutan berkelanjutan, maka untuk menghasilkan keberdayaan masyarakat serta terwujudnya pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan harus memanfaatkan modal sosial masyarakat sekitar hutan secara optimal. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan penguatan modal sosial mengharuskan adanya proses pemanfaatan dan penguatan modal sosial masyarakat sekitar hutan. Pemanfaatan dan Penguatan modal sosial tersebut dilalui dengan mekanisme (1) peningkatan hubungan timbal balik semua unsur pembentuk modal sosial; (2) melalui mekanisme saluran informasi serta; (3) melalui konsep norma adat dan nilai budaya. Model modal sosial ini merupakan penemuan dan menjadi *novelty* peneliti.

Disertasi: 290 halaman, 200 kepustakaan, 30 tabel, 21 gambar, 7 lampiran

## SUMMARY OF DISSERTATION

Name/NPM : Sylvana Ratina / NPM: 0706223160  
Study Program : Environmental Science  
Title : FOREST COMMUNITIES EMPOWERMENT MODEL IN SUSTAINABLE FOREST RESOURCES MANAGEMENT

(A Study to Utilize Social Capital Around Communities Forest, Study Case In Management Forest Unit (KPH) Sukabumi, Perum Perhutani, West Java Region)

### Background

In managing sustainable forest resources, people as an integrated society element is difficult to separate with forest resources, therefore ecological and economical conservation can only be reached if forest resources management also pays attention to social function of conservation related to social live around the forest. It is important in managing sustainable forest management carried out in the kind of society empowerment around the forest. Society empowerment constitutes an effort to handle poverty, because it is still a very underlying problem, while on the other side, total Indonesian forest area of 136 million Ha keeps going on damage (Mulyadi & David, 2008). Society empowerment models to date, of course gives positive impact to society welfare around the forest and also conservation of forest resources optimally, although the benefit is a little bit felt by society around forest area. Empowerment model applied does not yet necessarily pay attention optimal utilization from society social potency. Whereas based on several studies and researches, social resources is a factor that can determine development society empowerment. Social capital is a norm value that formed and become a reference in having attitude, behaving, interacting, interrelating in society to achieve common goals in sustainable forest resources management.

Problem formulation in this research is: *“Forest communities empowerment model applied in order to manage sustainable forest resources does not yet pay attention to utilization of potential social capital of forest communities optimally”*. And objective of this research is : (1) To Formulate Empowerment Model (hypothetical) around Forest Area in Managing Sustainable Forest Resources by Utilizing Society Social Capital Around Forest; (2) To analyze strength effect of society social capital to society empowerment around forest in managing sustainable forest resources for modern and old fashioned society; and (3) To formulate Society Empowerment Model (hypothetical) Around Forest in Managing Sustainable Forest Resources through utilizing and strengthening social capital optimally.

### Research Methodology:

Research is initiated by developing hypothetical concept of society empowerment model in managing sustainable forest resources by utilizing potential social capital. Formulation of that hypothetical model will be tested with *Structural Equation Modelling (SEM)*. Then research analyzes strength effect of social capital in society empowerment process around forest in managing sustainable forest resources by *cross section* table of SEM result. Then at the end, research will formulate hypothetical concept of social capital utilizing and strengthening in society empowerment in order to manage sustainable forest resources by dynamical system model approach. Research is carried out in Forest Stakeholder Unit (KPH) Sukabumi, Perum

Perhutani Regional III West Java, on 12 sample villages with 12 LMDH. Research population is society around forest who has passed empowerment process of 240 respondents. Collecting samples is carried out by *purpose sampling method*.

**Research Variable: Social Capital** consists of: Togetherness (27 indicators), Reliance (4 indicators), Social Network and Mutual Support (6 indicators), Involvement/participation (7 indicators), Social Leadership (7 indicators), Institution (15 indicators), custom norm of cultural value (8 indicators); and wisdom and local knowledge (7 indicators). **Society Empowerment Process around Forest** consists of: Society Empowerment Strategy (9 indicators) and Involvement and Support from Stakeholder (11 indicators); **Society Empowerment** consists of: Potency and Skill Development (7 indicators), participation in development (4 indicators), society autonomy (2 indicators). And **Sustainable Forest Resources Management** consists of: Preservation of production/economy function (10 indicators), Preservation of Ecological Function (10 indicators) and Preservation of Social Function (8 indicators).

**Research Result:**

Statistical test result as a whole from model developed and formulated from theory and concept states that hypothetical concept formulation from society empowerment model around forest in managing sustainable forest resources by utilizing society social capital is a model to describe existing effect relation directly and indirectly from social capital on (1) the society empowerment strategy around forest (2) the involvement and support from *stakeholders* for society empowerment around forest as well as (3) society empowerment around forest and (4) sustainable forest resources management. That hypothetical model has passed model test and hypothetical test on the way to give conclusion that model developed is proper and can be received. This formulation constitutes research findings as novelty of researchers.

Based on statistical test result and analysis result of social capital strength effect on modern and old fashioned LMDH society, then it can be seen that stronger social capital of a society will be stronger effect on the implementation of empowerment process in managing sustainable forest resources, and on the contrary, weaker social capital of a society, will cause difficulty in the implementation of empowerment process in managing sustainable forest resources. This verification constitutes findings and become novelty from researchers.

Society social capital become the first reason for all matters related to society around forest includes society empowerment as well as sustainable forest resources management, to generate society empowerment as well as the implementation of sustainable forest resources management shall utilize society social capital around forest optimally. In order to optimize utilizing and strengthening of social capital needs its process around the forest. It is passed through mechanism (1) improve mutual relation from all social capital shaper; (2) through information channel mechanism as well as; (3) through custom norm and cultural value concept. This social capital model constitutes findings and become novelty from researchers.

Dissertation: 290 pages, 200 Libraries, 30 tables, 21 pictures, 7 appendixes

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Allah Subhana Wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al A'raaf:56 dan surat Al An'am: 163, agar manusia selalu harmonis dengan lingkungannya, tidak membuat kerusakan di muka bumi serta wajib mengelola potensi bumi (sumber daya alam) dengan sebaik-baiknya, untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama seluruh makhluk di permukaan bumi.

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang memberikan begitu banyak manfaat mejemuk, karena hutan adalah sebagai sumber keanekaragaman jenis flora dan fauna yang sangat bermanfaat bagi kesejahteraan manusia, juga sebagai sumber beranekaragam jasa yang bermanfaat bagi kehidupan manusia seperti jasa wisata, pengatur tata air dan iklim, pengendali iklim, pengendali CO<sub>2</sub>, perlindungan tanah, gudang pala-manufah dan lain-lain.

Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, menjelaskan bahwa hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Bahwa hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional serta bertanggung-gugat. Bahwa hutan yang berkelanjutan dan berwawasan dunia, harus menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat, adat budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional.

Berdasarkan fungsi dan tujuan pengelolaan hutan, maka hutan terdiri dari 4 jenis, (UU No 5 tahun 19676, UU No 41 tahun 1999). yaitu : (1) Hutan Lindung, yaitu



kawasan hutan yang karena keadaan sifat alamnya diperuntukkan guna mengatur tata air, pencegahan bencana banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah; (2) Hutan Produksi, yaitu kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan, industri dan ekspor; (3) Hutan Suaka Alam, yaitu kawasan hutan yang karena sifat khas diperuntukkan secara khusus untuk perlindungan keanekaragaman hayati atau keindahan alam; dan (4) Hutan Wisata, yaitu kawasan hutan yang diperuntukkan secara khusus untuk dibina dan dipelihara guna kepentingan pariwisata atau wisata buru.

Pembagian jenis pengelolaan hutan tersebut tentunya didasarkan pada tujuan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, ada kelompok hutan yang memang harus dijaga dan harus dilestarikan, dan ada hutan yang memang khusus diperuntukkan untuk dimanfaatkan seperti hutan produksi, tanpa harus mengabaikan fungsi ekologi dan fungsi sosial. Di hutan produksi inilah tempat penulis melakukan penelitian dan memberi perhatian pada pengelolaan sumber daya hutan yang harus dilakukan untuk memberikan manfaat bagi kehidupan secara berkelanjutan.

Menurut Arief (2001), pengelolaan sumber daya hutan bukan hanya sekedar menetapkan hutan sebagai perlindungan tanah, iklim, sumber air dan pemenuhan kebutuhan akan kayu dan produk lainnya, tetapi pengelolaan sumber daya hutan harus ditujukan untuk mendayagunakan semua lahan kehutanan demi keberlanjutan kehidupan dan lingkungannya. Sehingga secara utuh dan menyeluruh perlu diperhatikan kaitan fungsi dan masalah yang satu terhadap fungsi dan masalah lainnya.

Dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan, manusia telah menjadi elemen integral yang sulit terpisahkan dari sumber daya hutan, sehingga kelestarian ekologi dan ekonomi hanya mungkin dicapai jika pengelolaan sumber daya hutan juga memperhatikan kehidupan dan penghidupan masyarakat sekitar hutan. Prinsip perhatian terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat sekitar hutan adalah bagian dari kelestarian fungsi sosial. Kelestarian fungsi sosial adalah terjaminnya keberlanjutan fungsi perusahaan hutan bagi kehidupan masyarakat

setempat yang tergantung kepada hutan, baik langsung maupun tidak langsung, secara lintas generasi (Lembaga Ekolabelling Indonesia, 2001).

Dalam mengelola sumber daya hutan, manusia mempunyai kedudukan penting sebagai konsumen hasil dan manfaat atau jasa dan juga sebagai pembina dan pengelola sumber daya hutan (Soerianegara, 1977). Pemanfaatan sumber daya hutan harus menjaga keseimbangan ekonomi, sosial dan ekologi. Kecepatan eksploitasi tidak boleh melebihi kecepatan tumbuh, kegiatan eksploitasi harus segera disusul dengan kegiatan regenerasi dan rehabilitasi. Perilaku ekonomi yang merusak ekosistem hutan akan seiring dengan realita kebenaran adagium ekologi menjadi nyata yang menyebutkan bahwa kemiskinan menyebabkan kerusakan hutan dan kerusakan hutan menyebabkan kemiskinan, artinya dampak kerusakan sumber daya hutan yang semakin parah bahkan dari sisi ekologi semakin parah menyebabkan proses kemiskinan masyarakat sekitar hutan dan menurunnya kualitas masyarakat sekitar hutan.

Kualitas lingkungan sumber daya hutan sangat bergantung pada kualitas masyarakat yang berada di sekelilingnya. Sehingga jika kualitas sumber daya hutan semakin baik, maka kualitas masyarakat akan semakin baik, demikian pula sebaliknya, jika kualitas hutan semakin buruk, maka kualitas masyarakat sekitar hutan juga semakin buruk. Masyarakat sekitar hutan sangat berperan untuk menentukan corak lingkungan hutan, karena mereka memang tinggal berdiam dan mencari kehidupan di sekitar hutan (Gibson *et al*, 2000 dalam Mehra, 2003). Gambaran kualitas masyarakat terlihat dari pola sikap, perilaku, interaksi dan pola interelasi dengan lingkungan sosialnya, maupun dengan lingkungan alam dan lingkungan ekonominya. Gambaran kualitas kelompok masyarakat tersebut dapat dilihat dari nilai-nilai sosial, tananan, norma dan budaya yang dihasilkan yang kemudian dikenal dengan modal sosial. Dengan demikian modal sosial ini sangat perlu menjadi perhatian dalam setiap upaya pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan.

Kegagalan dalam pengelolaan sumber daya hutan akan menimbulkan berbagai dampak, antara lain : pengurangan areal lahan dan penurunan kualitas hutan karena kecepatan tumbuh kayu lebih rendah dari tingkat penebangannya; degradasi sumber daya hutan berupa rusaknya fungsi hutan seperti erosi, terganggunya daerah aliran sungai dan perubahan iklim; hilangnya keanekaragaman hayati, musnahnya budaya setempat, terganggunya pola tatanan kehidupan dan sosial masyarakat sekitar hutan, dan terjadinya perubahan iklim baik secara lokal, regional maupun global. Praktek pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan selama ini telah menyebabkan laju degradasi dan deforestasi yang sangat memprihatinkan. Luas kawasan hutan tropis Indonesia kini hanya mencapai 109,35 juta ha, setiap tahun rata-rata laju kerusakan hutan mencapai 2,8 juta ha per tahun (Wibowo, 2006).

Demikian juga kondisi ekosistem hutan produksi yang dikelola oleh Perum Perhutani di Wilayah Jawa Barat, khususnya di wilayah Sukabumi juga mengalami suatu degradasi ekosistem hutan yang cukup memprihatinkan, karena lahan yang kritis di dalam kawasan hutan adalah seluas 22.763 ha dan di luar kawasan hutan seluas 65.268 ha (BPDAS Citarum, 2007). Perambahan hutan terjadi di seluruh kawasan hutan pada umumnya, dan khususnya di KPH Sukabumi terjadi perambahan yang cukup memprihatinkan, misalnya di wilayah Sukabumi bagian Utara, bagian Selatan, kecamatan nyalindung, sehingga di wilayah tersebut sering terjadi banjir dan longsor dan telah merenggut korban jiwa dan harta benda (Perhutani, 2007). Di sisi lain, Perum Perhutani juga terlambat dalam menanam areal hutan yang kosong atau yang dalam kondisi kritis.

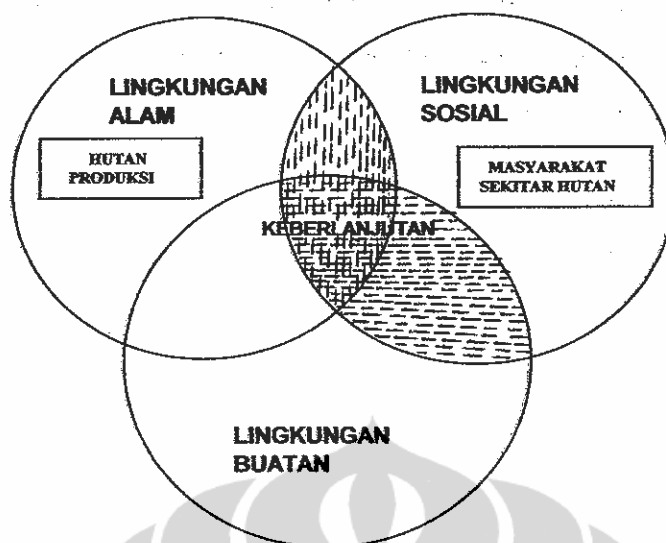
Salah satu hal yang terpenting yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan kehutanan yang berkeadilan dan berkelanjutan adalah pengaturan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan, bagaimana sistem sosial masyarakat tetap tertata dalam sistem pengelolaan sumber daya hutan. Pengaturan akses masyarakat atas sumber daya hutan adalah masalah fundamental yang harus ada, agar masyarakat sekitar hutan dapat turut aktif mengelola sumber daya hutan secara baik, berkelanjutan, dan menyejahterakan. Keterlibatan

masyarakat sekitar hutan dalam hal mengelola sumber daya hutan adalah salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang diamanatkan oleh konstitusi negara.

Dalam khasanah regulasi kehutanan, terminologi pemberdayaan masyarakat adalah sebagai turunan dari peran serta masyarakat yang tercantum dalam Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa masyarakat memiliki hak dan kewajiban ikut serta memelihara dan menjaga hutan dari kerusakan. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, pemberdayaan masyarakat sudah meningkat menjadi kewajiban pemerintah, pemerintah daerah atau KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan).

Pemberdayaan masyarakat dapat dipandang sebagai perekat antara masyarakat dan visi pembangunan kehutanan. Visi pembangunan kehutanan adalah pengelolaan hutan yang berkelanjutan, dan pendekatan pemberdayaan masyarakat sangat erat terkait dengan indikator pembangunan berkelanjutan yakni “mutu kehidupan dan keberlanjutan ekologi”. Dengan demikian paket pemberdayaan masyarakat dapat diibaratkan sebagai ramuan konsep pembangunan manusia sebagai pengentasan kemiskinan yang sekaligus menyelamatkan lingkungan dan keberlanjutan ekologi, keberlanjutan sumber daya hutan yang diharapkan dapat diterima semua pihak.

Berkaitan dengan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan yang melibatkan pemberdayaan masyarakat sebagai keberlanjutan fungsi sosial, maka konsepnya adalah dengan memberi penjelasan bahwa pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan adalah harus memenuhi ketiga indikator berkelanjutan yaitu lingkungan, sosial dan ekonomi. Keberlanjutan tersebut adalah merupakan irisan dari keberlanjutan lingkungan alam (hutan produksi) dan keberlanjutan lingkungan sosial (masyarakat sekitar hutan) dan irisan dari keberlanjutan lingkungan buatan dan keberlanjutan sosial (lihat gambar 1.1).



Gambar 1.1. Lingkungan Hidup yang terdiri atas lingkungan hidup alam, lingkungan hidup buatan dan lingkungan sosial yang saling berkaitan dan saling menentukan kualitas lingkungan hidup. (dikembangkan dari Soerjani, 1987)

Dari kedua irisan tersebut diperoleh wilayah irisan yang mencakup ketiga lingkungan tersebut. Kedua irisan tersebut semua terkait dengan lingkungan sosial. Sehingga dapat dikatakan wilayah lingkungan sosial sangat berpengaruh terhadap kedua wilayah lingkungan alam dan wilayah lingkungan buatan. Lingkungan sosial dengan sistem sosial yang ada sangat dipengaruhi oleh lingkungan alam dan lingkungan ekonomi, demikian pula sebaliknya lingkungan sosial akan sangat mempengaruhi lingkungan alam dan lingkungan ekonomi. Dengan demikian lingkungan sosial adalah merupakan fokus penting dalam suatu pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Lingkungan sosial ini akan berlanjut jika keberlanjutan manusia menjadi perhatian. Keberlanjutan manusia akan berlanjut, jika manusia sebagai masyarakat sosial diperhatikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupannya termasuk tatanan nilai-nilai sosial bersikap, berperilaku, berinteraksi dan berinterelasi, yang menjadi modal sosial. Bentuk perhatian terhadap keberlanjutan fungsi sosial tersebut akan terlihat dalam bentuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan.

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan yang merupakan sebuah upaya pengentasan kemiskinan, karena kemiskinan masih menjadi persoalan yang sangat mendasar. Hasil data statistik tahun 2006 memperlihatkan bahwa penduduk Indonesia yang berjumlah 219,9 juta jiwa, dan menurut data Brown dan Sunderlin *et al.* (2005), yang dikutip *Strategi Nasional Multistakeholders Forest Programme* hasil kerjasama antara Departemen Kehutanan dengan *Departmen for International Development* (DFID) Inggris menyebutkan bahwa sekitar 48,8 juta jiwa tinggal di dalam dan sekitar hutan. Dari 48,8 juta jiwa penduduk yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan tersebut 10,2 juta jiwa atau 25% diantaranya tergolong dalam kategori miskin. Forest Watch Indonesia (2009), menyebutkan bahwa Studi yang dilakukan oleh CESS (*Center for Economic and Social Studies*) dan ODI (*Overseas Development Institute*) mengenai “Kemiskinan dan Kehutanan di Indonesia” menyoroti bahwa dimensi kemiskinan kronis masyarakat sekitar hutan adalah berupa: hambatan geografis, hak yang lemah dalam pengakuan, penghormatan dan perlindungan kepemilikan, aset sosial yang lemah dan adanya keterasingan politik. Hasil temuan studi ini memperlihatkan bahwa ada korelasi yang kuat antara persentase tutupan kawasan hutan dengan persentase penduduk miskin di dalam suatu wilayah.

Sesungguhnya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan bukan suatu hal yang baru. Kementerian Kehutanan dan berbagai lembaga serta elemen masyarakat lainnya telah banyak melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan. Model-model pemberdayaan masyarakat yang selama ini telah dilakukan ternyata belum memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan juga pada kelestarian sumber daya hutan, walaupun tidak sedikit manfaat yang telah dirasakan oleh masyarakat sekitar kawasan hutan. Selama ini program pembangunan kehutanan cenderung berorientasi target dan proyek yang sering kurang sesuai dengan potensi, kondisi spesifik dan kebutuhan masyarakat sekitar kawasan hutan, sehingga melahirkan berbagai bentuk kesenjangan di masyarakat yang bermuara pada kegagalan dan ketidak-sinambungan pembangunan. Model pemberdayaan yang diterapkan belum melihat perlunya memperhatikan pemanfaatan potensi modal sosial masyarakat

yang dimiliki. Padahal berdasarkan beberapa hasil kajian dan penelitian, modal sosial, budaya, dan kultur masyarakat adalah faktor yang sangat menentukan keberhasilan suatu program pembangunan. Kegagalan berbagai program dan proyek pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan selama ini adalah fakta yang harus dicermati dan perlu mendapat kajian lebih lanjut dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan mewujudkan pengelolaan sumberdaya hutan berkelanjutan.

Berbagai pemberdayaan masyarakat yang dilakukan bersifat parsial, sektoral dan *charity* yang selanjutnya menimbulkan kebergantungan masyarakat dan menciptakan benih-benih fragmentasi sosial, dan bahkan melemahkan modal sosial yang ada dalam masyarakat (gotong royong, musyawarah, keswadayaan, dan lain lain). Lemahnya modal sosial kesadaran ekologi pada gilirannya akan mendorong pergeseran perubahan sikap, perilaku, interaksi dan interelasi masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan dan kepedulian untuk mengatasi persoalannya secara bersama, khususnya yang berkaitan langsung dengan pelestarian sumber daya hutan sebagai sumber kehidupannya (pengembangan Sutaryono, 2008). Nilai-nilai intrinsik alam sumber daya hutan tidak lagi mendapatkan tempat penghargaan karena sikap dan perilaku moral lingkungannya semakin menurun.

Dalam konteks pembangunan manusia melalui pemberdayaan masyarakat, modal sosial memiliki pengaruh yang sangat menentukan. Menurut Putnam (1993), memanfaatkan potensi modal sosial sebagai landasan dasar interaksi dalam suatu proses pembangunan, akan menyebabkan modal sosial semakin meningkat, dan sebaliknya jika modal sosial tidak dimanfaatkan, maka modal sosial akan semakin memudar bahkan akan semakin rusak. Karena begitu pentingnya modal sosial, Badaruddin (2008), guru besar pada universitas Sumatera Utara, berpendapat bahwa pembangunan yang memanfaatkan potensi modal sosial akan menunjukkan tingkat keberhasilan yang lebih baik, sehingga modal sosial merupakan salah satu syarat bagi keberhasilan suatu program pembangunan. Jika pemanfaatan potensi dan penguatan modal sosial tidak terwujud, maka hal tersebut dapat dinilai sebagai kunci kegagalan upaya perbaikan dalam

pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Modal sosial yang terbentuk sebagai hasil adaptasi dan hasil interaksi dari sekian waktu yang lama dari masyarakat sekitar hutan adalah nilai-nilai yang terlahir dari interaksinya dengan lingkungan sumber daya hutan yang menjadi kebutuhan dalam keberlangsungan hidupnya. Modal sosial tersebut diharapkan menjadi dasar masyarakat sekitar hutan dan para stakeholder untuk ikut bertanggung jawab menjaga kelestarian sumber daya hutan dan lingkungan sosial yang kondusif untuk kelestarian lingkungan hutan.

Konsep modal sosial menjadi salah satu komponen penting untuk menunjang model pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan, karena dalam model ini manusia dan sumber daya hutan ditempatkan sebagai subyek penting yang menentukan arah penyelenggaraan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Partisipasi dan kapasitas mengorganisasikan diri menjadi penting agar masyarakat dapat berperan dalam model pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan, padahal kedua kapasitas tersebut harus bisa berkembang bila ditunjang oleh modal sosial yang dimiliki masyarakat. Keberadaan modal sosial juga menjadi penting dalam penanggulangan kemiskinan karena pengentasan kemiskinan tidak hanya terkait dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi, tapi juga perluasan akses terhadap sumber-sumber daya kehidupan yang ditentukan pula oleh ketersediaan jejaring kerja dan saling percaya di kalangan masyarakat.

Pengembangan pengetahuan baru dalam pengelolaan sumber daya hutan yang memasukkan pemanfaatan potensi modal sosial masyarakat sekitar hutan sebagai kajian untuk diintegrasikan dalam model pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, dinilai sudah sangat mendesak. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mencari suatu model pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan tersebut, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan potensi modal sosial, peneliti dengan sengaja memilih lokasi penelitian sebagai studi kasus di kawasan hutan KPH Sukabumi Perum Perhutani Wilayah III Jawa Barat (Gambar 1.2), karena selain pertimbangan jarak dan waktu peneliti, Tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sukabumi dengan nilai 70.8 point berada pada posisi 22 dari 23 kabupaten yang berada di Provinsi Jawa



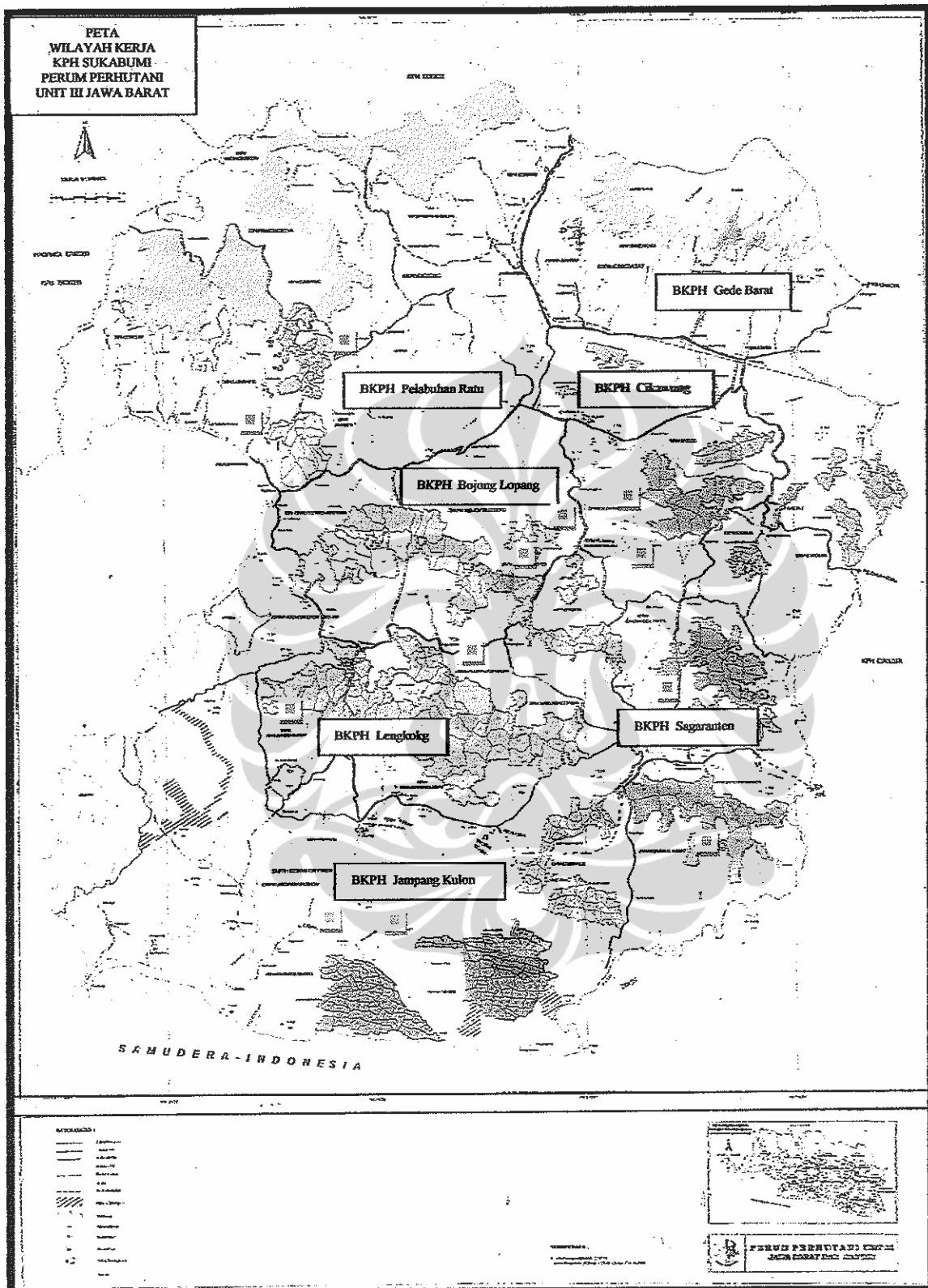
Barat, selain itu kondisi hutan di wilayah Sukabumi sudah kritis (Laporan Balai BRLKT Wilayah IV, 2004) juga karena masyarakat sekitar KPH tersebut pun berada dalam kondisi sosial dan ekonomi yang miskin. Kondisi sosial ekonomi Kabupaten Sukabumi, dimana KPH Sukabumi berada, memperlihatkan bahwa dari 563.613 KK, jumlah keluarga yang prasejahtera adalah 226.816 KK (40,24%), jumlah pengangguran 156.437 orang (27,76%), jumlah pemukiman kumuh 7.661 KK, luas lahan kritis 2.452 Ha (Jawa Barat Dalam Angka, BPS tahun 2006).

Selain pencermatan latar belakang tersebut di atas, Perum Perhutani juga telah berupaya menyelenggarakan pengelolaan sumber daya hutan dengan memberdayakan masyarakat sekitar hutan dengan model Pemberdayaan sebagaimana Tabel 1.1. berikut:

Tabel 1.1. Model Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan yang telah dilakukan Perum Perhutani

No.	Tahun	Model Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan
1.	1972	Program Pendekatan Kesejahteraan Masyarakat / Prosperity Approach
2.		Program MA-LU atau "Mantri – Lurah"
3.	1981	Program Pendekatan Kesejahteraan Masyarakat / Prosperity Approach : Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH)
4.	1994	Program Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) Terpadu Dalam Pengelolaan Hutan Bekerjasama Dengan Masyarakat Desa Hutan dan Lembaga Masyarakat Yang Mandiri dan Mengakar (LM3)
5.	2001-saat ini	Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

Sumber: Perum Perhutani, 2006



Sumber: KPH Sukabumi. 2009

Gambar 1.2. Peta Lokasi Penelitian Wilayah Kerja KPH Sukabumi

Sutaryono (2008) menjelaskan bahwa model-model pemberdayaan yang telah diterapkan di Perum Perhutani adalah sebagai berikut:

*Pertama:* Model *Prosperity Approach* yaitu embrio pemberdayaan yang sudah mulai diterapkan sejak tahun 1972, yang meliputi kegiatan di dalam dan di luar kawasan hutan. Model program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan sekaligus membuka dan memperluas lapangan kerja.

*Ke-dua:* Model Program MA-LU atau “Mantri – Lurah” yaitu model dengan program yang bertujuan untuk menggalang kerjasama antara Mantri dan Lurah dalam hal memberikan informasi kepada pesanggem tentang agroforestry dan aspek pertanian lain melalui berbagai demonstrasi plot.

*Ke-tiga:* Model pemberdayaan dengan program pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) dimulai tahun 1981, yaitu dengan sistem kontrak mengerjakan lahan kawasan.

*Ke-empat* adalah Model pemberdayaan dengan program Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) dimulai tahun 1994, yang didalamnya terdapat program pengembangan sumber daya manusia.

*Ke-lima* adalah model pemberdayaan dengan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dimulai tahun 2001, yang cenderung berorientasi pada pengamanan hutan, bukan pada upaya pemberdayaan.

Model pemberdayaan tersebut dengan berbagai program di atas terlahir tumbuh dan berkembang dalam nuansa politik yang sentralistik, paradigma pertumbuhan ekonomi yang menjadi acuan pembangunan serta hegemoni negara yang begitu kuat menjadikan ruang-ruang interaksi, inovasi dan partisipasi kritis masyarakat menjadi sangat terbatas (bersifat *top down*).

Model-model pemberdayaan masyarakat yang telah diterapkan tersebut belum memberikan hasil yang maksimal, karena jumlah masyarakat miskin yang berada dalam kawasan KPH Wilayah Jawa Barat masih dalam jumlah yang besar, dan kesadaran ekologi pun belum menggembirakan. Menurut data statistik BPS Tahun 2009, persebaran lokasi penduduk miskin tahun 2009, Provinsi Jawa Barat menduduki urutan ketiga jumlah penduduk termiskin di Indonesia setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jumlah penduduk miskin di Jawa Barat pada

Maret 2009 mencapai 4,98 juta jiwa (11,96 persen dari penduduk Jawa Barat). Sementara di sisi lain kondisi kawasan hutan Jawa Barat seluas 75.000 hektar yang berada dalam kawasan Perum Perhutani juga berada dalam kondisi ekologi rusak parah (Tempointeraktif, 11 Juli 2007). Untuk wilayah Propinsi Jawa Barat terdapat luas lahan kritis di dalam kawasan hutan seluas 123.777 ha dan di luar kawasan hutan seluas 212.949 ha, sedang untuk kabupaten Sukabumi lahan kritis dalam kawasan hutan seluas 22.763 ha dan di luar kawasan hutan 65.268 ha (BPDAS Citarum, 2007)

Menurut hasil penelitian Sutaryono (2008), model program pemberdayaan yang dilakukan Perum Perhutani di Pulau Jawa, memperlihatkan peran masyarakat sekitar hutan hanya sekedar obyek program. Partisipasi masyarakat hanya terletak pada tingkat operasional saja. Segala macam regulasi sudah ditentukan oleh Perum Perhutani, baik yang substansial maupun yang bersifat teknis. Tidak ada kebebasan ataupun peluang bagi anggota masyarakat yang terlibat dalam program-program tersebut untuk mengembangkan program ataupun untuk berimprovisasi sekedar mengikuti nalurinya sebagai petani yang akrab dengan alam. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sudah disiapkan secara sepihak oleh Perum Perhutani yang harus menjadi acuan dalam kegiatan operasional.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa dalam pengelolaan hutan di Jawa, upaya pemberdayaan yang dilakukan Perum Perhutani masih terbatas pada penggunaan terminologi belaka, tidak menyentuh substansi pemberdayaan. Akibatnya deforestasi masih menggejala dan tidak menunjukkan tanda-tanda berkurang intensitasnya. Pemberdayaan dalam pengelolaan hutan sebagaimana dilakukan Perum Perhutani masih bersifat setengah hati yang justru memberikan implikasi pada hilangnya kepercayaan masyarakat sekitar hutan kepada pihak-pihak yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan hutan. Hilangnya kepercayaan itu salah satunya dimanifestasikan dalam bentuk resistensi yang mulai berkembang ke arah resistensi terbuka dan bersifat kontraproduktif (Sutaryono, 2008).

Menurut Iskandar (2008), faktor yang menimbulkan kelemahan dan kegagalan dalam pengelolaan hutan yang berkaitan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan,

adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam berbagai program pengelolaan hutan oleh Perhutani, dan bahkan cenderung memarginalkan nilai-nilai modal sosial masyarakat lokal sekitar hutan.

Dalam buku Sekilas KPH Sukabumi (2008), dijelaskan bahwa masyarakat sekitar hutan di wilayah pengelolaan Perhutani saat ini masih dalam kondisi miskin dengan tingkat kesejahteraan yang masih rendah. Kemiskinan tersebut selain akibat keterbatasan lahan garapan, tidak mempunyai faktor produksi sendiri, dan kondisi alam dan geografis, juga disebabkan karena keahlian, ketrampilan dan pendidikan yang masih dalam kualitas rendah. Secara umum, masyarakat sekitar hutan dalam kondisi terpencil dengan aksesibilitas yang rendah, pendapatan rendah dan pendidikan rendah. Padahal masyarakat sekitar hutan dalam kehidupannya sangat bergantung pada hutan (hasil wawancara dengan Kepala Biro Perencanaan dan Pengembangan Perusahaan Perum Perhutani Jawa Barat dan Banten, September 2009). Menurut Sutaryono (2008), masyarakat sekitar hutan adalah masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan, kesejahteraan, inisiasi dan daya kreasi yang relative rendah. Budaya *nrimo* dan *sikap fatalis* menjadikan masyarakat selalu tersubordinasikan oleh sistem dan menjadi sulit untuk dapat menjadi berdaya.

Beberapa alasan mengapa modal sosial menjadi dasar untuk dimanfaatkan dalam pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan, karena: (1) Modal sosial berada dalam seluruh keterkaitan ekonomi, sosial, dan politik; dan meyakini bahwa modal sosial dan nilai-nilai yang ada telah menjadi suatu hubungan yang saling membutuhkan dengan lingkungan sumber daya hutan yang selama ini telah menjadi sumber kehidupannya; dan (2) Modal sosial adalah juga semacam perekat yang mengikat semua orang dalam masyarakat sekitar hutan dalam rangka pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan (modifikasi World Bank, 1998).

Alasan lain mengapa modal sosial (bukan modal yang lain, seperti modal fisik, modal alam, modal ekonomi, modal manusia) menjadi alasan dasar yang akan dimanfaatkan dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam rangka

pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan adalah karena (modifikasi World Bank, 1993; Stiglitz, 1996): (1) kenyataan bahwa nilai-nilai moral dan aturan-aturan sosial bukan merupakan kendala bagi setiap pilihan, bahkan sangat dimungkinkan bahwa nilai dan aturan sosial merupakan prasyarat bagi setiap kerja kooperatif yang memberi dampak pada nilai sosial, ekonomi, dan politik; khususnya yang terkait kesadaran ekologi dalam pengelolaan sumber daya hutan; (2) setiap individu berinteraksi dengan komunitasnya, yang terikat oleh nilai, norma dan pengalaman komunitasnya. Semakin dalam dan semakin mengakar nilai-nilai tersebut bagi individual akan semakin kokoh rasa komunitasnya dan semakin kuat perekatnya diantara komunitas; dan (3) modal sosial dapat membuat kerja komunitas lebih efisien, dan memperlancar inovasi dan adaptasi kelompok, serta memiliki keuntungan dan kemanfaatan melampaui batas-batas ekonomi serta memperkaya kreasi kebijakan pertumbuhan ekonomi, khususnya terkait dengan pengelolaan sumber daya hutan.

Dengan dasar latar belakang tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu hipotesa bahwa modal sosial masyarakat sekitar hutan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, modal sosial sangat berpengaruh pada keberdayaan masyarakat yang kemudian akhirnya modal sosial sangat berpengaruh pada pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Modal sosial akan menentukan ke arah mana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Pengelolaan sumber daya hutan berkesinambungan (lestari) adalah proses pengelolaan sumber daya hutan permanen untuk mencapai satu atau lebih tujuan-tujuan pengelolaan yang terinci, yang meliputi produksi yang berkesinambungan dari hasil-hasil hutan dan jasa-jasa hutan, tanpa banyak menyebabkan penurunan nilai dan produktivitas dan tanpa banyak memberikan pengaruh yang merugikan terhadap lingkungan fisik dan sosial (dikembangkan dari ITTO, 1992). Jadi pengelolaan sumber daya hutan berkesinambungan mempunyai tiga ciri, yaitu: (1) Keberlanjutan produksi dan jasa/manfaat hutan; (2) Keberlanjutan lingkungan

fisik (tanah, flora, fauna, hidrologi dan iklim; (3) Keberlanjutan lingkungan sosial masyarakat yang meliputi sosial, ekonomi dan budaya).

Keberlanjutan ekosistem hutan yang terdiri dari keterkaitan seluruh jejaring kehidupan di dalamnya serta arus energi seluruh unsur yang dalam ekosistem hutan tersebut, baik dari unsur fisik hutan, tanah, flora fauna, tanah, hidrologi dan iklim harus tetap dilestarikan walau sekalipun dalam hutan produksi yang dikelola. Kelestarian ekologi atau lingkungan dalam hutan produksi yang dikelola akan tercapai jika tetap memperhatikan keseimbangan kelestarian sosial dan kelestarian ekonomi.

Sebagaimana telah disebutkan pada latar belakang bahwa kelestarian sosial telah memberi sumbangsih pada dua irisan terhadap lingkungan alam dan lingkungan ekonomi, sehingga lingkungan sosial perlu menjadi fokus perhatian karena manusia adalah sebagai pemanfaat dan sekaligus pengelola hutan. Keterkaitan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan dan keberlanjutan kehidupan manusia adalah model pengelolaan keberlanjutan yang membutuhkan suatu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang optimal. Keterlibatan manusia masyarakat yang tinggal di sekitar hutan dalam pengelolaan sumber daya hutan sering dikenal adalah dalam bentuk pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.

Paradigma perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumber daya hutan dan pemberdayaan masyarakat yang sentralistik (berupa program yang dirancang dari atas ke bawah/*top-down* tanpa melibatkan masyarakat) telah memberi gambaran yang tidak menggembirakan dengan keberhasilan yang belum mencapai sasaran. Pengelolaan sumber daya hutan yang dihasilkan selama ini terlihat masih belum memenuhi indikator-indikator keberlanjutan. Program-program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan atas inisiatif pemerintah (pusat, provinsi dan kota) dan perusahaan bidang kehutanan cenderung dirancang dengan pola seragam dan bersifat instruksi dari atas yang harus dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, yang mencantumkan kriteria persyaratan sasaran penerima layanan yang ketat. Masyarakat hanya sebagai obyek pembangunan dan pelaksana program yang telah dirancang

sebelumnya, karena itu paradigma *top-down* tersebut harus diubah ke arah peningkatan keterlibatan masyarakat secara optimal (*bottom-up*).

Jika dicermati dari hasil pengelolaan sumber daya hutan dan proses serta hasil pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah dan Perum Perhutani selama ini, tampaknya secara metodologis juga perlu pembenahan. Berbagai bantuan yang diberikan kepada masyarakat sebaiknya diarahkan pada upaya untuk membenahi kultur dan sikap mental masyarakat agar mereka memiliki kesiapan untuk menggali dan memanfaatkan berbagai potensi sosial budaya lokal yang dimiliki dan telah hidup di masyarakat, misalnya potensi dalam bentuk aset personal atau modal sosial serta berbagai strategi penanganan masalah yang mereka hadapi secara konvensional.

Paradigma baru pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan adalah lebih menekankan pada apa yang dimiliki masyarakat sebagai potensi modal daripada apa yang tidak dimiliki masyarakat. Agar masyarakat benar-benar berdaya dari dirinya sendiri, maka strategi yang dapat ditempuh adalah menumbuh-kembangkan kemampuan dan kesadarannya untuk mengenali dan menggali sumber-sumber potensi modal yang dimiliki. Sebab dengan kesadaran dan kemampuan tersebut, masyarakat tidak lagi merasa bergantung pada pihak lain, melainkan telah tumbuh dan berkembang rasa percaya memiliki kemampuan hidup secara mandiri.

Pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan adalah pengelolaan yang didalamnya terkait keterlibatan masyarakat sekitar hutan. Masyarakat sekitar hutan adalah salah satu *stakeholder* terpenting yang juga merupakan tujuan dari pengelolaan sumberdaya hutan berkelanjutan, yaitu mewujudkan masyarakat sekitar hutan yang sejahtera. Selain itu, kesadaran tentang pentingnya menjaga kelestarian sumber daya hutan di sekelilingnya sebagai "dapur kehidupan" perlu diupayakan secara terus menerus untuk menjadi "energi" dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan mencapai pengelolaan sumberdaya hutan yang berkelanjutan, maka dalam proses pemberdayaan perlu dilakukan strategi-strategi



kesadaran ekologi yang sesuai dengan potensi modal masyarakat dan upaya keterlibatan masyarakat untuk menentukan setiap strategi dari setiap tahapan proses pemberdayaan dalam pengelolaan sumber daya hutan.

Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat sekitar hutan yang miskin dan tidak berdaya dalam mengakses sumber daya hutan. Oleh karena itu untuk mendesain suatu model pemberdayaan harus melibatkan masyarakat yang menjadi sasaran, agar masyarakat tersebut dapat mengenali segala permasalahannya sendiri, menganalisis sendiri potensi dan kebutuhannya dan pada akhirnya mampu untuk mengambil keputusan dan percaya diri dalam bertindak. Masyarakat sekitar hutan yang diberdayakan dalam pengelolaan sumber daya hutan, selain dapat meningkatkan keberdayaannya, masyarakat juga akan merasa memiliki hutan tersebut, kemudian akan menjaga keberlanjutan sumberdaya hutan yang menjadi sumber kehidupan mereka.

Pemilihan strategi pemberdayaan menjadi penentu dalam keberhasilan proses pemberdayaan, sehingga strategi yang terpilih harus memahami benar penyebab akar permasalahan kemiskinan dan ketidak berdayaan masyarakat sekitar hutan baik penyebab secara internal maupun eksternal khususnya yang berkaitan dengan kondisi dan potensi modal sosial masyarakat. Strategi pemberdayaan masyarakat yang dipilih harus menyentuh permasalahan yang dihadapi dan potensi modal yang dimiliki masyarakat. Strategi pemberdayaan masyarakat adalah melibatkan masyarakat sekitar hutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Selain strategi pemberdayaan, hal lain yang terpenting dalam suatu proses pemberdayaan adalah keterlibatan semua para pihak (*stakeholders*) pemberdayaan masyarakat. Keterlibatan semua para pihak akan sangat mendukung keberhasilan proses pemberdayaan masyarakat, karena semua pihak akan mengambil peran sesuai dengan kewenangannya untuk menjadi pendorong dan pemicu tercapainya keberdayaan masyarakat dan terwujudnya pengelolaan sumberdaya hutan berkelanjutan.

Keberhasilan suatu pemberdayaan masyarakat akan sangat ditentukan oleh model pemberdayaan masyarakat yang diterapkan. Model pemberdayaan harus dirancang sesuai dengan kondisi dan potensi serta kebutuhan masyarakat yang akan diberdayakan. Pola pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan bukan suatu kegiatan yang sifatnya *top down intervention* yang tidak menjunjung tinggi aspirasi dan potensi masyarakat, akan tetapi model pemberdayaan yang dibutuhkan adalah model pemberdayaan yang sifatnya *bottom-up intervention* yang menghargai, melibatkan dan mengakui bahwa masyarakat memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatasi permasalahannya sendiri serta mampu melakukan usaha-usaha produktif dengan prinsip kebersamaan dalam pengelolaan sumber daya hutan sebagai sumber kehidupannya. Keberhasilan suatu proses pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari manusia yang berdaya yaitu manusia yang mampu menjalankan harkat martabatnya sebagai manusia, merdeka dalam bertindak sebagai manusia dan menjadikan nilai-nilai luhur kemanusiaan sebagai kontrol terhadap sikap perilakunya. Keberdayaan masyarakat sebagai output proses pemberdayaan dapat dilihat dari kepemilikan potensi dan ketrampilan, partisipasi dalam pembangunan dan kemandiriannya.

Penelitian ini akan mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan modal sosial yang terkait dengan lingkungan sumber daya hutan yang akan dimanfaatkan untuk merumuskan model pemberdayaan masyarakat sekitar hutan yang sesuai dengan kondisi potensi modal sosial masyarakat sekitar hutan tersebut, karena menurut Fukuyama (1999) modal sosial sangat memegang peranan yang sangat penting dalam memperkuat daya kehidupan masyarakat. Modal sosial merupakan sumber daya terpenting dalam kehidupan masyarakat (sekitar hutan) karena modal ini merupakan jaringan kerja sosial dan ekonomi di masyarakat antar individu dan kelompok yang bermanfaat dan menguntungkan hubungan kekeluargaan untuk memecahkan persoalan-persoalan kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas dan melihat modal sosial yang sangat memegang peranan penting dan menjadi landasan dasar dalam keberhasilan suatu pembangunan termasuk dalam upaya pemberdayaan

masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan, maka rumusan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

***“Model pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan yang diterapkan selama ini dalam rangka pengelolaan sumberdaya hutan berkelanjutan belum memperhatikan pemanfaatan potensi modal sosial masyarakat sekitar hutan secara optimal”.***

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana konsep rumusan model pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan dengan memanfaatkan modal sosial masyarakat sekitar hutan?
- b. Bagaimana pengaruh kekuatan modal sosial masyarakat sekitar hutan pada pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan?
- c. Bagaimana rumusan model pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan dengan pemanfaatan dan penguatan modal sosial masyarakat sekitar hutan secara optimal?

### **1.3. Tujuan Penelitian :**

Adapun tujuan penelitian adalah menjawab pertanyaan penelitian tersebut di atas, yaitu sebagai berikut:

- a. Merumuskan konsep (hipotetik) model pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan dengan memanfaatkan modal sosial masyarakat sekitar hutan.
- b. Menganalisis bagaimana pengaruh kekuatan modal sosial masyarakat pada pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan.

- c. Merumuskan konsep (hipotetik) model pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan melalui pemanfaatan dan penguatan dan modal sosial secara optimal.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua *stakeholders*, baik dalam tataran akademis maupun praktis, sebagai berikut:

- a). Kegunaan dalam tataran akademis/keilmuan:

Hasil Penelitian ini akan memperkaya khasanah keilmuan lingkungan tentang pemahaman model pemberdayaan dan keberdayaan masyarakat sekitar hutan ditinjau dengan pendekatan dan kajian pemanfaatan modal sosial dalam pengelolaan sumberdaya hutan keberlanjutan.

Selain itu manfaat hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya dalam memperkaya temuan variabel modal sosial yang akan menjadi landasan dalam pemberdayaan masyarakat yang kemudian memperkaya khasanah ilmu lingkungan, karena modal sosial melibatkan hubungan *interaksi yang kompleks* antara faktor-faktor penentu, struktur dan manifestasi modal sosial dengan lingkungan alam dan lingkungan ekonomi. Struktur modal sosial ditandai oleh *hubungan yang dinamis* antar komponen dengan peran masing-masing pembentuk modal sosial dan hubungan dan jaringan dalam suatu lingkungan hidupnya. Modal sosial akan mendorong terciptanya *keseimbangan dan keselarasan* hubungan sosial dari *keberagaman* yang ada yang selanjutnya menciptakan *kesinambungan* kehidupan dengan kualitas lingkungan yang semakin baik.

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu prasyarat pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan akan menemukan suatu kajian tentang hubungan interaksi yang kompleks, dan saling kebergantungan para pihak dan lingkungan yang beraneka ragam untuk menuju suatu keselarasan dan kesinambungan masyarakat dan sumber daya hutan. Model ini mengkaji tentang kehidupan

sosial dan keberlanjutan fungsi sosial dan memberi gambaran dan jawaban pada hubungan sebab akibat yang berlangsung pada lingkungan (manusia dan sumber daya hutan), yang akan memberi manfaat pada perkembangan ilmu lingkungan

- b). Kegunaan dalam tataran praktis adalah: sebagai tambahan informasi kepada para *stakeholder* (Pemerintah/Perum Perhutani, Swasta, Pemerhati lingkungan/Kehutanan, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat Sekitar Hutan) dalam mengambil kebijakan dan merencanakan serta mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat dan merumuskan serta mendesain model pemberdayaan masyarakat yang efektif (khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan nilai-nilai kultur budaya atau modal sosial bagi masyarakat sekitar kawasan hutan dalam rangka pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan).

## BAB 2

### TINJAUAN KEPUSTAKAAN

#### 2.1. Kerangka Teori

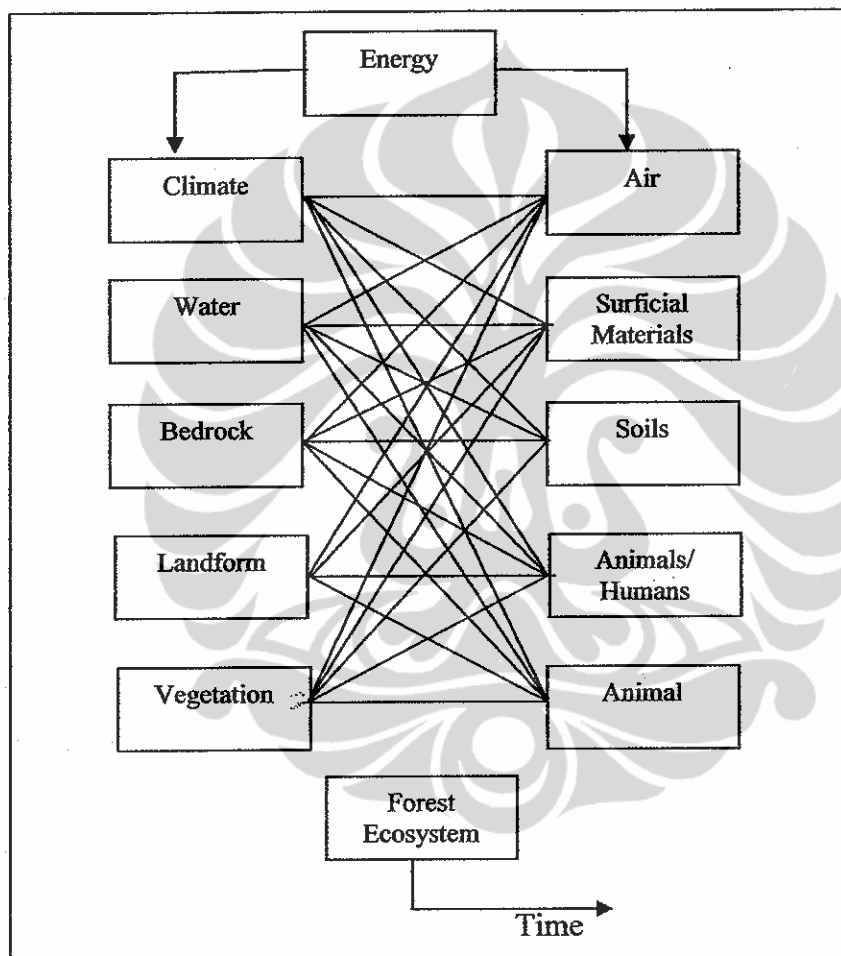
##### 2.1.1. Ekosistem Hutan dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan

Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan (Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999). Ekosistem hutan adalah suatu area *landscape* yang didominasi oleh pepohonan dan terdiri atas integrasi dari komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan mikroba, bersama dengan tanah dan atmosfer yang saling berinteraksi satu sama lain (Kimmins, 2003). Ekosistem hutan sangat kompleks, karena merupakan hubungan timbal balik (interaksi) antara tumbuhan, binatang, manusia, dan unsur lingkungan lainnya.

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kawasan hutan sebagai ekosistem terbentuk dan tersusun dari berbagai komponen yang tidak bisa berdiri sendiri, tidak dapat dipisah-pisahkan, bahkan saling mempengaruhi dan saling bergantung. Sumber daya hutan adalah benda hayati, non hayati dan jasa yang terdapat di dalam hutan yang telah diketahui nilai pasar, kegunaan dan teknologi pemanfaatannya (UU Nomor 41 Tahun 1999).

Hutan mempunyai peran yang sangat penting pada lingkungan secara menyeluruh. Hutan menyediakan makanan dan tempat tinggal, tempat berlindung dan bersembunyi dari pemangsanya serta banyak lagi manfaat lainnya pada lingkungan. Pohon, tanah, air dan binatang, atmosfer, batu semuanya berinteraksi satu sama lain menciptakan keseimbangan lingkungan yang sangat bermanfaat bagi manusia. Keseimbangan ini terus dipertahankan dalam sebuah siklus lingkungan. Tumbuhan dan binatang serta manusia saling berproses dan berpengaruh pada siklus keseimbangan oksigen dan karbon di atmosfer. Hutan

juga membantu melestarikan air dan melindungi tanah dalam suatu siklus air dalam hutan. Di dalam hutan terjadi siklus nutrisi yang saling membutuhkan antara pepohonan, tanah, binatang dan manusia. Hutan juga sangat penting bagi perkembangan ekonomi, banyak produk hutan yang secara komersil telah disediakan oleh hutan. Tanah hutan juga sangat penting bagi pertanian dan industri pariwisata. Siklus energi jejaring kehidupan yang terjadi dalam suatu ekosistem hutan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1. Ekosistem Hutan Dengan Jejaring kehidupan (dikembangkan dari Gray, 1996)

Formasi ekosistem hutan merupakan tipe atau bentuk susunan ekosistem hutan yang terjadi akibat pengaruh lingkungan yang dominan terhadap pembentukan dan perkembangan komunitas dalam ekosistem hutan. Adanya pengelompokan formasi hutan diilhami oleh paham tentang klimaks yang berkaitan dengan

adaptasi tetumbuhan secara keseluruhan terhadap segi fisiologis, morfologis, syarat pertumbuhan, dan bentuk tumbuhnya, sehingga kondisi ekstrim dari pengaruh iklim dan tanah akan menyebabkan efek adaptasi pohon serta tetumbuhan lainnya menjadi nyata. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap bentuk susunan ekosistem hutan (formasi hutan). Ekosistem hutan sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur iklim dan kondisi tanah (Arief, 1994). Dengan demikian untuk pengelolaan sumber daya hutan sangat memerlukan pengetahuan tentang ekosistem hutan yang demikian kompleks, sehingga pengelolaan sumber daya hutan tersebut tetap dapat berkelanjutan.

Menurut Zeki & Yolasigma (2003), salah satu prinsip pengelolaan ekosistem hutan adalah pengelolaan tersebut harus terintegrasi baik secara ekonomi, ekologi dan secara hubungan sosial. Pengelolaan ekosistem hutan memiliki tiga dimensi, yaitu (1) struktur fisik yang ditentukan oleh topografi dan (2) struktur geologi, komposisi biologis flora dan fauna, serta (3) struktur manusia yang diwakili oleh dimensi sosial, ekonomi, rohani, sejarah dan nilai-nilai budaya. Pengelolaan ekosistem hutan akan selalu menyeimbangkan tiga dimensi keberlanjutan demi kesejahteraan masa depan generasi mendatang dengan menyediakan pilihan-pilihan pengelolaan.

Menurut Arief (2001), pengelolaan sumber daya hutan dapat dikelompokkan sebagai: (1) Pengelolaan sumber daya hutan produksi yang berfungsi seimbang antara kepentingan ekonomi dan ekologi; (2) Pengelolaan sumber daya hutan konservasi yang berfungsi ekologi; dan (3) pengelolaan sumber daya hutan konversi yang berfungsi ekonomi. Pengelolaan sumber daya hutan adalah demi kepentingan ekologi/lingkungan, sosial dan ekonomi secara seimbang. Menurut Elvida dan Sukadri (2002) tujuan pengelolaan hutan pada dasarnya adalah menuju *Sustainable Forest Management* (SFM) yang memiliki tiga faktor utama, yaitu ekologi, sosial dan ekonomi.

Sebagaimana tersebut sebelumnya, bahwa pengelolaan hutan produksi adalah pengelolaan sumber daya hutan yang memang diperuntukkan untuk produksi hasil hutan dengan tetap menjaga keseimbangan ekologi dan sosial. Pengelolaan



sumber daya hutan produksi tidak semata-mata untuk meningkatkan ekonomi, tetapi bagaimana mengelola sumber daya hutan secara arif dan bijaksana. Kelestarian sumber daya hutan sangat bergantung dari kebijakan pengelolanya. Dengan demikian keberlanjutan sumber daya hutan tidak hanya mencakup produksi/ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan aspek ekologi dan sosial ekonomi masyarakat. Demikian juga yang akan menjadi lokasi penelitian adalah lingkungan Hutan Produksi yang dikelola oleh Perum Perhutani.

Menurut Higgs (1997), Maginnis & Jackson, (2005) untuk menjaga ekologi hutan tidak terlepas dari sistem sosial. Oleh karena itu, masyarakat sekitar hutan dengan modal sosial yang kuat secara tidak langsung akan memiliki ekologi dan ekosistem hutan yang baik. Maginnis & Jackson, (2005) menyatakan desain hutan keberlanjutan perlu menggabungkan beberapa aspek pendekatan yang berbeda. Hal ini membutuhkan penerimaan eksplisit dari premis bahwa 1) dimensi ekologi, ekonomi, dan sosial adalah semua bernilai tinggi di hutan, 2) tidak setiap tujuan dapat dicapai pada setiap bagian dari lanskap, dan 3) keberlanjutan hanya dapat dievaluasi secara memadai dalam hal proses ekosistem dan fungsi pada skala lanskap.

Di dalam suatu ekosistem hutan terdapat interaksi antara sistem masyarakat sekitar hutan dan sistem sumber daya hutan yang masing-masing mempunyai sistem kehidupan yang kemudian saling beradaptasi untuk keberlangsungan kehidupan masing-masing. Hasil interaksi tersebut akan saling mempengaruhi dan merupakan salah satu ukuran keberlanjutan suatu pengelolaan ekosistem hutan yang berkelanjutan. Menurut Pretzch H *et al.* (2008), dalam perspektif Negara Eropa, ada 5 (lima) paradigma dalam model pengelolaan ekosistem hutan, yaitu: (1) *multiple uses*, (2) *dominant use*; (3) *environmentally sensitive multiple use*; (4) *full ecosystem approach*, and (5) *eco-regional perspective*.

Menurut Kimmins (2003):

*“Forest ecosystem management/FEM is the management of forest ecosystem processes and disturbance regime to sustain the desired values and ecosystem services from a shifting mosaic of different ecosystem condition across the landscape, and a non-declining pattern of change over time in*

*the value and services provided by each stand in that landscape. It is also the management of the human use of, and interaction with the forest, because human are part of forest ecosystems. Elements of forest ecosystem management are: sustainability, goal, sound ecological models and understanding, complexity and connectedness, the dynamic character of ecosystems, context and scale, human as ecosystem components, and adaptability and accountability”.*

Pembangunan berkelanjutan dalam keberlanjutan hutan telah didefinisikan cukup beragam oleh berbagai institusi dan para pakar, sesuai dengan latar belakang kepakarannya serta tujuannya, oleh karena itu muncul inisiatif standar keberlanjutan dari tingkat internasional seperti: *International Tropical Timber Organization (ITTO)*, *Forest Stewardship Council (FSC)*, *African Timber Organization (ATO)*, dan ditingkat nasional seperti Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), *Center for International Forestry Research (CIFOR)*, dan ICRAF yang telah diganti menjadi *World Agroforestry Research*.

Berkaitan dengan batasan keberlanjutan, Helm (dalam Suhendang, 2002) mendefinisikan keberlanjutan sumber daya hutan adalah keberlanjutan dalam pemanfaatan hasil dan nilai-nilai yang dapat diperoleh dari hutan untuk generasi kini tidak boleh mengorbankan kemampuan hutan tersebut untuk memberikan hasil dan nilai-nilai yang sama untuk generasi yang akan datang.

Tujuan pengelolaan sumber daya hutan ialah untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun pengelolaan tersebut tentu saja tidak mengabaikan kelestarian dan keseimbangan serta keserasian sub-sub sistem lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya hutan harus didasarkan pada asas-asas ekologi dan pendekatan ekosistem. Untuk mengelola sumber daya hutan harus dilihat hutan sebagai bagian dari keseluruhan sumber daya alam dan lingkungan hidup di suatu wilayah. Oleh karena itu perlu memperhatikan masyarakat manusia yang mempunyai kedudukan penting sebagai konsumen hasil dan manfaat atau jasa dan juga sebagai manusia pembina dan pengelola sumber daya hutan (Soerianegara, 1977 dalam Suhendang *et al.* 2002).

Pengelolaan sumber daya hutan ialah pemanfaatan dan perlakuan terhadap ekosistem sumber daya hutan dengan kelestarian. Pertimbangan ekonomi dalam hal eksploitasi, produksi dan konsumsi harus diimbangi dengan pertimbangan ekologi dalam hal regenerasi, rehabilitasi, dan konservasi. Kecepatan eksploitasi tidak boleh melebihi kecepatan tumbuh dari sumber daya hutan, dan kegiatan eksploitasi harus segera disusul dengan kegiatan regenerasi dan rehabilitasi (Soerianegara, 1977 dalam Suhendang *et al.* 2002).

Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (*Sustainable Forest Management/SFM*) adalah sistem pengelolaan hutan yang menjamin keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan dengan memperhatikan fungsi ekonomi, sosial dan lingkungan secara seimbang. Fungsi Sosial adalah pengelolaan yang memberi dampak pada kesejahteraan sosial dan ekonomi jangka panjang untuk masyarakat lokal. Fungsi lingkungan adalah menjaga fungsi lingkungan hidup yang meliputi stabilitas daerah aliran sungai, konservasi sumber daya biologi dan perlindungan habitat hidupan liar, dan Fungsi ekonomi adalah perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan harus memasukkan konsep kelestarian hasil.

Pengelolaan hutan berkelanjutan (*Sustainable forest management*) menurut ITTO (1992), adalah proses pengelolaan lahan hutan permanen untuk mencapai tujuan-tujuan pengelolaan yang terinci, yang meliputi produksi yang berkesinambungan dari hasil-hasil hutan dan jasa-jasa hutan, tanpa menyebabkan penurunan nilai dan produktivitas dan tanpa banyak memberikan pengaruh yang merugikan terhadap lingkungan fisik dan sosial. Jadi pengelolaan hutan yang lestari mempunyai tiga ciri, yaitu: (1) kesinambungan produksi dan jasa/manfaat hutan; (2) kelestarian lingkungan ekologi (fisik hutan tanah, flora, fauna, hidrologi, dan iklim); (3) kelestarian lingkungan sosial masyarakat (meliputi sosial, ekonomi, dan budaya). Sedang menurut Shopi Higman, *et al.* 2007, unsur-unsur Pengelolaan Hutan Lestari (SFM) terdiri atas: (1) Kerangka Hukum dan Kebijakan; (2) Kelestarian dan Produksi optimal hasil hutan; (3) Perlindungan lingkungan; (4) Keberadaan masyarakat; dan (5) Pertimbangan tambahan.

Menurut Fausy & Anna (2005), konsep pembangunan sumber daya (termasuk hutan) yang berkelanjutan mengandung aspek: (1) keberlanjutan ekologi, yaitu pemanfaatan sumberdaya hutan hendaknya tidak melewati batas daya dukungnya, peningkatan kapasitas dan kualitas ekosistem menjadi hal yang utama; (2) keberlanjutan sosio-ekonomi, yaitu pemanfaatan sumber daya hutan dapat memberi kesejahteraan individu dan masyarakat; (3) keberlanjutan komunitas, yaitu pemanfaatan sumberdaya hutan dapat memberikan keberlanjutan kesejahteraan dari sisi komunitas atau masyarakat; dan(4) keberlanjutan kelembagaan, yaitu pemanfaatan sumberdaya hutan dapat memberikan keberlanjutan kelembagaan yang menyangkut memelihara aspek finansial dan administrasi yang sehat.

Menurut Lembaga Ekolabel Indonesia LEI, 1999, penilaian keberlanjutan pengelolaan sumber daya hutan adalah:

(1) Kelestarian fungsi produksi (ekonomi); (a) adanya kepastian penggunaan lahan sebagai kawasan hutan, status penataan batasan kawasan hutan, (b) kualitas fisik tata batas, (c) perencanaan dan implementasi penataan hutan menurut tipe-tipe dan fungsi-fungsi hutan, (d) pengorganisasian kawasan yang menjamin kegiatan produksi yang kontinyu, (e) produksi yang sesuai dengan kemampuan produktivitas hutan, (f) meminimumkan tingkat pembalakan, serta (g) meminimumkan dampak perubahan penutupan lahan akibat perambahan, (h) alih fungsi kawasan hutan, (i) kebakaran dan gangguan lainnya:

(2) Kelestarian fungsi ekologi; meletakkan proporsi yang proporsional antara pemanfaatan hutan dengan fungsi ekologi hutan, sehingga tidak menimbulkan dampak kerusakan hutan yang pada akhirnya akan mengakibatkan kerusakan lingkungan dan hilangnya keanekaragaman hayati;

(3) Kelestarian fungsi sosial; (a) adanya kejelasan batas antara kawasan konsesi dengan kawasan komunitas setempat yang terdelinasi secara jelas, (b) adanya jaminan akses pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat setempat, (c) sebagai sumber-sumber ekonomi komunitas masyarakat sekitar hutan, (d) adanya pengakuan dan kompensasi formal terhadap penggunaan pengetahuan tradisional masyarakat adat, (e) komunitas masyarakat sekitar hutan dapat mengakses

kesempatan kerja dan peluang berusaha serta meminimasi dampak kerusakan sumber daya hutan terhadap kesehatan masyarakat, (f) terjaminnya hak asasi manusia, promosi pemberdayaan komunitas, kerjasama dengan otoritas kesehatan, (g) keberadaan dan pelaksanaan kesepakatan kerja bersama, (h) pelaksanaan upah minimum regional (UMR) dan gaji yang adil, (i) terjaminnya kesehatan dan keselamatan kerja.

Menurut Soerjani (2004), LEI (1999), Indikator kinerja dimensi hasil suatu pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan adalah: (1) kelestarian fungsi produksi: kelestarian sumber daya, kelestarian hasil hutan, dan kelestarian usaha; (2) kelestarian fungsi ekologis: stabilitas ekosistem dan sintasan jenis dilindungi; (3) kelestarian fungsi sosial: terjaminnya sistem tenurial dan terjaminnya ketahanan dan pengembangan ekonomi komunitas.

Gray (1996) menyatakan pada dasarnya pemeliharaan ekosistem hutan tidak terlepas dari peran manusia. Sebuah "pendekatan ekosistem" didasarkan pada ide bahwa jika manusia bersahabat dan menerapkan nilai-nilai yang sesuai dan didukung dengan pengetahuan yang cukup dan peralatan yang memadai, maka manusia dapat melindungi dan mempertahankan ekosistem. Pendekatan ekosistem adalah proses adaptif yang mempekerjakan seperangkat komponen yang terintegrasi untuk merawat aset alam bumi dengan mengelola hubungan antar komponen, seperti budaya, sosial, ekonomi, ekologi dan nilai-nilai yang pada akhirnya menentukan hubungan humanecosystem (keberlanjutan sosial).

Menurut LEI (1999), relevansi keberlanjutan fungsi sosial dalam pengelolaan sumberdaya hutan berkelanjutan adalah: terjaminnya keberlanjutan fungsi perusahaan hutan bagi kehidupan masyarakat sekitar hutan yang bergantung kepada hutan, baik langsung maupun tidak langsung secara lintas generasi. Menurut Mustofa (2004), pada dasarnya prinsip keberlanjutan sosial tersebut mencakup 5 (lima) kondisi, yang diformulasikan dalam bentuk aksi sebagai: (1) Menghormati/mengakui eksistensi kawasan yang digunakan sebagai ruang kehidupan masyarakat lokal; (2) Mempertahankan peran masyarakat lokal dalam pengendalian atas sumber daya hutan yang diusahakan; (3) Menjaga

keberlangsungan aktivitas tradisi sosio kultural masyarakat lokal dengan sumberdaya hutan; (4) Membuka ruang kesempatan yang luas bagi masyarakat lokal sekitar hutan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengelolaan sumber daya hutan; dan (5) Menghindarkan dan atau menyelesaikan secara manusiawi berbagai interaksi sosial yang bersifat disosiatif (merugikan) berkaitan dengan pengusahaan hutan dan keberadaan/kepentingan masyarakat lokal sekitar hutan.

Mustofa (2004) selanjutnya menjelaskan bahwa apabila kelima hal tersebut di atas dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam pengelolaan sumberdaya hutan, maka kelestarian sumberdaya hutan diyakini dapat dicapai. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa kelimanya merupakan pendekatan terhadap dua persoalan sosiologis kunci terkait dengan pengelolaan sumberdaya hutan yang tidak pernah berhasil selama ini, yaitu 'ketidakadilan' dan 'ketidak-amanan' yang dirasakan masyarakat.

Menurut Kellomaki (2003) dari University of Joensuu Jepang yang meyoroti kelestarian hutan dalam dimensi sosial menyatakan:

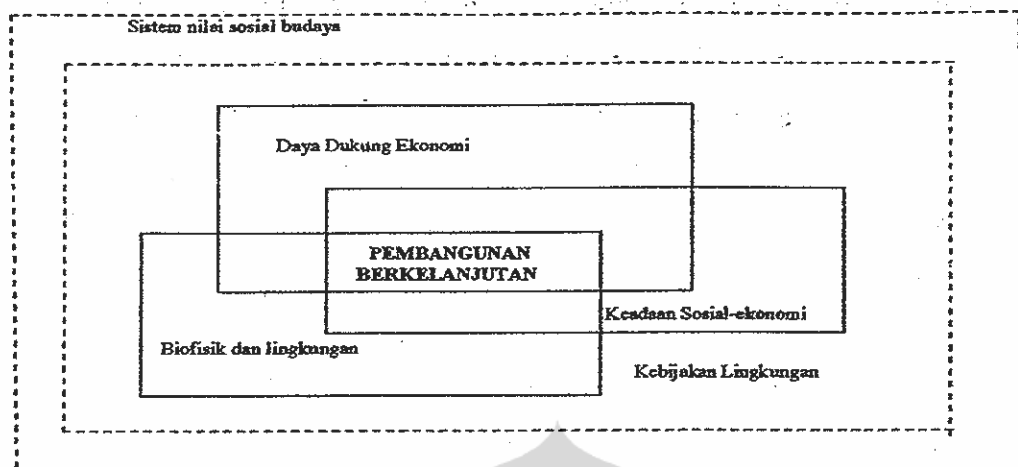
*"The sustainable social development of any society closely relates to the sustainable management of natural resources. Management of natural resources is sustainable whenever current use consider the needs of future generation".*

Dengan demikian masalah keberlanjutan menekankan pada pembangunan sosial pada berbagai kelompok sosial berkorelasi dengan keberlanjutan sumber daya hutan. Pengelolaan sumber daya hutan akan berkelanjutan bila pemanfaatannya mempertimbangkan kebutuhan masa mendatang. Pemahaman keberlanjutan sumber daya hutan pada awalnya selalu diidentikkan dengan terjaganya produksi kayu secara kontinyu dan terjaganya satwa, namun demikian seiring dengan perkembangan zaman, ilmu dan teknologi, maka pemahaman tentang keberlanjutan sumber daya hutan berkaitan pula dengan lahan hutan (*land forest*) telah berubah yakni keberlanjutan dilihat dari manfaat bagi kehidupan manusia. Berkaitan dengan itu batas keberlanjutan atau kelestarian termasuk di dalamnya keanekaragaman hayati, produktivitas, ekosistem, ekologi, ekonomi, dan fungsi sosial (Suhendang, 2002).

Berkaitan dengan keberlanjutan sumber daya hutan, lebih lanjut Kellomaki (2003), menyatakan bahwa ada tiga prinsip pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan terkait dengan upaya konservasi yang harus dilakukan, yaitu: (1) sumber daya genetik hutan memerlukan konservasi yang kemudian berkontribusi pada keanekaragaman hayati hutan dan ekosistemnya; (2) kapasitas ekosistem sumber daya hutan untuk jadi energi dan materi lain seperti air, karbon, nitrogen, nutrisi mineral memerlukan adanya pemeliharaan; (3) kapasitas ekosistem sumber daya hutan untuk memproduksi kayu dan lainnya seperti jasa, memerlukan konservasi.

Cara kerja dari ketiga prinsip tersebut saling mendukung dan berkaitan satu sama lainnya, hal ini dikuatkan oleh Samoel *et al.* (1999) yang menyatakan bahwa hal terpenting dari makna keberlanjutan atau kelestarian adalah pendekatan ekosistem, secara lebih spesifik adalah upaya-upaya konservasinya. Ekologi yang tidak didukung kondisi ekonomi dan sosial, akan ada kesenjangan, maka sistem keberlanjutan atau kelestarian akan tidak berjalan (*collaps*). Berkaitan dengan hal tersebut Becker (dalam Purnomo, 2003) menggambarkan keterkaitan antara sistem yang mendukung pengembangan keberlanjutan (Gambar 2.2).

Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan perpotongan (irisan) dan ketiga bagian utama menggambarkan keterkaitan langsung faktor-faktor dalam pengembangan keberlanjutan, daya dukung ekonomi, biofisik dan lingkungan, dan keadaan sosial ekonomi, sedangkan garis putus-putus, di luar ketiga kotak tersebut menggambarkan lingkungan yang kondusif berupa sistem nilai sosial budaya (yang merupakan modal sosial) yang turut memberikan pengaruh dan arah keberlanjutan.



Sumber : Backer, Purnomo, 2003

Gambar 2.2. Konsep Kerangka Kerja Untuk Penilaian Keberlanjutan

Berkaitan dengan beberapa defenisi pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan di atas, maka peneliti mengambil suatu kesimpulan bahwa pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan adalah suatu upaya pengelolaan sumber daya hutan untuk memanfaatkan produk hutan dan jasa lingkungan untuk generasi kini dan generasi mendatang, dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem sumber daya hutan, sehingga keberlanjutan fungsi ekonomi hutan, keberlanjutan fungsi ekologi hutan dan keberlanjutan fungsi sosial berjalan seimbang dan tidak saling mendominasi.

Untuk mencapai suatu pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan, maka perlu dilakukan suatu upaya pendekatan kajian lingkungan. Penelitian ini berupaya mengkaji lingkungan hidup dan kedudukan manusia yang berada dalam ekosistem sumber daya hutan, khususnya yang berkaitan dengan hasil-hasil interaksi masyarakat dengan lingkungannya yang berbentuk nilai-nilai sebagai bentuk adaptasi lingkungan diantara masyarakat sekitar hutan dan pengelolaan sumber daya hutan. Nilai-nilai tersebut berbentuk modal sosial yang mempengaruhi tingkat keberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan.



### **2.1.2. Hubungan Masyarakat Sekitar Hutan dan Lingkungan Sumber Daya Hutan**

Dalam tahapan hubungan manusia dengan lingkungannya akan ditunjukkan bahwa seluruh aspek budaya, perilaku bahkan "nasib" manusia dipengaruhi, ditentukan, dan tunduk pada lingkungan. Bentuk-bentuk persekutuan hidup manusia muncul akibat dari interaksi iklim, geografi dan ekonomi. Ketiga bagian dari lingkungan itu juga bersifat sangat menentukan corak temperamen manusia (Ibnu Khaldun dalam Rachmad D, Susilo, 2008).

Hutan merupakan ekosistem yang berperan penting dalam hal menunjang kehidupan manusia. Hutan merupakan lingkungan "wahana interaksi" masyarakat yang mendiami kawasan di sekitarnya. Ekosistem hutan dan manusia tidak dapat dipisahkan satu sama lain sebagai satu kesatuan utuh kehidupan manusia sejak awal keberadaannya di muka bumi. Masyarakat sekitar hutan adalah masyarakat yang bertempat tinggal di desa yang secara administratif dan ekologis berada dan atau berbatasan langsung dengan hutan. Perum Perhutani (2006) menyebutkan bahwa masyarakat sekitar hutan disebut juga masyarakat desa hutan, yaitu masyarakat yang tinggal di desa hutan dan melakukan kegiatan yang berinteraksi dengan sumber daya hutan untuk mendukung kehidupannya. Masyarakat sekitar hutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem hutan. Interaksi antara ekosistem hutan dan sosio-sistem masyarakat sekitar hutan akan menentukan kelangsungan sumber daya hutan.

Selanjutnya Darusman (2000) menyatakan bahwa fakta yang sangat kuat dan meluas bahwa ada masyarakat yang hidup di sekitar hutan, baik bermukim (menetap) maupun nomaden (berpindah-pindah) baik asli/turunan temurun maupun pendatang. Masyarakat sekitar hutan harus diperhatikan karena: (1) masyarakat sekitar hutan adalah bagian dari ekosistem hutan yang saling tergantung; (2) masyarakat sekitar hutan mempunyai hak mendapatkan keadilan sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 tentang Kehutanan dan PP No 6 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan; (3) masyarakat sekitar

hutan mempunyai hak untuk berdemokrasi dan hak untuk menentukan suatu kebijakan; (4) masyarakat sekitar hutan adalah 35% kategori miskin dan juga merupakan warga negara yang juga ingin sejahtera; (5) masyarakat sekitar hutan dapat menjadi sumber gangguan keamanan hutan.

Menurut Mubyarto *et al.* (1992), secara umum peranan hutan bagi masyarakat sekitar hutan adalah: (1) hutan sebagai penghasil kayu dan non kayu; (2) hutan menjadi penyedia lahan untuk kegiatan pertanian para petani masyarakat sekitar hutan; (3) hutan sebagai sumber makanan ternak dan tempat hidup ternak. Sedang menurut Darusman & Bahruni (1999), terdapat tiga hal pokok yang merupakan basis hubungan antara pengelolaan hutan dan masyarakat sekitar hutan yang dapat menunjukkan keberlanjutan pengelolaan sumber daya hutan, yaitu: (1) masyarakat sekitar hutan yang kehidupannya tergantung pada sumber daya hutan, dengan kearifan lokal dan norma-norma yang dimilikinya dapat diselaraskan dengan sistem pengelolaan hutan. Pengelolaan sumber daya hutan tidak boleh mengeliminasi atau mengurangi hak-hak masyarakat sekitar hutan; (2) pengelolaan sumber daya hutan tidak boleh mengganggu seluruh aspek tatanan kehidupan masyarakat sekitar hutan; (3) masyarakat sekitar hutan diberikan keleluasan untuk mengembangkan aktivitas serta partisipasinya dalam pengelolaan sumber daya hutan.

Hubungan antara masyarakat sekitar hutan dengan sumber daya hutan terjadi di dalam suatu hubungan yang timbal balik, artinya masyarakat sekitar hutan membutuhkan sumber daya hutan, sumber daya hutan juga membutuhkan manusia. Masyarakat sekitar hutan membutuhkan lingkungan sumber daya hutan untuk kelangsungan kehidupan dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok primer dan sekunder manusia yaitu makan, minum dan tempat tinggal, manusia bermasyarakat di sekitar hutan juga membutuhkan sosialisasi di dalam lingkungan sumber daya hutan. Sumber daya hutan juga membutuhkan manusia sebagai pemelihara dan pengambil manfaat sumber daya hutan, agar tatanan sistem ekosistem sumber daya hutan tetap terjaga dan lestari untuk keberlanjutan sumber daya hutan itu sendiri dan seluruh makhluk yang ada di lingkungannya.

Menurut Sastrosupeno (1984), manusia masyarakat sekitar hutan dan sumber daya hutan saling membutuhkan dalam memanfaatkan serta mengelola sumber daya hutan. Dengan saling membutuhkan tersebut, maka terjadi kehidupan berkelompok sesuai dengan pembagian kerja dan aktivitas kerja sama kesatuan hidup manusia yang ditandai dengan hidup yang berkelompok menimbulkan keterikatan manusia pada norma-norma aturan-aturan dan adat-istiadat tertentu sebagai modal sosial yang terus berkembang dan bersifat kontinu, sehingga membentuk masyarakat.

Menurut Nurjaya (2008), temuan dari penelitian-penelitian antropologis mengenai pengelolaan sumber daya hutan oleh masyarakat lokal, membuktikan bahwa masyarakat asli sekitar hutan memiliki modal sosial berupa kapasitas budaya, sistem pengetahuan dan teknologi, religi, tradisi, etika dan kearifan lingkungan, norma-norma dan institusi hukum untuk mengelola sumber daya hutan secara bijaksana dan berkelanjutan. Modal sosial tersebut harus didayagunakan dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan.

Menurut Nababan (2003), beberapa dimensi yang menjelaskan adanya hubungan masyarakat sekitar hutan dengan sumber daya hutan, sehingga diantaranya keduanya memiliki hubungan komplementer, yaitu:

- (1) **Dimensi pertama adalah kehidupan masyarakat sekitar hutan sangat bergantung kepada sumber daya hutan.** Hutan menyimpan kekayaan sumber daya hutan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti pangan, pengobatan dan keperluan ritual. Masyarakat sekitar hutan mengambil sumber daya hutan berupa kayu, madu, tanaman obat untuk keperluan sehari-hari. Masyarakat menggunakan sumber daya hutan hanya menggunakan teknologi sederhana dan sangat tradisional, sehingga tidak terjadi eksploitasi sumber daya hutan;
- (2) **Dimensi kedua adalah masyarakat sekitar hutan memiliki lembaga yang mengatur harmonisasi hubungan antara masyarakat dengan hutan.** Lembaga tersebut berfungsi untuk mengatur pengelolaan internal dan eksternal segala hal yang terkait dengan pelestarian hutan yang dilakukan dengan musyawarah; dan

- (3) **Dimensi ketiga adalah masyarakat sekitar hutan memiliki hubungan magis dan spiritual dengan hutan.** Misalnya adanya kepercayaan masyarakat Dayak di Taman Nasional Betung Karihun, Masyarakat Baduy di Jawa Barat.

Menurut Nababan (2003), masyarakat sekitar hutan menganut prinsip-prinsip pelestarian hutan yang berkembang secara evolusioner serta diwariskan secara turun menurun, sebagai berikut:

- (1) **Prinsip pertama adalah manusia dan alam memiliki hubungan yang selaras dan seimbang.** Masyarakat sekitar hutan melakukan pengelolaan hutan yang berorientasi kepada kepentingan lokal dan memanfaatkan sumber daya hutan sesuai dengan perspektif ekologi. Keutuhan hutan beserta sumber daya yang dimilikinya harus dijaga dengan seksama, karena jika ada unsur yang rusak, maka akan berpengaruh pada keseimbangan unsur yang lainnya;
- (2) **Prinsip kedua adalah Ilmu pengetahuan lokal dan struktur pemerintahan masyarakat sekitar hutan dianggap mampu memecahkan masalah pemanfaatan sumber daya hutan.** Banyak pengetahuan lokal yang diterapkan masyarakat yang selaras dengan kaidah keseimbangan dan kelestarian hutan. Sebagai contoh praktek ladang berpindah masyarakat Dayak yang ternyata tidak berbanding lurus dengan pengurangan sumber daya hutan;
- (3) **Prinsip ketiga adalah wilayah hutan dibagi-bagi menurut fungsinya.** Sebagai contoh adalah masyarakat adat Kasepuhan yang tinggal di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Provinsi Jawa Barat. Masyarakat adat Kasepuhan membagi hutan adat menjadi 3 (tiga), yaitu *Leuweung Titipan*, *Leuweung Tutupan*, dan *Leuweung Garapan*. Sistem pembagian hutan seperti ini adalah sama dengan sistem pembagian kawasan lindung yang diterapkan pemerintah, yaitu zona inti, zona penyangga dan zona pemanfaatan;
- (4) **Prinsip keempat adalah untuk mengurangi kecemburuan sosial maka dilakukan pendistribusian hasil hutan.** Hal ini salah satunya disebabkan masyarakat sekitar hutan mempunyai modal sosial desa, seperti gotong royong. Pembentukan kerjasama dan jaringan kerja di masyarakat dihasilkan dari sebuah pengembangan saling percaya (*trust*) diantara masyarakat. Misalnya masyarakat *Da'a* di Taman Nasional Lore Lindu, Provinsi Sulawesi

Tengah. Masyarakat *Da'a* membuka lahan di hutan (*pangale*) secara bersama-sama oleh seluruh masyarakat untuk dijadikan kebun (*tinalu*). Hasil yang diperoleh juga dibagi sama rata (Sangaji, 2001); dan

- (5) **Prinsip kelima adalah alokasi fungsi hutan dan penegakkan hukum dan nilai masyarakat untuk memelihara hutan milik bersama.** Misalnya masyarakat Dayak Wehea di Kutai, yang memiliki aturan adat melarang warganya membuka lahan kebun di kawasan lindung, tetapi boleh mengambil hasil hutan non-kayu. Jika masyarakat melanggar aturan, maka warga dikenakan sanksi dan diselesaikan dengan hukum adat.

Beberapa sistem pengetahuan lokal masyarakat sekitar hutan dalam melakukan pengelolaan hutan dengan sistem berdasarkan warisan nenek moyang secara turun menurun (Adiprasetyo, 2006), antara lain:

- (1) **Budaya adat:** dalam pengelolaan hutan, masyarakat biasanya menganut aturan adat yang dimiliki, misalnya menanam suatu jenis tanaman yang sesuai dengan musimnya, menebang pohon yang usianya sudah tua dan telah siap pohon penggantinya, memilih jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi tanah dan iklim yang mendukung;
- (2) **Kearifan lokal:** kepercayaan terhadap hal-hal ghoib yang melahirkan pengetahuan atau kebiasaan, misalnya yang sering dilakukan sebelum atau sesudah pengolahan lahan dan pasca panen, mereka mengadakan selamatan (*jaa, tumpengan*) dengan mengundang orang-orang yang ada di sekitarnya, dengan kebiasaan tersebut, mereka tetap menjaga serta melestarikan suatu tempat yang dianggap keramat (*petilasan/punden*);
- (3) **Mempelajari keanekaragaman tanaman hutan:** ilmu ilmiah yang diwarisi secara turun menurun yang tidak pernah ditinggalkan/dilupakan adalah mempelajari jenis-jenis tanaman yang hidup di dalam hutan, mereka pelajari suatu tanaman yang berfungsi sebagai sumber kehidupan alternatif, tanaman yang berfungsi pengobatan tradisional, tanaman yang bisa dimakan, tanaman yang berfungsi untuk ritual dan juga pohon yang bisa dibuat untuk rumah dalam jangka waktu puluhan tahun;

- (4) Pengelolaan hutan: lahan hutan yang dikelola biasanya menggunakan cara-cara tradisional yang tidak merusak kesuburan tanah dan habitat di sekitarnya, alat-alat yang digunakan sangat sederhana, dalam hal mengelola hutan mereka menganalisis dampak-dampak yang timbul kemudian hari seperti lahan kemiringan dijadikan sebagai hutan resapan, daerah sekitar sumber air tetap dilestarikan dengan menanam pohon yang banyak mengandung kadar air dan membuat terasering untuk mencegah terjadinya erosi.
- (5) Pemanfaatan fungsi hutan: secara tidak langsung masyarakat sekitar hutan telah banyak melakukan langkah-langkah penyelamatan hutan dari kerusakan yang disebabkan karena proses alam maupun kerusakan yang disebabkan oleh manusia, pemanfaatan fungsi hutan menurut budaya adat masyarakat adalah pengelolaan yang secara berkelanjutan dan tetap terjaganya nilai-nilai budaya lokal dan kearifan lokal.

Berdasarkan penelitian Ihsan (2007) di Desa Simarasa Kecamatan Cisolok, Sukabumi, menyimpulkan bahwa masyarakat sekitar hutan yang berada dalam kawasan hutan Perum Perhutani dan Taman Nasional Gunung Halimun menunjukkan interaksi dan hubungan yang saling kebergantungan antara masyarakat Desa Simarasa dengan hutan yang ada di sekitarnya. Interaksi masyarakat dengan hutan, terutama dilakukan untuk mencapai kebutuhan pokoknya berupa pangan, sumber air, kayu bakar, dan pengembangan ternak. Dalam pengelolaan hutan, masyarakat desa di sekitar hutan mempunyai kearifan lokal dan nilai-nilai yang berakar di masyarakat desa hutan.

Berdasarkan uraian di atas, maka kajian ilmu lingkungan dalam mendesain model pemberdayaan masyarakat sekitar hutan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan adalah memperhatikan hak-hak masyarakat sekitar hutan dan bentuk hubungan interaksi berupa nilai-nilai, norma, yang dihasilkan dan yang terjadi sebagai suatu kesatuan sub sistem yaitu masyarakat sekitar hutan dengan segala potensinya dengan lingkungannya di sekitar kawasan hutan.

### 2.1.3. Konsep Pemberdayaan Masyarakat dengan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan

#### Konsep Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan dari kata *empowerment* adalah konsep alternatif pembangunan pengentasan kemiskinan yang intinya menekankan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung/berpartisipasi, demokratis dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung (Hall, 1995 dalam Hikmat, 2004). Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum *nilai-nilai sosial*. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat *people centred, participatory, empowering, and sustainable* (Chambers, 1995). Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada tingkat individu dan sosial. Menurut Rappaport (1987) dalam Randy *et al.* (2007), pemberdayaan diartikan sebagai pemahaman secara psikologis pengaruh kontrol individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik, dan hak-haknya.

Para ilmuwan sosial dalam hal memberikan pengertian dan konsep pemberdayaan mempunyai rumusan yang berbeda-beda dalam berbagai konteks dan bidang kajian, artinya belum ada definisi yang tegas mengenai konsep tersebut. Namun demikian, bila dilihat secara luas, pemberdayaan sering disamakan dengan perolehan daya, kemampuan dan akses terhadap sumberdaya untuk memenuhi kebutuhannya.

Payne (1987), Ife (1995) dan Simon (1990), menjelaskan bahwa pemberdayaan pada hakekatnya bertujuan untuk membantu klien mendapatkan daya, kekuatan dan kemampuan kepada pihak yang kurang berdaya untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri klien tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Pemberdayaan adalah makna-makna yang harus sesuai dengan pendelegasian kekuasaan atau kekuatan sesuai potensi yang dimiliki masyarakat. Robinson

(1994) berpendapat bahwa pemberdayaan adalah suatu proses *pribadi dan sosial*; suatu pembebasan kemampuan pribadi, kompetensi, kreativitas dan kebebasan bertindak.

Perkin & Zimmerman (1995) dalam Randy *et al.* (2007), mendefinisikan pemberdayaan sebagai suatu proses sengaja yang berkelanjutan, berpusat pada masyarakat lokal, dan melibatkan prinsip saling menghormati, refleksi kritis, keperdulian, dan partisipasi kelompok, dan melalui proses tersebut orang-orang yang kurang memiliki bagian yang setara akan sumber daya berharga memperoleh akses yang lebih besar dan memiliki kendali atas sumber daya tersebut.

Menurut Deni (2005) keberhasilan program dapat dilihat dari tercapainya masyarakat yang berdaya, yaitu masyarakat yang mempunyai ciri-ciri: mampu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dan merumuskan serta menetapkan prioritasnya; mampu merumuskan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut; mampu mengorganisasi diri, sebagai salah cara penanggulangan secara bersama; mampu mengembangkan aturan main, nilai, norma yang disusun, disepakati serta dipatuhi bersama dan mampu memperluas kerjasama serta kemitraan yang setara.

Berdasarkan beberapa pengertian dan defenisi pemberdayaan tersebut, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pada hakekatnya pemberdayaan masarakat adalah suatu proses dan upaya yang berkelanjutan membuat masyarakat dapat berdaya secara mandiri, yaitu mampu mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahannya dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya dan potensi modal yang dimiliki sebaik mungkin, sehingga masyarakat pada akhirnya memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, sosial dan ekologi. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi masyarakat, tetapi juga harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya, terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat, sebagai suatu pelestarian dan pengayaan modal sosial masyarakat.



Oleh karena itu tujuan akhir pemberdayaan masyarakat adalah manusia yang berdaya, yaitu manusia yang mampu menjalankan harkat dan martabatnya sebagai manusia, merdeka dalam bertindak, menjadikan nilai-nilai luhur kemanusiaan sebagai kontrol sikap perilakunya. Wujud hakikat keberdayaan adalah kepedulian, kebersamaan, kejujuran, kepercayaan, bertindak adil, altruisme, tidak mementingkan diri sendiri dan sifat baiknya, tidak merusak dirinya, orang lain dan lingkungannya, tapi berguna bagi hidupnya sendiri dan bermanfaat bagi lingkungannya. Dengan demikian terlihat hakikat keberdayaan adalah sesungguhnya mempunyai indikator sama dengan modal sosial.

### **Proses Pemberdayaan Masyarakat**

United Nations (1956:83-92) dalam Dunham (1994) mengemukakan beberapa hal yang harus dilakukan dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah mengetahui seluruh informasi dan karakteristik setempat (lokal) yang akan diberdayakan; memperhitungkan faktor *local leaders*; mendorong agar masyarakat sadar punya masalah yang perlu dipecahkan; merangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya; membantu masyarakat mengidentifikasi permasalahan; membantu rasa percaya diri masyarakat; membantu masyarakat menetapkan suatu program; membuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatan-kekuatan dan sumber-sumber; membantu masyarakat untuk bekerja berkesinambungan memecahkan masalahnya; dan meningkatkan kemandirian masyarakat untuk menolong dirinya sendiri secara swadaya.

Menurut Rojek, 1996 (dalam Hikmat, 2004:14), Faktor-faktor determinan yang mempengaruhi proses pemberdayaan adalah antara lain: (a) perubahan sistem sosial yang diperlukan sebelum pemberdayaan; (b) Sistem dan **kemampuan/potensi modal sosial** yang menjadi landasan dalam mengawal pemberdayaan dan inheren dalam pelaksanaan strategi pemberdayaan, tahap konsientisasi, serta proses pemecahan masalah sampai pada terbentuknya aktualisasi diri dan ko-aktualisasi komunitas (Allyn & Bacon, 1996 dalam Dubois & Miley, 1996).

Menurut Kartasamita (1997), dalam proses pemberdayaan, upaya yang berkembang dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu: (1) menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang; (2) memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat; (3) memberdaya mengandung arti melindungi, mencegah yang lemah bertambah lemah karena kurang-berdayaannya dalam hal menghadapi yang kuat. Upaya ini harus terarah (*targetted*), harus mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran, dan menggunakan pendekatan kelompok, karena lebih efektif daripada pendekatan individu.

Menurut Randy *et al.* 2007, pemberdayaan adalah sebuah “proses menjadi”, bukan sebuah “proses instan”. Sebagai suatu proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan sebagai berikut: Tahap pertama adalah *penyadaran*, yaitu tahap pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mempunyai “sesuatu”, dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka (bukan dari orang luar); Tahap kedua adalah *peng-kapasitas-an*, yaitu tahap “*capacity building*” yaitu memampukan atau *enabling*. Untuk diberikan daya atau kuasa, yang bersangkutan harus mampu terlebih dahulu. Proses *capacity building* terdiri atas tiga jenis, yaitu: manusia, organisasi dan sistem nilai. dan Tahap ketiga pemberdayaan adalah pemberian daya itu sendiri, atau *empowerment*, yaitu pemberian daya, kekuasaan, otoritas atau peluang. Pemberian daya ini disesuaikan dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki. Pada tahap ini cukup sederhana, namun sering kali tidak cakap menjalankannya karena mengabaikan kesederhanaannya pada ukuran. Pokok gagasannya adalah proses pemberian daya atau kekuasaan sesuai dengan kecakapan penerima.

Dalam proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pendekatan-pendekatan praktis yang sangat dibutuhkan (Bambang & Emilians, 2003), adalah Partisipasi, *Partnership*, Jaringan Kerja, Menghargai Proses. Menurut Budiman (2003), pemberdayaan masyarakat yang terkait dengan pengentasan kemiskinan merupakan proses pembangunan menyeluruh dan diperlukan pentahapan, pencapaian indikator keberhasilan, dan karakter mandiri, berlanjut, partisipatif dan integratif dalam pembangunan.

Sedang menurut Mulyadi & David (2008), syarat berlangsungnya proses pemberdayaan adalah: (1) Anggota masyarakat harus memiliki “rasa kemasyarakatan” (*sense of community*) dan mereka aktif berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat; dan (2) Partisipasi warga, yaitu suatu proses dimana tiap individu ikut ambil bagian dalam proses pengambilan keputusan dalam lembaga, program, dan lingkungan.

Proses pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat menjadikan masyarakat menjadi lebih berdaya berkekuatan dan berkemampuan. Sumarjo (1999) menyebutkan bahwa masyarakat yang ciri-ciri berdaya sebagai hasil dari proses pemberdayaan adalah: (1) masyarakat yang mampu memahami diri dan potensinya, mampu merencanakan untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika ke depan; (2) masyarakat yang mampu mengarahkan dirinya sendiri; (3) masyarakat yang memiliki kekuatan untuk berunding dan memiliki *bargaining power* yang memadai dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dan (4) masyarakat yang bertanggung jawab atas tindakannya.

Suharto (2005) menyebutkan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai suatu proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk kelompok miskin. Sebagai suatu tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh suatu perubahan sosial, yaitu masyarakat berdaya, mempunyai pengetahuan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam hal melaksanakan kehidupan,

### **Ukuran Keberdayaan Masyarakat**

Menurut Phil Bartle (2007), ada enam belas (16) elemen ukuran keberdayaan masyarakat yang merupakan suatu gambaran metode untuk mengamati peningkatan kemampuan/keberdayaan masyarakat, yaitu: (1) Mendahulukan kepentingan umum; (2) Kesamaan nilai; (3) Layanan masyarakat; (4) Komunikasi;

(5) Percaya diri (6) Keterkaitan (politis dan administratif; (7) Informasi; (8) Rintangan; (9) Kepemimpinan; (10) Jaringan kerja; (11) Organisasi; (12) Kekuatan politik; (13) Keahlian; (14) Kepercayaan; (15) Keselarasan; dan (16) Kekayaan. Semakin banyak masyarakat memiliki setiap komponen ukuran elemen di atas, semakin kuat masyarakat, semakin besar daya kemampuan yang dimilikinya, dan semakin berdaya mereka. Sementara masing-masing perkiraan elemen-elemen ini adalah subyektif, setiap usaha harus dibuat untuk memastikan bahwa penggunaan tongkat pengukuran internal yang sama sebagaimana yang digunakan hari ini, setahun yang lalu dan lima tahun yang lalu.

Menurut kajian UNDP (1998), ada tiga level tentang dimensi dan tingkatan pemberdayaan yang harus dicapai dan menjadi keberhasilan oleh suatu model pemberdayaan, yaitu: (1) Pemberdayaan pada level individu, berupa pengembangan potensi dan ketrampilan; (2) Pemberdayaan pada level kelompok/organisasi, yakni yang berhubungan dengan peningkatan partisipasi kelompok dalam pembangunan; serta (3) Pemberdayaan pada level kesisteman, yakni berwujud meningkatnya kemandirian masyarakat baik secara ekonomi, sosiologis maupun politik. Adapun indikator masing-masing dimensi dan tingkatan pemberdayaan dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1. Dimensi dan Indikator Pemberdayaan Masyarakat

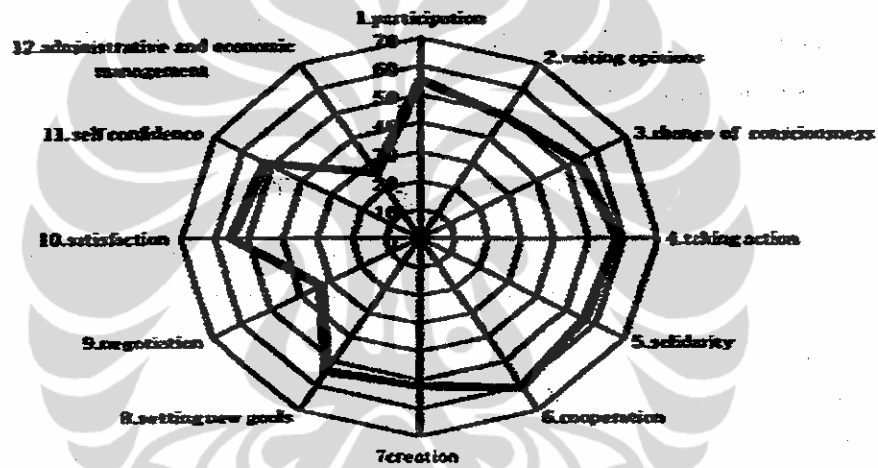
Dimensi	Indikator
<b>Level Individu:</b> Pengembangan potensi dan Ketrampilan	1. Kepemilikan aset/modal 2. Kekuatan fisik 3. Tidak terisolasi 4. Penguasaan ketrampilan 5. Keberfungsian lembaga usaha
<b>Level Kelompok/Organisasi:</b> Partisipasi dalam pembangunan	1. Perencanaan dan pengambilan keputusan 2. Pelaksanaan dan pengawasan keputusan bersama 3. Pemanfaatan hasil-hasil pembangunan
<b>Level Sistem:</b> Kemandirian masyarakat	Pengurangan ketergantungan kepada bantuan luar

Sumber: UNDP (1998)

Menurut Fujikake (2000), hasil suatu pemberdayaan masyarakat dapat dievaluasi dengan menggunakan 12 indikator. Model evaluasi pemberdayaan tersebut dinamakan model "Fujikake". Adapun ke 12 indikator tersebut adalah:

(1) Partisipasi (*participation*); (2) Mengeluarkan pendapat (*voicing opinion*); (3) Perubahan kesadaran (*change of consciousness*); (4) Melakukan aksi (*taking action*); (5) Solidaritas (*solidarity*); (6) Kerjasama (*cooperation*); (7) Penciptaan kreasi (*creation*); (8) Menentukan tujuan baru (*setting new goals*); (9) Negoisasi (*negotiation*); (10) Kepuasan (*satisfaction*); (11) Kepercayaan diri (*self confidence*); (12) Pengelolaan administrasi dan ekonomi (*administrative and economic management*).

Model "Fujikake" Evaluasi pemberdayaan dengan menggunakan 12 indikator tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Source: Fujikake (2000, 2001)

Gambar 2.3. Model "Fujikake" Evaluasi Pemberdayaan dengan menggunakan 12 indikator

Evaluasi pemberdayaan model "Fujikake" adalah suatu model evaluasi yang sudah diverifikasi oleh Komite "Improving Research Method and Empowerment Indicator Classification" JICA yang menegaskan bahwa model ini mempunyai validitas, reliabilitas (konsistensi internal dan reproduktivitas yang tinggi) dan dapat diterapkan untuk proyek-proyek pemberdayaan serupa (Social Development Cooperation Departememnt, JICA 2008 dalam Fujikake, 2008). Dengan demikian peneliti meyakini bahwa 12 indikator tersebut dapat digunakan dalam penelitian ini untuk mengevaluasi kondisi *existing* pemberdayaan masyarakat

sekitar hutan untuk klasifikasi keberdayaan masyarakat yang kemudian juga digunakan sebagai dasar klasifikasi tingkat kemajuan masyarakat sekitar hutan.

### **Pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan**

Zamzami (2005) dalam penelitiannya tentang Konsepsi dan Nilai Budaya Lokal terhadap Pelestarian hutan di Kawasan Hutan di Nagari Situjuan Gadang Sumatera Barat, dilakukan dengan metode etnologi, bahwa untuk model pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam pelestarian hutan, maka perlu memahami konsepsi-konsepsi masyarakat sekitar kawasan hutan tentang hutan itu sendiri; perlu memahami wujud tindakan dalam pembukaan, pengelolaan dan pemanfaatan hutan serta perlu memahami efek pola tindakan yang dilakukan terhadap lingkungan.

Menurut Posman (2007) dalam penelitiannya, tentang pemberdayaan masyarakat asli sekitar hutan di Desa Malinau Kalimantan Timur, yang memfokuskan pada permasalahan kerusakan hutan dan akibat yang ditimbulkan dikarenakan faktor kemiskinan masyarakat sekitar hutan, model pemberdayaan masyarakat yang dilakukan untuk mengurangi kemiskinan masyarakat sekitar hutan adalah dengan menyertakan masyarakat sekitar hutan dalam perencanaan pengelolaan hutan lestari dengan metode *Participatory Action Research* (PAR).

Menurut Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), 2005, model pemberdayaan masyarakat sekitar hutan yang telah dilakukan oleh perusahaan di kehutanan adalah mengacu pola *community development* (konteks sosial lingkungan) yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif. Model yang digunakan merupakan model sosial yang fleksibel dan dinamis, sehingga apabila terjadi perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat karena perkembangan dinamika sosial, maka perubahan model berupa penyesuaian sesuai dinamika yang terjadi. Model Pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan ialah dengan pemberian saham koperasi, bantuan beasiswa dan pendidikan, bantuan dana koperasi, pemberian *fee*

kubikasi produksi, pemberian kesempatan pengusahaan hutan, pelatihan manajemen dan pelatihan konflik sosial.

Friedman (1992) mengemukakan pendapat mengenai pengentasan kemiskinan atau ketidak berdayaan melalui pemberdayaan, bahwa model pemberdayaan dalam pembangunan adalah mengembalikan 3 daya, yaitu: daya sosial, daya politik, dan daya psikologis, yang telah dirampas. Sedang Departemen Sosial dalam penelitiannya tentang Model pemberdayaan keluarga menerapkan dan mengembangkan 2 variabel yaitu: variabel sosial dan variabel ekonomi.

Hikmat (2004) menjelaskan bahwa dalam suatu sistem model pemberdayaan masyarakat, terdapat suatu masyarakat yang tidak berdaya, kemudian melalui proses pemberdayaan untuk menjadikan masyarakat berdaya. Dalam model pemberdayaan tersebut ada kondisi sebelumnya yang harus dilakukan sebagai *Pre-Existing condition* dan strategi pemberdayaan sebagai input dalam proses pemberdayaan yang mencari pemecahan masalah melalui dialog, penemuan dan pengembangan yang pada akhirnya mengeluarkan *ouput dan outcomes* yang menghasilkan keberdayaan masyarakat yang mampu mengaktualisasikan diri dengan kemandiriannya.

Penelitian Renoati (2001) tentang program pemberdayaan yang berkelanjutan dalam rangka menyongsong otonomi daerah di Kabupaten Sleman memberi kesimpulan bahwa: (1) Model yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat desa yang berkelanjutan dalam rangka menyongsong otonomi daerah di Kabupaten Sleman adalah Model *bottom up* yang menekankan pada prinsip keterlibatan masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. dan (2) Faktor yang berkaitan dengan kebijakan program pemberdayaan masyarakat desa yang berkelanjutan adalah: kesesuaian antara jenis kegiatan dengan kondisi kelompok masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan; pemilihan pemimpin terutama pemimpin informal; metode dan materi pembinaan; Jangka waktu dan efektivitas pembinaan.

Hasil penelitian Setiowati (2006) tentang analisis pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam di Kecamatan

Tepus Tanjungsari Gunung Kidul, memberi kesimpulan bahwa pemberdayaan yang dilakukan melalui introduksi sumber mata pencaharian baru (sebagai nelayan) telah membuahkan hasil yang positif, namun belum dapat menyejahterakan sebagian besar masyarakat pesisir. Setiowati merekomendasikan agar penelitian untuk mendesain model pemberdayaan masyarakat selanjutnya menekankan pada tinjauan aspek sosial budaya masyarakat setempat.

Salah satu model pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat adalah dengan pendekatan metode *Appreciative Inquiry*, yaitu metode pemberdayaan masyarakat yang mentransformasikan kapasitas sistem manusia dengan memfokuskan pada potensi atau kemampuan yang dimiliki atau pengalaman positif dan masa depan yang penuh harapan oleh individu atau organisasi untuk perubahan yang positif menjadikan hidup lebih baik (Cooperrider 2006).

Menurut Sutaryono (2008), Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan dapat dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

- (1) Pemberian asset lahan kehutanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat sekitar hutan. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi kontak langsung masyarakat sekitar hutan dengan hutan sekaligus mereduksi terjadinya pendudukan lahan, karena masyarakat sudah diberi asset terhadap lahan kehutanan yang dapat berfungsi sebagai kawasan penyangga;
- (2) Pemberian akses masyarakat terhadap kawasan hutan, baik dalam hal pemanfaatan hasil hutan, pemeliharaan dan pengawasan;
- (3) Meningkatkan ruang interaksi antara masyarakat sekitar hutan dengan lembaga yang diberi otoritas dalam pengusahaan hutan dengan semangat kesetaraan dan kemitraan;
- (4) Perluasan lapangan kerja dalam pengusahaan hutan yang memungkinkan masyarakat sekitar hutan terlibat; dan
- (5) Menggeser paradigma pengusahaan hutan dari *timber management* yang bercirikan *timber extraction* (penambangan kayu) ke dalam pengelolaan hutan berbasis *resources management* yang mengedepankan pengelolaan sumber daya hutan partisipatif terintegrasi dan berbasiskan masyarakat.



Berdasarkan beberapa model pemberdayaan yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa aspek penting dalam model pemberdayaan masyarakat adalah memasukkan variabel strategi pemberdayaan, keterlibatan *stakeholders*, pemberdayaan harus mendukung keterlibatan kaum miskin dan kelompok yang terpinggirkan lainnya pemberdayaan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, pemberdayaan harus digali dari sumber daya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya lokal, dan pengetahuan lokal, memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan, berbagai lembaga pihak terkait terlibat, yang semuanya merupakan variabel modal sosial. Model Pemberdayaan Masyarakat membutuhkan suatu keberanian dan kemauan politik dari pemerintah pusat atau daerah untuk melakukan terobosan dan inovasi kebijakan untuk saling menciptakan bertemunya kekuatan potensi modal masyarakat dan dukungan dan strategi dari sistem kebijakan yang memadai melalui suatu paduan pendekatan *top-down initiative* dengan *bottom-up capacity*.

Riyanto (2005), menjelaskan bahwa terdapat hal-hal yang dapat menjadi masukan dalam pengelolaan hutan (Riyanto, 2005) yaitu: (1) Dalam pemberdayaan masyarakat perlu melibatkan masyarakat sekitar hutan itu sendiri dengan jalan kerjasama; (2) Dalam penetapan suatu tahapan pengelolaan hutan, perlu dilakukan secara bertahap dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan diikuti dengan kesepakatan-kesepakatan dengan masyarakat; (3) Masyarakat sekitar hutan bersama pemerintah menyusun rencana pengelolaan hutan; (4) Antara pengelola hutan dan masyarakat sekitar hutan harus berbagi peran dan tanggung jawab; (5) Perlu pendanaan yang memadai dalam pengelolaan kawasan hutan; dan (6) Peningkatan penelitian, pengetahuan dan kerjasama dalam pengembangan pengelolaan hutan. Dengan demikian melibatkan masyarakat melalui pemberdayaan dalam pengelolaan hutan adalah sesuatu yang mutlak.

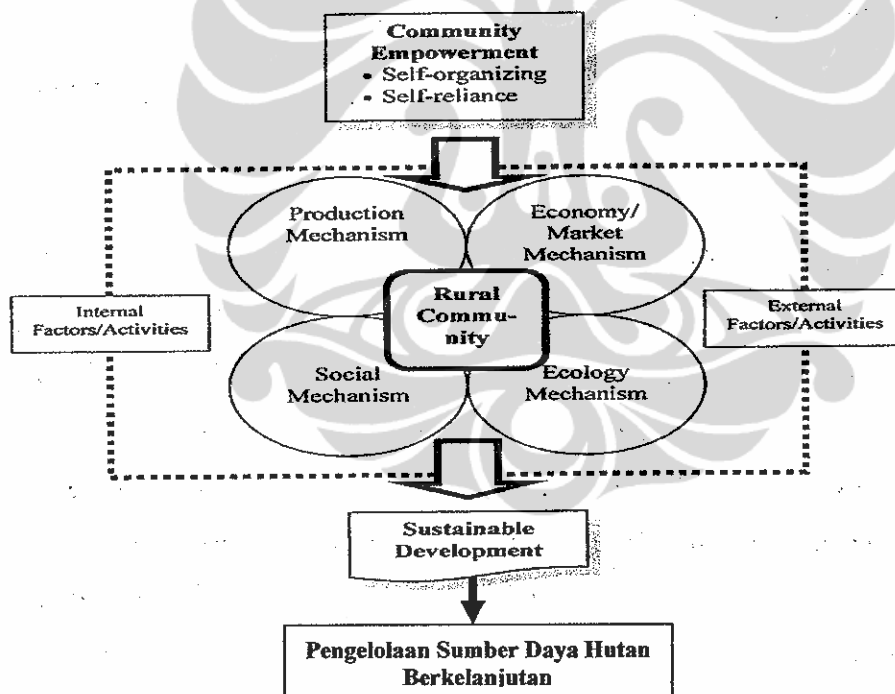
Menurut World Bank (1999) dalam Eko (2003), pembangunan pengembangan masyarakat, khususnya dalam pemberdayaan masyarakat, perlu memberikan suatu fokus perhatian terhadap peranan dan implementasi modal sosial serta kemungkinan pemanfaatan serta kontribusinya dalam proses pengentasan

kemiskinan khususnya di negara-negara berkembang. Menurutnya untuk mendapatkan hasil yang optimal suatu proses pemberdayaan seharusnya mempertimbangkan secara serius akan peran pemanfaatan dari Modal Sosial.

Bertolak dari teori-teori dan penelitian terdahulu tentang model pemberdayaan masyarakat seperti yang telah diuraikan di atas, maka perbedaan yang peneliti lakukan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah bahwa penelitian terdahulu mendesain suatu model pemberdayaan dengan bentuk suatu paket-paket program baik berupa bantuan modal, pendidikan dan pelatihan dan lain-lain, serta model pemberdayaan yang dibentuk hanya dari proses dan strategi pemberdayaan tanpa mengangkat potensi asset potensi modal sosial yang dimiliki masyarakat. Sedang penelitian ini berupaya mendesain model pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dengan memperhatikan dan memanfaatkan asset potensi modal sosial dalam rangka pengelolaan sumber daya hutan keberkelanjutan. Konsepsi pemberdayaan dapat diterapkan dalam upaya pemberdayaan pranata lokal yang kemudian dipahami sebagai modal sosial. Pranata lokal yang dikenal dalam modal sosial yang digunakan dan dimanfaatkan dalam pengelolaan sumber daya hutan justru dapat mempertahankan kelestariannya dibandingkan dengan konsep-konsep modern yang dilaksanakan.

Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan memiliki keterkaitan erat dengan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan, karena pemberdayaan merupakan suatu prasyarat utama yang dapat diibaratkan sebagai gerbong yang akan membawa masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamis. Untuk itu menurut peneliti, pemberdayaan masyarakat adalah suatu prasyarat dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Menurut *United States Departement of Agriculture (2005)*, konsep pemberdayaan masyarakat sekitar hutan adalah sebuah proses pembangunan **jejaring interaksi** dalam rangka meningkatkan kapasitas sebuah komunitas, mendukung pembangunan berkelanjutan dan pengembangan kualitas hidup masyarakat. Jejaring interaksi sangat berkaitan dengan interaksi-interaksi sosial yang kemudian dapat menguatkan modal sosial.

Subejo & Supriyanto (2004) memaknai pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal untuk merencanakan, memutuskan dan mengelola sumber daya lokal (hutan) yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial. Masyarakat sekitar hutan memiliki lingkungan strategis yang mencakup lingkungan produksi, ekonomi, sosial dan ekologi. Melalui upaya pemberdayaan, warga masyarakat sekitar hutan didorong agar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara optimal serta terlibat penuh dalam mekanisme produksi, ekonomi, sosial dan ekologinya. Secara ringkas keterkaitan antara pemberdayaan masyarakat dengan sustainable development dan pengelolaan sumberdaya hutan berkelanjutan disajikan pada Gambar 2.4.



Gambar 2.4. Proses dan Keterkaitan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan (dikembangkan dari Subejo dan Supriyanto, 2004).

Dalam hal *mekanisme produksi*, masyarakat memiliki sumber daya produksi yang antara lain mencakup lahan, ternak, modal, peralatan usaha tani serta tenaga kerja. Upaya pemberdayaan semestinya memfasilitasi dan mendorong masyarakat

pedesaan yang sebagian besar berprofesi sebagai petani untuk mampu memanfaatkan sumber daya produksi yang dimilikinya sehingga mampu memproduksi secara efisien dan menjamin pemenuhan pangan serta memperoleh surplus yang dapat dipasarkan

Terkait dengan *ekonomi*, bahwa sebenarnya telah banyak upaya untuk menciptakan institusi ekonomi (pasar) dengan maksud meningkatkan akses masyarakat terhadap pasar. Namun nampaknya kelembagaan ekonomi yang ada belum dapat sepenuhnya memberikan manfaat kepada masyarakat secara ekonomi. Menurut Sadjad (2000) bahwa selama ini program pemberdayaan masyarakat secara ekonomi masih *on farm centralism*. Mestinya pemberdayaan lebih diarahkan supaya tumbuh rekayasa agribisnis sehingga masyarakat sekitar hutan desa menjadi pelaku bisnis yang handal dan akhirnya bisa menjadi pusat bisnis masyarakat pedesaan yang mensejahterakan.

Pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan mensyaratkan adanya pengelolaan sumberdaya hutan secara bijaksana oleh masyarakat lokal. Dalam hal ini *mekanisme ekologi* mencakup aspek lingkungan sekitar yang sangat luas bagi masyarakat. Termasuk di dalamnya bagaimana masyarakat diberi kesempatan dan didorong untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya hutan secara berkesinambungan, termasuk di dalamnya fasilitas infarastruktur, hutan dan semua ekosistemnya, gunung, sungai dan lain sebagainya. Beberapa ahli banyak memberi kritik bahwa selama ini masyarakat cenderung hanya dilibatkan sebagai obyek dalam pengelolaan sumberdaya ekologi, termasuk sumber daya hutan, mereka jarang sekali dilibatkan dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya hutan (Subejo, 2004).

Terkait dengan *mekanisme sosial*, sebagian besar masyarakat di Indonesia dikenal sebagai salah satu masyarakat di dunia yang mempunyai tradisi komunitarian paling kuat (Scott, 1976). Tradisi komunitarian tersebut antara lain diwujudkan dalam bentuk *social relationship* yang kuat, masyarakat kita telah banyak berinovasi untuk menciptakan *social relationship* yang memberikan manfaat kepada masyarakatnya, yang kesemuanya menggambarkan suatu jaringan yang

spesifik dan sering disebut *social capital* (modal sosial). Modal sosial memiliki peran yang sangat penting dan positif dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Transaksi ekonomi akan berjalan efisien jika didukung dengan *social relationship* yang mantap dan kuat. Secara umum kemampuan *social relationship* di pedesaan hutan masih kuat dan mengakar termasuk kesediaan untuk saling membantu dalam pengerjaan usahatani dan pekerjaan rumah tangga lainnya. *Corporate action and function* dari pemimpin-pemimpin lokal juga masih berperan penting untuk mendukung berlangsungnya *social relationship* antar warga masyarakat yang mantap.

#### **2.1.4. Konsep Modal Sosial Sebagai Landasan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan**

Pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat akan muncul jika terdapat kesepakatan untuk memanfaatkan sumber daya hutan secara bersama. Kesepakatan ini akan terjadi karena terdapat interaksi secara regular dan berkesinambungan antara anggota masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya hutan. Menurut Grootaert dan Narayan, Deepa. (2003), salah satu hal yang terpenting adalah bahwa hasil interaksi berupa kepedulian dan aksi bersama untuk mencapai tujuan bersama hanya dimungkinkan jika sejumlah modal sosial tersedia dalam suatu komunitas. Secara etimologis modal sosial mempunyai pengertian modal yang dimiliki oleh masyarakat yang merupakan sumber daya yang ada dan tertanam di dalam struktur sosial. Dimana sumberdaya ini dapat diakses dan atau dimanfaatkan untuk tujuan tertentu, termasuk dalam pemberdayaan masyarakat. Modal sosial merupakan konsep yang sering digunakan untuk menggambarkan kapasitas sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memelihara integrasi sosial.

Dalam konteks pembangunan manusia melalui pemberdayaan masyarakat, modal sosial memiliki pengaruh yang sangat menentukan, sebagaimana Putnam *et al.* (1993), menyatakan bahwa semakin memanfaatkan potensi modal sosial sebagai landasan dasar interaksi dalam suatu proses pembangunan, maka potensi modal sosial akan semakin meningkat, dan sebaliknya jika modal sosial tidak

dimanfaatkan atau digunakan akan semakin memudar bahkan modal sosial akan semakin rusak. Karena begitu pentingnya modal sosial, maka Badaruddin (2008); Tjondronegoro (2005); Ostrom (1993), Suharto dan Yuliani, 2005; Rahadiansah, 2005), Mawardi (2007), ADB (2000), Hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) (1995), dan Djohan (2007) menyatakan bahwa pembangunan yang memanfaatkan potensi modal sosial akan menunjukkan tingkat keberhasilan yang lebih baik, sehingga modal sosial merupakan salah satu syarat penting bagi keberhasilan suatu program pembangunan (menurut peneliti termasuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan).

Konsep modal sosial dapat diterapkan untuk berbagai kebutuhan pembangunan, karena modal sosial memiliki kontribusi penting dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan. Konsep Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pembangunan sosial yang dilaksanakan di Kopenhagen 12 Maret 1995 memunculkan modal sosial sebagai kata kunci dalam agenda mengurangi kemiskinan, menciptakan angkatan kerja yang produktif, dan meningkatkan integrasi sosial. Pembangunan yang hanya berorientasi ekonomi dan politik ternyata tidak serta merta membuat kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Ide tentang modal sosial telah memberi tawaran baru bagi dunia akademis dan praktisi yang terbukti memberi kontribusi yang sangat besar terhadap negara (Raharjo, 2001).

Menurut Putnam (1995), modal sosial menjadi suatu alternatif pembangunan, sehingga modal sosial dapat merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan (menurut peneliti termasuk dalam pemberdayaan masyarakat). Modal sosial adalah sebagai suatu nilai *mutual trust* (kepercayaan) antara anggota masyarakat dan masyarakat terhadap pemimpinnya, modal sosial adalah nilai-nilai yang terbentuk dari hasil interaksi masyarakat. Modal sosial didefinisikan sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan (*networks*), norma-norma (*norms*), dan kepercayaan sosial (*social trust*) yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial (koordinasi dan kooperasi) untuk kepentingan dan tujuan bersama.

Bourdieu (1986) mendefinisikan modal sosial sebagai “sumber daya aktual dan potensial” yang dimiliki oleh seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung terus menerus dalam bentuk pengakuan dan perkenalan timbal balik yang memberikan kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif”. Bourdieu juga menegaskan tentang modal sosial sebagai suatu yang berhubungan satu dengan yang lain, baik ekonomi, budaya, maupun bentuk-bentuk modal sosial berupa institusi lokal maupun kekayaan sumber daya alam termasuk sumber daya hutan.

Coleman (1988) mendefinisikan modal sosial sebagai pengetahuan dan pengertian bersama dan pola-pola interaksi dimana sekelompok orang membawa aktivitas yang produktif. Sedangkan menurut Bardhan (1995) dalam Mefi & Hesti (2003), modal sosial dipahami pula sebagai serangkaian norma, jaringan dan organisasi dimana masyarakat mendapat akses pada kekuasaan dan sumberdaya, serta dimana pembuatan keputusan dan kebijakan dilakukan. Pemahaman Bardhan tersebut terlihat dengan jelas bagaimana modal sosial berkaitan atau menjadi dasar dalam suatu proses pemberdayaan (akses mendapat kekuasaan). Menurut Darundono, 2007, modal sosial sangat berperan dalam perbaikan kampung. Sedangkan menurut Salmah (2008), menyebutkan bahwa modal sosial perlu menjadi fokus dalam pemberdayaan untuk penataan bantaran sungai Ciliwung.

Bank Dunia (1999) mendefinisikan Modal Sosial sebagai suatu yang merujuk ke dimensi institusional, hubungan-hubungan yang tercipta, dan norma-norma yang membentuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat. Sedangkan Uphoff (1999) menjelaskan bahwa: *“social capital can be considered as an accumulation of various types of intangible social, psychological, cultural, institutional, and related assets that influence cooperative behavior”*.

Salah satu modal sosial yang sangat penting dan telah sering diangkat oleh beberapa peneliti adalah kearifan lokal dan pengetahuan lokal. Menurut Koentjaraningrat (1964) dalam BPP-PSPL (2005) kearifan lokal memiliki dimensi sosial dan budaya yang kuat, karena memang lahir dari aktivitas perlakuan

berpola manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Kearifan lokal dapat menjelma dalam berbagai bentuk seperti ide, gagasan, nilai, norma dan peraturan dalam ranah kebudayaan, sedangkan kehidupan sosial dapat berupa sistem religius, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, sistem mata pencaharian hidup dan sistem teknologi dan peralatan. Sedang pengetahuan lokal menurut Sunaryo & Joshi (2003) adalah pengetahuan yang dimiliki oleh sekelompok orang yang hidup di wilayah tertentu untuk jangka waktu yang lama.

Berdasarkan penjelasan teori di atas, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa modal sosial adalah suatu asset modal berupa nilai atau norma yang terbentuk dari hasil interaksi masyarakat suatu norma atau nilai yang terbentuk dan dipahami bersama masyarakat yang dapat memperkuat jaringan sosial yang positif, terjalinnya kerjasama yang saling menguntungkan, menumbuhkan kepedulian dan solidaritas yang tinggi dan dapat mendorong tingkat kepercayaan antara sesama dalam rangka tercapainya tujuan bersama. Modal sosial yang dimaksud adalah nilai-nilai hasil interaksi masyarakat berupa norma-norma atau nilai-nilai sosial yang telah berlangsung lama dan menjadi acuan dalam bersikap, berperilaku, berinteraksi dan berinteraksi (dalam suatu pengelolaan sumber daya hutan).

Keterkaitan modal sosial dengan ilmu lingkungan adalah terletak pada nilai-nilai hasil interaksi masyarakat dengan lingkungan sosial, lingkungan alam dan lingkungan ekonomi. Modal sosial yang lahir tersebut pasti dipengaruhi oleh lingkungannya, dan modal sosial yang lahir tersebut akan timbal balik mempengaruhi lingkungannya. Menurut Pretty dan Ward (2001), bahwa pengelolaan sumber daya alam sangat terkait dengan modal sosial kegiatan kolektif, kepercayaan, hubungan timbal balik, aturan, norma dan sanksi, dan hubungan kelembagaan. Modal sosial dapat meningkatkan pelestarian lingkungan.



Sejumlah parameter atau unsur-unsur modal sosial yang dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan sesuai dengan tujuan penelitian dan berdasarkan para pendapat para ahli adalah sebagai berikut :

### **1. Modal Sosial Kebersamaan**

Para ahli dan peneliti terdahulu yang berpendapat bahwa kebersamaan adalah unsur modal sosial adalah: Salmah, 2008; Darudono, 2007; Mawardi, 2007; Darsono, 2004; Lin & Beser, 2003; Fukuyama, 1995; Narayan & Cassidy, 2001.

Dari pendapat tersebut disimpulkan bahwa kebersamaan adalah perasaan peduli atau ikut memiliki dan perasaan menjadi bagian dari masyarakat. Modal sosial kebersamaan ini dapat diperoleh dari aksi kolektif, solidaritas, kerjasama dan toleransi. Aksi kolektif adalah aksi bersama dalam suatu masyarakat untuk mencapai tujuan bersama yang disertai dengan rasa solidaritas rasa empati setia kawan kepada sesama untuk saling memahami demi tercapainya kebersamaan. Dengan aksi kolektif dan solidaritas akan menumbuhkan kepedulian terhadap sesama, kondisi yang terkait dengan sumber kehidupan suatu kelompok masyarakat misalnya yang terkait dengan pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Solider adalah mempunyai atau memperlihatkan perasaan bersatu, rasa setia kawan. Kerjasama adalah perasaan peduli atau ikut memiliki dan perasaan menjadi bagian dari sebuah komunitas. Sedang toleransi adalah suatu sikap menghargai pendapat orang lain yang merupakan salah satu kewajiban moral yang harus dilakukan oleh setiap orang ketika berada atau hidup bersama orang lain. Memberi kesempatan kepada orang lain untuk berbicara dan bersikap atau mempunyai kepentingan yang berada dan bertentangan.

Kebersamaan akan melahirkan nilai-nilai dan norma-norma dalam bersikap, berperilaku, berinteraksi dan berinteraksi, sehingga dari ilmu lingkungan, maka modal sosial kebersamaan adalah berkaitan dengan kisi lingkungan yang bersifat harmoni (keseimbangan). Kebersamaan itu timbul karena adanya hasil interaksi yang cukup lama antara manusia dengan lingkungannya dimana ia berada mencari kehidupan. Harmoni atau keseimbangan itu terjaga karena ada upaya adaptasi

yang cukup baik dengan ekologi lingkungannya, baik lingkungan alam, lingkungan binaan atau lingkungan ekonomi. Kebersamaan itu adalah suatu nilai intrinsik yang terbentuk setelah ada bentuk-bentuk kesepakatan dalam kehidupan bersama dengan lingkungannya. Nilai intrinsik tersebut dapat bersifat kekeluargaan, kerjasama, gotong royong dan lain-lain. Dengan kebersamaan manusia dapat bekerjasama memperoleh keuntungan ekonomi yang lebih baik, dengan kebersamaan manusia dapat memperoleh keuntungan lingkungan dan keuntungan lingkungan sosial yang lebih baik. Terjadi keseimbangan ekosistem antara kesejahteraan manusia dan keberlangsungan kehidupan lingkungan (Kates *et al*, 2001).

Menurut Sulasmi (2003), modal sosial kebersamaan sangat berpengaruh pada sinergitas kerja lembaga/organisasi. Kebersamaan akan mendorong terbentuknya suatu kelembagaan, memperkuat nilai-nilai, norma, adat dan budaya serta kearifan dan pengetahuan lingkungan yang tentu saja menurut peneliti karena modal sosial ini adalah modal sosial masyarakat sekitar hutan, maka tentu saja akan terkait langsung dengan lingkungan ekologi hutan yang menjadi sumber nafkah masyarakat sekitar hutan.

## 2. Kepercayaan

Para ahli dan peneliti terdahulu yang berpendapat bahwa kepercayaan merupakan unsur modal sosial adalah: Badaruddin, 2008; Teguh, 2008; Suharto, 2005; Grootaert and Baster, 2002; Lubis, 2002; Fukuyama, 2002; Narayan & Cassidy, 2001; Cohen & Pusak, 2001; Putnam, 1995; Ridel, 1997; Spellerberg, 1997; Coleman, 1988; Cox, 1997; Collier, 1998; Ostrom, 1993;

Dari rangkuman pendapat tersebut disimpulkan bahwa kepercayaan adalah hubungan sosial yang dibangun atas dasar rasa percaya dan rasa memiliki bersama. Kepercayaan adalah harapan dan keyakinan (akan kejujuran dan kebaikan) yang tumbuh di dalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur, transparan dan kerjasama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama; Kepercayaan dapat membuat dan memungkinkan transaksi

ekonomi menjadi lebih efisien dengan memberikan kemungkinan bagi pihak-pihak terkait untuk dapat (1) mengakses informasi lebih banyak, (2) memungkinkan mereka untuk saling berkoordinasi untuk kepentingan bersama, dan (3) dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan *opportunistic behavior* melalui transaksi yang terjadi berulang-ulang dalam rentang waktu yang panjang. Dengan kepercayaan dan saling percaya dalam suatu jaringan sosial, maka akan mendorong untuk meningkatkan kelembagaan sosial yang kokoh, kesatuan, kekuatan dan keberdayaan masyarakat. Menurut ABS Australia (2004), indikator kepercayaan dapat dilihat pada kepercayaan secara umum terhadap sesama, kepercayaan terhadap institusi, kepercayaan terhadap kejujuran dan akuntabilitas, kepercayaan terhadap keamanan.

Modal sosial kepercayaan akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana seseorang dalam bersikap, berperilaku, berinteraksi dan berinteraksi terhadap sesamanya dan lingkungannya. Sehingga dari sudut ilmu lingkungan, kepercayaan dapat dinilai dari sudut kekuatan yang membentuk jaringan kehidupan, kelembagaan, dan memelihara keseimbangan kehidupan dalam ekosistem lingkungan. Dikembangkan dari pendapat Fukuyama (1995) bahwa dengan hadirnya kepercayaan atau saling percaya antara anggota masyarakat dan masyarakat dengan pimpinan masyarakat, antara masyarakat dengan pengelola hutan, atau bentuk-bentuk nilai-nilai kepercayaan antara masyarakat dengan lingkungannya, akan menimbulkan kekuatan kerjasama dan saling peduli yang selanjutnya berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat, lingkungan sosial semakin baik, dan tentu saja akan berdampak pada perbaikan lingkungan alam, karena alam (hutan) adalah tempat tinggal dan sebagai sumber kehidupan masyarakat sekitar hutan. Dengan semakin baiknya ketiga sistem lingkungan tersebut, maka akan terjadi suatu kehidupan yang berkelanjutan.

### **3. Jaringan sosial dan Dukungan timbal balik/*Reciprocity***

Para ahli dan peneliti terdahulu yang berpendapat bahwa jaringan sosial dan dukungan timbal balik merupakan unsur pembentuk modal sosial adalah: Teguh,

2008; Salmah, 2008; Darundono, 2007; Grootaert, 2003; Fukuyama, 2002; Woolcock, 2001; Ridell, 1997; Fukuyama, 1995; Ridell, 1997

Dari pendapat ahli tersebut, bahwa jaringan sosial terbentuk berdasarkan kepentingan atau keterkaitan individu secara prinsip atau pemikiran (kerelaan, kekerabatan, keterbukaan, motivasi, keaktifan). Jaringan memfasilitasi terjadinya hubungan komunikasi, interaksi dan interalasi, yang memungkinkan terjadinya kepercayaan dan memperkuat kerjasama. Jaringan sosial yang erat akan memperkuat perasaan kerjasama para anggotanya, memperkuat hubungan sosial dan tanggung jawab sosial, serta manfaat-manfaat dari partisipasinya. *Reciprocity* adalah suatu hubungan antar dua pihak yang saling menguntungkan saling memberi dan saling menerima. Menurut ABS Australia 2004, *Reciprocity* ini dapat dilihat pada indikator persepsi masyarakat terhadap keinginan untuk berbagi waktu, proporsi untuk berbagi dan bertanggung jawab dalam masyarakat. *Reciprositas* adalah Hubungan yang bersifat saling berbalasan kebaikan antara individu dalam suatu kelompok atau antar kelompok itu sendiri. *Resiprositas* yang kuat akan melahirkan suatu masyarakat yang lebih mudah membangun diri, dan mempunyai keuntungan lain yang mengagumkan untuk meningkatkan kemampuan dan keberdayaan masyarakat.

Dari sudut ilmu lingkungan, jaringan sosial dan dukungan timbal balik ini akan terkait dengan nilai intrinsik saling memberi dan saling menerima yang kemudian terkait kisi lingkungan saling ketergantungan satu sama lain. Dalam suatu ekosistem akan terjadi suatu saling keterkaitan dan kebergantungan satu sama lain. Jika salah satu unsur sistem terkecil terganggu dalam keterkaitan dan kebergantungan dalam jaringan tersebut, maka keseimbangan ekosistem akan terganggu, baik lingkungan alam, lingkungan binaan ataupun lingkungan buatan. Jaringan sosial yang kuat akan menjadi penentu bagi keberlangsungan fungsi ekonomi, keberlangsungan sosial dan keberlangsungan ekologi (dikembangkan dari Fukuyama, 1995).

#### 4. Keterlibatan/partisipasi

Para ahli dan peneliti yang berpendapat bahwa keterlibatan/partisipasi adalah unsur modal sosial adalah: Teguh, 2008; Woolcock, 1998; Fukuyama, 1995.

Dari pendapat tersebut, disimpulkan bahwa keterlibatan/partisipasi adalah kesadaran dalam diri seseorang untuk ikut terlibat dalam berbagai hal yang berkaitan dengan diri dan lingkungannya. Terlibat dalam aktivitas organisasi dalam jaringan hubungan sosial (keinginan berbagi, frekuensi mengikuti, jumlah organisasi, partisipasi). Partisipasi didasarkan atas prinsip kesukarelaan, kesamaan, kebebasan dan keadaban. Partisipasi ini dimanfaatkan untuk peningkatan kekuatan keberdayaan kelompok masyarakat. Partisipasi bisa dalam bentuk kegiatan sosial, organisasi, dan keagamaan. Kemampuan berpartisipasi akan memberi pengaruh yang sangat kuat dalam suatu peningkatan kekuatan hidup dan keberdayaan suatu kelompok masyarakat. Partisipasi/keterlibatan masyarakat adalah bentuk aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan individu dan sosialnya. Keterlibatan biasanya dalam bentuk partisipasi kegiatan aktivitas dalam organisasi kelembagaan masyarakat, aktivitas dalam pertemuan kelompok perkumpulan warga, peran serta dalam forum pertemuan, aktivitas dalam kegiatan sosial, aktivitas dalam pengelolaan hutan, aktivitas dalam pengamanan wilayah, aktivitas keagamaan dan aktivitas dalam mengajak warga untuk terlibat dalam kegiatan sosial.

Ditinjau dari ilmu lingkungan, maka keterlibatan/partisipasi adalah terkait dengan kisi lingkungan saling interaksi dan saling ketergantungan satu sama lain. Dengan keterlibatan/partisipasi tersebut, masyarakat merasa ada kebutuhan untuk saling berinteraksi, rasa tersebut timbul karena ada ketergantungan, rasa ketergantungan timbul karena ada rasa peduli, merasa saling membutuhkan. Keterlibatan/partisipasi tersebut dapat memberikan keuntungan ekonomi, sosial dan lingkungan (dikembangkan dari Fukuyama, 1995). Hal tersebut juga dapat dirasionalkan oleh Barbara et al. (1997) yang mengatakan bahwa pengelolaan hutan yang baik dan berkelanjutan adalah adanya keterlibatan atau keikutsertaan yang adil dan bijak oleh semua pihak yang berkepentingan.

## 5. Kelembagaan

Para ahli dan peneliti sebelumnya yang berpendapat bahwa kelembagaan adalah unsur modal sosial adalah : Iwanto & Subejo, 2004; Grootaert, 2003; Grootaert and Baster, 2002; Woolcock, 2001.

Dari hasil pendapat tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa kelembagaan termasuk struktur, pengambilan keputusan, hubungan antara kelembagaan, jaringan kelembagaan dan ketaatan kelembagaan. Kelembagaan adalah perihal yang bersifat ikatan atau organisasi pola perilaku yang mapan yang terjadi atas interaksi sosial berstruktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Kelembagaan dapat juga merupakan suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat yang dapat menentukan bentuk hubungan antara manusia atau antara organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik aturan formal maupun informal untuk pengendalian perilaku sosial serta insentif untuk bekerjasama mencapai tujuan bersama.

Dari tinjauan ilmu lingkungan, maka kelembagaan akan sangat terkait dengan kisi lingkungan ketergantungan. Dalam suatu masyarakat yang mempunyai kebersamaan, kepercayaan dan jaringan yang baik akan mempunyai tujuan bersama yang kuat, kemudian saling berinteraksi membentuk pola-pola hubungan yang kemudian melembaga dan membentuk suatu kelembagaan. Dalam kelembagaan pengelolaan sumber daya hutan, maka pola-pola yang terbentuk tersebut adalah pola-pola yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya hutan. Kelembagaan akan mempermudah tercapainya suatu pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Kelembagaan yang kuat akan meningkatkan hasil pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan melalui penurunan biaya, tindakan kolektif, peningkatan saluran informasi, peningkatan kerjasama, pemantauan dan perbaikan penegakan hukum, sehingga selanjutnya degradasi hutan semakin berkurang (dikembangkan dari Claridge, T 2002;). Kelembagaan akan mempengaruhi tindakan kolektif dalam pengelolaan sumber daya hutan

(dikembangkan dari Anderson et al dalam Clardge, T 2002). Selanjutnya dikembangkan dari Prestty dan Ward (2001) dalam Claridge, T (2002) mengidentifikasi bahwa kelembagaan mampu mengontrol kelompok-kelompok lokal dengan aturan dan sanksi sehingga dapat berbuat lebih banyak untuk pengelolaan sumber daya alam (hutan) berkelanjutan.

## 6. Kepemimpinan sosial.

Para ahli dan peneliti terdahulu yang berpendapat bahwa kepemimpinan sosial adalah merupakan unsur modal sosial adalah: (Fukuyama, 1995); (Faizal, 2010); Darudono (2007).

Kepemimpinan sosial terbentuk dari kesamaan visi, hubungan personal keagamaan. Seluruh kepemimpinan sosial muncul dari proses demokrasi. Kepemimpinan sosial adalah suatu proses mempengaruhi antara pemimpin dengan yang dipimpin dalam sebuah organisasi atau lembaga kemasyarakatan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kepemimpinan sosial menjadi panutan dalam masyarakat, nilai dan norma-norma yang menjadi perilaku pemimpin sosial adalah nilai dan norma-norma yang menjadi keteladanan masyarakat yang dipimpinnya. Sehingga dengan kepemimpinan yang melekat pada dirinya akan membentuk suatu panutan komando untuk memperkuat kebersamaan, kepercayaan, jaringan sosial dan dukungan timbal balik, partisipasi, kelembagaan, norma adat dan nilai budaya serta kearifan dan pengetahuan lokal. Sehingga dengan kepemimpinan sosial yang kuat akan lebih mudah melaksanakan program-program keberlanjutan.

Ditinjau dari ilmu lingkungan, maka modal sosial kepemimpinan sosial dapat dikaitkan dengan kisi lingkungan harmoni. Dengan kepemimpinan sosial yang kuat, harmoni lingkungan dapat diciptakan, sehingga tujuan bersama dapat tercapai. Kepemimpinan sosial dengan nilai sikap dan perilaku yang baik terhadap lingkungan, tentu saja akan memberi pengaruh pada para anggotanya untuk bersikap dan berperilaku yang sama.

## 7. Norma, Adat dan Nilai-nilai budaya

Para ahli dan peneliti terdahulu yang berpendapat bahwa norma, adat dan nilai budaya merupakan unsur modal sosial adalah: Teguh, 2008; Suharto, 2005; Grootaert, 2003; Fukuyama, 2002 dan 1995; Narayan and Cassidy, 2001; Woolcock, 2001; Collier, 1998; Spellerberg, 1997; Ridel, 1997; Coleman, 1988.

Ada banyak adat nilai dan kultur yang masih terpelihara erat dalam lingkungan kita dan dijunjung tinggi sebagai suatu modal yang menjunjung tinggi kebersamaan, kerjasama dan hubungan sosial dalam masyarakat. Nilai yang turun temurun menjadi nilai yang berlaku dalam kehidupan dan pemanfaatan sumber daya hutan. Norma adalah sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu entitas tertentu. Norma terdiri dari pemahaman-pemahaman, nilai-nilai, harapan-harapan dan tujuan-tujuan yang diyakini dan dijalankan bersama oleh sekelompok orang. Norma-norma dapat bersumber dari agama, panduan moral, maupun standar-standar sekuler seperti kode etik profesional. Norma-norma dibangun dan berkembang berdasarkan sejarah kerjasama di masa lalu dan diterapkan untuk mendukung iklim kerjasama (Putnam, 2002; Fukuyama, 2002). Norma-norma dapat merupakan prakondisi maupun produk dari kepercayaan sosial untuk dapat menekan entitas sosial berperilaku dengan cara tertentu dan bertanggung jawab (Richard Dudley, 2004). Norma-norma sosial akan sangat berperan dalam mengontrol perilaku yang tumbuh dalam masyarakat dan perilaku yang diharapkan dalam konteks hubungan sosial yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan.

Dari itu lingkungan, norma, nilai dan adat budaya adalah merupakan pengatur perilaku masyarakat (Coleman, 1990) yang dapat memberi gambaran keterkaitan dengan etika lingkungan yang mengarahkan pada tanggung jawab kolektif dalam suatu lingkungan. Dengan norma, nilai, adat dan budaya, lingkungan sosial akan semakin baik, dan kemudian akan mempengaruhi lingkungan alam dan lingkungan ekonomi.



## 8. Kearifan lokal dan pengetahuan lokal

Para ahli dan peneliti terdahulu yang berpendapat bahwa kearifan dan pengetahuan lokal merupakan unsur modal sosial adalah: Darudono, 2007; Mawardi, 2007; Iwanto & Subejo, 2004; Grooetart, 2003; Woolcock, 2001; Sunaryo dan Joshi, 2003; Fukuyama, 1995; Koentjaraningrat, 1964.

Kearifan dan pengetahuan lokal adalah merupakan pengetahuan yang berkembang dalam komunitas sebagai pendukung nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Kearifan lokal merupakan pengetahuan secara turun temurun yang dimiliki oleh masyarakat lokal sebagai hasil adaptasi terhadap lingkungannya dalam pengelolaan hutan. Sedang pengetahuan lokal adalah pengetahuan yang dimiliki oleh sekelompok orang yang hidup di wilayah tertentu untuk jangka waktu lama (Sunaryo dan Joshi, 2003). Menurut Zakaria (1994) Kearifan lokal dan pengetahuan lokal mencakup sejumlah pengetahuan kebudayaan yang berkaitan dengan model-model pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hutan secara lestari.

Menurut Fukuyama (1995), Colleta (2000), Dasgupta (1997), Grootaert & Baster (2001), Narayan dan Pritchett, 1999 & La Porta, 1999, dalam Abu Sufian dan Anizah, 2004, dalam suatu proses kehidupan sosial bermasyarakat, modal sosial sangat bermanfaat untuk: (1) menjadi kekuatan masyarakat supaya masyarakat tidak bergantung dan dapat mengelola kepentingannya sendiri (penguatan otonomi); (2) modal sosial membantu masyarakat mampu mengelola resiko sosial; (3) membangun kesadaran kelompok sehingga orang merasa menjadi bagian dari masyarakatnya sehingga dapat menemukan identitas asli dari masyarakat sendiri; (4) membantu masyarakat tidak kaku dalam menghadapi dinamika kehidupan; (5) membantu elemen-elemen masyarakat saling membantu dan mengelola resiko, yang didasarkan pada hubungan sosial informal dan formal; (6) membangun dan mengembangkan budaya demokratis, karena dalam proses pembangunan berprinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat; (7) mengatur dan mengelola komunitas sendiri dengan memanfaatkan nilai-nilai lokal yang ada; (8) menjadi lem perekat masyarakat yang dimaknai sebagai

koherensi internal sosial-budaya dalam masyarakat, (9) memberikan kemudahan dalam mengakses informasi bagi anggota komunitas, (10) menjadi power sharing atau pembagian kekuasaan dalam komunitas, (11) mengembangkan solidaritas, (12) memungkinkan untuk memobilisasi sumber daya, (13) memungkinkan pencapaian tujuan bersama, dan (14) membentuk perilaku kebersamaan dan berorganisasi komunitas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Fukuyama menjelaskan bahwa fungsi dan peran modal sosial adalah: (1) membentuk solidaritas sosial masyarakat dengan pilar kekuasaan ; (2) membangun partisipasi masyarakat; (3) menyeimbangkan hubungan sosial dalam masyarakat; (4) sebagai pilar demokrasi; (5) agar masyarakat mempunyai *bargaining position* (posisi tawar) dengan pemerintah; (6) membangkitkan keswadayaan dan keswasembadaan ekonomi; (7) sebagai bagian dari mekanisme manajemen konflik; (8) menyelesaikan konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat; (9) memelihara dan membangun integrasi sosial dalam masyarakat yang rawan konflik; (10) memulihkan masyarakat akibat konflik, yaitu guna menciptakan dan memfasilitasi proses rekonsiliasi dalam masyarakat pasca konflik; (11) mencegah disintegrasi sosial yang mungkin lahir karena potensi konflik sosial tidak dikelola secara optimal sehingga meletus menjadi konflik kekerasan; (12) modal sosial yang berasal dari hubungan individu dan kelompok bisa menghasilkan trust, norma pertukaran, serta civic; (13) menjadi perekat sosial yang mampu mencegah konflik kekerasan. Modal sosial kebersamaan, solidaritas, toleransi, kerjasama, kemampuan berempati adalah modal sosial yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Hilangnya modal sosial tersebut dapat dipastikan kesatuan masyarakat, Bangsa dan Negara akan terancam, atau paling tidak masalah kolektif akan sulit diselesaikan.

Demikian juga Djameluddin Ancok (2003), menguraikan tentang manfaat-manfaat dari modal sosial bagi masyarakat, organisasi dan individu, yang merupakan kajian berbagai pustaka sebagai berikut:

- a) Manfaat pada masyarakat: Modal sosial “kepercayaan” berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi (Fukuyama, 1995), pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat akan membaik seiring dengan hadirnya modal sosial hubungan

yang erat antara anggota masyarakat dan adanya kepemimpinan yang jujur dan egaliter, adanya saling percaya dan kerjasama diantara unsur masyarakat (Putnam, 1993).

- b) Manfaat pada organisasi: Menurut Sulasmi (2003), modal sosial semangat kerjasama, rasa saling percaya, berkorelasi dengan intensitas kerjasama yang selanjutnya akan mempengaruhi kualitas sinergi kerja organisasi. Sedang menurut Tjakraatmaja (2002), terbentuknya sebuah organisasi pembelajar berkorelasi dengan kehadiran rasa saling percaya dan kemauan belajar bersama. Sebuah organisasi yang memiliki anggota yang cerdas belum tentu akan menjadi organisasi yang cerdas. Anggota organisasi yang cerdas tapi tidak memiliki kemampuan bersinergi dan bekerjasama dengan orang lain tidak akan memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi.
- c) Manfaat pada individu: Individu yang memiliki modal sosial yang tinggi ternyata lebih maju dalam karir jika dibandingkan dengan individu yang modal sosialnya rendah. Kompensasi yang diperoleh pekerja juga dipengaruhi oleh modal sosial yang dimilikinya (Burt 1997). Demikian pula suksesnya seseorang di dalam memperoleh pekerjaan juga dipengaruhi oleh modal sosial yang dimilikinya (Lin Dumin, 1996).

Menurut Lasser (2000), modal sosial sangat penting bagi komunitas karena:

- (1) memberikan kemudahan dalam mengakses informasi bagi anggota komunitas;
- (2) menjadi power sharing atau pembagian kekuasaan dalam komunitas;
- (3) mengembangkan solidaritas;
- (4) memungkinkan mobilisasi sumber daya komunitas;
- (5) memungkinkan pencapaian tujuan bersama; dan
- (6) membentuk perilaku kebersamaan dan berorganisasi komunitas.

Claridge (2004), telah mencoba melakukan kajian literatur terhadap beberapa studi empiris dari beberapa penelitian dan menyimpulkan bahwa modal sosial sangat berperan penting dan bermanfaat bagi hasil sosial ekonomi, kinerja bisnis dan produksi, stabilitas demokrasi, penurunan kriminalitas, peningkatan efektivitas lembaga-lembaga masyarakat dan pemerintah, variabel pendidikan, kesehatan masyarakat, yang menurut peneliti pada hakikatnya pemberdayaan masyarakat adalah sama dengan unsur modal sosial.

Selain tersebut di atas, menurut World Bank (2006), Fatchamps dan Minten (1999) dalam Syahyuti (2008), terdapat bukti bahwa modal sosial juga berpengaruh pada sistem ekonomi dan sistem bisnis. Pengukuran modal sosial memperlihatkan tumbuhnya nilai tambah secara signifikan di atas kepemilikan sarana, kapital tenaga kerja, *human capital*, dan ketrampilan manajemen. Modal sosial juga mampu membangkitkan kemitraan sebagai salah bentuk yang diidealkan dalam kegiatan ekonomi.

Dalam konteks pengelolaan sumber daya hutan, menurut Nurjaya (2008), modal sosial harus dimanfaatkan, diperhitungkan, didayagunakan dan diakomodasikan. Sedang menurut Djainal Abidin Simanjutak (2008), modal sosial sangat penting dan bermanfaat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi terutama dalam pembinaan terhadap pelaku ekonomi mikro dan kecil. Menurut Abu Bakar (2004) modal sosial adalah bentuk modal yang mempunyai peranan dan manfaat sangat penting dalam menyumbang pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat sebuah Negara. Sedang menurut Salmah (2008) modal sosial sangat bermanfaat untuk diberdayakan dalam penataan pemukiman di bantaran sungai, dan menurut Darundono (2007) modal sosial berperan penting dalam perbaikan kampung.

Menurut Fukuyama (1999), pengukuran modal sosial dapat dilalui dengan dua pendekatan, yaitu: *pertama*, dengan melakukan sensus menghitung jumlah group atau kelompok sosial yang ada dan keanggotaan kelompok dalam suatu masyarakat; dan kedua dapat juga dilakukan dengan survey mengukur derajat kepercayaan dan daya kohesi dalam masyarakat. Narayan & Pritchett (1977) mengkonstruksi pengukuran modal sosial secara kuantitatif dengan menggunakan survey skala besar.

Menurut Fukuyama (2002), modal sosial diukur melalui pengukuran densiti kegiatan, kerjasama secara sukarela, kerjasama etika, tingkat kepercayaan. Menurut Yaojun Li *at al.* (2003), pengukuran modal sosial dapat diskoring pada dimensi modal sosial, yaitu pada keakraban tetangga, jaringan sosial dan partisipasi warga. Sedang menurut Narayan dan Pritchett (1977) mengonstruksi

pengukuran modal sosial secara kuantitatif menggunakan survei skala besar. Luke Keele (2005) mengembangkan pengukuran makro modal sosial. Keele mengukur (1) kehidupan berorganisasi komunitas, (2) keterlibatan dalam persoalan publik, (3) kerelawanan komunitas, (4) kesosialan informal, dan (5) kepercayaan sosial.

Menurut Grootaert & Narayan (2004), pengukuran 6 (enam) dimensi modal sosial, yaitu: (1) Kelompok dan Jaringan (2) Kepercayaan dan solidaritas, (3) Tindakan kolektif dan kerjasama (4) Informasi dan Komunikasi, (5) Kohesi Sosial dan Inklusi dan (6) Penguatan dan Tindakan Politik, dapat dilakukan dengan instrument *Integrated Questionnaire for the Measurement of Sosial Capital* (SC-IQ) sebagaimana telah dilakukannya pada negara-negara berkembang, seperti Nigeria dan Albania.

Bank Dunia juga mengembangkan piranti pengukuran modal sosial dengan menggunakan serangkaian kuesioner *Social Capital Assessmens Tool* (SOCAT) sebagaimana telah dibuat oleh para peneliti di World Bank (Grootaert & Bastelaer 2002; Grootaert et. Al 2003). *Social Capital Assessmens Tool* (SOCAT) adalah instrumen multiaspek yang dirancang untuk mengumpulkan data dengan mengintegrasikan instrument kualitatif maupun kuantitatif modal sosial di tingkat rumah tangga, komunitas dan organisasi. Menurut Bank Dunia, fitur penting piranti SOCAT ini adalah informasi yang rinci mengenai struktural dan kognitif dari modal sosial yang penting untuk menghubungkan informasi modal sosial dengan kemiskinan dan kesejahteraan.

#### **2.1.5. Keterkaitan Modal Sosial dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Sumber Daya hutan Berkelanjutan**

Sebagaimana telah disebutkan pada konsep pemberdayaan di atas bahwa dalam pemberdayaan adalah suatu proses yang kompleks yang melibatkan pertimbangan atas kesadaran, partisipatif aktif dan pembangunan aksi kemampuan sosial dan politik. Para pakar seperti Rappaport (1987) dan Wallersten (1992) melihat pemberdayaan sebagai suatu proses yang dimaksudkan membantu individu

memecahkan masalah hidup mereka. Individu, kelompok dan atau masyarakat dapat mengontrol keadaan mereka dan mencapai tujuan mereka sehingga mereka mampu bekerja untuk maksimalisasi kualitas hidup mereka (Adam, 1996). Akar Pemberdayaan berkaitan dengan daya dan kekuasaan. Sedang modal sosial menurut peneliti (dikembangkan dari Bourdieu, Coleman dan Putnam), adalah sesuatu nilai asset sumber daya yang merupakan tatanan nilai yang dimiliki bersama sebagai hasil interaksi hubungan sosial yang dapat diinvestasikan dan dimanfaatkan untuk memungkinkan kerjasama dalam mencapai tujuan bersama.

Keterkaitan konsep pemberdayaan dengan modal sosial terletak dimana pemberdayaan adalah sebuah prakondisi yang diperlukan untuk mendapatkan suatu daya atau kekuasaan dalam rangka meningkatkan kemandirian masyarakat yang secara langsung dapat memperkuat modal sosial masyarakat. Kemudian memiliki modal sosial juga diperlukan sehingga seseorang dapat berpartisipasi dan terlibat dalam sebuah proses pemberdayaan. Kedua-duanya saling membutuhkan untuk suatu penciptaan kualitas hidup dan kemandirian masyarakat. Jika dalam proses pemberdayaan memanfaatkan potensi modal sosial, maka hal tersebut adalah suatu proses yang saling menguatkan dan saling terkait satu sama lain. Proses pemberdayaan yang memanfaatkan modal sosial, secara langsung akan memberi suatu dampak terhadap penguatan modal sosial, dan modal sosial yang dimanfaatkan dalam proses pemberdayaan akan memberi dampak peningkatan kualitas hidup yang kemudian menjadikan masyarakat berdaya.

Salah satu indikator pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan adalah keberlanjutan fungsi sosial, fungsi sosial tersebut akan selalu terkait dengan masyarakat sekitar hutan yang diberdayakan. Jika terkait dengan masyarakat maka akan terkait pula dengan fungsi-fungsi sosial yang meliputi modal sosial. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa modal sosial mempunyai peranan penting dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Salah satunya adalah hasil penelitian Mukherjee (2002) menyatakan kesimpulannya bahwa modal sosial sangat berperan penting dalam proses pengelolaan hutan berkelanjutan, bahwa proses transformasi modal sosial adalah penting,

peningkatan modal sosial dalam suatu lembaga akan membuat target pengelolaan hutan berkelanjutan tercapai. Mehra (2006) juga menegaskan bahwa modal sosial sangat berperan dalam konservasi hutan.

Kemudian Ozmond Roshan D'Souza (2005), menjelaskan bahwa masyarakat yang heterogen dapat membentuk suatu modal sosial demi mencapai suatu kerja sama untuk penyelamatan hutan. Menurut Prante *et al.* (2007), hasil analisisnya tentang Program Kolaborasi Restorasi Hutan di Mexico bahwa, diperlukan adanya penguatan modal sosial pada masyarakat sekitar hutan, karena antara modal sosial dengan upaya mencapai tujuan pengelolaan hutan berkelanjutan sangat terkait erat.

Saat ini peran modal sosial telah berkembang sangat cepat sebagai salah satu alat pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan (dikembangkan dari Bourdieu, 1986). Pernyataan ini menjelaskan bahwa ikatan sosial dan norma sosial merupakan bagian penting sebagai dasar utama untuk membangun kehidupan berkelanjutan dalam suatu lingkungan alam, sosial dan ekonomi. Sementara itu menurut Bromley (1993) dalam Pretty (2001), bahwa memanfaatkan lembaga-lembaga lokal yang terdapat dalam masyarakat sekitar hutan sangat efektif dalam mengelola sumber daya hutan karena lembaga-lembaga lokal memiliki biaya murah dan negoisasi yang terjalin sangat efektif. Selain itu dapat lembaga lokal dapat memfasilitasi kegiatan kolektif, modal sosial juga dapat memberi keyakinan untuk berinvestasi dalam kegiatan kolektif, karena memiliki keyakinan bahwa orang lain juga akan melakukannya. Pretty menyatakan bahwa terdapat empat komponen modal sosial yang sangat terkait dengan pengelolaan lingkungan (sumber daya hutan), yaitu kepercayaan, hubungan timbal balik, norma, nilai dan sanksi, jaringan sosial dan kelembagaan.

Selanjutnya Pretty (2001) menjelaskan bahwa modal sosial kepercayaan sangat diperlukan dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan (termasuk sumber daya hutan), karena kepercayaan terhadap individu akan menimbulkan kepercayaan timbal balik dari individu yang lain dalam pengelolaan lingkungan (sumber daya hutan). Hubungan pertukaran timbal balik akan memberi kontribusi bagi

kewajiban jangka panjang antar individu-individu yang menjadi bagian penting dalam mencapai hasil pengelolaan lingkungan (sumber daya hutan) yang positif. Norma, aturan, nilai-nilai dan sanksi merupakan modal sosial yang mengarahkan perilaku masyarakat yang memberikan nilai-nilai “moralitas internal yang tinggi”, dimana masyarakat dapat menyeimbangkan hak-hak dan kewajiban kolektif yang sangat diperlukan dalam pengelolaan lingkungan (sumber daya hutan). Hubungan sosial, jaringan sosial dan kelembagaan adalah modal sosial penting yang memberikan aspek keterhubungan dalam memanifestasikan diri dalam kehidupan berkelompok.

Pretty kemudian memperjelas penjabaran ke empat modal sosial di atas bahwa pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan menuntut adanya pemanfaatan peran modal sosial dalam upaya menghasilkan lingkungan yang produktif, karena modal sosial dapat memberikan nilai-nilai dan melahirkan beberapa manfaat antara biaya kerja yang murah, terciptanya norma aturan yang disepakati masyarakat sekitar hutan, sehingga masyarakat tidak berbuat hal-hal yang dapat merusak hutan dan lingkungannya, tercipta hubungan kelembagaan yang harmonis di sekitar hutan, dan melahirkan hubungan yang bersifat timbal balik antara masyarakat, antar masyarakat dengan lingkungannya, karena masyarakat sekitar hutan hidup dalam aturan, norma dan saling mempercayai satu sama lain, sehingga kelestarian lingkungan dapat dengan mudah diwujudkan, yang pada akhirnya memberi dampak sumber daya hutan berkelanjutan, bukti empiris ini seperti dinyatakan oleh Pretty (2001) bahwa peran modal sosial telah diwujudkan dalam kelompok dan asosiasi pada masyarakat di seluruh dunia, seperti pengelolaan hutan di India dengan 15.000 komite perlindungan hutan, atau irigasi partisipatif di Sri Lanka dengan 33.000 kelompok.

Hyakumura (2006), dalam penelitiannya menghasilkan kesimpulan bahwa Jika salah dalam pengurusan modal sosial akan mengakibatkan pengelolaan hutan yang tidak efektif, semakin efektif dalam penggunaan modal sosial, maka semakin efektif pula pengelolaan hutan berkelanjutan. Sehingga terlihat jelas saling keterkaitan antara modal sosial dengan pengelolaan hutan berkelanjutan, karena



dalam pengelolaan hutan tidak bisa dipisahkan atau tidak boleh mengabaikan modal sosial masyarakat sekitar hutan.

Modal sosial berupa kebersamaan, kepercayaan, jaringan sosial dan hubungan timbal balik, keterlibatan/partisipasi, kelembagaan, kepemimpinan sosial, norma, nilai, adat dan budaya serta kearifan dan pengetahuan lokal adalah nilai intrinsik dari modal sosial. Nilai intrinsik tersebut adalah nilai-nilai kebaikan, kebenaran dan keindahan yang melekat ke dalam masing-masing unsur modal sosial yang sangat diperlukan dalam pengelolaan sumber daya hutan (dikembangkan dari Pretty, 2003)

Menurut Yuwono (2008), Modal sosial berupa kearifan lokal berupa kearifan lingkungan dapat diwujudkan dalam nilai sosial, norma adat, etika, sistem, kepercayaan, pola penataan ruang tradisional, serta peralatan dan teknologi sederhana ramah lingkungan. Sumber daya modal sosial ini diwarisi secara turun menurun yang menurut beberapa penelitian terbukti efektif menjaga kelestarian lingkungan, serta menjamin kelestarian lingkungan sosial. Beberapa modal sosial kearifan lingkungan yang telah dilakukan masyarakat Indonesia dalam pelestarian lingkungan, sebagaimana berikut:

1. *Sasi* di Maluku yang digunakan untuk melindungi kawasan perairan dan didukung oleh peran *kewang* sebagai penegak *sasi*.
2. *Tombak Hamijon* pada masyarakat kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Struktur tanaman tombak hamijon menyerupai hutan (agroforestry), terdiri atas beranekaragaman jenis dan spesies tumbuhan. Kemenyan, semak hidup bersama di sebuah lapangan yang sama, tajuknya berlapis, mulai dari bangunan yang tingginya belasan meter hingga yang menjalar di permukaan tanah. Hewan-hewan seperti kera banyak hidup di dalam tombak hamijon. Tidak terhitung banyaknya binatang kecil, seperti burung, kumbang (*tapponak*) dan pelbagai jenis hewan hidup di hutan kemenyan.
3. *Repong Damar* atau hutan damar, masyarakat *Kruy* di Lampung Barat merupakan model pengelolaan lahan bekas ladang dalam bentuk wanatani yang dikembangkan masyarakat *Kruy* di Lampung Utara, yaitu menanam lahan

bekas ladang dengan berbagai jenis tanaman antara lain damar, kopi, karet, dan durian.

4. *Pahomba* di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Gugus hutan yang disebut *pahomba* terlarang keras untuk dimasuki apalagi untuk diambil hasil hutannya.
5. *Tembawai* (Dayak Iban – Kalimantan Barat). Tembawai merupakan hutan rakyat yang dikembangkan masyarakat Dayak Iban di Kalbar, di dalamnya terdapat tanaman produktif seperti durian. Rotasi perladangan yang dikembangkan masyarakat adalah untuk memulihkan kesuburan tanah atau rempong damar sebagai model konservasi.
6. *Tri Hita Karana* (Bali) adalah suatu konsep yang ada dalam kebudayaan Hindu Bali, berintikan keharmonisan hubungan manusia – Tuha, manusia – manusia, dan manusia – alam. Ini berarti bahwa nilai keharmonisan hubungan antara manusia dengan lingkungan merupakan suatu kearifan pada masyarakat dan kebudayaan Bali
7. *Seren taun* di Desa Sinaresmi, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Seren taun memiliki banyak arti bagi masyarakat kasepuhan. Seren taun adalah puncak prosesi pertanian yang bermakna hubungan manusia, alam dan pencipta-Nya. Sekaligus perayaan adat pertanian kasepuhan sebagai ungkapan rasa syukur setelah mengolah lahan pertanian dengan segala hambatan dan perjuangannya untuk mendapatkan hasil optimal.

Dalam proses pembangunan, modal sosial berupa kearifan lingkungan itu mengalami pergeseran. Persebaran nilai-nilai baru terbawa oleh kegiatan pembangunan ditandai dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi maju yang berpedoman pada nilai-nilai industri telah menyisihkan sebagai sumber daya modal sosial. Memudarnya modal sosial tersebut telah merugikan pengelolaan lingkungan atau pengelolaan sumber daya hutan. Kearifan tradisional dan tradisi-tradisi pelestarian lingkungan seakan-akan tidak berdaya, bahkan tersisihkan oleh nilai-nilai baru yang menitik-beratkan pada peningkatan ekonomi untuk kepentingan sesaat tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan (sumber daya hutan).

### 2.1.6. Model

Defenisi model adalah suatu penggambaran abstrak dari sistem dunia nyata, yang akan bertindak seperti dunia nyata untuk aspek-aspek tertentu (Manestch and Park, 1997). Model adalah penyederhanaan dari sesuatu, model menggambarkan fenomena suatu obyek. Fenomena itu disebut entitas. Karena itu model merupakan tiruan dari kenyataan yang diteliti atau suatu sistem yang diselidiki. Model dan manipulasinya melalui proses simulasi adalah alat yang sangat bermanfaat dalam sistem analisis. Model dapat digunakan sebagai representasi sebuah sistem yang saling dikerjakan atau menganalisis sistem yang sudah dilakukan. Dengan menggunakan model dapat dihasilkan desain atau keputusan operasional dalam waktu yang sangat singkat dan biaya yang murah (Blanchord dan Fabrycky, 1981 dalam Pranoto, 2005).

Dari terminologi penelitian operasional, secara umum model didefenisikan sebagai suatu perwakilan atau abstraksi dari sebuah obyek atau situasi aktual. Model memperlihatkan hubungan-hubungan langsung maupun tidak langsung serta kaitan timbal balik dalam istilah sebab akibat. Oleh karena itu suatu model adalah suatu abstraksi dari realitas, maka pada wujudnya kurang kompleks daripada realitas itu sendiri (Eriyatno, 2003).

Menurut Muhammadi *et al.* (2001) model adalah suatu bentuk dibuat untuk menirukan suatu gejala atau proses. Model dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu model kuantitatif, kualitatif, dan ikonik (Aminullah, 2003). Model yang baik akan memberikan gambaran perilaku dunia nyata sesuai dengan permasalahan dan akan meminimalkan perilaku yang tidak signifikan dari sistem yang dimodelkan. Sistem secara umum diartikan sebagai suatu kelompok hal/benda, aktifitas, ide dan kombinasi-kombinasinya yang mempunyai kesatuan fungsi dan organisasi. Pengertian lain sistem adalah suatu kumpulan unsur yang saling berintegrasi dan secara terpadu menyusun suatu tujuan bersama. Model tidak mungkin berisikan semua aspek sistem nyata, karena sistem nyata memiliki banyak karakteristik yang selalu berubah dan juga tidak semua faktor atau variabel relevan dianalisis. Karena itu dalam membentuk model diperlukan penyederhanaan dan penciptaan

yang kritis agar variabel yang relevan terpilih mempunyai dampak yang besar terhadap keputusan yang diambil.

Salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks adalah menggunakan konsep model simulasi. Dengan menggunakan simulasi, maka model akan menkomputasikan jalur waktu dari variabel model untuk tujuan tertentu dari input sistem dan parameter model. Karena itu model simulasi akan memprediksi dunia riil yang kompleks. Model juga dapat digunakan untuk keperluan optimasi, dimana suatu kriteria model dioptimalkan terhadap input atau struktur sistem alternatif. Karena itu model dapat dibangun dengan basis data atau basis pengetahuan (Eriyatno, 2003).

Menurut Muhammadi *et al.* (2001), pemahaman struktur dan perilaku sistem akan membantu untuk pembentukan model dinamika kuantitatif formal, dengan menggunakan diagram sebab akibat (*causal loop*) dan diagram alir (*flow diagram*). Diagram sebab akibat akan dipergunakan sebagai dasar untuk membuat diagram alir yang akan disimulasikan dengan menggunakan program model yang ada dalam software atau program untuk analisis sistem, sehingga setelah dilakukan analisis akan didapatkan kesimpulan dan kebijakan apa yang harus dilaksanakan.

Salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks adalah menggunakan konsep model persamaan struktural (*Structural Equation Model*, SEM). Pendekatan analisis data penelitian dengan menggunakan persamaan model struktural (SEM) tidak hanya berguna dalam pengujian hubungan antara variabel akan tetapi sekaligus pengembangan instrument pengukuran yang baik dari suatu model (Fornell & Larcker dalam Wahyu, 2005).

*Structural Equation Model/SEM* adalah suatu teknik modeling statistik yang bersifat cross-sectional, linear dan umum, juga termasuk teknik statistik yang digunakan untuk membangun dan menguji model statistik yang biasanya dalam bentuk model-model sebab akibat. SEM cenderung digunakan untuk menentukan apakah suatu model tertentu valid atau tidak daripada pada menggunakannya untuk menemukan suatu model tertentu cocok/sesuai atau tidak meski analisis

SEM sering pula mencakup elemen-elemen yang digunakan untuk menerangkan walaupun memang analisisnya untuk lebih menegaskan daripada menerangkan.

*Structural Equation Model /SEM* merupakan salah satu analisis multivariate yang dapat menganalisis hubungan variabel secara kompleks. Analisis ini umumnya digunakan untuk penelitian yang menggunakan banyak variabel. Teknik analisis data menggunakan SEM dilakukan untuk menjelaskan secara menyeluruh hubungan variabel yang ada dalam penelitian. SEM digunakan bukan merancang suatu teori, konsep atau rumusan model, tetapi lebih ditujukan untuk memeriksa dan membenarkan suatu rumusan model yang terlebih dahulu harus diciptakan. Oleh karena itu syarat utama menggunakan SEM adalah membangun suatu model hipotesis yang terdiri dari model struktural dan model pengukuran dalam bentuk diagram jalur yang berdasarkan justifikasi teori. SEM adalah merupakan sekumpulan teknik-teknik statistik yang memungkinkan pengujian sebuah rangkaian hubungan secara simultan. Hubungan itu dibangun antara satu atau beberapa variabel independen.

Beberapa keunggulan SEM dibandingkan persamaan matematis lainnya adalah: SEM memungkinkan adanya asumsi-asumsi yang lebih fleksibel; mempunyai kemampuan untuk menguji model-model dengan menggunakan beberapa variabel tergantung, mempunyai kemampuan untuk membuat model gangguan kesalahan serta mempunyai kemampuan untuk mengatasi data yang sulit, data yang tidak normal dan data yang tidak lengkap. Keunggulan SEM yang lainnya adalah peneliti dapat melakukan tiga kegiatan sekaligus, yaitu pemeriksaan validitas dan reliabilitas instrumen, pengujian model hubungan antar variabel laten dan mendapatkan model yang bermanfaat untuk prediksi.

## 2.2. Kerangka Berpikir

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, tinjauan pustaka dan hasil penelitian atau kajian terdahulu tentang yang berkaitan dengan tujuan penelitian, maka disusunlah kerangka berpikir. Penelitian ini adalah kajian ilmu lingkungan dengan melihat manusia sebagai masyarakat sekitar hutan yang tinggal dan berdiam di sekitar kawasan hutan sebagai lingkungan alamnya. Masyarakat sekitar hutan sebagai lingkungan sosial dalam hal melangsungkan kehidupannya terus berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungannya untuk keberlanjutan hidupnya dengan memperhatikan keseimbangan sistem lingkungan alam, buatan dan sosial. Kemudian ada Perum Perhutani yang memegang mandat pengelolaan sumber daya hutan, dan mempunyai tanggung jawab untuk mengelola sumber daya hutan secara lestari dan berkesinambungan baik secara lingkungan/ekologi, sosial dan ekonomi. Perum Perhutani mempunyai misi pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan dan tanggung jawab memberdayakan masyarakat sekitar hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana telah disebutkan dalam kerangka teori bahwa hutan menurut bentuk pengelolaannya terdiri dari hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam dan hutan wisata. Lingkungan hutan adalah lingkungan yang mempunyai ekosistem yang sangat kompleks karena meliputi struktur fisik yang ditentukan oleh topografi dan struktur ekologi, komposisi biologis flora dan fauna, sejarah dan nilai-nilai budaya, sehingga pengelolaannya juga tergantung dari jenis hutan yang akan dikelola. Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah lingkungan hutan produksi yang memang tujuannya dikelola untuk produksi yang berkelanjutan yang tetap menjaga keseimbangan keberlanjutan ekologi dan keberlanjutan sosial.

Penjelasan terdahulu juga telah menyebutkan bahwa keberlanjutan sosial adalah lingkungan sosial yang menjadi irisan dari kedua irisan lingkungan alam dan lingkungan buatan, sehingga keberlanjutan pengelolaan sumber daya hutan akan banyak ditentukan oleh lingkungan sosial yang selama ini masih terabaikan. Lingkungan sosial tersebut adalah keadaan sosial masyarakat sekitar hutan dalam

bersikap, berperilaku, berinteraksi dan berinterelasi, yang kemudian melahirkan nilai-nilai tatanan sosial yang dikenal bernama modal sosial. Modal sosial masyarakat sekitar hutan lahir dari hasil interaksi dan adaptasi masyarakat dengan lingkungan kehidupannya secara timbal balik, modal sosial dipengaruhi oleh lingkungannya dan selanjutnya berkembang menjadi modal sosial mempengaruhi lingkungannya.

Kondisi masyarakat sekitar hutan yang pada umumnya masih dalam kondisi miskin dan tidak berdaya secara sosial, ekonomi dan politik perlu dilakukan upaya-upaya pemberdayaan dengan pembenahan model pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi potensi modal yang dimiliki oleh masyarakat sekitar hutan. Jika konsep model pemberdayaan masyarakat berangkat dengan potensi modal yang telah dimiliki tersebut, maka masyarakat akan merasa terpanggil dan ikut terlibat berpartisipasi dalam proses pemberdayaan tersebut dan sekaligus terlibat dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan.

Interaksi yang terjadi antara sistem masyarakat sekitar hutan dan lingkungannya telah melahirkan interaksi-interaksi yang saling mempengaruhi sistem masing-masing dan memberi dampak positif dan dampak negatif. Dampak tersebut melahirkan nilai-nilai atau modal sosial yang terkait dengan ekologi, sosial dan ekonomi yang dapat dijadikan suatu potensi yang dapat dimanfaatkan dan diberdayakan dalam proses pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan.

Pemberdayaan sebagai suatu proses menunjuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan secara sistematis yang mencerminkan pentahapan sebagai strategi upaya mengubah masyarakat yang kurang berdaya menuju keberdayaan. Proses pemberdayaan masyarakat akan melahirkan keberdayaan masyarakat. Namun dalam proses pemberdayaan untuk melahirkan keberdayaan masyarakat, maka diperlukan pula keterlibatan para *stakeholders* pemberdayaan. Dengan demikian untuk melahirkan keberdayaan masyarakat maka diperlukan dua dimensi variabel proses pemberdayaan, yaitu variabel strategi pemberdayaan dan variabel keterlibatan dan dukungan *stakeholders* pemberdayaan. Sedangkan variabel dimensi keberdayaan masyarakat adalah terdiri dari indikator

kepemilikan potensi dan ketrampilan pada level individu, partisipasi dalam pembangunan pada level kelompok, dan adanya kemandirian masyarakat pada level sistem. Dimensi keberdayaan tersebut akan menjadi target pencapaian proses pemberdayaan dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan.

Sebagaimana dijelaskan dalam tinjauan pustaka bahwa, modal sosial menempati posisi penting dan sangat berperan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, maka sudah barang tentu pemanfaatan, pendayagunaan dan pengembangannya bagi peningkatan kesejahteraan sosial menjadi sangat signifikan. Modal sosial adalah variabel independent yang menjadi konsep pertama yang mengarahkan proses pemberdayaan dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan.

Berdasarkan pendapat Putnam (1995), Coleman (1998), dan Fukuyama (2002), dan pustaka lainnya, maka indikator modal sosial masyarakat yang akan menjadi dasar untuk dimanfaatkan dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan adalah tingkat keadaan atau kuantitas frekuensi tindakan dari masing-masing modal sosial berikut: (1) Kebersamaan (KB); (2) kepercayaan (KP); (3) Jaringan sosial dan Dukungan timbal balik (JS); (4) Keterlibatan/partisipasi (KPs); (5) Kelembagaan (KL); (6) Kepemimpinan Sosial (KS); (7) Norma, adat dan nilai budaya (NB); (8) Kearifan dan pengetahuan lokal (KPL). Pemilihan unsur pembentuk modal sosial tersebut dianggap sesuai dengan kondisi dan tujuan penelitian, sebagaimana telah dijelaskan terdahulu. Masing-masing unsur pembentuk modal sosial tersebut dijelaskan oleh variabel teramati yang disebut indikator.

Keberhasilan pemberdayaan akan ditentukan pula dari proses pelaksanaan pemberdayaan yang meliputi variabel: (1) Strategi pemberdayaan masyarakat (SPM) yang dilaksanakan dan (2) keterlibatan dan dukungan Stakeholders (KDS). Pelaksanaan proses pemberdayaan dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan akan saling mempengaruhi sebagai input, demikian pula pemanfaatan potensi modal sosial yang terkait dengan ekologi, sosial dan ekonomi sebagai input dalam proses pemberdayaan. Strategi pemberdayaan masyarakat

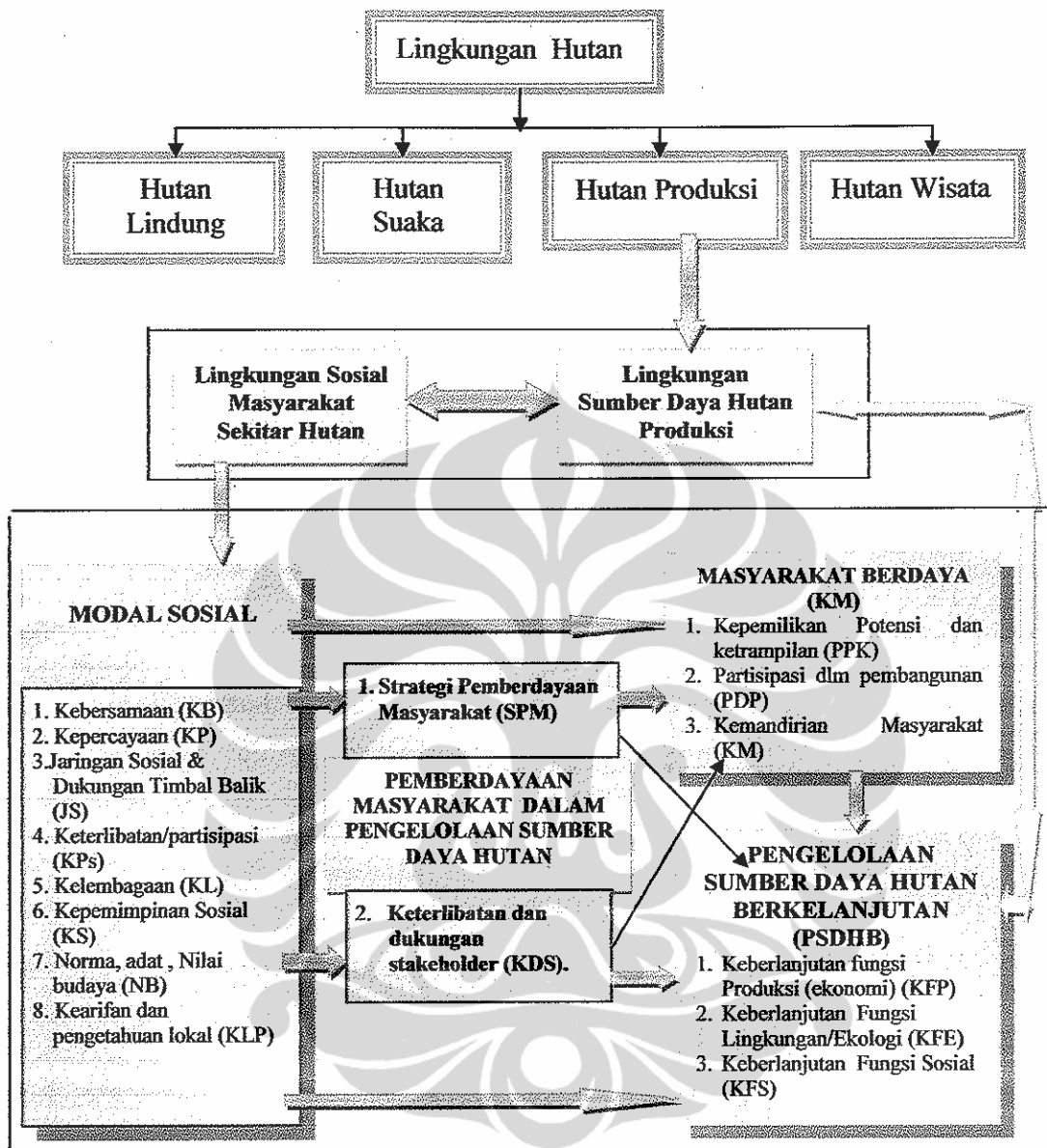


yang akan dilaksanakan tergantung dari karakteristik dan potensi modal sosial yang hidup dan berada dalam masyarakat sekitar hutan. Masing-masing variabel strategi pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan dan dukungan stakeholder dijelaskan oleh variabel teramatai yang disebut indikator.

Pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan oleh Perum Perhutani harus sesuai dengan pengelolaan yang lestari (keberlanjutan ekologi/lingkungan, keberlanjutan sosial dan keberlanjutan ekonomi) dan kemudian disesuaikan dengan potensi modal sosial yang juga terkait dengan ekologi, sosial dan ekonomi yang ada yang kemudian menjadi model pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan ditentukan oleh variabel keberlanjutan ekonomi/produksi, keberlanjutan ekologi dan keberlanjutan sosial yang masing mempunyai penjelasan dari indikatornya.

Gambar 2.6 merupakan kerangka konsep berpikir untuk melihat hubungan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan dengan pemanfaatan modal sosial. Modal sosial menjadi penentu ke arah mana model pemberdayaan yang akan diterapkan. Dinamika dan pemanfaatan modal sosial dalam suatu pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan akan ditentukan oleh suatu potensi modal sosial yang hidup dalam masyarakat sekitar hutan. Modal sosial yang hidup dalam masyarakat sekitar hutan adalah modal sosial yang lahir dan berkembang dari hasil interaksi dalam masyarakat sekitar hutan itu sendiri baik dari lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan buatan, sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat dengan masing-masing lingkungannya. Strategi pemberdayaan yang dipilih sangat bergantung pada karakteristik dan potensi modal sosial yang dimiliki masyarakat sekitar hutan. Keterlibatan para stakeholder pemberdayaan adalah juga tergantung dari dorongan kekuatan modal sosial masyarakat sekitar hutan.

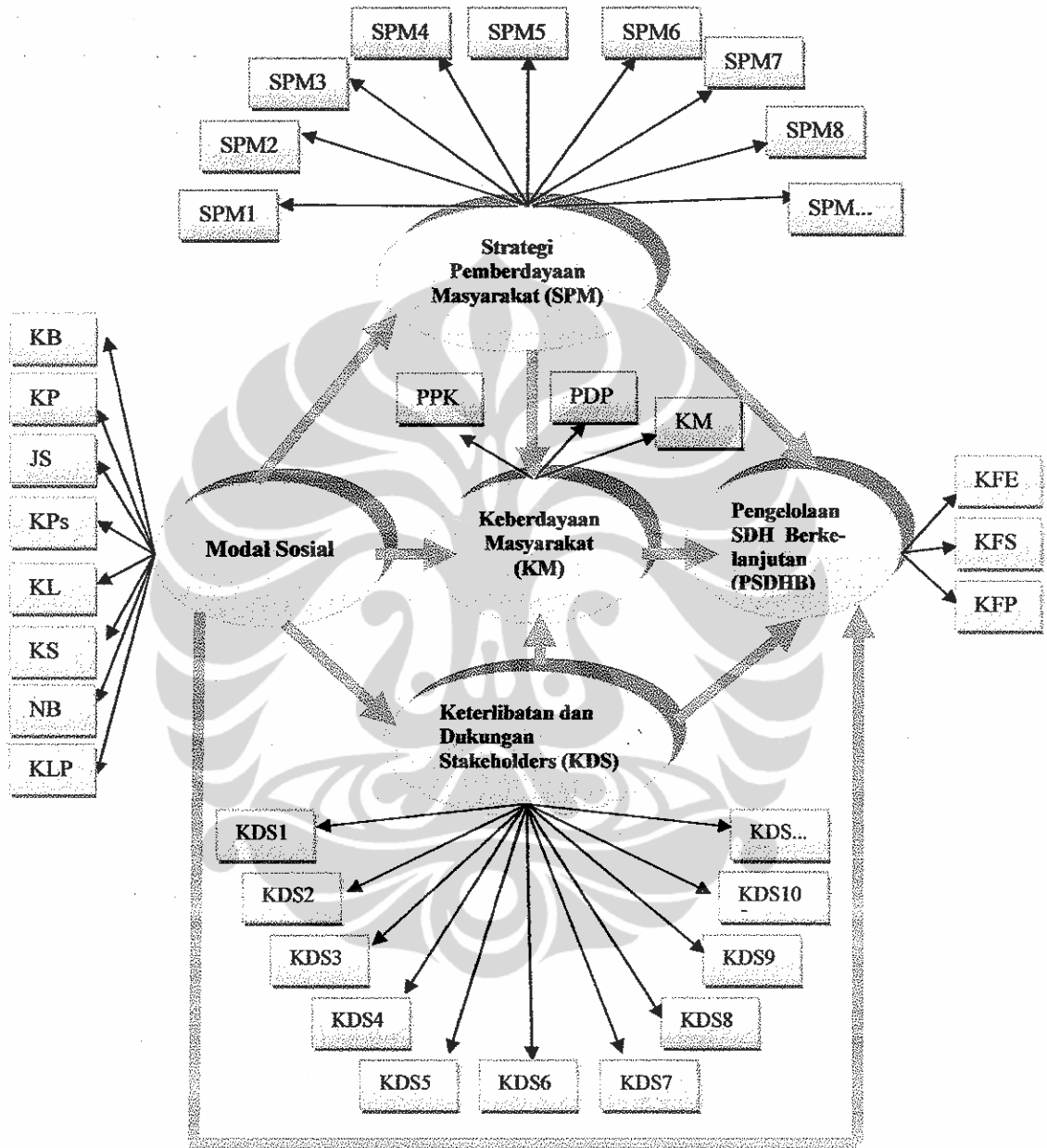
Berdasarkan konsep kerangka berpikir tersebut di atas, maka dapat digambarkan Kerangka konsep berpikir dalam skema berikut:



Gambar 2.5. Kerangka Konsep Berpikir Model Pemberdayaan Masyarakat sekitar Hutan dalam pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi modal Sosial.

Jika kerangka konsep seperti terlihat pada Gambar 2.5 di atas digambarkan dalam bentuk hubungan antara variabel-variabel dalam bentuk konsep penelitian SEM (*Structural Equation Modelling*), maka variabel-variabel yang akan menjadi fokus penelitian variabel modal sosial, strategi pemberdayaan masyarakat,

keterlibatan dan dukungan stakeholders, keberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan, sebagaimana gambar skema berikut:



Gambar 2.6. Kerangka Konseptual Model Penelitian dengan Model *Structural Equation Modeling* (SEM).

Modal sosial masyarakat sekitar hutan yang terdiri dari berbagai faktor pembentuknya yaitu: kebersamaan (KB), kepercayaan (KP), jaringan sosial dan dukungan timbal balik (JS), keterlibatan/partisipasi/ (KPs), kelembagaan (KL), kepemimpinan sosial (KS), norma adat dan nilai budaya (NB), serta kearifan dan pengetahuan lokal (KLP), memiliki relasi yang menentukan terhadap strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan.

Strategi pemberdayaan masyarakat (SPM) tersebut diukur dengan indikator:

1. Dukungan masyarakat cukup tinggi terhadap cara-cara Perhutani dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan (SPM1);
2. Dalam menentukan cara pengelolaan sumber daya hutan telah melibatkan masyarakat sekitar hutan (SPM2);
3. Keterlibatan masyarakat cukup memadai dalam proses penentuan cara pengelolaan sumber daya hutan (SPM3);
4. Cara pengelolaan sumber daya hutan telah sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sekitar hutan (SPM4);
5. Tingkat kesesuaian cara pengelolaan sumber daya hutan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sekitar hutan cukup baik (SPM5);
6. Cara pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan Perhutani telah meningkatkan kemampuan masyarakat mengelola sumber daya hutan (SPM6);
7. Cara pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan Perhutani telah berpengaruh terhadap peningkatan potensi masyarakat (SPM7);
8. Cara pengelolaan sumber daya hutan telah sesuai dengan harapan sebagian besar masyarakat sekitar hutan (SPM8);
9. Masyarakat setuju terhadap cara pengelolaan sumber daya hutan (SPM9).

Modal sosial yang terdiri dari berbagai faktor pembentuknya juga memiliki relasi terhadap keterlibatan dan dukungan *stakeholders* (KDS) pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Keterlibatan dan dukungan *stakeholders* hanya akan berarti banyak bagi pemberdayaan masyarakat sekitar hutan bila memperhatikan dan mempertimbangkan sepenuhnya faktor pembentuk modal sosial masyarakat sekitar hutan. Keterlibatan dan dukungan *stakeholders* (KDS) diukur dengan indikator:

1. Keterlibatan Perhutani dalam menentukan cara pengelolaan sumber daya hutan (KDS1);
2. Keterlibatan lembaga swasta dalam menentukan cara pengelolaan sumber daya hutan (KDS2);
3. Keterlibatan lembaga pemerhati kehutanan seperti Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam menentukan cara pengelolaan sumber daya hutan (KDS3);
4. Keterlibatan Pemerintah/Perhutani dalam menentukan cara pengelolaan sumber daya hutan sudah sesuai dengan perannya (KDS4);
5. Keterlibatan masyarakat dalam menentukan cara pengelolaan sumber daya hutan sudah sesuai dengan perannya (KDS5);
6. Keterlibatan lembaga swasta dalam menentukan cara pengelolaan sumber daya hutan sudah sesuai dengan perannya (KDS6);
7. Lembaga swasta mendukung usaha peningkatan peran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sumber daya hutan (KDS7);
8. Lembaga pemerhati kehutanan seperti Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mendukung usaha peningkatan peran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sumber daya hutan (KDS8);
9. Keberhasilan peningkatan peran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sumber daya hutan adalah karena dukungan sebagian besar masyarakat (KDS9);
10. Motivasi peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi dasar bagi lembaga swasta untuk terlibat dan mendukung dalam pengelolaan sumber daya hutan (KDS 10);
11. Motivasi peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi dasar bagi lembaga pemerhati kehutanan untuk terlibat dan mendukung kegiatan pengelolaan sumber daya hutan (KDS11).

Selanjutnya masing-masing faktor pembentuk modal sosial juga memiliki relasi dengan masyarakat berdaya atau keberdayaan masyarakat sekitar hutan yang terdiri dari komponen (1) kepemilikan potensi dan keterampilan (PPK) (2) partisipasi dalam pembangunan (PDP) serta (3) kemandirian masyarakat (KM) .

Secara detail, semua faktor pembentuk modal sosial juga memiliki relasi dengan semua faktor pembentuk pengelolaan sumberdaya hutan berkelanjutan yaitu keberlanjutan fungsi ekonomi/produksi (KFP), keberlanjutan fungsi ekologi (KFE) dan keberlanjutan fungsi sosial (KFS) dari hutan.

Tidak hanya modal sosial yang memiliki relasi yang menentukan terhadap berbagai variabel lainnya, strategi pemberdayaan masyarakat (SPM) dalam pengelolaan sumberdaya hutan juga memiliki relasi dengan masyarakat berdaya atau keberdayaan masyarakat (KM) dan semua faktor pembentuknya. Strategi pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari proses pemberdayaan masyarakat jelas sangat menentukan terhadap keberdayaan masyarakat sebagai keluaran (*output*) dari proses pemberdayaan masyarakat. Secara detail strategi pemberdayaan masyarakat akan menentukan sejauhmana setiap individu anggota masyarakat dapat mengaktualkan potensi dan keterampilannya.

Strategi pemberdayaan masyarakat juga mengkondufikan munculnya partisipasi masyarakat dalam konteks kelembagan masyarakat. Oleh karena itu dapat disebutkan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat (SPM) memiliki relasi langsung yang menentukan terhadap keberdayaan masyarakat (KM) berupa wujud kepemilikan potensi dan keterampilan individual, partisipasi masyarakat dan kemandirian masyarakat.

Strategi pemberdayaan masyarakat (SPM) dalam pengelolaan sumberdaya hutan juga memiliki relasi dengan pengelolaan sumberdaya hutan berkelanjutan (PSDHB). Strategi pemberdayaan masyarakat yang tepat pada gilirannya adalah strategi yang dapat menjamin keberlanjutan fungsi ekonomi, fungsi ekologi, dan fungsi sosial hutan.

Keterlibatan dan dukungan *stakeholders* (KDS) pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan sebagai faktor pembentuk proses pemberdayaan masyarakat juga memiliki relasi dengan keberdayaan masyarakat keluaran (*output*) pemberdayaan masyarakat. *Stakeholders* pemberdayaan masyarakat sebagai aktor utama pemberdayaan masyarakat menjadi penentu tergalinya potensi dan keterampilan individual warga masyarakat. Sebagai bagian dari

pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses maka *stakeholders* juga berperan penting dalam menggali dan mewujudkan partisipasi masyarakat sebagai komponen dari keberdayaan masyarakat. *Stakeholders* pemberdayaan masyarakat yang aktif dan penuh dedikasi pada saatnya diharapkan dapat memunculkan kemandirian masyarakat sebagai pertanda keberdayaan masyarakat. Sekaligus rasional ini menjelaskan bahwa keterlibatan dan dukungan *stakeholders* memiliki relasi yang menentukan terhadap potensi dan keterampilan, partisipasi masyarakat dan kemandirian masyarakat sebagai komponen keberdayaan masyarakat.

Keterlibatan dan dukungan *stakeholders* (KDS) pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan tentu memiliki relasi dengan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan (PSDHB). Para *stakeholders* yang melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan sepenuh hati akan dapat menjamin keberlanjutan fungsi ekonomi, fungsi ekologi, dan fungsi sosial hutan. Bila mana terjadi ketidakberlanjutan fungsi ekonomi, hal itu adalah pertanda bahwa seakan-akan tidak ada lagi *stakeholders* pemberdayaan masyarakat di lokasi tersebut.. Karena itu dapat disebutkan bahwa keterlibatan dan dukungan *stakeholders* memiliki relasi yang menentukan terhadap keberlanjutan fungsi ekonomi, fungsi ekologi, dan fungsi sosial hutan dalam pengelolaan sumberdaya hutan berkelanjutan.

Selanjutnya keberdayaan masyarakat (KM) yang terbentuk dari kepemilikan potensi dan keterampilan, partisipasi masyarakat dan kemandirian masyarakat memiliki relasi dengan keberlanjutan fungsi ekonomi, fungsi ekologi, dan fungsi sosial hutan. Warga masyarakat yang mampu menggali potensi dan keterampilannya sangat mungkin untuk menghasilkan adanya fungsi ekonomi, fungsi ekologi, dan fungsi sosial hutan yang berkelanjutan. Hal ini karena warga tersebut tidak hanya mengedepankan fungsi ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukannya tetapi juga telah mempertimbangkan fungsi ekologi dan fungsi sosial hutan secara simultan.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut di atas, maka konsep model pemberdayaan masyarakat sekitar dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi modal sosial dapat dibentuk dari rumusan hipotesis model sebagai berikut:

1. Modal sosial (MS) berpengaruh langsung pada strategi pemberdayaan masyarakat (SPM);
2. Modal sosial (MS) berpengaruh langsung pada keterlibatan dan dukungan *stakeholders* pemberdayaan (KDS);
3. Modal sosial (MS) berpengaruh langsung pada keberdayaan masyarakat (KM);
4. Modal sosial (MS) berpengaruh langsung pada pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan (PSDHB);
5. Strategi pemberdayaan masyarakat (SPM) berpengaruh langsung pada keberdayaan masyarakat (KM);
6. Strategi pemberdayaan masyarakat (SPM) berpengaruh langsung pada pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan (PSDHB);
7. Keterlibatan dan dukungan *stakeholders* pemberdayaan (KDS) berpengaruh langsung pada keberdayaan masyarakat (KM);
8. Keterlibatan dan dukungan *stakeholders* pemberdayaan (KDS) berpengaruh langsung pada pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan (PSDHB);
9. Keberdayaan masyarakat (KM) berpengaruh langsung pada pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan (PSDHB);
10. Modal sosial (MS) berpengaruh tidak langsung pada pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan (PSDHB) melalui strategi pemberdayaan masyarakat (SPM);
11. Modal sosial (MS) berpengaruh tidak langsung pada pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan (PSDHB) melalui keberdayaan masyarakat (KM);
12. Modal sosial (MS) berpengaruh tidak langsung pada pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan (PSDHB) melalui keterlibatan dan dukungan *stakeholders* pemberdayaan (KDS) dan keberdayaan masyarakat (KM).



Rancangan model penelitian seperti Gambar 2.6 di atas memiliki beberapa asumsi dan argumen rasional yang mendukung keberadaan model penelitian dan keberlakuannya seperti diuraikan berikut ini:

*Pertama*, model penelitian adalah model yang memproyeksikan keberlakuannya pada *setting* dan asumsi masyarakat pedesaan dengan sejumlah pertanda yang menunjukkan bahwa masyarakat tersebut adalah masyarakat sekitar hutan yang menjadi populasi penelitian ini. Masyarakat pedesaan yang berdiam di sekitar hutan dengan kondisi sosial masyarakat sekitar hutan yang mempunyai sikap, perilaku, interaksi, interelasi yang kemudian melahirkan nilai-nilai sosial yang kemudian dikenal modal sosial masyarakat sekitar hutan.

*Kedua*, model penelitian ini menggunakan asumsi utama bahwa pemberdayaan masyarakat sekitar hutan adalah membutuhkan pemberdayaan sebagai suatu proses melalui (1) penambahan kekuatan/daya masyarakat bagi masyarakat yang masih kurang berdaya dan (2) pemberian kekuatan/daya kepada masyarakat yang belum/tidak memiliki daya, terutama dalam menghadapi kondisi sosial ekonominya sehari-hari atau masih hidup dalam kondisi miskin.

*Ketiga*, model penelitian menggambarkan dengan jelas bahwa variabel penelitian terdiri dari (1) modal sosial (masyarakat sekitar hutan), (2) strategi pemberdayaan masyarakat (dalam pengelolaan sumberdaya hutan), (3) keterlibatan dan dukungan stakeholders (dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan), (4) keberdayaan masyarakat, serta (5) pengelolaan sumberdaya hutan berkelanjutan. Modal sosial berposisi sebagai variabel bebas (*independent variable*) (Prayitno, 2004; Lie, 2007; Prayitno, 2004:34), serta strategi pemberdayaan masyarakat, keterlibatan dan dukungan stakeholders dan keberdayaan masyarakat berposisi sebagai variabel antara (*intervening variable*) serta pengelolaan sumberdaya hutan berkelanjutan berposisi sebagai variabel terikat (*dependent variable*). Adanya variabel antara pada model penelitian ini muncul karena terdapatnya hubungan sebab akibat yang bersifat tidak langsung (*indirect effect*) disamping adanya hubungan sebab akibat yang langsung (*direct effect*).

*Keempat*, pemunculan modal sosial sebagai variabel bebas (*independent variable*) terjadi karena dalam sistem sosial masyarakat sekitar hutan dan sistem sumber daya hutan yang saling berinteraksi sesamanya menempatkan modal sosial masyarakat sekitar hutan sebagai norma dan nilai yang diakui oleh masyarakat sekitar hutan dalam kehidupannya bermasyarakat. Modal sosial masyarakat sekitar hutan relatif tidak mudah berubah dalam waktu singkat karena sebagian besar modal sosial terbentuk dan berasal dari interaksi yang cukup lama atau dari warisan leluhur, sehingga faktor yang mempengaruhinya hanyalah faktor struktural dan faktor kultural masyarakat sekitar hutan itu sendiri. Sepanjang faktor struktural dan faktor kultural masyarakat sekitar hutan tetap menggunakan norma dan nilai modal sosial maka modal sosial tetap eksis pada masyarakat sekitar hutan. Hal inilah yang sekaligus menjadikan modal sosial sebagai variabel bebas dan bahkan menjadi mesin penggerak (*growth engine*) masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan.

*Kelima*, hubungan antar variabel dalam model penelitian adalah hubungan yang positif dalam arti penguatan dan pelemahan pada salah satu variabel selaras dengan penguatan dan pelemahan pada variabel lainnya. Hal ini terjadi karena semua variabel berada dalam lingkup sistem masyarakat sekitar hutan dan sistem sumber daya hutan yang pada saatnya memproyeksikan eksistensi semua variabel dalam model penelitian.

*Keenam*, balikan (*feed back*) dari variabel pengelolaan sumberdaya hutan berkelanjutan pada model penelitian tidak menjadi fokus perhatian, karena pengelolaan sumberdaya hutan berkelanjutan yang dikonsepskan dalam model ini adalah pengelolaan sumberdaya hutan yang akan dicapai bersamaan dengan keberdayaan masyarakat dengan mengkaji pemanfaatan modal sosial yang telah ada dan berada dalam kondisi *eksisting*.

*Ketujuh*, model penelitian ini mengasumsikan tetap adanya kebijakan pemerintah (*governmental policy*) yang mengatur dan memperhatikan atas tersedianya sarana prasarana untuk proses pemberdayaan masyarakat, karena kebijakan pemerintah terutama bersangkutan dengan variabel strategi pemberdayaan masyarakat yang

lazimnya dipersiapkan oleh lembaga pemerintah, posisi pemerintah sebagai *stakeholders* pemberdayaan masyarakat serta kebijakan pemerintah tentang pengelolaan sumberdaya hutan berkelanjutan yang diregulasi oleh lembaga pemerintah. Model ini juga mengasumsikan dan tidak mengabaikan modal-modal yang lain seperti modal fisik dan modal manusia, tetapi dalam implementasinya, modal-modal tersebut harus tetap diperhatikan dengan mengkombinasikannya dengan modal sosial.

*Kedelapan*, model penelitian ini dapat dipakai dan berjalan dengan baik jika adanya prasyarat antara lain adalah (1) adanya kemauan politik (*political will*) dari semua lembaga pemerintah untuk memposisikan masyarakat sekitar hutan yang hidup berdampingan dengan hutan sebagai *stakeholders* sekaligus pihak yang dapat melakukan pengelolaan sumberdaya hutan (2) adanya pengakuan pemegang otoritas bidang kehutanan bahwa masyarakat sekitar hutan adalah masyarakat yang berdasarkan sejarahnya merupakan pihak yang seharusnya mendapatkan manfaat dari sumberdaya hutan yang ada disekitarnya.

Model penelitian dan kerangka penelitian seperti disebutkan diatas menempatkan dan bahkan memastikan bahwa modal sosial adalah variabel independen atau variabel yang menjadi *causa prima* (sebab pertama dalam penelitian yang dilakukannya). Penempatan modal sosial sebagai variabel independen yang berpengaruh terhadap berbagai variabel dependen lainnya, sesuai dengan yang dinyatakan oleh Lawang (2005:208) bahwa hampir semua definisi tentang modal sosial menempatkan modal sosial itu sebagai variabel independen. Artinya modal sosial itu merupakan penyebab dari suatu tindakan individual atau tindakan kolektif yang memungkinkan suatu daya guna dan daya hasil tercapai.

Berdasarkan kerangka konsep seperti tersebut diatas maka penempatan modal sosial sebagai variabel independen terdahulu mendapatkan pembenaran sehingga modal sosial adalah variabel independen terhadap variabel dependen strategi pemberdayaan masyarakat, keterlibatan dan dukungan stakeholder, keberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumberdaya hutan berkelanjutan.

## BAB 3 METODOLOGI

### 3.1. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah merupakan penelitian studi kasus, yang bertujuan untuk : (1) Merumuskan konsep model pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan dengan memanfaatkan modal sosial masyarakat sekitar hutan; (2) Menganalisis pengaruh modal sosial pada pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan; dan (3) Merumuskan konsep hipotetik model pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan melalui pemanfaatan dan penguatan modal sosial secara optimal.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka penelitian ini akan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Membangun rancangan model konsep hipotetik model pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi modal sosial melalui kajian terhadap keterkaitan dan pengaruh terhadap masing-masing variabel-variabel dalam model tersebut. Keterkaitan dan pengaruh antara variabel tersebut dibuat dalam bentuk hipotesa jalur yang akan diuji masing-masing validitas dan reliabilitasnya, kemudian diuji kesesuaian model pada hubungan dan keterkaitan tersebut. Rumusan model tersebut akan diuji dengan *Structural Equation Modelling (SEM)*.
- b. Menganalisis bagaimana pengaruh kekuatan modal sosial terhadap proses pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Analisis Perbandingan dilakukan terhadap masyarakat sekitar hutan yang masuk klasifikasi LMDH maju (mempunyai modal sosial kuat) dan masyarakat sekitar hutan yang masuk klasifikasi LMDH belum maju (mempunyai modal sosial lemah) dengan metode *cross section table*. Klasifikasi maju dan belum maju dilakukan dengan metode evaluasi Model “Fujikake” melalui evaluasi 12 indikator keberdayaan. Keberdayaan tersebut

menggambarkan tingkat kemajuan dan kekuatan modal sosial masing masyarakat.

- c. Perumusan konsep model modal sosial untuk pemanfaatan dan penguatan modal sosial dengan pembuatan model dinamis *causal loop*.

Adapun secara jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1. Tujuan Penelitian dan Kebutuhan Data, Metode dan Analisa Yang dilakukan

Tujuan Penelitian	Data	Metode	Analisis
1. Merumuskan konsep model pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan dengan memanfaatkan modal sosial masyarakat sekitar hutan.	Data Primer: MS, SPM, KDS, KM dan PSDHB	- Rancangan bangun model hipotetik - Kuesioner - Wawancara - FGD - Dokumen	- SEM - Analisis Jalur - Uji Kesesuaian model
2. Menganalisis pengaruh modal sosial pada pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan	Data Primer: Kondisi eksisting keberdayaan masyarakat MS, KDS, SPM, KM, PSDHB	- Evaluasi model Fujikake - Aplikasi SEM tujuan 1 - Analisis jalur	- Cross section hasil SEM
3. Merumuskan konsep hipotetik model pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan melalui pemanfaatan dan penguatan modal sosial secara optimal	Hasil olahan tujuan 1 dan 2	Pendekatan sistem dinamis	Causal loop

Konsep dan rumusan model pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam rangka pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi modal sosial yang ada dalam masyarakat disusun dengan berdasarkan pada alur berpikir bahwa dalam sistem masyarakat sekitar hutan dengan sistem sumber daya hutan terdapat relasi dimana sumberdaya hutan memungkinkan peningkatan interaksi yang semakin tinggi antara masyarakat sekitar hutan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan lingkungan sumberdaya hutan. Sedangkan interaksi masyarakat sekitar hutan yang semakin meningkat, juga berarti peningkatan dan mobilitas modal sosial dalam masyarakat sekitar hutan.

Modal sosial (MS) yang terbentuk sebagai hasil interaksi dan adaptasi masyarakat sekitar hutan dengan lingkungan hutan, lingkungan sosial dan lingkungan buatan, membentuk suatu pranata dan tatanan nilai dalam masyarakat dan berpengaruh langsung pada proses pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam dimensi strategi pemberdayaan maupun keterlibatan dan dukungan *stakeholders* pemberdayaan masyarakat. Modal sosial berpengaruh langsung terhadap strategi pemberdayaan masyarakat (SPM) karena tanpa memperhatikan modal sosial, strategi pemberdayaan masyarakat menjadi sia-sia serta modal sosial adalah potensi yang dapat direalisasikan pada strategi pemberdayaan masyarakat, serta berdampak langsung terhadap keberdayaan masyarakat (KM).

Modal sosial (MS) berpengaruh langsung pula pada keterlibatan dan dukungan *stakeholders* (KDS) pemberdayaan karena modal sosial adalah potensi yang dapat didayagunakan para *stakeholders* pemberdayaan masyarakat untuk terlibat dan mendukung proses pemberdayaan, serta *stakeholders* kunci dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat dengan modal sosial yang melekat kepada masyarakat.

Modal sosial (MS) berpengaruh langsung juga terhadap pengelolaan sumberdaya hutan berkelanjutan (PSDHB), karena modal sosial adalah potensi yang harus direalisasikan demi pengelolaan sumberdaya hutan berkelanjutan serta masyarakat sebagai pemegang modal sosial adalah aktor kunci pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan.

Strategi pemberdayaan masyarakat (SPM) sebagai bagian integral dari proses pemberdayaan masyarakat, adalah strategi untuk menghasilkan keberdayaan masyarakat sebagai keluaran dari proses pemberdayaan masyarakat, menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat berpengaruh langsung pada keberdayaan masyarakat. Pilihan strategi dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan adalah penentu terhadap keberhasilan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan dan karenanya strategi pemberdayaan masyarakat (SPM) berpengaruh langsung terhadap pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan (PSDHB).

Keterlibatan dan dukungan *stakeholders* pemberdayaan (KDS) masyarakat berpengaruh langsung pula pada keberdayaan masyarakat (KM) karena *stakeholders* adalah aktor utama dalam proses pemberdayaan masyarakat demi menghasilkan keberdayaan masyarakat. Keterlibatan dan dukungan *stakeholders* (KDS) pemberdayaan masyarakat menjadi berpengaruh langsung pada pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan (PSDHB), karena sesungguhnya para *stakeholders* pemberdayaan masyarakat sekitar hutan adalah *stakeholders* pula dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Keberdayaan masyarakat (KM) sekitar hutan sebagai keluaran dari proses pemberdayaan masyarakat yang terlihat pada level individu, level kelompok/organisasi dan level sistem dalam masyarakat berpengaruh langsung pula pada pengelolaan sumberdaya hutan berkelanjutan (PSDHB), karena masyarakat sekitar hutan yang berdaya adalah masyarakat yang mampu untuk melakukan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan.

### **3.2. Tempat dan Waktu Penelitian**

Kegiatan penelitian dilakukan di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Sukabumi Perum Perhutani Wilayah III Jawa Barat, pada 12 desa sampel yang mencakup 6 Bagian Wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan (BWKPH). Penelitian dilakukan pada bulan Mei sampai dengan Desember 2009.

### **3.3. Populasi dan Sample Penelitian**

Populasi penelitian adalah masyarakat sekitar hutan yang berada di KPH Sukabumi. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purpose sampling* yaitu disesuaikan dengan tujuan penelitian. Sampel yang diambil adalah masyarakat sekitar hutan yang telah mengalami dan mengikuti proses pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Perum Perhutani. Karena prosedur estimasi modeling persamaan struktural yang paling umum merupakan estimasi kemungkinan maksimum (*Maximum Likelihood Estimation/MLE*), maka ukuran sampel minimum yang dianjurkan agar MLE stabil adalah 100 sampai 150; Salah

satu ukuran sampel yang dianjurkan adalah 200, agar memberikan dasar yang bagus bagi estimasi (Hair *et al.* 2006). Didasarkan pada karakteristik model pengukuran dasar dan rumitnya model dari penelitian ini, maka Hair *et al.* (2006) mengatakan bahwa model-model SEM yang berisi lima metode atau kurang, masing-masingnya dengan lebih dari tiga item (variabel yang diamati), dan dengan komunalitas item yang tinggi (0.6 atau lebih tinggi), dapat diperkirakan dengan sampel sekecil 100-150. Untuk itu ukuran sampel dalam penelitian ini khususnya dalam pembuatan model, ditetapkan sebanyak 240 responden (karena berkaitan dengan sebaran wilayah hutan penelitian yang terdiri dari 6 bagian pemangkuan hutan dan 12 desa responden, setiap desa satu LMDH, masing-masing LMDH 20 responden, sehingga total responden 240).

Untuk kajian analisis pengaruh kekuatan modal sosial terhadap variabel model pemberdayaan, maka sample responden pada 12 LMDH tersebut diklasifikasikan dalam 2 kriteria LMDH yang sudah maju (mempunyai modal sosial yang kuat), dan LMDH yang belum maju (mempunyai modal sosial yang lemah). Adapun klasifikasi LMDH tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Klasifikasi responden LMDH untuk kajian analisis perbandingan

No.	LMDH maju	LMDH belum maju
1.	LMDH Rimba Makmur	LMDH Rimba Mekar
2.	LMDH Tani Sejati	LMDH Jaya Abadi
3.	LMDH Agung Jaya	LMDH Wana Boga
4.	LMDH Harapan Mukti	LMDH Karya Bakti
5.	LMDH Lestari	LMDH Mandiri Putra
6.	LMDH Sempur	LMDH Mekar Makmur

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2009

Klasifikasi maju dan belum maju dilakukan dari hasil evaluasi pemberdayaan model *Fujikake* sebagai kondisi eksisting pemberdayaan dengan 12 indikator (lampiran 4). Keberdayaan yang dicapai tersebut disamakan dengan tingkat kemajuan yang dicapai atau tingkat kekuatan modal sosial yang ada pada masing-masing LMDH.



### 3.4. Variable Penelitian dan Defenisi Operasional

Adapun variabe penelitian dan defenisi operasional pada penyusunan model pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi modal sosial ini adalah sebagai berikut:

#### 3.4.1. Modal Sosial

Modal sosial adalah suatu norma atau nilai yang terbentuk dari hasil interaksi, yang kemudian dipahami dan menjadi acuan bersama dalam berperilaku masyarakat yang dapat memperkuat jaringan sosial yang positif, terjalannya kerjasama yang saling menguntungkan, menumbuhkan kepedulian dan solidaritas yang tinggi dan dapat mendorong tingkat kepercayaan antara sesama dalam rangka tercapainya tujuan bersama. Peningkatan modal sosial dapat meningkatkan hasil pengelolaan lingkungan, karena adanya manfaat modal sosial berupa pengurangan biaya, peningkatan kerjasama, peningkatan arus informasi, penurunan degradasi sumber daya alam. Peningkatan investasi dalam pengelolaan dan sistem irigasi, pemantauan perbaikan dan penegakan hukum (Claridge, T 2002).

Variabel modal sosial yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah kebersamaan (KB), kepercayaan (KP), jaringan sosial dan dukungan timbal balik (JS), keterlibatan/partisipasi KPs), kelembagaan (KL), kepemimpinan sosial (KS), norma, adat dan nilai budaya (NB), dan kearifan dan pengetahuan lokal (KPL).

Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu dalam teori tinjauan pustaka tentang modal sosial, maka peneliti menyarikan dan menyesuaikan kondisi masyarakat sekitar hutan dengan tujuan penelitian. Sejumlah indikator modal sosial yang dapat dimanfaatkan dalam pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan dengan bentuk pernyataan dengan permintaan persetujuan, yaitu: (a) Sangat Setuju Sekali = SSS; (b) Sangat Setuju = SS; (c) Setuju = S ; (d) Ragu-ragu = R; (e) Tidak Setuju = TS; (f) Sangat Tidak Setuju

= STS; (g) Sangat Tidak Setuju Sekali = STSS. Jika pernyataan sangat setuju sekali, sangat setuju, dan setuju, maka berarti pernyataan persetujuan tersebut mempunyai nilai yang mengarah menguatkan indikator, demikian seterusnya jika pernyataan dinyatakan dalam bentuk ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju sekali, berarti pernyataan persetujuan mengarah melemahkan indikator. Setiap pernyataan dinyatakan dalam bentuk kalimat positif (telah mencukupi), dan masing-masing pernyataan persetujuan indikator diukur dengan menggunakan skala Likert dengan tujuh pilihan jawaban, dimana jawaban terendah diberi skor 1 dan tertinggi diberi skor 7.

**Kebersamaan (KB)** adalah perasaan peduli atau ikut memiliki dan perasan menjadi bagian dari masyarakat dalam mencapai keberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Dengan keberdayaan dan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan, maka akan tercapai keseimbangan lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan ekonomi. Kebersamaan ini dapat dilihat dari indikatornya sebagai berikut:

1. Kebersamaan masyarakat dengan pemerintah dan para pemimpin politis dalam mengajukan usulan pengembangan desa (KB1);
2. Kesuksesan kegiatan nomor 1 (KB2);
3. Kerja sama masyarakat dengan pemerintah dan pimpinan politis untuk mengatasi isu tertentu dalam masyarakat tahun lalu (KB3);
4. Aktifitas pribadi berkaitan dalam politik, sosial, ekonomi, budaya dan keamanan dalam tiga tahun terakhir (KB4);
5. Frekuensi didekati seseorang dalam hal kegiatan politik, sosial, ekonomi, budaya dan keamanan dalam tiga tahun terakhir (KB5);
6. Jumlah isu penting masyarakat yang ditemui dalam kehidupan bermasyarakat di desa ini (KB6);
7. Kemudahan akses terhadap pelayanan publik di desa ini (KB7);
8. Upaya masyarakat dalam memperbaiki kualitas pelayanan atau mengatasi masalah publik di desa ini (KB8);
9. Jumlah kelompok masyarakat yang berperan penting dalam memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat atau mengatasi masalah (KB9);

10. Keberhasilan aksi kolektif masyarakat sekitar hutan (KB10);
11. Kerjasama masyarakat untuk mengatasi masalah hutan (KB11);
12. Aktifitas partisipasi masyarakat sekitar hutan (KB12);
13. Dorongan partisipasi masyarakat (KB13);
14. Jumlah pendukung dalam mencapai suatu kebaikan masyarakat (KB14);
15. Kegiatan kebersamaan dengan Perum Perhutani (KB15);
16. Jumlah orang/institusi yang membantu jika mengalami kesulitan atau musibah (KB16);
17. Jumlah orang/institusi yang membantu jika masyarakat mengalami kerugian ekonomi/keuangan di desa ini (KB17);
18. Hubungan yang terjadi dalam kaitan pemecahan masalah dan kesulitan masyarakat (KB18);
19. Kepedulian masyarakat terhadap kesulitan sesama anggota (KB19);
20. Rasa peduli terhadap kesejahteraan sesama warga (KB20);
21. Dukungan warga terhadap kegiatan proyek baru yang bermanfaat bagi masyarakat (KB21);
22. Bantuan yang diberikan terhadap warga yang membutuhkan bantuan telah mencukupi (KB22);
23. Kerjasama masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan (KB23);
24. Kepedulian Perum Perhutani terhadap masyarakat sekitar hutan (KB24);
25. Kepedulian masyarakat terhadap sumber daya hutan (KB25);
26. Penghargaan terhadap pada setiap pendapat warga lain (KB26);
27. Peluang yang diberikan kepada warga lain untuk berbicara dan bersikap yang berbeda (KB27);

**Kepercayaan (KP)** adalah harapan dan keyakinan (akan kejujuran dan kebaikan) yang tumbuh di dalam masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur, transparan dan kerjasama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama, yang semua berkaitan dengan pencapaian keberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Dengan keberdayaan dan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan, maka akan tercapai keseimbangan lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan ekonomi. Adapun indikator kepercayaan adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan terhadap Pemerintah/Perum Perhutani (KP1);
2. Kepercayaan terhadap tokoh masyarakat (KP2);
3. Kepercayaan terhadap antara sesama warga dalam hal pinjam meminjam keuangan (KP3);
4. Kepercayaan terhadap antara sesama warga, terhadap kepedulian warga terhadap kesulitan warga lain (KP4);
5. Kepercayaan terhadap antara sesama warga terhadap penitipan barang dan penitipan anak (KP5);
6. Kepercayaan terhadap nilai/norma masyarakat (KP6);

**Jaringan sosial dan dukungan timbal balik (JS)** adalah hubungan atau jaringan yang terjadi berdasarkan kepentingan atau keterkaitan individu secara prinsip atau pemikiran karena adanya komunikasi dan interaksi. Dukungan timbal balik adalah hubungan antar dua pihak yang saling memberi dan menerima, hubungan yang saling berbalas kebaikan antara individu. Modal sosial jaringan sosial dan dukungan timbal balik ini adalah terkait dengan pencapaian keberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Dengan keberdayaan dan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan, maka akan tercapai keseimbangan lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan ekonomi. Adapun indikator dari jaringan sosial dan dukungan timbal balik adalah sebagai berikut:

1. Kekompakan dan atau kepedulian masyarakat dalam mengatasi masalah yang mempengaruhi masyarakat termasuk masalah pelestarian sumber daya hutan (JS1);
2. Kepedulian dalam pengembangan jaringan sosial di desa ini (JS2);
3. Kerjasama masyarakat/lembaga untuk mengatasi masalah dan situasi yang mempengaruhi masyarakat desa (JS3);
4. Partisipasi pengambilan keputusan menghadapi situasi masalah masyarakat khususnya dalam pengelolaan sumber daya hutan (JS4)
5. Jumlah organisasi/lembaga masyarakat (JS5)
6. Keterkaitan masyarakat dengan pengelolaan hutan (JS6)
7. Frekuensi konflik antar lembaga/organisasi (JS7)

8. Jumlah kelompok yang dapat berbagi dengan sesama anggota (JS8)
9. Hubungan antar warga dengan warga lainnya (JS5)
10. Keharmonisan hubungan antara warga masyarakat sudah baik (JS6)
11. Hubungan antar lembaga/organisasi dalam masyarakat (JS11)
12. Jumlah organisasi yang dapat diakses dengan mudah. (JS12)
13. Kebersamaan dalam kemajuan masyarakat (JS13)
14. Kepedulian dalam mengatasi masalah masyarakat (JS14)
15. Kepedulian terhadap kemajuan masyarakat (JS15)

**Keterlibatan/Partisipasi (KPs)** adalah kesadaran dalam diri seseorang untuk ikut terlibat dalam berbagai hal yang berkaitan dengan diri dan lingkungannya, khususnya yang terkait dengan pencapaian keberdayaan masyarakat sekitar hutan dan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Dengan keberdayaan dan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan, maka akan tercapai keseimbangan lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan ekonomi. Adapun indikator keterlibatan/partisipasi adalah sebagai berikut:

1. Akses masyarakat terhadap pelayanan umum (KPs1)
2. Akses masyarakat memperoleh pinjaman keuangan (KPs2)
3. Akses masyarakat memperoleh sumber daya hutan (KPs3)
4. Partisipasi / keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumber daya hutan (KPs4)
5. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemerintah pengelolaan sumber daya hutan (KPs5)
6. Keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan sumber daya hutan (KPs6)
7. Perbandingan keterlibatan wanita dan Pria dalam pengelolaan sumber daya hutan (KPs7)

**Kelembagaan (KL)** adalah merupakan suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat yang dapat menentukan hubungan antara manusia atau antara organisasi yang diwadahi. Kelembagaan ini adalah gambaran yang terkait dengan pencapaian keberdayaan masyarakat sekitar hutan dan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Dengan keberdayaan

dan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan, maka akan tercapai keseimbangan lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan ekonomi. Adapun indikator dari kelembagaan ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah organisasi/asosiasi/kelompok (formal dan informal) kelembagaan yang berfungsi dalam desa (KL1)
2. Jumlah kelompok yang paling berpengaruh dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat (KL2)
3. Pengetahuan tentang prosedur dan kebijakan (KL3)
4. Frekuensi kegiatan lembaga dalam masyarakat (KL4)
5. Frekuensi hubungan kerjasama antara kelembagaan (KL5)
6. Partisipasi lembaga dalam kegiatan pemerintah dan dalam pengelolaan sumber daya hutan (KL6)
7. Pengaruh lembaga dalam pengambilan keputusan (KL7)
8. Kualitas kepemimpinan lembaga (KL8)
9. Keberhasilan lembaga dalam setiap kegiatan (KL9)
10. Frekuensi perubahan kepemimpinan dalam lembaga (KL10)
11. Kemampuan dan kualitas menjadi pemimpin efektif (KL11)
12. Persiapan kaderisasi kepemimpinan lembaga (KL12)
13. Persentase wanita menduduki pemimpin kelembagaan (KL13)
14. Kualitas kepemimpinan dalam organisasi (KL14)
15. Keharmonisan hubungan pimpinan, staf dan yang lainnya (KL15)
16. Legitimasi kepemimpinan organisasi (KL16)
17. Frekuensi pertemuan yang dilakukan organisasi (KL17)
18. Persentase masyarakat yang merasa terwakili dalam organisasi (KL18)
19. Kapasitas lembaga dalam menyelesaikan tugas (KL19)
20. Jumlah anggota keluarga yang menjadi anggota suatu organisasi (KL20)
21. Derajat partisipasi anggota dalam kelompok/organisasi (KL21)
22. Jumlah kehadiran dalam pertemuan keluarga (KL22)
23. Kesamaan agama dalam kelompok (KL23)
24. Kesamaan jenis kelamin dalam kelompok organisasi (KL24)
25. Kesamaan dalam pandangan politik dalam kelompok/organisasi (KL25)
26. Kesamaan pekerjaan dalam kelompok/organisasi (KL26)

27. Kesamaan usia dalam kelompok/organisasi (KL27)
28. Kesamaan pendidikan dalam kelompok/organisasi (KL28)
29. Efektifitas kepemimpinan kelompok/organisasi (KL29)
30. Pengaruh kelompok terhadap perolehan ketrampilan (KL30)

**Kepemimpinan sosial (KS)** adalah suatu proses mempengaruhi antara pemimpin dengan yang dipimpin dalam sebuah organisasi atau lembaga kemasyarakatan untuk mencapai suatu tujuan bersama, yaitu keberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Dengan keberdayaan dan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan, maka akan tercapai keseimbangan lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan ekonomi. Adapun indikator dari kepemimpinan sosial adalah sebagai berikut:

1. Perubahan kepemimpinan sosial (KS1)
2. Dukungan masyarakat terhadap kepemimpinan sosial (KS2)
3. Frekuensi hubungan personal keagamaan (KS3)
4. Frekuensi kemunculan kepemimpinan sosial dalam proses demokrasi (KS4)
5. Ketaatan terhadap kepemimpinan sosial (KS5)
6. Pengaruh kepemimpinan dalam masyarakat (KS6)
7. Aktifitas keterlibatan kepemimpinan dalam masyarakat. (KS7)

**Norma, adat dan nilai budaya (NB)** ialah sekumpulan aturan, pemahaman, nilai, harapan dan tujuan-tujuan yang diyakini dan dijalankan oleh sekelompok orang yang sangat berperan dalam mengontrol perilaku masyarakat, khususnya yang terkait dengan mencapai tujuan keberdayaan masyarakat sekitar hutan dan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Dengan keberdayaan dan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan, maka akan tercapai keseimbangan lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan ekonomi. Adapun indikator dari norma, adat, dan nilai-nilai budaya ini adalah sebagai berikut:

1. Ketaatan terhadap nilai kultur budaya lokal (NB1)
2. Persentase masyarakat yang masih memakai nilai kultur budaya tersebut dalam kehidupan (NB2)

3. Keberhasilan nilai kultur budaya dalam memberi solusi masalah masyarakat (NB3)
4. Ketaatan terhadap agama (NB4)
5. Ketaatan terhadap nilai/norma masyarakat (NB5)
6. Ketaatan terhadap tokoh masyarakat (NB6)
7. Ketaatan terhadap pihak luar/ LSM (NB7)
8. Ketaatan terhadap pemerintah (NB8)
9. Ketaatan terhadap Perum Perhutani (NB9)

**Kearifan dan pengetahuan lokal (KPL)** ialah pengetahuan yang berkembang dalam komunitas sebagai pendukung nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dalam rangka mencapai keberdayaan masyarakat sekitar hutan dan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Dengan keberdayaan dan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan, maka akan tercapai keseimbangan lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan ekonomi. Adapun indikator dari kearifan dan pengetahuan lokal adalah sebagai berikut:

1. Penghargaan terhadap nilai-nilai lokal dalam pengelolaan hutan (KLP1)
2. Jumlah bentuk kearifan dan pengetahuan lokal yang ada terkait dalam pengelolaan sumber daya hutan (KLP2)
3. Lama waktu kearifan dan pengetahuan lokal terpakai dalam pengelolaan sumber daya hutan (KLP3)
4. Ketaatan terhadap kearifan dan pengetahuan lokal yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari (KLP4)
5. Keberhasilan dalam pemakaian kearifan dan pengetahuan lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan (KLP5)
6. Kepercayaan terhadap keberhasilan aplikasi kearifan dan pengetahuan lokal. (KLP6)
7. Jenis kearifan dan pengetahuan lokal pengelolaan hutan (KLP7)
8. Pengaruh kearifan dan pengetahuan lokal dalam pengelolaan hutan (KLP8)
9. Kearifan dan pengetahuan lokal yang paling berpengaruh dalam masyarakat terkait pelestarian sumber daya hutan. (KLP9)



### 3.4.2. Strategi Pemberdayaan Masyarakat (SPM)

**Strategi Pemberdayaan Masyarakat (SPM)** ialah suatu rencana, arahan atau kebijakan berupa rangkaian tahapan kegiatan yang menjadi acuan dalam pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Dengan pemberdayaan dan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan, maka akan tercapai keseimbangan lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan ekonomi. Sejumlah indikator strategi pemberdayaan masyarakat berbentuk pernyataan dengan permintaan persetujuan responden, yaitu: (a) Sangat Setuju Sekali = SSS; (b) Sangat Setuju = SS; (c) Setuju = S ; (d) Ragu-ragu = R; (e) Tidak Setuju = TS; (f) Sangat Tidak Setuju = STS; (g) Sangat Tidak Setuju Sekali = STSS. Jika pernyataan sangat setuju sekali, sangat setuju, dan setuju, maka berarti pernyataan persetujuan tersebut mempunyai nilai yang mengarah menguatkan indikator, demikian seterusnya jika pernyataan dinyatakan dalam bentuk ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju sekali, berarti pernyataan persetujuan mengarah melemahkan indikator. Setiap pernyataan dinyatakan dalam bentuk kalimat positif (telah mencukupi), dan masing-masing pernyataan persetujuan indikator diukur dengan menggunakan skala Likert dengan tujuh pilihan jawaban, dimana jawaban terendah diberi skor 1 dan tertinggi diberi skor 7. Adapun indikator strategi pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Dukungan masyarakat terhadap model strategi pemberdayaan (SPM1)
2. Keterlibatan masyarakat sekitar hutan dalam proses pemilihan strategi/model pemberdayaan (SPM2)
3. Keterlibatan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan Perhutani (SPM3)
4. Strategi pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan Perhutani sudah sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sekitar hutan (SPM4)
5. Kesesuaian antara cara pengelolaan sumber daya hutan dengan kondisi masyarakat sudah cukup sesuai (SPM5)

6. Cara pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan Perhutani telah meningkatkan kemampuan masyarakat sekitar hutan untuk turut mengelola sumber daya hutan (SPM6)
7. Pengaruh strategi pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan pada potensi masyarakat sudah memadai (SPM7)
8. Cara pengelolaan sumber daya hutan yang ditetapkan Perhutani telah sesuai dengan harapan sebagian besar masyarakat sekitar hutan (SPM8)
9. Persetujuan masyarakat terhadap cara-cara yang dilakukan Perhutani dalam pengelolaan sumber daya hutan sudah cukup tinggi (SPM9)
10. Strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh Perhutani telah meningkatkan keberdayaan masyarakat sekitar hutan (SPM10).

#### **3.4.3. Keterlibatan dan dukungan stakeholders (KDS)**

**Keterlibatan dan dukungan stakeholders (KDS)** ialah suatu bentuk peran serta atau partisipasi dan dukungan dari para pihak terkait dalam proses pemberdayaan untuk mencapai keberdayaan masyarakat sekitar hutan dan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Sejumlah indikator keterlibatan dan dukungan stakeholders pemberdayaan dengan bentuk pernyataan dengan permintaan persetujuan responden, yaitu: (a) Sangat Setuju Sekali = SSS; (b) Sangat Setuju = SS; (c) Setuju = S ; (d) Ragu-ragu = R; (e) Tidak Setuju = TS; (f) Sangat Tidak Setuju = STS; (g) Sangat Tidak Setuju Sekali = STSS. Jika pernyataan sangat setuju sekali, sangat setuju, dan setuju, maka berarti pernyataan persetujuan tersebut mempunyai nilai yang mengarah menguatkan indikator, demikian seterusnya jika pernyataan dinyatakan dalam bentuk ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju sekali, berarti pernyataan persetujuan mengarah melemahkan indikator. Setiap pernyataan dinyatakan dalam bentuk kalimat positif (telah mencukupi), dan masing-masing pernyataan persetujuan indikator diukur dengan menggunakan skala Likert dengan tujuh pilihan jawaban, dimana jawaban terendah diberi skor 1 dan tertinggi diberi skor 7. Adapun indikator variabel keterlibatan dan dukungan stakeholders (KDS) adalah sebagai berikut:

1. Keterlibatan Pemerintah/Perhutani dalam pengelolaan sumber daya hutan (KDS1)
2. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan (KDS2)
3. Keterlibatan lembaga swasta dalam pengelolaan sumber daya hutan (KDS3);
4. Keterlibatan lembaga pemerhati kehutanan dalam pengelolaan sumber daya hutan (KDS4);
5. Keterlibatan Pemerintah/Perhutani dalam pengelolaan sumber daya hutan sudah sesuai dengan perannya (KDS5);
6. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan sudah sesuai dengan perannya (KDS6);
7. Keterlibatan lembaga swasta dalam pengelolaan sumber daya hutan sudah sesuai dengan perannya (KDS7);
8. Keterlibatan pemerhati lingkungan dalam pengelolaan sumber daya hutan sesuai dengan perannya (KDS8)
9. Pemerintah/Perum Perhutani mendukung usaha peran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sumber daya hutan (KDS9)
10. Masyarakat sekitar hutan mendukung usaha peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan (KDS10)
11. Lembaga swasta mendukung usaha peningkatan peran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sumber daya hutan (KDS11);
12. Lembaga pemerhati mendukung usaha peningkatan peran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sumber daya hutan (KDS12);
13. Keberhasilan peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan adalah karena dukungan Pemerintah/Perhutani (KDS13)
14. Keberhasilan peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan adalah karena dukungan sebagian besar masyarakat (KDS14)
15. Keberhasilan peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan adalah karena dukungan sebagian besar lembaga swasta (KDS15).
16. Keberhasilan peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan adalah karena dukungan lembaga pemerhati kehutanan (KDS16).
17. Motivasi peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi dasar bagi Pemerintah/Perhutani untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya hutan (KDS17);

18. Motivasi peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi dasar bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya hutan (KDS18);
19. Motivasi peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi dasar bagi lembaga swasta untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya hutan (KDS19);
20. Motivasi peningkatan kesejahteraan menjadi dasar bagi lembaga pemerhati kehutanan untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya hutan (KDS20).
21. Partisipasi pemerintah/perhutani dalam pemberdayaan masyarakat telah sesuai dengan kondisi masyarakat sekitar hutan (KDS21).
22. Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat telah sesuai dengan kondisi masyarakat sekitar hutan (KDS22).
23. Partisipasi lembaga swasta dalam pemberdayaan masyarakat telah sesuai dengan kondisi masyarakat sekitar hutan (KDS23).
24. Partisipasi lembaga pemerhati kehutanan dalam pemberdayaan masyarakat telah sesuai dengan kondisi masyarakat sekitar hutan (KDS24).

Dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, maka *stakeholders* yang terlibat dan perannya masing-masing adalah: Pemerintah/Perhutani, masyarakat, pihak swasta dan lembaga pemerhati lingkungan/kehutanan.

#### 3.4.4. Keberdayaan Masyarakat (KM)

Keberdayaan Masyarakat adalah dimilikinya daya, kekuatan atau kemampuan oleh masyarakat sekitar hutan untuk mengidentifikasi potensi dan masalah serta dapat menentukan alternatif pemecahannya secara mandiri. Keberdayaan masyarakat sekitar hutan diukur melalui pengukuran dimensi dan indikator pemberdayaan pada level individu, level masyarakat dan level system. Keberdayaan masyarakat adalah hasil dari proses pemberdayaan dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan, sehingga dengan tercapainya keberdayaan masyarakat dapat memberi gambaran pula terhadap tercapainya keseimbangan lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan ekonomi. Sejumlah indikator keberdayaan masyarakat dengan bentuk pernyataan dengan permintaan persetujuan responden, yaitu: (a) Sangat Setuju Sekali = SSS; (b) Sangat Setuju = SS; (c) Setuju = S; (d) Ragu-ragu = R; (e) Tidak Setuju = TS; (f)

Sangat Tidak Setuju = STS; (g) Sangat Tidak Setuju Sekali = STSS. Jika pernyataan sangat setuju sekali, sangat setuju, dan setuju, maka berarti pernyataan persetujuan tersebut mempunyai nilai yang mengarah menguatkan indikator, demikian seterusnya jika pernyataan dinyatakan dalam bentuk ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju sekali, berarti pernyataan persetujuan mengarah melemahkan indikator. Setiap pernyataan dinyatakan dalam bentuk kalimat positif (telah mencukupi), dan masing-masing pernyataan persetujuan indikator diukur dengan menggunakan skala Likert dengan tujuh pilihan jawaban, dimana jawaban terendah diberi skor 1 dan tertinggi diberi skor 7. Adapun indikator keberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

**Level Individu: Pengembangan potensi dan Ketrampilan (PPK)** untuk keberdayaan masyarakat sekitar hutan dan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan :

1. Kepemilikan aset/modal individu (PPK1)
2. Kepemilikan aset/modal masyarakat (PPK2)
3. Kekuatan fisik individu (PPK3)
4. Kekuatan fisik Masyarakat (PPK4)
5. Tidak terisolasi individu (PPK5)
6. Tidak terisolasi masyarakat (PPK6)
7. Penguasaan ketrampilan individu (PPK7)
8. Penguasaan ketrampilan masyarakat (PPK8)
9. Keberfungsian lembaga usaha individu (PPK9)
10. Kebefungsian lembaga usaha masyarakat (PPK10)

**Level Kelompok/Organisasi: Partisipasi dalam pembangunan (PDP)**, khususnya yang terkait dengan keberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan:

1. Perencanaan dan pengambilan keputusan individu(PDP1)
2. Perencanaan dan pengambilan keputusan masyarakat (PDP2)
3. Pelaksanaan dan pengawasan keputusan bersama individu (PDP3)
4. Pelaksanaan dan pengawasan keputusan bersama masyarakat (PDP4)
5. Pemanfaatan hasil-hasil pembangunan secara individu (PDP5)

## 6. Pemanfaatan hasil-hasil pembangunan masyarakat (PDP6)

**Level Sistem:** **Kemandirian masyarakat (KM)** yang menggambarkan keberdayaan masyarakat dan dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan.

1. Pengurangan ketergantungan kepada bantuan luar secara individu (KM1)
2. Pengurangan ketergantungan masyarakat kepada bantuan luar (KM2)

### 3.4.5. Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan (PSDHB)

Pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan adalah sistem pengelolaan hutan yang menjamin keberlanjutan fungsi produksi (ekonomi) dan manfaat sumber daya hutan dengan memperhatikan fungsi ekonomi, sosial dan lingkungan secara seimbang dan tidak saling mendominasi.

Sejumlah indikator pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan dengan bentuk pernyataan dengan permintaan persetujuan responden, yaitu: (a) Sangat Setuju Sekali = SSS; (b) Sangat Setuju = SS; (c) Setuju = S ; (d) Ragu-ragu = R; (e) Tidak Setuju = TS; (f) Sangat Tidak Setuju = STS; (g) Sangat Tidak Setuju Sekali = STSS. Jika pernyataan sangat setuju sekali, sangat setuju, dan setuju, maka berarti pernyataan persetujuan tersebut mempunyai nilai yang mengarah menguatkan indikator, demikian seterusnya jika pernyataan dinyatakan dalam bentuk ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju sekali, berarti pernyataan persetujuan mengarah melemahkan indikator. Setiap pernyataan dinyatakan dalam bentuk kalimat positif (telah mencukupi), dan masing-masing pernyataan persetujuan indikator diukur dengan skala Likert dengan tujuh pilihan jawaban, dimana jawaban terendah diberi skor 1 dan tertinggi diberi skor 7. Adapun indikator pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan adalah sebagaimana berikut:

**Kelestarian fungsi produksi (ekonomi) (KFP)**, adalah kelestarian atau keberlanjutan dalam menghasilkan produksi sumber daya hutan dengan indikator:

- (1) Adanya kepastian penggunaan lahan sebagi kawasan hutan, (KFP1)
- (2) Status penataan batasan kawasan hutan (KFP2)

- (3) Kualitas fisik tata batas (KFP3)
- (4) Perencanaan dan implementasi penataan hutan menurut tipe-tipe dan fungsi-fungsi hutan (KFP4)
- (5) Pengorganisasian kawasan yang menjamin kegiatan produksi (KFP5)
- (6) Produksi yang sesuai dengan kemampuan produktivitas hutan (KFP6)
- (7) Meminimumkan tingkat pembalakan (KFP7)
- (8) Meminimumkan dampak perubahan penutupan lahan akibat perambahan (KFP8)
- (9) Alih fungsi kawasan hutan (KFP9)
- (10) Kebakaran dan gangguan lainnya (KFP10)

**Kelestarian fungsi ekologi (KFE)**, adalah kelestarian atau keberlanjutan ekologi yang tetap menjaga ekosistem hutan produksi yang meliputi struktur fisik hutan, struktur geologi dan struktur manusia, dengan indikator sebagai berikut:

- (1) Penanggulangan kebakaran dan gangguan hutan (KFE1)
- (2) Meletakkan proporsi yang proporsional antara pemanfaatan hutan dengan fungsi ekologi hutan, (KFE2)
- (3) Tidak menimbulkan dampak kerusakan hutan (KFE3)
- (4) Tidak menimbulkan kerusakan lingkungan hutan (KFE 4)
- (5) Tidak menimbulkan hilangnya keanekaragaman hayati (KFE5)
- (6) Adanya kejelasan batas antara kawasan konsesi dengan kawasan komunitas setempat yang terdelinasi secara jelas (KFE6)

**Kelestarian fungsi sosial (KFS)**, adalah kelestarian atau keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat sekitar hutan dengan seluruh tatatan nilai sosial, budaya, ekonomi dan politik , dengan indikator sebagai berikut:

- (1) Adanya kejelasan batas antara kawasan konsesi dengan kawasan komunitas setempat yang terdelinasi secara jelas (KFS1)
- (2) Adanya jaminan akses pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat (KFS2)
- (3) Sebagai sumber-sumber ekonomi komunitas masyarakat sekitar hutan (KFS3)
- (4) Adanya pengakuan dan kompensasi formal terhadap penggunaan pengetahuan tradisional masyarakat adat, (KFS4)

- (5) Komunitas masyarakat sekitar hutan dapat mengakses kesempatan kerja dan peluang berusaha serta (KFS5)
- (6) Meminimasi dampak kerusakan sumber daya hutan terhadap kesehatan masyarakat (KFS6)
- (7) Terjaminnya hak asasi manusia, (KFS7)
- (8) Promosi pemberdayaan komunitas, (KFS8)
- (9) Kerjasama dengan otoritas kesehatan, (KFS9)
- (10) Keberadaan dan pelaksanaan kesepakatan kerja bersama, (KFS10)
- (11) Pelaksanaan upah minimum regional (UMR) dan gaji yang adil, (KFS11)
- (12) Terjaminnya kesehatan dan keselamatan kerja.(KFS12).

### **3.5. Metode Pengumpulan dan Analisis Data**

Secara umum kegiatan ini menerapkan prinsip triangulasi dalam pengumpulan data karena dipandang lebih mampu menjamin kebenaran ilmiah. Data penelitian ini berasal dari tiga sumber yaitu melalui pengamatan observasi visual di lapangan, kuesioner, wawancara, dan dokumen tertulis berupa data, peristiwa, maupun catatan-catatan di lapangan. Keterlibatan langsung peneliti dalam proses pelaksanaan di lapangan merupakan sumber data yang penting.

Data yang dihimpun dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden yang meliputi data tentang: modal sosial, strategi pemberdayaan masyarakat, keterlibatan dan dukungan stakeholders, keberdayaan masyarakat, dan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pencatatan data yang telah ada tersedia di Perum Perhutani Wilayah III, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten, Kecamatan dan Desa serta Instansi terkait.

Model konsep hipotik yang telah dibentuk berdasarkan konsep-konsep dan teori sebelumnya dibuktikan dan dianalisis pengaruh variabel eksosogen terhadap variabel endogen. Pengaruh tersebut sangat kompleks, dimana terdapat variabel bebas, variabel antara dan variabel terikat. Variabel-variabel tersebut merupakan



variabel laten yang dibentuk oleh beberapa indikator. Oleh karena itu untuk menganalisis data dalam penelitian ini digunakan teknis analisis *Structural Equation Modeling (SEM)* dan SPSS. Penggunaan SEM memungkinkan peneliti untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian, mengkonfirmasikan ketepatan model sekaligus menguji pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. SEM dapat menguji secara bersama-sama. SEM memiliki kemampuan untuk memperkirakan berbagai hubungan dan saling keterkaitan hubungan ketika menerangkan kesalahan pengukuran dalam proses estimasi (Hair *et al.* 2006).

Peneliti tertarik dengan SEM karena SEM menyediakan cara pengujian yang menarik secara konseptual untuk sebuah teori. Jika seorang peneliti mengungkapkan sebuah teori dalam sebuah hubungan diantara variabel yang diukur, maka SEM akan menilai bagaimana teori sesuai dengan realita seperti yang tergambar pada data.

Hair *et al.* (2006) menyebutkan proses keputusan SEM enam tahap, enam tahap ini adalah sebagai berikut: (1) menetapkan metode individual, (2) mengembangkan seluruh model pengukuran, (3) merancang studi untuk memberikan hasil empiris, (4) menilai validitas model pengukuran, (5) menetapkan model struktural, dan (6) menilai validitas model struktural.

Proses dimulai dengan menjalankan metode yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian survei dan melibatkan serangkaian item skala dalam skala seperti 7-poin Likert. Baik dikembangkan bagi studi atau diambil dari berbagai sumber, maka skala ini diperlukan untuk melaksanakan *pretest* sebelum *testing* konfirmasi (Hair *et al.* 2006). Mereka juga menyebutkan bahwa *pretest* ini penting jika skala diterapkan dalam konteks khusus, dalam kasus ini yaitu konteks khusus dari model pemberdayaan. *Pretest* yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengambil 50 responden dari populasi yang ada.

Tahap selanjutnya termasuk desain studi yang akan memberikan hasil konfirmasi. Pengukuran peneliti sedang diuji. Jika semuanya berlangsung bagus pada model pengukuran, sampel yang sama akan digunakan untuk menguji model struktural.

Sebelumnya model pengukuran harus ditetapkan dengan tepat, sehingga model SEM bisa mengukur secara empiris mengenai hubungan diantara variabel dan konsep yang digambarkan oleh teori pengukuran. Hasilnya memungkinkan kita membandingkan antara teori dan praktek seperti pada data sampel. Proses menetapkan model struktural ini menggunakan unit analisis yang tepat, menggambarkan teori secara visual dengan menggunakan diagram alur, menjelaskan metode yang eksogen dan endogen, dan beberapa isu yang berkaitan seperti ukuran sampel dan identifikasi.

Tahap terakhir adalah menilai validitas model struktural. Data yang diamati masih digambarkan oleh matriks kovarian dari sampel yang diamati. Namun, sangat disadari bahwa tidaklah mudah untuk menangkap makna (*meaning*) dari sesuatu yang tanpa wujud, seperti yang menjadi variabel dalam penelitian ini, walaupun telah diformula menjadi definisi operasional namun modal sosial keberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan tetap rentan untuk bermulti makna. Karena itu variabel penelitian dijabarkan dalam bentuk indikator sebanyak mungkin namun setelah data dari item-item pertanyaan sebagai penjabaran indikator mencapai jumlah yang sangat banyak, instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan dibuat dengan pertimbangan sebanyak mungkin agar tidak terjadi multi makna tentang variabel penelitian terutama oleh responden. Pada tahap konseptualisasi model yang dibangun mengharuskan berfokus pada model struktural dan harus mempresentasikan kerangka teoritis yang diuji. Pengembangan model berdasarkan teori dan konsep ini dikenal sebagai pembuatan model dengan pendekatan konfirmatori. Dalam penelitian ini, justifikasi teori yang digunakan dalam membangun model konsep penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.3. Justifikasi Teori Untuk Model Konseptual Penelitian

Hipotesis	Justifikasi Teori
Modal sosial berpengaruh pada strategi pemberdayaan masyarakat	Suharto (2005), Litbang Pertanian (2006), Fukuyama (1995)
Modal sosial berpengaruh pada keterlibatan dan dukungan stakeholders pemberdayaan	Suharto (2005), Kilpatrick (2000)
Modal sosial berpengaruh pada keberdayaan masyarakat	ADB ((2000), Putnam (1993), Rahadiansah (2005), Suharto (2003)

Lanjutan Tabel 3.3

Hipotesis	Justifikasi Teori
Modal sosial berpengaruh pada pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan	Barber <i>et al.</i> (1997), Mehra (2006), Agus (2004), Grootaert <i>et al.</i> (2003), Badaruddin (2008), World Bank (1993), Fukuyama (1995)
Strategi pemberdayaan masyarakat pada keberdayaan masyarakat	Johnson (2002),
Strategi pemberdayaan masyarakat berpengaruh pada pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan	Sutomo (2008), Albee & Boyd (1997), Subejo & Supriyanto (2004)
Keterlibatan dan dukungan stakeholders pemberdayaan berpengaruh pada keberdayaan masyarakat	Agung (2004),
Keterlibatan dan dukungan stakeholders pemberdayaan berpengaruh pada pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan	Agung (2004)
Keberdayaan masyarakat berpengaruh pada pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan	Mariana (2000), Barber (1999)
Modal sosial berpengaruh pada pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan melalui strategi pemberdayaan masyarakat dan keberdayaan masyarakat	Grootaert (2003),
Modal sosial berpengaruh pada pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan melalui keterlibatan dan dukungan stakeholders pemberdayaan dan keberdayaan masyarakat	Mariane (2000),
Modal sosial berpengaruh pada pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan melalui keberdayaan masyarakat	Grootaert (2003), Sutomo (2008)

Pada tahap pengujian model yang telah dibangun, maka secara keseluruhan *goodness of fit* dari suatu model dapat dinilai berdasarkan beberapa ukuran fit:

1. CMIN/DF: *the minimum sample discrepancy function (CMIN)* dibagi dengan *degree of freedom*-nya akan menghasilkan indeks CMIN/DF, yang umumnya dilaporkan oleh para peneliti sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat fitnya sebuah model. Dalam hal ini CMIN/DF tidak lain adalah statistik chi-square,  $X^2$  dibagi DF nya sehingga  $X^2$  relatif. Nilai  $X^2$  relatif kurang dari 2.0 atau bahkan kadang-kadang kurang dari 3.0 adalah indikator dari *acceptable fit* antara model dan data (Arbuckle dalam Ferdinand, 2002)

2. *Goodness Of Fit Index (GFI)*: GFI merupakan suatu ukuran mengenai ketepatan model dalam menghasilkan observed matriks kovarians. Nilai GFI harus berkisar antara 0 dan 1. Nilai GFI yang lebih besar daripada 0,9 menunjukkan fit suatu model yang baik (Ghozali & Fuad, 2005)
3. *Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)*: RMSEA ini mengukur penyimpangan nilai parameter pada suatu model dengan matriks kovarians populasinya. Nilai RMSEA yang kurang dari 0,05 mengindikasikan adanya model fit, sedangkan RMSEA yang berkisar 0,08 sampai dengan 0,1 menunjukkan model memiliki fit yang cukup, sedangkan RMSEA lebih besar dari 0,1 mengindikasikan model fit yang sangat jelek (Ghozali & Fuad, 2005).
4. *Root Mean Residual (RMR)*: RMR mengukur residu atau selisih kovarian sampel dengan kovarian *estimate*. Semakin kecil hasil RMR akan semakin baik dan menandakan model fit, karena selisih antara sampel dengan *estimate* semakin kecil. Semakin besar hasil RMR akan semakin buruk, karena nilai selisih antara sampel dan *estimate* semakin besar pula dan menandakan model tidak fit

Penelitian ini merupakan penelitian atas lima variabel. Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan analisis multivariat dengan SEM. Dalam pengujian hipotesis yang diajukan, data yang diperoleh selanjutnya akan diolah sesuai dengan kebutuhan analisis. Untuk kepentingan pembahasan, data diolah dan dipaparkan berdasarkan prinsip-prinsip statistik deskriptif, sedangkan untuk kepentingan analisis dan pengujian hipotesis, digunakan pendekatan statistik inferensial.

## BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Deskripsi Keadaan Umum Lokasi Penelitian

#### 4.1.1. Deskripsi Geografi dan Demografi Kabupaten Sukabumi

##### Kondisi Geografis

Kabupaten Sukabumi secara geografis berada antara 6<sup>0</sup>57' Lintang Selatan dan 106<sup>0</sup>00' Bujur Timur dengan luas daerah 4.200 km<sup>2</sup> atau 9,18% dari luas Provinsi Jawa Barat (dengan Banten) atau 3,01% dari luas Pulau Jawa. Dari tata letak Kabupaten Sukabumi berada:

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi
2. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudera Indonesia
3. Sebelah Barat, berbatasan dengan Provinsi Banten
4. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Cianjur

Sedangkan Ibu Kota Kabupaten Sukabumi berada di Kecamatan Pelabuhan Ratu, meskipun sebagian besar Kantor Pemerintah masih berada di Kecamatan Cisaat.

Bentuk topografi wilayah Kabupaten Sukabumi pada umumnya meliputi permukaan yang bergelombang di daerah bagian selatan dan bergunung di daerah bagian utara dan tengah. Dengan adanya daerah pantai dan gunung yang mempunyai ketinggian mencapai 2.958 meter di atas permukaan laut (dpl) menyebabkan keadaan lereng sangat miring (lebih dari 35<sup>0</sup>) meliputi 29% dari luas wilayah Kabupaten Sukabumi, kemiringan antara 13<sup>0</sup>-35<sup>0</sup> meliputi 37% dan kemiringan 2<sup>0</sup>-13<sup>0</sup> meliputi 21% dari luas wilayah Kabupaten Sukabumi dan sisanya 3% merupakan daerah datar berada di luar Kabupaten Sukabumi. Keadaan demikian mengakibatkan daerah Sukabumi rawan longsor.

Berdasarkan aspek sumber daya air, sumber daya air yang ada di Sukabumi cukup banyak, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya aliran sungai (seperti

sungai Cilandar dan anak-anak sungainya, Cipelang, Cicatih, Citarik, Cibodas, Cidadap, Ciletuh, Cikarang, Cikaso dan Cibuni).

Berdasarkan aspek kemampuan tanah (kedalaman tanah dan tekstur) daerah Kabupaten Sukabumi sebagian besar Tanah Sedang (Tanah Lempung), kedalamannya dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) golongan besar, yaitu Sangat Dalam (lebih dari 90 cm) dan Kurang Dalam (kurang dari 90 cm). Kedalaman tanah sangat dalam tersebar di bagian utara, sedangkan kedalaman Tanah Kurang Dalam tersebar di bagian tengah dan selatan, hal ini mengakibatkan di bagian utara lebih subur dibanding wilayah bagian selatan.

Rata-rata hujan per tahun sekitar 2.987 mm dari 160 hari hujan, suhu udara berkisar antara  $18^{\circ}$  –  $30^{\circ}$ , dengan suhu rata-rata  $26^{\circ}$ , kelembaban rata-rata sebesar 85%, sedangkan potensi geologis antara lain sumber panas bumi di daerah Gunung Salak dan Cisolok, bahan tambang dan bahan galian emas, perak, galena, batu bara, pasir kuarsa, marmer, pasir besi, bentonit, dan lain-lain.

Jenis tanah di bagian utara umumnya terdiri dari tanah *latosol*, *andosol* dan *regosol*, di bagian tengah umumnya terdiri dari tanah *latosol* dan *podsolik*, sedangkan di bagian selatan sebagian terdiri atas tanah *laterit*, *grumosol*, *podsolik*, dan *alluvial*.

### **Demografis**

Wilayah pemerintahan yang berada di Kabupaten Sukabumi terdiri atas 45 kecamatan, 339 desa, 3 kelurahan. Dari 339 desa sebanyak 115 desa berada atau berbatasan dengan kawasan hutan yang dikelola Perum Perhutani KPH Sukabumi. Jumlah penduduk di Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 mencapai 2.391.736 jiwa terdiri dari 1.199.698 laki-laki dan 1.192.038 perempuan, yang terurai sebagaimana Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sukabumi Tahun 2000-2010

Kecamatan	Jumlah Penduduk			Rasio Jenis Kelamin	Kepadatan penduduk per Km <sup>2</sup>
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
2000	1.058.852	1.033.596	2.092.448	102,44	506,89
2001	1.075.979	1.053.685	2.129.664	102,12	515,91
2002	1.094.940	1.075.241	2.170.181	101,83	525,72
2003	1.115.074	1.097.747	2.212.821	101,58	536,05
2004	1.135.889	1.120.755	2.256.644	101,35	546,67
2005	1.156.871	1.143.773	2.300.644	101,15	557,33
2006	1.178.005	1.167.454	2.345.459	100,90	568,18
2007	1.199.698	1.192.038	2.391.736	100,64	579,39
2008	1.221.177	1.216.218	2.437.395	100,41	590,45
2009	1.241.050	1.238.259	2.479.309	100,23	600,61
2010	1.258.922	1.257.698	2.516.620	100,10	609,65

Sumber : BPS Kabupaten Sukabumi, Proyeksi Penduduk Hasil SP 2000

Berdasarkan Tabel 4.1, terlihat bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan serta peningkatan kepadatan penduduk per km<sup>2</sup> dari tahun 2000–2010 mencapai 20,27% atau 2,03% pertahun. Peningkatan pertambahan kepadatan penduduk per km<sup>2</sup> tersebut tentu saja membawa sejumlah resiko terhadap luas lahan yang dapat digarap oleh setiap petani, apalagi ditambah dengan komposisi penduduk menurut kelompok umur seperti terlihat pada Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sukabumi Tahun 2007

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	120.028	120.628	240.656
5 - 9	106.274	111.531	217.805
10 - 14	120.020	121.361	241.381
15 - 19	123.059	121.337	244.396
20 - 24	102.195	105.884	208.079
25 - 29	90.166	105.291	195.457
30 - 34	94.373	103.978	198.351
35 - 39	94.784	89.821	184.605
40 - 44	85.931	78.711	164.642
45 - 49	74.392	66.761	141.153
50 - 54	58.989	49.790	108.779
55 - 59	42.005	35.724	77.729
60 - 64	29.718	26.742	56.460
65 - 69	22.946	21.436	44.382
70 - 74	17.253	16.593	33.846
75 +	17.565	16.450	34.015
Jumlah	1.199.698	1.192.038	2.391.736

Sumber BPS Kabupaten Sukabumi, Proyeksi Penduduk Hasil SP2000

Pada Tabel 4.2 diatas terlihat bahwa 48,18 % dari penduduk berada pada kelompok umur 0-24 tahun, yang pada masanya tetap membutuhkan lapangan kerja termasuk disektor pertanian dan kehutanan yang ada disekitar desa mereka, termasuk bila dihubungkan dengan jumlah penduduk menurut kelompok umur sekolah seperti terlihat pada Tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Sekolah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sukabumi Tahun 2007

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
0-6	164.156	166.612	330.768
7-12	130.784	135.898	266.682
13-15	77.362	76.579	153.941
16-18	73.866	72.759	146.625
19-24	125.408	128.893	254.301
25+	628.122	611.297	1.239.419
Jumlah	1.199.698	1.192.038	2.391.736

Sumber: BPS Kabupaten Sukabumi, Proyeksi Penduduk Hasil SP2000

Berdasarkan Tabel 4.3, ternyata memang hampir setengah dari penduduk Kabupaten Sukabumi adalah penduduk umur sekolah. Dan jumlah penduduk usia 0-6 tahun sebanyak 13,82 % dari semua kelompok umur sekolah yang lainnya membutuhkan perhatian tersendiri akan kebutuhan sarana pendidikan dan keberlangsungan pendidikannya. Selain kebutuhan sarana pendidikan dan keberlangsungan pendidikan yang harus diperhatikan, maka Kabupaten Sukabumi masih harus berhadapan dengan masalah adanya keluarga prasejahtera seperti terlihat pada Tabel 4.4 berikut ini.

Tabel 4.4. Pentahapan Keluarga Sejahtera Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 dan 2007

Pentahapan Keluarga Sejahtera	Tahun 2006	Tahun 2007
Keluarga Pra Sejahtera	126.560	128.027
Keluarga Sejahtera I	162.595	168.391
Keluarga Sejahtera II	219.688	228.814
Keluarga Sejahtera III	91.763	91.718
Keluarga Sejahtera III Plus	22.883	27.104

Sumber: Dinas KB dan Pemberdayaan Perempuan Sukabumi, 2009

Berdasarkan Tabel 4.4 terlihat bahwa 19,88% keluarga masih berada pada tahap Keluarga Pra Sejahtera, dengan perkembangan yang cenderung meningkat, sehingga diperlukan penanganan yang serius agar persentase dan kecenderungan



perkembangan meningkatnya angka Keluarga Prasejahtera, termasuk di Kecamatan yang menjadi lokasi penelitian seperti tertera pada Tabel 4.5. Dengan dasar ini pula yang menjadi alasan terpilihnya lokus penelitian.

Tabel 4.5. Pentahapan Keluarga Sejahtera Kecamatan Desa 12 LMDH Responden Tahun 2007

Kecamatan	Pra Sejahtera	Sejahtera I	Sejahtera II	Sejahtera III	Sejahtera III Plus
1. Cibitung	1.046	1.784	4.064	611	171
2. Sagaranten	2.848	4.202	6.190	1.770	623
3. Cidadap	873	964	4.482	70	25
4. Jampang Tengah	4.281	7.508	6.251	1.936	449
5. Waluran	836	2.357	3.304	608	348
6. Lengkong	3.536	2.493	1.355	491	193
7. Simpenan	2.102	3.761	6.738	902	599
8. Pelabuhan Ratu	4.843	4.737	8.721	4.645	1.248
9. Nyalindung	2.535	3.717	7.018	1.526	127

Sumber: Dinas KB dan Pemberdayaan Perempuan Sukabumi, 2008

Berdasarkan Tabel 4.5, terlihat bahwa jumlah keluarga prasejahtera di lokasi penelitian berkemiripan saja dalam prosentasenya dengan prosentase keluarga prasejahtera sekabupaten Sukabumi yaitu sekitar 19,25% untuk lokasi penelitian dan 19,88 % untuk prosentase Kabupaten Sukabumi.

Menurut Statistik Provinsi Jawa Barat Tahun 2005, Rata-rata Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sukabumi tahun 2005 adalah 68,54 dengan uraian sebagai berikut: indeks kesehatan 67,83; Indeks Daya beli 58,81; indeks pendidikan 78,97 dan indeks melek huruf 95,59. Data BPS Jawa Barat memperlihatkan bahwa pada tahun 2008, Kabupaten Sukabumi mempunyai jumlah rumah tangga miskin sesuai penerima bantuan langsung tunai (BLT) adalah sejumlah 228.165 KK dengan kategori sangat miskin 2.200 KK, sangat miskin 61.014 KK, miskin 55,068 KK dan hampir miskin 109,883 KK. Dari angka-angka tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Sukabumi masih memerlukan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia yang lebih baik dan perlu upaya-upaya untuk mengentaskan kemiskinan.

Tabel 4.6. Jumlah Kepala Keluarga Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kabupaten Sukabumi

Kecamatan	Tidak Tamat SD	Tamat SD-SLTP	Tamat SLTA Keatas	Jumlah
1. Waluran	1.339	5.492	622	7.453
2. Cibitung	701	6.478	497	7.676
3. Sagaranten	3.130	10.839	1.664	15.633
4. Cidadap	1.197	4.929	288	6.414
5. Lengkong	2.474	4.879	715	8.068
6. Pelabuhanratu	1.520	17.480	5.194	24.194
7. Simpenan	11.408	1.579	1.115	14.102
8. Jampangtengah	5.142	13.182	2.101	20.425
9. Nyalindung	2.644	10.857	1.422	14.923

Sumber BPS Kabupaten Sukabumi, Proyeksi Penduduk Hasil SP2000

Pada Tabel 4.6 di atas tampak bahwa 20,13 % kepala keluarga di kecamatan yang desanya menjadi lokasi penelitian, tidak tamat SD. Keluarga yang tamat SD dan SLTP juga terlihat lebih besar dari keluarga yang tamat SLTA. Hal tersebut tentunya membutuhkan penelaahan lebih lanjut apakah besaran prosentase keluarga prasejahtera memiliki hubungan keberartian terhadap tingkat pendidikan yang ditamatkan kepala keluarga atau sebaliknya. Keadaan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap keberdayaan masing-masing keluarga.

#### 4.1.2. Deskripsi Pengelolaan Hutan KPH Sukabumi Lokasi Penelitian

Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Sukabumi adalah salah satu dari 14 KPH Perum Perhutani yang mengelola kawasan hutan di Pulau Jawa. Pengelolaan KPH Sukabumi pada awal periode tahun 1952-1957 merupakan bagian dari Kawasan Hutan Provinsi Jawa Barat yang ditangani oleh Jawatan Kehutanan Jawa Barat, meliputi Kawasan Hutan Cianjur Barat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 64 Tahun 1967 tentang Penambahan Unit Produksi Perusahaan Umum Kehutanan Negara, ayat (1) Pemangkuan Hutan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Suwantantra Tingkat I. Sejak tahun 1957-1978 Daerah Hutan diubah menjadi Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH), sedangkan Kepala Sub Daerah Hutan (KSDH) diubah menjadi Kepala Sub Kesatuan Pemangkuan Hutan (KSKPH), wilayah hutan Cianjur Barat dimasukkan ke dalam kawasan Pemangkuan Hutan Cianjur. Berdasarkan PP No, 2 Tahun

1978 tentang Penambahan Unit Produksi Perusahaan Umum Kehutanan Negara, maka seluruh wilayah Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I Jawa Barat ditetapkan sebagai Unit Produksi Perum Perhutani Jawa Barat, sedangkan sebutan Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan (KKPH) berubah menjadi Administratur Perum Perhutani/Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan.

Perum Perhutani sebagai Badan Usaha Milik Negara, keberadaannya diatur oleh PP No. 53 Tahun 1999 (tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara Perum Perhutani), perubahan PP No. 36 Tahun 1986 (tentang hal yang sama), diberi tugas untuk mengelola kawasan hutan negara (Hutan Lindung dan Hutan Produksi) di Jawa Tengah (Unit I), Jawa Timur (Unit II) dan Jawa Barat (Unit III). Kesatuan Pemangkuan (KPH) Sukabumi sebagai unit pengelolaan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat mempunyai wilayah kerja yang meliputi Hutan Lindung dan Hutan Produksi Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan PP No. 33 tahun 2003 tentang Perum Perhutani, KPH Sukabumi diberi tugas untuk mengelola kawasan hutan seluas 78.125,18 ha, dengan perincian berdasarkan fungsinya yaitu:

1. Hutan Produksi seluas 18.462,53 ha,
2. Hutan Produksi Terbatas seluas 39.261,21 ha dan
3. Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 20.401,44 ha.

Dengan adanya surat keputusan Menteri Kehutanan no. 174 dan no. 175 tahun 2003, tentang Perluasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango di BPKH Cicurug seluas 9.490,55 ha, BPKH Gede Barat seluas 3.807,53 ha, dan BPKH Pelabuhan Ratu seluas 7.103,6 ha masuk rencana perluasan Taman Nasional, sehingga luas KPH Sukabumi saat ini adalah seluas 58.385,26 ha, yang berdasarkan kesesuaian lahan kawasan hutan tersebut dibagi dalam 2 (dua) kelas perusahaan, yaitu:

- (1) Kelas Perusahaan Jati seluas 11.853,18 ha dan
- (2) Kelas Perusahaan Pinus seluas 46.532,08 ha.

Berdasarkan wilayah pengelolaannya, wilayah yang tersebut dibagi menjadi 2 (dua) Sub KPH (SKPH), terbagi dalam 6 BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan), dengan perincian sebagai berikut:

- a. SKPH Sukabumi Barat terdiri atas:
    1. BKPH Pelabuhan Ratu Cicurug = 8.383,00 ha
    2. BKPH Cikawung dan Gede Barat = 8.386,85 ha
  
  - b. SKPH Sukabumi Timur, terdiri atas:
    3. BKPH Sagaranten = 8.163,57 ha
    4. BKPH Bojonglopang = 6.612,11 ha
    5. BKPH Lengkong = 14.986,55 ha
    6. BKPH Jampang Kulon = 11.853,18 ha
- 
- Jumlah = 58.385,26 ha

Pengelolaan sumber daya hutan KPH Sukabumi didasarkan pada Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) Kelas Perusahaan Jati Jangka Perusahaan 2003 - 2012 dan Kelas Perusahaan Pinus Jangka Perusahaan 2003 - 2012 yang terkoreksi dengan hasil audit sumber daya hutan. Adapun pembagian hutan KPH Sukabumi berdasarkan fungsinya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7. Pembagian Hutan KPH Sukabumi Berdasarkan Fungsi Hutan

BKPH	HP	HPT > 15%	HPT < 15%	HL	Jumlah (Ha)
1. Jampang Kulon	4.482,87	6.440,70	929,61	-	11.853,18
2. Sagaranten	1.163,18	6.930,45	-	-	8.093,63
3. Bojong Lopang	4.156,39	1.695,28	752,05	-	6.603,72
4. Lengkong	3.409,47	2.753,53	8.831,94	-	14.994,94
5. Cikawung	3.894,44	359,91	3.207,20	537,61	7.999,16
6. Pelabuhan Ratu	2.871,10	1.348,65	3.495,82	1.125,06	8.840,63
Jumlah (Ha)	19.977,45	19.528,52	17.216,62	1.662,67	58.385,26

Sumber: KPH Sukabumi, 2009

Keterangan: HP = Hutan Produksi; HL = Hutan Lindung

HPT > 15% = Hutan Produksi Terbatas kemiringan lebih besar 15 %

HPT < 15% = Hutan Produksi Terbatas kemiringan lebih kecil 15%

KPH Sukabumi mempunyai kegiatan pengelolaan hutan dengan jenis kegiatan:

(1) Pembuatan tanaman; (2) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu; (3) Program Kemitraan Bina Lingkungan; (4) Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

Pembuatan tanaman dilakukan dalam kegiatan reboisasi yang merupakan tanaman rutin yang perkembangannya dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8. Reboisasi Tanaman tahun 2003 – 2007 (ha)

Tanaman	Tahun 2003	Tahun 2004	Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007
Jati	831	576	457	528	1.015
Pinus	800	507	1.144	519	92
Rimba	1.766	1.404	2.493	2.224	5.874
Accacia Mangium	-	694	684	593	-
Kayu Putih	139	-	101	201	-

Sumber: Laporan Tahunan Perum Perhutani, 2008

Pada Tabel 4.8 terlihat adanya kecenderungan peningkatan jumlah luas reboisasi tanaman terutama tanaman rimba. Setiap tahun Perhutani KPH Sukabumi melakukan kegiatan reboisasi sebagai kegiatan rutin yang juga melibatkan masyarakat sekitar hutan. Kegiatan ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan tumpang sari yang menyertakan masyarakat sekitar hutan yang tergabung dalam LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan). Reboisasi ini tampaknya sejalan dengan pemanfaatan kayu dan non kayu dengan melihat perkembangan produksi kayu seperti terlihat pada Tabel 4.9 berikut.

Tabel 4.9. Perkembangan Produksi Kayu tahun 2003 – 2007

Jenis Kayu	2003		2004		2005		2006		2007	
	Luas (ha)	Volume (m3)	Luas (ha)	Volume (m3)	Luas (ha)	Volume (m3)	Luas (ha)	Volume (m3)	Luas (ha)	Volume (m3)
Jati	768	8.634	1.213	12.388	1.896	11.340	980	8.264	1.624	10.146
Rimba	594	17.036	1.604	32.156	2.824	52.742	1.538	54.173	3.399	72.640
Pinus	586	15.194	1.604	62.066	2.558	49.644	1.229	47.420	3.078	63.486
Mahoni	-	852	-	1.930	242	2.810	10	1.760	218	3.299
Acc Mangium	-	-	-	-	12	4	55	818	4	16
Rimba lain	8	914	-	146	-	-	-	994	-	1.259
Jumlah		42.630		108.686		116.540		106.027		150.846

Sumber: Laporan Tahunan Perum Perhutani, 2008

Berdasarkan tabel 4.8 dan 4.9 terlihat bahwa laju luasan produksi kayu tidak sebanding atau lebih besar dengan laju luasan penanaman/reboisasi yang dilakukan, khususnya pada tanaman jati dan pinus. Hal ini menandakan bahwa dari segi ekologi belum dapat menggambarkan adanya suatu keberlanjutan ekologi. Seharusnya laju luasan produksi diperhitungkan dengan kemampuan hutan memproduksi kayu dan laju penanaman/reboisasi yang dilakukan. Berdasarkan tabel 4.8 dan 4.9 tersebut terlihat juga bahwa hampir setengah dari keseluruhan produksi kayu bersumber dari jenis kayu rimba yang bukan

merupakan jenis kayu utama yang diunggulkan. Namun demikian jenis kayu rimba tersebut sebagian besarnya bermanfaat untuk menjadi pemasok kayu bakar yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar hutan. Produksi kayu bakar tersebut seperti terlihat pada Tabel 4.10 berikut ini.

Tabel 4.10. Perkembangan Produksi Kayu Bakar tahun 2003 - 2007

Jenis Kayu	2003		2004		2005		2006		2007	
	Luas (ha)	Volume (m3)	Luas (ha)	Volume (m3)	Luas (ha)	Volume (m3)	Luas (ha)	Volume (m3)	Luas (ha)	Volume (m3)
Jati	768	530	1.213	186	1.896	-	980	-	1.624	-
Rimba	594	420	1.604	1.303	2.824	2.454	1.538	861	3.399	-
Pinus	586	420	1.604	1.304	2.558	2.404	1.229	1.198	3.078	-
Mahoni	-	-	-	-	242	50	10	-	218	-
Acc Mangium	-	-	-	-	12	-	55	-	4	-
Rimba lain	8	-	-	-	-	-	-	32	-	-
		1.370		2.793		4.908		2.091		-

Sumber: Laporan Tahunan Perum Perhutani, 2008

Pada Tabel 4.10, terlihat bahwa jenis kayu yang diproduksi sebagai kayu bakar adalah kayu rimba dan pinus dengan volume yang cukup besar dan memerlukan penyikapan tersendiri karena bersangkutan dengan kebiasaan masyarakat sekitar hutan mempergunakan kayu bakar untuk memasak sehari-hari. Pemanfaatan kayu bakar melibatkan masyarakat sekitar hutan, karena memang produksinya diperuntukkan kepada masyarakat sekitar hutan. Selanjutnya produksi sumber daya hutan non-kayu, terlihat seperti pada Tabel 4.11 berikut.

Tabel 4.11. Luas dan Produksi Hasil Hutan Non Kayu Thn 2003-2007

No.	Jenis Hasil Non Kayu	2003	2004	2005	2006	2007
1.	Getah Pinus					
	- Luas (Ha)	3.748	4.715	4.396	4.971	4.971
	- Produksi (Ton)	1.706	2.019	2.019	2.523	2.841
2.	Getah Damar (Kopal					
	- Luas (Ha)	289	330	-	31	17
	- Produksi (Ton)	4	12	-	6	6
3.	Daun Kayu Putih					
	- Luas (Ha)	359	359	359	359	422
	- Produksi (Ton)	310	297	318	336	566
	Jumlah Luas (ha)					
	Produksi (ton)	420	2.328	2.337	2.865	3.413

Sumber: Laporan Tahunan Perum Perhutani, 2008

Berdasarkan Tabel 4.11 tampak bahwa terdapat kecenderungan peningkatan hasil hutan non kayu terutama getah pinus dan daun kayu putih sebagai sumber daya hutan non kayu yang memerlukan perhatian tersendiri. Walau terjadi kecenderungan peningkatan hasil hutan non kayu di KPH Sukabumi, namun sebaliknya terjadi penurunan pada pendapatan dan peningkatan pengeluaran KPH Sukabumi seperti Tabel 4.12 berikut ini.

Tabel 4.12. Pendapatan, Pengeluaran dan Laba KPH Sukabumi (x 1000)

Tahun	Jumlah Pendapatan	Jumlah Pengeluaran	Laba (+) / Rugi (-)
2003	15.323.240	19.084.077	3.760.837 (-)
2004	21.352.122	22.749.898	1.397.776 (-)
2005	18.902.728	23.119.308	4.216.580 (-)
2006	17.843.920	28.313.939	10.470.019 (-)
2007	22.347.204	35.848.029	13.500.825 (-)

Sumber: Laporan Tahunan Perum Perhutani, 2008

Tabel 4.12 di atas memperlihatkan bahwa terdapat fluktuasi dalam pendapatan, namun terdapat kecenderungan peningkatan dalam pengeluaran di KPH Sukabumi yang membutuhkan telaahan lebih lanjut. Sejak tahun 2003, terlihat Perum Perhutani KPH Sukabumi terus mengalami kerugian setiap tahunnya. Jika dikaitkan dengan indikator keberlanjutan fungsi produksi atau fungsi ekonomi, maka kenyataan fakta ini memperlihatkan adanya ketidak berlanjutan dan fungsi ekonomi.

#### **PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat)**

Secara teori berdasarkan arti dari Perhutani, PHBM adalah suatu sistem pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan oleh Perum Perhutani bersama dengan masyarakat desa hutan atau Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dengan jiwa berbagi, sehingga kepentingan bersama mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat PHBM merupakan suatu sistem kegiatan pengelolaan hutan yang lebih mengedepankan pemberdayaan masyarakat melalui

wadah LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan). PHBM mempunyai jiwa “kesediaan” dari perusahaan, Masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan untuk berbagi dalam pengelolaan hutan. PHBM mempunyai prinsip memperhatikan kaidah-kaidah: keseimbangan (ekologis, sosial, dan ekonomi); Keberlanjutan fungsi dan manfaat Sumber Daya Hutan (SDH); Kesesuaian dengan kultur dan budaya masyarakat dan keselarasan dengan pembangunan daerah. Adapun Tahapan pelaksanaan PHBM adalah: (1) Sosialisasi; (2) Dialog; (3) Lembaga LMDH, dan (4) Perjanjian Kerjasama Hutan Pangkuan Desa (PKS HP).

Beberapa kelebihan dari program PHBM dibanding dari beberapa model-model pemberdayaan masyarakat sebelumnya, yaitu: (1) adanya bagi hasil baik kayu maupun non-kayu; (2) Kayu hasil penjarangan pertama 100% menjadi hak LMDH; (3) masyarakat sudah dapat menikmati sejak melakukan kerjasama; (4) adanya kerjasama pemanfaatan lahan di bawah tegakan sampai daur 80 tahun; (5) LMDH berbadan hukum mempunyai akte notaris; (6) LMDH mempunyai hak diikuti mulai dari perencanaan, melaksanakan, memantau sampai pelaksanaan pengelolaannya; (7) kegiatan yang dilakukan di dalam dan di luar kawasan hutan; (8) masyarakat tidak semata-mata sebagai buruh namun ikut memiliki; (9) dibentuk forum mulai dari tingkat propinsi sampai dengan tingkat desa; (10) melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan;

Sampai Agustus tahun 2008, di Kabupaten Sukabumi telah dilakukan sosialisasi dan dialog pada seluruh 96 desa dari 115 desa hutan yang ada dan berbatasan langsung dengan kawasan hutan di Kabupaten Sukabumi, dan jumlah LMDH yang telah terbentuk adalah sebanyak 89 LMDH dengan 24 PKS HPD dengan total luas 56.980,17 Ha. PHBM diprioritaskan pada masyarakat sekitar hutan yang tidak memiliki lahan pertanian dan yang memiliki motivasi tinggi dan sudah biasa mengusahakan kegiatan usaha tani khususnya pertanian lahan kering. Rata-rata luas garapan yang digarap masyarakat per orang berkisar antara 0,5 sampai 1,0 ha. Beberapa komoditas yang dikembangkan oleh masyarakat melalui LMDH dengan sistem tumpang sari adalah antara lain kapolaga, vanili, jambu batu, pisang, karet, singkong, kacang dan lain-lain.



Sejak digulirkannya PHBM melalui SK 136 Tahun 2001, saat ini sudah mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat LMDH baik sifatnya langsung maupun tidak langsung. Jenis kontribusi tidak langsung berupa tanaman tumpang sari dengan nilai kontribusi pada 12 LMDH responden sebagaimana pada Table 4.13. Bentuk kontribusi langsung yang diterima oleh LMDH dari PHBM adalah berupa sharing hasil hutan kayu dan kayu bakar.

Tabel 4.13. Kontribusi KPH Sukabumi terhadap 12 LMDH Responden, tahun 2004-2009 ( X Rp 1.000)

No	LMDH/ Anggota	KONSTRI- BUSI	2004	2005	2006	2007	2008	s/d Agst 2009
1.	<b>Rimba Makmur</b> Anggota 135 orang	Tidak Langsung	100.115	210.000	396.000	525.000	875.500	702.450
		Langsung	415.005	500.496	700.525	1.537.000	1.789.500	1.895.720
		Total	515.120	710.496	1.096.525	2.062.000	2.665.000	2.598.170
		Rata-rata/ orang	3.816	5.263	8.122	15.274	19.740	19.246
		Rata-rata/orang/ bulan	318	438,59	676,83	1.272,83	1.645	1.603,81
2.	<b>Rimba Mekar</b> Anggota 103 orang	Tidak Langsung	211.500	379.555	356.625	659.500	765.950	648.521
		Langsung	561.500	939.652	835.000	996.007	825.000	945.678
		Total	773.000	1.319	1.191.625	1.656	1.591	1.594.199
		Rata-rata/ orang	7.505	12.808	11.569	16.072	15.446	15.478
		Rata-rata/orang/ bulan	477,16	1.067,32	964,08	1.339,40	1.287,18	1.289,80
3.	<b>Tani Sejati</b> Anggota 119 orang	Tidak Langsung	1.200	21.501	1.650	2.300	1.500	2.575
		Langsung	49.500	80.000	58.500	75.000	50.000	65.250
		Total	50.700	101.501	60.150	77.300	51.500	67.825
		Rata-rata/ orang	426	853	505	650	433	570
		Rata-rata/orang/ bulan	35	71	42	54	36	48
4.	<b>Jaya Abadi</b> Anggota 110 orang	Tidak Langsung	1.375	1.350	1.525	1.750	1.842	6.250
		Langsung	15.250	14.650	27.210	25.500	30.000	32.565
		Total	16.625	16.000	28.735	27.250	31.842	38.815
		Rata-rata/ orang	151	146	261	248	289	353
		Rata-rata/orang/ bulan	12,96	12,12	21,77	20,64	24,12	29,40
5.	<b>Agung Jaya</b> Anggota 120 orang	Tidak Langsung	88.625	98.750	115.500	126.525	149.440	165.247
		Langsung	171.345	168.500	226.500	235.750	298.880	288.752
		Total	259.970	267.250	342.000	362.275	448.320	453.999
		Rata-rata/ orang	2.166	2.227	2.830	3.019	3.736	3.7783
		Rata-rata/orang/ bulan	180,53	185,59	237,50	21,58	311,33	315,28
6.	<b>Wana Boga</b> 45 orang	Tidak Langsung	45.525	48.125	53.200	55.650	40.000	65.625
		Langsung	70.250	69.450	87.650	96.235	70.500	91.245
		Total	115.775	117.575	140.850	151.885	110.500	156.870
		Rata-rata/ orang	2.969	2.612	3.130	3.375	2.456	3.486
		Rata-rata/orang/ bulan	247	217,73	260,83	281,27	205	290,50

Lanjutan Tabel.4.13

No	LMDH/ Anggota	KONSTRI- BUSI	2004	2005	2006	2007	2008	s/d Agst 2009
7.	<b>Harapan Mukti</b> 45 orang	Tidak Langsung	13.750	12.115	15.350	13.500	14.800	17.525
		Langsung	33.150	32.850	41.650	37.250	40.000	65.850
		Total	46.900	44.965	57.000	50.750	54.800	83.375
		Rata-rata/ orang	1.042	999	1.267	1.128	1.217	1.852
		Rata-rata/orang/ bulan	86,85	83,27	105,56	93,98	101,48	154,39
8.	<b>Karya Bakti</b> 95 orang	Tidak Langsung	20.500	23.450	24.535	19.500	17.900	18.252
		Langsung	57.520	59.375	61.500	52.500	46.500	60.250
		Total	78.020	82.825	86.035	72.000	64.400	78.502
		Rata-rata/ orang	821	871	905	758	678	826
		Rata-rata/orang/ bulan	68,44	72,65	75,47	63,16	56,49	68,86
9.	<b>Lestari</b> 136 orang	Tidak Langsung	1.450	1.570	1.325	1.500	1.780	2.175
		Langsung	11.500	15.420	13.650	16.850	20.000	25.335
		Total	12.950	16.990	14.975	18.350	21.780	27.510
		Rata-rata/ orang	95	124	110	134	160	202,28
		Rata-rata/orang/ bulan	7,94	10,41	9,18	11,24	13,33	16,857
10	<b>Mandiri Putra</b> Anggota 68 orang	Tidak Langsung	1.175	1.325	1.525	1.950	2.000	2.275
		Langsung	25.500	28.625	29.750	32.500	50.000	45.950
		Total	26.675	29.950	31.275	34.450	52.000	48.225
		Rata-rata/ orang	392	440	459	506	764	709
		Rata-rata/orang/ bulan	32,69	36,70	38,33	42,17	63,73	59,099
11.	<b>Sempur</b> 147 orang	Tidak Langsung	13.255	18.000	12.500	15.000	15.000	18.500
		Langsung	30.335	35.250	32.650	52.500	45.000	52.450
		Total	43.490	53.250	45.150	67.500	60.000	70.950
		Rata-rata/ orang	296	362	307	459	408	482
		Rata-rata/orang/ bulan	24,71	30,19	25,59	38,27	34,01	40,22
12.	<b>Mekar Makmur</b> Anggota 97 orang	Tidak Langsung	5.000	7.500	5.500	6.500	5.000	7.500
		Langsung	26.325	31.250	25.500	27.500	25.000	32.550
		Total	31.325	38.750	31.000	34.000	30.000	40.050
		Rata-rata/ orang	322	399	319	350	309	412
		Rata-rata/orang/ bulan	26,91	33,29	26,58	29,21	25,77	34,40

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan PHBM KPH Sukabumi,2004-2009

Jika dilihat dari perkembangan nilai kontribusi langsung maupun tak langsung Perhutani kepada masyarakat sekitar hutan cukup menggembirakan, karena setiap tahun ada peningkatan, tetapi jika dilihat dari sudut pandang perkembangan keberdayaan dan kemajuan masyarakat, maka secara umum proses pemberdayaan dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan melalui PHBM belum memberi hasil yang maksimum, karena nilai kontribusi tersebut ada yang belum memenuhi standar biaya hidup dari setiap anggota LMDH. Nilai kontribusi tersebut perlu

penelaahan lebih lanjut atas keterkaitannya dengan tingkat kemajuan atau tingkat keberdayaan masing-masing anggota LMDH, karena ternyata jumlah besaran kontribusi yang diterima tidak merta memberi makna berdaya/maju, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.14 berikut:

Tabel 4.14. Jumlah Penerimaan Kontribusi Per Tahun (2009) Dari Perhutani Berdasarkan Urutan Jumlahnya (x Rp 1000)

No.	Nama LMDH	Jumlah Penerimaan Kontribusi		Keterangan
		Total/LMDH/thn	Per orang/bulan	
1.	LMDH Rimba Makmur	2.598.170	1.603,81	LMDH Maju
2.	LMDH Rimba Mekar	1.594.199	1.289,80	LMDH Belum Maju
3.	LMDH Agung Jaya	453.999	315,28	LMDH Maju
4.	LMDH Wana Boga	156.870	290,50	LMDH Belum Maju
5.	LMDH Harapan Mukti	83.375	154,39	LMDH Maju
6.	LMDH Karya Bakti	78.502	68,86	LMDH Belum Maju
7.	LMDH Mandiri Putra	48.225	59,09	LMDH Belum Maju
8.	LMDH Tani Sejati	67.825	48,00	LMDH Maju
9.	LMDH Sempur	70.950	40,22	LMDH Maju
10.	LMDH Mekar Makmur	40.050	34,40	LMDH Belum Maju
11.	LMDH Jaya Abadi	38.815	29,40	LMDH Belum Maju
12.	LMDH Lestari	27.510	16,86	LMDH Maju

Sumber: Diolah dari Laporan Bulanan Agustus 2009 dan Hasil Data Primer, 2009

Berdasarkan Tabel 4.14, terlihat bahwa jumlah penerimaan kontribusi dari Perum Perhutani tidak serta merta membuat suatu LMDH masuk dalam kategori Maju dan Belum Maju. Ada LMDH yang memperoleh kontribusi cukup banyak, namun ternyata LMDH nya dikategorikan dalam LMDH belum maju. Hal tersebut menandakan bahwa masyarakat sekitar hutan tersebut, tidak mempunyai hasil tambahan yang lain selain dari penerimaan kontribusi dari Perum Perhutani. Masyarakat tersebut kurang mempunyai kreativitas dalam meningkatkan kesejahteraannya, atau karena akses sarana parasana yang tidak memadai atau karena akses transportasi yang sangat terbatas. Sedang LMDH yang menerima kontribusi dengan jumlah yang sedikit dan ternyata LMDH nya dikategorikan LMDH yang Maju, berarti masyarakat tersebut mempunyai penghasilan tambahan selain kontribusi yang diterima oleh Perum Perhutani. LMDH tersebut mempunyai peluang dan kesempatan yang lebih besar untuk mengakses dan memperoleh manfaat sumber-sumber daya yang lain, atau karena fasilitas untuk mengakses peluang dan kesempatan peningkatan kesejahteraannya lebih baik dibanding dengan masyarakat yang LMDH yang belum maju.

#### **4.1.3. Deskripsi Responden Masyarakat Sekitar Hutan di KPH Sukabumi**

Sebagaimana disebutkan terdahulu bahwa wilayah pengelolaan KPH Sukabumi terbagi dalam 6 (enam) wilayah BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) yaitu terdiri dari: BKPH Cikawung dan Gede Barat, BKPH Pelabuhan Ratu dan Cicurug, BKPH Sagaranten, BKPH Bojonglopang, BKPH Lenglong dan BKPH Jampang Kulon. Responden terpilih adalah masyarakat sekitar hutan yang mendiami di 6 lokasi BKPH tersebut, sehingga dapat mewakili masyarakat sekitar hutan di KPH Sukabumi. Program pemberdayaan masyarakat melalui PHBM di KPH Sukabumi sampai tahun 2009 telah dilaksanakan pada hampir semua wilayah KPH yaitu 96 desa, sehingga desa terpilih diambil 10% yaitu 10 desa. Karena wilayah desa mencakup 6 BKPH, sehingga ditetapkan setiap BKPH terpilih adalah 2 (dua) desa setiap BKPH, sehingga jumlah desa terpilih adalah 12 desa masyarakat sekitar hutan. Masyarakat responden yang terpilih adalah masyarakat sekitar hutan yang telah mengalami proses pemberdayaan oleh KPH Sukabumi. Masyarakat sekitar hutan tersebut adalah masyarakat yang telah bergabung dalam suatu lembaga masyarakat desa hutan yaitu LMDH. Setiap LMDH terpilih 20 responden masyarakat sekitar hutan, sehingga total responden adalah 240 orang.

Untuk analisis tentang pentingnya dan pengaruh kekuatan modal sosial bagi pemberdayaan masyarakat, maka analisis diarahkan untuk mengkaji modal sosial pada masyarakat yang telah dikategorikan belum berhasil dalam proses pemberdayaan dan masyarakat dengan kategori yang sudah dianggap berhasil sebagai output proses pemberdayaan. Kategori untuk masyarakat yang belum berhasil dan masih dalam kategori belum maju serta mempunyai modal sosial yang lemah dimasukkan kedalam kelompok 6 (enam) LMDH yang belum maju, yaitu: LMDH Rimba Mekar, LMDH Jaya Abadi, LMDH Wana Boga, LMDH Karya Bakti, LMDH Mandiri Putra dan LMDH Mekar Makmur. Sedang yang masyarakat dengan kategori maju ada 6 (enam) LMDH, yaitu: LMDH Rimba Makmur, LMDH Tani Sejati, LMDH Agung Jaya, LMDH Harapan Mukti, LMDH Lestari, dan LMDH Sempur.

Peneliti melakukan observasi langsung dan tinggal beberapa hari di tempat kediaman masyarakat sekitar hutan yang menjadi responden, peneliti mengamati dan melakukan wawancara mendalam dan juga melakukan FGD (Forum Group Discussion) untuk memberi penilaian terhadap tingkat keberdayaan/tingkat kemajuan masyarakat sekitar hutan. Peneliti mewawancarai tokoh masyarakat, Kepala Desa, Tokoh masyarakat dan Kepala Resort Kesatuan Hutan di setiap desa untuk memahami masyarakat sekitar hutan. Berikut data 12 LMDH responden terpilih di KPH Sukabumi, sebagaimana Tabel 4.15 berikut:

Tabel 4.15. Data 12 LMDH Responden di KPH Sukabumi

No.	LMDH/ Ketua, Lokasi BKPH/RPH dan Desa/Kec	Tanggal Tahun Pembentukan dan Jumlah Anggota	PKS HPD	Keterangan
1.	LMDH: <b>Rimba Makmur</b> (Ketua : Kusnadi) BKPH : Jampang Kulon RPH: Karang Bolong Desa : Cidahu, Kec Cibitung	Tgl 17/05/2005 Anggota = 135orang, kategori LMDH : maju	PKS HPD HPD= 218,63 HP= 2.008,75 HPT < 15 %	JPP 58 ,16 ha Jati 302,59 ha Mulai tanam th 2006 – 2007 TS: padi, palawija
2.	LMDH: <b>Rimba Mekar</b> (Ketua : H. Engkus) BKPH : Jampang Kulon RPH : Karang Bolong Desa: Cibitung, Kec. Cibitung	Tgl 18/05/2005 Anggota : 103 org Kategori: LMDH belum maju	HPD: 2.035 Ha HP: 2.018,63 HPT <15 %	JPP 25,82 ha Mahoni 6,03 ha Jati 11,30 ha Tanam th 2001 TS: Padi
3.	LMDH: <b>Tani Sejati</b> (Ketua: Hermansyah) BKPH: Sagaranten RPH: Bentang Timur Desa Pada Senang, Kec. Cidadap	Tgl 01/12/2004 Anggota: 119 org LMDH maju	HPD: 620,98 HPT>15%	Kayu putih 50% 22,6 ha, Pinus 40%, Rimba campur 10% TS:palawija
4.	LMDH: <b>Jaya Abadi</b> (Ketua:Tibyani) BKPH: Sagaranten RPH: Gonggang Selatan Desa: Cibaregbeg, Kec Sagaranten	Tgl 10/12/2004 Anggota: 110 org LMDH Belum maju	HPD: 274,14 Ha HPT<15%	Sengon 10 ha TS:
5.	LMDH: <b>Agung Jaya</b> Ketua: Amir A BKPH: Bojong Lopang RPH: Nangka Tepus Desa: Bantar Agung Kec. Jampang Tengah	Tgl 09/05/2005 Anggota 45 org LMDH maju	HPD: 1,461,47 Ha HPT > 15% = 50% HP 50%	Acc mangium 90%, pinus TS: Padi 9,43 ha
6.	LMDH: <b>Wana Boga</b> Ketua: Eman BKPH: Bojong Lopang RPH: Pasir Awi Desa Cijulang, Kec. Jampang Tengah	Tgl 27/04/2005 Anggota 45 org LMDH belum maju	PKS HPD HPD: 467,71	Pinus 8,81 ha Jati 10 ha TS: kacang, padi
7.	LMDH: <b>Harapan Mukti</b> Ketua : Ilyas BKPH: Lengkong RPH: Hanjuang Tengah Desa: Tegalega, Kec. Lengkong	Tgl 04/09/2006 Anggota 45 org LMDH maju	PKS HPD HPD: 1.250 Ha HPT > 15%	Pinus 200 ha; Mahoni Puai 19 ha TS:Padi, jagung, kacang , singkong

Lanjutan Tabel 4.15

No.	LMDH/ Ketua, Lokasi BKPH/RPH dan Desa/Kec	Tanggal Tahun Pembentukan dan Jumlah Anggota	PKS HPD	Keterangan
8.	LMDH: <b>Karya Bakti</b> Ketua: Sadja BKPH: Lengkong; RPH: Hanjuang Barat Desa Waluran, Kec. Waluran	Tgl 27/05/2005 Anggota:30 org LMDH belum maju	HPD: 1.027 Ha HP < 15%	Acc mangium 187,12 ha TS: Padi, kacang, singkong
9.	LMDH: <b>Lestari</b> Ketua: Hasanuddin BKPH: Pelabuhan Ratu RPH: Buniwangi Desa Buniwangi Kec. Pelabuhan Ratu	Tgl 19/01/2005 Anggota 136 org LMDH maju	PKS HPD HPD: 935,83 Ha HPT> 15% HPT 60% HP 40%	Pinus 20 ha Rimba campur, mahoni dan jati TS: Padi, jagung Tanaman obat
10	LMDH: <b>Mandiri Putra</b> Ketua: Umud BKPH: Pelabuhan Ratu RPH: Parang Masigit Desa Cibuntu, Kec. Simpenan	Tgl 03/06/2003 Anggota: 68 org LMDH belum maju	HPD: 6674,45 ha HPT>15% = 70% HP=30%	Pinus, Kalindra, Mesisis = 60% TS: Padi Inkon palawija
11.	LMDH Mekar Makmur Ketua: Jejen BKPH: Cikawung-Gede Barat RPH Cikembar Desa Wangun Reja Kec. Nyalindung	Tg 6/10/2006 Anggota 97 orang LMDH belum maju	HPD 409,8 ha	Pinus 10 ha TS: Jambu batu 10 ha
12.	LMDH: <b>Sempur</b> Ketua: Eji Ramdani BKPH: Cikawung Gede Barat RPH: Ciguha Desa Sukamaju, Kec., Nyalindung	Tgl 25/08/2005 ANggota 147 org LMDH maju	PKS HPD HPD 698,27 Ha	Pinus, Kaliandra Perlebahan

Sumber: Diolah dari Buku Laporan Kemajuan Hasil Monev Implementasi PHBM Bidang PHBM & Lingkungan dan PKBL KPH Sukabumi s/d Desember 2008, Sukabumi Desember 2008.

Keterangan: HPD = Hutan Pangkuan Desa; HPT = Hutan Produksi Terbatas dengan kemiringan  
HP = Hutan Produksi; TS= Tumpang Sari;

Masyarakat sekitar hutan yang tergabung dalam Kedua belas LMDH tersebut berdiam di 12 desa, yaitu Desa Cidahu, Cibitung, Padasenang, Cibaregbeg, Bantar Agung, Jampang Tengah, Tegallega, Waluran, Buniwangi, Cibuntu, Wangun Reja, dan Desa Suka maju. Masyarakat di sekitar hutan 12 desa tersebut hampir 99 % menjadikan pertanian sebagai sumber kehidupan mereka. Mereka bertani dan bercocok tanam dengan sistem tumpang sari di lahan-lahan garapan dalam kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani. Jenis tanaman yang

dusahakan adalah palawija, padi, kacang tanah, jambu batu, kapulaga dan beberapa jenis lainnya.

Proses pemberdayaan yang dilakukan Perhutani dalam bentuk PHBM (pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) di KPH Sukabumi secara umum baru mulai dilakukan pada tahun 2001 dan aktif disosialisasikan pada tahun 2003. Hasil yang diperoleh setelah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui PHBM adalah sejumlah masyarakat khususnya yang tergabung dalam LMDH telah merasakan adanya sumber mata pencaharian dan telah menerima kontribusi langsung dan tak langsung Perhutani, sebagaimana pada Tabel 4.13.

Masyarakat sekitar hutan baik yang tergabung dan belum bergabung dalam LMDH adalah masyarakat lokal yang telah lama tinggal di sekitar kawasan hutan, rata-rata mereka tinggal 25 tahun ke atas, mereka tinggal mulai lahir sampai usia tua. Desa mereka terbentuk sudah sejak lama berkisar antara 20 – 30 tahun, kecuali beberapa desa yang merupakan pemekaran dari desa sebelumnya. Masyarakat yang menjadi responden adalah yang tergabung dalam LMDH, dan pada umumnya usia mereka terlihat masih sangat produktif. Adapun kondisi karakteristik perumahan responden masyarakat sekitar hutan adalah sebagaimana pada Tabel 4.16 berikut:

Tabel 4.16. Karakteristik perumahan Responden

No.	Karakteristik Perumahan	LMDH maju	LMDH belum maju
1.	Rumah pribadi	95% rumah pribadi	99% rumah pribadi
2.	Cara memperoleh rumah	Sbgn besar beli	Sbgn besar dgn beli
3.	Konstruksi rumah	Lebih baik	Lebih sederhana
4.	Rata-rata Jumlah kamar tidur	2-3 kamar	2-3 kamar
5.	Sistem Pembuangan MCK	55% MCK	35% MCK
6.	Mempunyai Sumber air (sumur, pipa)	47% sumur, pipa	35% sumur, sungai
7.	Cara pembuangan sampah	75% dibakar	Dibuang di tempat kosong
8.	Pencahayaannya	78% PLN	55% PLN
9.	Rata-rata jumlah keluarga dalam rumah 3-5 orang	2 – 4 orang	3 – 6 orang
10.	Rata-rata usia responden 20-40 thn	45 %	57%
11.	Rata-rata usia responden 41-60 thn	51%	38%
12.	Pekerjaan Responden	90% petani	99% petani
13.	Ada Pekerjaan selain petani	60%	10%
14.	Lama tinggal di desa	15-30 thn	20 – 30 thn

Sumber: Hasil data primer, 2009

Berdasarkan Tabel 4.16 di atas, terlihat, bahwa karakteristik perumahan antara LMDH yang berdaya dan belum maju, tidak jauh berbeda keadaannya, hanya dibedakan pada kondisi fisik perumahan, yang maju lebih banyak terbuat dari semen dan keramik, sedang yang belum maju walaupun dari bahan yang sama, tetapi kualitas dan bentuk terlihat jauh lebih sederhana seadanya. LMDH yang belum maju rata-rata mempunyai keluarga yang lebih banyak dibandingkan LMDH yang maju. Sarana sumber pencahayaan dari listrik PLN, masih terlihat sangat terbatas untuk LMDH yang belum maju, pelayanan PLN masih sangat terbatas, sarana jalan dan sarana umum lainnya memang masih dibawah dari LMDH yang maju. LMDH yang maju umumnya mempunyai akses informasi dan jalan yang lebih baik sebagaimana digambarkan pada Tabel 4.17 berikut:

Tabel 4.17. Kondisi Sarana Prasarana Yang Terdapat dalam desa LMDH

No.	Kondisi Sarana Prasarana	LMDH maju (%)	LMDH belum maju
1.	Sarana listrik	>60%	<50%
2.	Sarana Penerangan umum	Tidak ada	Tidak ada
3.	Sarana pipa Air minum	Tidak ada	Tidak ada
4.	Sarana telpon umum	Tidak ada	Tidak ada
5.	Sarana Jalan	baik	Kurang baik
6.	Puskesmas	Puskesmas pembantu	Puskesmas Pembantu
7.	Kantor pos	Kantor	Tidak ada
8.	Pasar umum desa	Tidak ada	Tidak ada
9.	Jarak pasar terdekat	>5 km	>5 km
10.	Sarana transport publik, jalan	Ojek, angkot, jalan aspal baik	Ojek, perahu, kondisi jalan tanah, rusak
11.	Sarana rekreasi	Tidak ada	Tidak ada
12.	Keamanan	masyarakat	masyarakat
13.	Sarana Pendidikan	TK, PAUD, SD, Madrasah, SLTP, tidak ada SLTA (jauh)	TK, PAUD, SD, SLTP SLTA tidak ada (jauh)

Sumber: Diolah dari data primer, 2009

Pada Tabel 4.17 di atas, Secara umum terlihat bahwa sebagian besar masyarakat sekitar hutan responden mempunyai rumah yang masih sangat sederhana. Sistem pembuangan limbah manusia (CMK) masih belum menjadi prioritas masyarakat sekitar hutan, karena mereka berpikir dapat membuang limbahnya dimana saja, di areal kebun atau di sungai-sungai yang berada dekat rumahnya. Sistem pembuangan sampah belum mempunyai sistem pelayanan publik yang terkoordinasikan, tetapi sebagian masyarakat masih membakar sampahnya di



sekeliling halaman rumah. Sedang sistem penerangan listrik belum semua masyarakat sekitar hutan menikmati listrik PLN, ada sekitar 20% masyarakat yang belum mendapat fasilitas penerangan listrik. LMDH maju menikmati listrik lebih baik dibanding dengan LMDH belum maju.

Sarana parasana pendidikan masih belum mencukupi dengan jumlah usia sekolah yang ada di setiap desa responden, khususnya untuk tingkat SLTP dan SLTA. Anak usia SLTP dan SLTA bersekolah di luar desa melalui perjalanan yang cukup melelahkan, karena sarana jalan yang rusak dan ketersediaan transportasi yang sangat terbatas.

Sarana kesehatan pun masih dalam kondisi terbatas, tenaga dokter yang tersedia hanya tersedia 1 (satu) orang per desa, itu pun hanya dengan jumlah waktu-waktu tertentu, sehingga pada saat dibutuhkan darurat, mereka tidak terlayani dengan baik, dan terpaksa mereka harus ke luar desa dan menempuh perjalanan yang cukup melelahkan dan memakan waktu, sehingga saat darurat dapat menimbulkan kondisi kritis.

Secara umum perkembangan desa belum begitu menggembirakan selama lima tahun terakhir, kecuali ada 6 desa dari 12 desa responden yang memperlihatkan adanya perkembangan yang cukup baik, yaitu desa Cidahu, desa Padasenang, Desa Bantar Agung, desa Tegallega, desa Buniwangi, dan desa Sukamaju. Kemajuan desa tersebut dipengaruhi oleh akses kualitas jalan dan transportasi yang cukup tersedia serta kepemimpinan kelembagaan yang baik.

Masyarakat desa sekitar hutan dipimpin oleh kepala desa yang dipilih oleh masyarakat. Tetapi secara umum terpilihnya seorang kepala desa juga dipengaruhi oleh ketokohan mereka sebagai tokoh masyarakat sebelumnya, apalagi yang bersangkutan adalah seorang tokoh agama yang disegani atau seorang tokoh yang paham dan ahli di bidang agama, atau setidaknya penampilannya yang agamis. Masyarakat sangat antusias terhadap setiap pemilihan kepala desa, walaupun beberapa kepala desa terlihat tidak begitu disukai masyarakatnya. Kepala desa yang tidak disukai masyarakatnya, dan kepala desa tersebut juga tidak berupaya untuk memahami masyarakatnya, maka akan terjadi suatu kesenjangan dan

sumber konflik yang kemudian menjadi kendala kemajuan pembangunan desa dan kemajuan masyarakat desa. Beberapa kepala desa yang memperlihatkan adanya gap dengan masyarakatnya adalah desa Cibitung dan desa Cibuntu. Menurut Kepala Desa Cibitung, Masyarakat LMDH Rimba Mekar dan Perhutani hampir tidak pernah melaporkan kegiatan PHBM nya, dan demikian sebaliknya menurut masyarakat desa Cibitung, Kepala desa mereka tidak pernah peduli terhadap perkembangan desanya. Ada gap komunikasi diantara pihak-pihak tersebut.

Pengambilan suatu keputusan dalam masyarakat desa rata-rata diambil melalui musyawarah, tetapi hasil musyawarah tersebut sering pula menjadi konflik, karena hasil musyawarah yang diperoleh bukan menjadi perwakilan masyarakat secara menyeluruh, karena yang hadir dalam pengambilan keputusan tersebut adalah orang-orang terdekat saja pada saat itu. Atau kehadiran masyarakat sudah terwakili, tetapi dalam pengambilan keputusan, sebagian besar yang hadir tidak mengeluarkan pendapatnya, hanya berdiam diri, karena ada yang berpendapat tetapi tidak bisa mengeluarkan pendapat, ada yang bisa mengeluarkan pendapat tetapi tidak mempunyai pendapat atas tema yang didiskusikan. Hal yang sering menjadi kendala, karena rata-rata masyarakat tersebut hanya mempunyai tingkat pendidikan jenjang SD dan dukungan sarana prasarana pendidikan tambahan bagi mereka sangat minim.

Kelompok-kelompok organisasi di desa terdiri dari dari organisasi formal dan tidak formal. Organisasi formal terdiri dari Pemerintah desa, BPD, LKMD, PKK, Karang Taruna, Dewan Sekolah, LMDH, sedang yang tidak formal adalah, majelis taklim, kelompok olah raga, arisan, kelompok petani dan lain-lain. Untuk masyarakat sekitar hutan, organisasi yang paling dominan dan berpengaruh bagi mereka adalah organisasi atau lembaga LMDH, kelompok tani hutan dan majelis taklim. Pengambilan keputusan dalam setiap lembaga pada umumnya diambil secara musyawarah, walaupun ada beberapa keputusan ada yang masih belum sejalan dengan para anggotanya, karena hal sebab yang sudah diungkapkan terdahulu. Organisasi yang dianggap kurang penting bagi masyarakat sekitar hutan adalah Dewan Sekolah. Hal tersebut disebabkan setiap acara Dewan Sekolah, mereka dipanggil dan diajak untuk membicarakan kemajuan pendidikan,

mereka menganggap membuang-buang waktu, karena selama waktu tersebut, mereka tidak bisa bekerja mencari nafkah dan mata pencaharian sumber nafkah mereka terganggu. Selain itu masyarakat sekitar hutan menganggap organisasi PKK tidak begitu penting bagi mereka, karena merasa tidak pernah terlibat dan tidak mempunyai ikatan terhadap organisasi tersebut. Sedangkan organisasi yang tidak dapat diakses bagi masyarakat sekitar hutan adalah BPD, karena masyarakat merasa tidak pernah terlibat dengan organisasi ini dan tidak mempunyai kepentingan terhadap BPD.

Untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat sekitar hutan, mereka saling berinteraksi antar sesama masyarakat dan saling berinteraksi dengan lingkungannya. Interaksi yang telah berlangsung cukup lama menghasilkan modal sosial berupa norma-norma dan nilai sosial yang berlaku dan dipahami dan kemudian menjadikan acuan dalam bersikap, berperilaku, berinteraksi dan berinteraksi selanjutnya. Modal sosial sebagaimana tinjauan pustaka terdahulu yang ada telah memberikan parameter modal sosial dan telah menjadi istilah dalam keilmuan dan menjadikan indikator untuk suatu pengukuran atau menjadi fokus pengamatan dalam penelitian ini. Modal sosial yang diamati pada LMDH desa responden adalah modal sosial berupa: kebersamaan, kepercayaan; jaringan sosial dan dukungan timbal balik, keterlibatan/partisipasi, kelembagaan, kepemimpinan sosial, norma, adat dan nilai budaya serta kearifan dan pengetahuan lokal masyarakat sekitar hutan. Adapun kondisi modal sosial pada responden keseluruhan sebagai hasil observasi peneliti adalah sebagaimana Tabel 4.18 berikut:

Tabel 4.18. Kondisi Eksisting Rata-rata Modal Sosial Masyarakat Sekitar Hutan pada LMDH Responden keseluruhan Terkait Keberdayaan dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan

No.	Kondisi Modal Sosial terkait dengan Keberdayaan dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan
1.	<p><b>Modal Sosial Kebersamaan :</b></p> <p>Tingkat kebersamaan dalam membangun lingkungan (pengembangan desa) dalam kegiatan kolektif rata-rata masih belum cukup baik, hal ini ditandai dengan belum seringnya para pemimpin desa dengan masyarakat secara bersama-sama melakukan kegiatan pengembangan desa yang berkaitan dengan lingkungan (sumber daya hutan). Lain halnya jika kegiatan tersebut berkaitan dengan keagamaan atau mengatasi suatu musibah, masyarakat masih sangat baik dalam kebersamaan.</p> <p>Dalam kegiatan pengelolaan SDH, kebersamaan masyarakat masih belum maksimal, masyarakat masih lebih banyak bersifat pasif dalam pengambilan keputusan, kecuali beberapa desa pada LMDH yang sudah lebih maju</p> <p>Kebersamaan yang sering dilakukan adalah saat mulai menanam atau memanen hasil pertanian atau hutan, kebersamaan itu ditunjukkan dalam bergotong royong yang disebut <i>meutemeunyan</i>" (artinya mengawali) yaitu memulai untuk menanam atau memanen dengan kebersamaan bergotong royong untuk berkumpul bersama membawa nasi dan lauk pauk sayur nangka. Pada saat menanam atau memanen, sebelumnya didahului dengan makan bersama, mereka merasa senang sepenanggungan dan saling peduli atas nasib kehidupan mereka. Disini ada etika lingkungan rasa terima kasih dan perilaku "<i>sopan satun</i>" terhadap alam yang telah memberinya rezeki. Ada nilai-nilai kebaikan dalam kebersamaan karena adanya sikap syukur dan menghargai apa yang diberikan oleh lingkungan alam (Pandey, 2002). Konsep ini juga sesuai dengan konsep Kates et, al (2001) dalam narayan (2002), bahwa kesejahteraan masyarakat sekitar hutan erat kaitannya dengan ekosistem alam. Konsep kebersamaan ini memberi nilai harmoni dan saling ketergantungan dengan lingkungan hidupnya. Nilai intrinsik kebersamaan ini dapat mendorong dan dimanfaatkan dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan.</p>
2.,	<p><b>Modal Sosial Kepercayaan :</b></p> <p>Tingkat kepercayaan sesama warga satu sama lain masih sangat baik dan masih tetap terpelihara. Tetapi jika ditinjau dari kepemilikan barang, sebagian besar masih memilih lebih memperhatikan barang miliknya sendiri, sebagian besar masih lebih memilih memperhatikan sumber mata pencaharian mereka masing-masing. Dalam memperoleh bantuan, sebagian besar mereka masih percaya masih banyak yang akan memberi bantuan, sehingga terlihat bahwa hubungan sosial masih memberi kepercayaan terhadap sesama warga.</p> <p>Tingkat kepercayaan sesama anggota LMDH dalam mengelola lahan garapan di kawasan hutan Perum Perhutani masih cukup baik. Beberapa masyarakat yang tergabung dalam LMDH yang belum maju memang masih terlibat tingkat kepercayaan yang masih rendah. Kepercayaan ini dalam pengelolaan lahan hutan dapat memberi arti kepastian pengelolaan dalam garapan yang menjadi sumber nafkah mereka, rasa ketergantungan terhadap hutan sebagai sumber nafkah dapat memberi kepercayaan dan kepastian pengertian ekologi untuk tetap memelihara lingkungan hutan.</p>

Lanjutan Tabel 4.18

No.	Kondisi Modal Sosial terkait dengan Keberdayaan dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan
	<p>Kepercayaan terhadap sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya hutan, masih nampak khususnya kepercayaan terhadap hal-hal gaib terhadap pohon-pohon yang besar yang terdapat sumber air di bawahnya. Mereka masih percaya bahwa pohon tersebut ada roh gaib yang menunggu dan akan marah jika pohon tersebut diganggu atau ditebang. Kepercayaan ini sangat baik untuk melestarikan sumber daya hutan. Kepercayaan ini memberi nilai intrinsik keseimbangan dan pelestarian dalam ekologi lingkungan.</p>
3.	<p><b>Modal Sosial Jaringan Sosial, dan dukungan timbal balik :</b></p> <p>Tingkat jaringan sosial masyarakat sekitar hutan masih cukup baik, mereka peduli dengan kesulitan sesama warga. Dukungan timbal balik masih baik, karena adanya tingkat kepercayaan untuk saling berbagi kebaikan masih tinggi. Jaringan hubungan dalam pengelolaan sumber daya hutan dengan Perhutani sangat baik. Namun jaringan dengan instansi lain belum cukup baik. Jaringan-jaringan sosial terbentuk karena ada hubungan jejaring antar kelompok-kelompok LMDH, koperasi, majelis taklim, dan kelompok-kelompok Olah Raga. Jaringan sosial akan sangat terasa pada kelompok-kelompok LMDH dan majelis taklim. Kedua kelompok tersebut begitu kuat karena adanya kebersamaan sumber nafkah dan kesamaan spritual. Jaringan sosial yang terjadi antar LMDH sangat baik untuk LMDH yang maju.</p> <p>Jaringan sosial dan dukungan timbal balik ini sangat membantu dalam upaya-upaya melestarikan sumber daya hutan, karena melalui jaringan ini informasi tentang kegiatan pengelolaan sumber daya hutan dapat diterima dengan baik. Kelembagaan LMDH dan majelis taklim sangat efektif dimanfaatkan untuk penyampaian menerima informasi tentang kegiatan-kegiatan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan.</p> <p>Dengan jaringan ini juga masyarakat dapat saling berinteraksi dan saling ketergantungan dan bekerjasama dan menimbulkan kepercayaan dalam pengelolaan hutan. Sehingga dengan jaringan sosial dan dukungan timbal balik dapat memberikan nilai-nilai intrinsik kebaikan dan dalam lingkungan seperti dinamis, harmoni, keseimbangan, dan ketergantungan. Modal sosial ini memberi manfaat pengurangan biaya, peningkatan saluran informasi, kebersamaan, kekuatan kelembagaan dan akhirnya dapat mewujudkan keberdayaan dan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan</p>
4.	<p><b>Modal Sosial Keterlibatan/ Partisipasi :</b></p> <p>Tingkat akses masyarakat sekitar hutan dalam pinjaman keuangan terhadap lembaga keuangan masih rendah, tetapi dengan Perhutani sudah cukup baik. Partisipasi dalam memperoleh manfaat sumber daya hutan sangat baik, partisipasi dalam pengambilan keputusan pengelolaan cukup baik, namun perbandingan partisipasi wanita dengan pria masih sangat kurang.</p> <p>Partisipasi masyarakat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat terlihat masih cukup baik, apalagi yang berkaitan dalam hal menanam dan memanen. Partisipasinya terlibat dalam "meutemeunyan" (mengawali) mereka berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong dan menyediakan makanan untuk dinikmati bersama dalam rangka rasa syukur dan terima kasih atas apa yang diberikan alam.</p>

Lanjutan Tabel 4.18

No.	Kondisi Modal Sosial terkait dengan Keberdayaan dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan
	<p>Partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan pengelolaan sumber daya hutan akan sangat membantu untuk tetap menjaga hubungan baik sesama masyarakat atau dengan lembaga lainnya, dengan partisipasi ini rasa kebersamaan dan kepedulian dapat tercipta apalagi yang terkait dengan sumber daya hutan sebagai sumber nafkah mereka. Konsep kesejahteraan masyarakat erat kaitannya dengan ekosistem hutan Kates et, al (2001).</p> <p>Keterlibatan/partisipasi dapat memberikan nilai-nilai dinamis dan kepedulian terhadap sesama, dan terhadap lingkungan, sehingga dapat tercapai lingkungan yang seimbangan antara lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan ekonomi.</p>
5.	<p><b>Modal Sosial Kelembagaan :</b></p> <p>Pengetahuan tentang prosedur dan kebijakan kelembagaan dan pengelolaan SDH masih kurang, sehingga pengelolaan sumber daya hutan dan jenis tanaman yang ditanam di bawah tegakan masih tergantung dengan pengelolaan Perum Perhutani.</p> <p>Hubungan organisasi dengan masyarakat sangat baik, partisipasi organisasi dalam pengelolaan SDH baik, pengaruh organisasi dalam pengelolaan SDH baik. Kualitas kepemimpinan sangat berpengaruh dalam jalannya organisasi, pengaruh organisasi terhadap peningkatan kesejahteraan anggota sangat tinggi, peralihan kepemimpinan cukup stabil, nilai manfaat organisasi sangat berpengaruh terhadap anggotanya. Kaderisasi kepemimpinan belum cukup baik, karena walaupun melalui pemilihan, faktor ketokohan masih sangat berpengaruh.</p> <p>Kelembagaan yang terbentuk secara formal yaitu LMDH, majelis taklim, koperasi, DKM Dewan Kepengurusan Masjid, LSM lingkungan dan kelompok-kelompok lainnya. Kelembagaan ini sangat membantu dalam penyampaian dan penerimaan informasi tentang pengelolaan sumber daya hutan, kelembagaan ini juga memberi kemudahan dalam kerjasama dan berpartisipasi. Kelembagaan juga efektif dapat membantu dalam menciptakan dan menerapkan norma-norma dan aturan-aturan pengelolaan sumber daya hutan.</p>
6.	<p><b>Modal Sosial Kepemimpinan Sosial :</b></p> <p>Tingkat perubahan kepemimpinan sosial stabil. Kepemimpinan yang dipilih tidak melalui kaderisasi, tetapi melewati kualitas dan ketokohan masyarakat yang dipilih. Kepemimpinan sosial sangat berpengaruh terhadap lancarnya LMDH. Kelancaran kerja LMDH tersebut berpengaruh terhadap pengelolaan sumber daya hutan.</p> <p>Kepemimpinan sosial yang lebih berhasil adalah kepemimpinan yang dirangkap secara formal, misalnya yang menjadi ketua LMDH adalah kepala desa, sekretaris desa atau seorang guru atau profesi yang lainnya. Kepemimpinan sosial yang berhasil adalah kepemimpinan yang mempunyai wawasan yang luas, hubungan sosial yang lebih baik dan sekaligus yang merangkap jabatan formal, seperti kepala desa, sekretaris desa, guru dan lain-lain. Kepemimpinan sosial ini dapat menjadi alat untuk menyampaikan aturan atau kebijakan pengelolaan sumber daya hutan, dan dapat diikuti oleh warga masyarakatnya. Kepemimpinan sosial dapat memberi kemudahan dalam tindakan kolektif kerjasama dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan.</p>

Lanjutan Tabel 4.18

No.	Kondisi Modal Sosial terkait dengan Keberdayaan dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan
	<p>Kepemimpinan sosial pada umumnya adalah karena pengetahuan keagamaannya dan pada umumnya mempunyai moral dan akhlak yang baik, maka penerapan etika lingkungan dan menghargai nilai-nilai kehidupan sesama makhluk ciptaan Tuhan akan menjadi lebih mudah.</p>
7.	<p><b>Modal Sosial Norma, adat dan nilai Budaya</b></p> <p>Norma dan nilai-nilai yang dijunjung adalah norma dan nilai budaya yang terkait keagamaan, perayaan-perayaan keagamaan, tahlilan, yasinan, Warisan-warisan leluhur berupa mantera atau ibadah yang dulu dilakukan yang bertentangan dengan pemahaman agama, sudah banyak ditinggalkan, yang ada hanya nilai-nilai norma aturan umum perilaku kehidupan sehari-hari dan adat kegotong-royongan dalam hal panen dan pembersihan lahan. Kegiatan <i>peuteumeunyan</i> adalah satu-satunya kegiatan yang masih terlibat yang menjadi nilai warisan, terutama karena jenis makanan yang disajikan dan kebersamaan serta rasa saling peduli pada saat <i>meutemeunyan</i> tersebut.</p> <p>Norma, adat dan nilai budaya ini menjadi sangat bermanfaat jika kegiatan pengelolaan sumber daya hutan dikaitkan dengan nilai ibadah, pemeliharaan terhadap alam akan menjadi nilai ibadah karena terkait bahwa manusia sebagai khalifatul ardh, harus menjaga alam sebagai titipan Tuhan. Hutan telah memberi begitu banyak kehidupan pada masyarakat sekitar hutan, sehingga manusia harus bersyukur dan tetap menjaga keharmonisan alam. Kembali ke konsep Kesejahteraan masyarakat sekitar hutan akan sangat tergantung pada terpeliharanya ekosistem hutan (Kates et, al 2001).</p>
8.	<p><b>Modal Sosial Kearifan dan pengetahuan lokal</b></p> <p>Pada umumnya kearifan dan pengetahuan lokal masyarakat sekitar hutan tidak begitu nampak. Kearifan lokal dan pengetahuan lokal hanya berupa jenis tanaman yang ditanam adalah sesuai yang sejak dahulu dan memang cocok untuk lahan pertanian dan menjadi sumber mata pencaharian. Kearifan dan pengetahuan lokal berkembang sesuai dengan kebutuhan kehidupan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat, kearifan dan pengetahuan lokal yang bertentangan dengan nilai-nilai agama akan ditinggalkan oleh masyarakat.</p> <p>Ketergantungan pada alam sebagai sumber nafkah, dan sifat menahan diri terhadap kegiatan eksploitasi berlebihan karena kearifan dan etika moral akan mendorong pelestarian hutan.</p> <p>Kearifan lokal akan sangat bermanfaat untuk konservasi karena terbatasnya insentif ekonomi untuk konservasi keanekaragaman hayati, Keberlanjutan suatu ekosistem membutuhkan semua cabang pengetahuan dan inovasi (Kates et al dalam Narayan, 2002)</p>

Sumber: Hasil olahan data primer, 2009

Sebagaimana telah dijelaskan dalam kajian pustaka, maka seluruh unsur modal sosial tersebut sangat bermanfaat dan berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan sosial dan peningkatan kualitas lingkungan sumber daya hutan.

Secara keseluruhan responden, kondisi modal sosial masih dalam kategori cukup kuat, namun jika dilihat pada klasifikasi kemajuan setiap LMDH nya, maka akan terlihat sebagaimana pada Tabel 4.19 berikut:

Tabel 4.19. Perbandingan Kondisi Modal Sosial pada Masyarakat LMDH yang Maju dan LMDH Belum Maju

No.	Unsur Modal Sosial	LMDH maju	LMDH yang belum maju
1.	Kebersamaan	Relatif Kuat	Relatif kuat
2.	Kepercayaan	Relatif cukup	Relatif sangat Lemah
3.	Jaringan Sosial dan Dukungan Timbal Balik	Relatif Kuat	Relatif kuat
4.	Keterlibatan/ partisipasi	Relatif Kuat	Relatif kuat
5.	Kelembagaan	Relatif Kuat	Relatif Sangat Lemah
6.	Kepemimpinan Sosial	Relatif Kuat	Relatif sangat Lemah
7.	Norma, Adat dan Budaya	Relatif Kuat	Relatif lemah
8.	Kearifan dan pengetahuan lokal	Relatif Kuat	Relatif lemah

Sumber: Diolah dari data primer, 2009

Berdasarkan Tabel 4.19, terlihat LMDH yang maju mempunyai modal sosial yang lebih kuat daripada modal sosial LMDH yang belum maju. Sedangkan bila Tabel 4.19 dihubungkan dengan model penelitian yang telah dibangun sebelumnya menyimpulkan bahwa pada masyarakat LMDH yang maju maka pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses akan lebih mudah, keberdayaan masyarakat akan bertambah dan pengelolaan sumberdaya hutan akan berjalan sebagai mana mestinya. Sebaliknya pada masyarakat LMDH yang belum maju maka pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses akan lebih sukar untuk berproses, keberdayaan masyarakat relative sukar untuk bertumbuh dan pengelolaan sumberdaya hutan berkelanjutan belumlah dapat berjalan sebagai mana mestinya. Nilai kekuatan modal masing-masing LMDH diperoleh dari nilai *factor loading* dari hasil perhitungan SEM, yang kemudian dicocokkan dengan *crosscheck* yang diperoleh dari hasil observasi dan pengamatan langsung di lapangan.



Modal sosial pada gambaran LMDH maju memperlihatkan lebih kuat dibanding LMDH yang belum maju, hal ini menggambarkan bahwa nilai-nilai sosial pada LMDH maju memberi nilai-nilai intrinsik kebaikan lebih tinggi pada lingkungannya dibanding dengan LMDH belum maju.

Pada LMDH belum maju sangat lemah pada modal sosial kepercayaan, kelembagaan dan kepemimpinan sosial, padahal nilai-nilai intrinsik inilah yang mempunyai dorongan lebih besar untuk mendorong masyarakat untuk bersikap, berperilaku, berinteraksi dan berinterelasi sehingga mempunyai nilai kebaikan dan kebenaran pada keseimbangan lingkungannya.

Untuk melihat sejauh mana LMDH maju dan LMDH belum maju memberi kontribusi terhadap pengelolaan sumber daya hutan yang ditandai dengan produksi kayu yang dihasilkan oleh kawasan hutan dimana LMDH berada, dapat dilihat sebagaimana Tabel 4.20 berikut:

Tabel 4.20. Produksi Hutan Kayu LMDH Maju dan Belum Maju

NO	LMDH Maju		LMDH Belum Maju	
	Nama LMDH	Produksi Kayu (m <sup>3</sup> )	Nama LMDH	Produksi Kayu (m <sup>3</sup> )
1	Lestari	1.605,89	Mandiri Putra	1.547,58
2	Harapan Mukti	11.116,74	Karya Bakti	3.575,43
3	Agung Jaya	9.186,44	Wana Boga	3.528,45
4	Tani Sejati	47.268,53	Jaya Abadi	15.525,36
5	Sempur	73.189,95	Mekar Makmur	22.197,13
6	Rimba Makmur	3.450,162	Rimba Mekar	1.049,26

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan KPH Sukabumi, 2009

Berdasarkan Tabel 4.20, terlihat bahwa produksi kayu yang dihasilkan kawasan hutan dimana terdapat LMDH Maju lebih baik daripada LMDH yang belum maju. Hal tersebut memperlihatkan bahwa LMDH yang maju memberi kontribusi yang cukup signifikan terhadap produksi kayu yang dihasilkan dibandingkan dengan LMDH yang belum maju. LMDH yang maju mempunyai potensi modal sosial yang lebih kuat dan memperlihatkan potensi anggotanya yang lebih baik dibanding dengan LMDH yang belum maju, khususnya terkait dalam pengelolaan sumber daya hutan (produksi kayu).

## **4.2. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian memberi batasan pada lima variabel yang diamati karena dianggap telah mewakili seluruh proses pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan yang memanfaatkan modal sosial masyarakat sekitar hutan. Modal sosial yang teramati adalah nilai modal sosial yang memang lahir dari interaksi masyarakat dengan lingkungannya, yaitu lingkungan alam/hutan, lingkungan buatan dan lingkungan sosial. Modal sosial tersebut adalah modal sosial yang dipengaruhi dan mempengaruhi secara timbal balik dengan ketiga lingkungan. Modal sosial tersebut yang berada dalam lingkungan sosial tapi juga berada dalam irisan lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan ekonomi. Penelitian ini terbatas pada membangun dan merancang model pada kondisi eksisting, tidak melakukan penelitian mengapa kondisi eksisting terjadi demikian.

## **4.3. Perumusan Model Pemberdayaan masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan Dengan Pemanfaatan Modal Sosial Masyarakat Sekitar Hutan**

Berdasarkan hasil kajian pustaka menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat sekitar hutan tidak akan berhasil secara maksimum tanpa memanfaatkan secara optimal potensi modal sosial masyarakat sekitar hutan. Dengan prinsip bahwa untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat sekitar hutan, maka memanfaatkan potensi modal sosial apa yang sudah ada dan sudah terbentuk dalam masyarakat adalah suatu strategi yang sangat baik. Untuk itu peneliti akan mengkaji bagaimana rumusan konsep hipotetik suatu model pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam rangka pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi modal sosial masyarakat sekitar.

Langkah dalam merumuskan model pemberdayaan masyarakat sekitar hutan secara keseluruhan tersebut adalah dengan memperoleh data primer yang berkaitan dengan: (1) modal sosial; (2) strategi pemberdayaan masyarakat; dan (3) keterlibatan dan dukungan stakeholder; (4) Keberdayaan masyarakat; (5) Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan. Seluruh variabel dan indikator

dari masing-masing variabel sebelumnya dilakukan uji validitas dan reliabilitas dengan uji statistik SPSS. Kemudian data primer yang dihasilkan dianalisis dan diuji dengan menggunakan Model Persamaan Struktural (*SEM Structural Equation Modelling*).

Model hipotetik tersebut dibangun dari teori-teori yang ada sebelumnya. Variabel-variabel yang dibentuk bersama indikatornya dikonsepsikan dalam hubungan keterkaitan antara variabel-variabel dalam suatu hubungan struktural dan pengukuran.

#### **4.3.1. Analisis Uji Validitas dan Reliabilitas**

Mengingat pengumpulan data dalam merumuskan konsep model pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan menggunakan kuesioner, maka kesungguhan responden dalam menjawab pernyataan merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian. Keabsahan atau kesahihan suatu hasil penelitian sangat ditentukan oleh alat ukur yang digunakan. Apabila alat ukur yang dipakai tidak valid dan atau tidak dapat dipercaya, maka hasil penelitian yang dilakukan tidak akan menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan dua macam pengujian, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas untuk menguji kesungguhan setiap jawaban responden.

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah disusun benar-benar mengukur apa yang perlu diukur. Uji validitas berguna untuk menentukan seberapa cermat suatu alat melakukan fungsi ukurannya. Alat ukur validitas yang tinggi berarti mempunyai varian kesalahan yang kecil, sehingga memberikan keyakinan bahwa data yang terkumpul merupakan data yang dapat dipercaya. Uji validitas ini akan memberikan hasil bahwa setiap indikator variabel yang memenuhi syarat uji validitas adalah benar-benar telah valid untuk menjadi alat ukur pada setiap variabelnya.

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui apakah alat pengumpul data pada dasarnya menunjukkan tingkat ketepatan, keakuratan, kestabilan atau konsistensi alat tersebut dalam mengungkapkan gejala tertentu dari kelompok individu,

walaupun dilakukan pada waktu, lokasi dan populasi yang berbeda. Uji reliabilitas ini akan menghasilkan bahwa setiap indikator dari setiap variabel adanya benar-benar tepat, akurat, stabil dan konsisten. Parameter dan indikator terpilih adalah yang memenuhi nilai validitas dan reliabilitas yang telah ditetapkan menurut teori.

Adapun pengujian validitas dan reliabilitas dari masing-masing indikator dan variabelnya adalah sebagai berikut:

#### a. Modal Sosial

Modal sosial adalah bentukan nilai-nilai dari hasil interaksi yang cukup lama antara masyarakat dengan lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan buatan. Modal sosial dapat memperlihatkan wujudnya dalam suatu norma dan nilai yang telah terbentuk dan dipahami bersama masyarakat yang dapat memperkuat jaringan sosial yang positif, terjalinnya kerjasama yang saling menguntungkan, menumbuhkan kepedulian dan solidaritas yang tinggi dan dapat mendorong tingkat kepercayaan antara sesama dalam rangka tercapai keberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya hutan. Modal sosial yang dapat terbentuk dan memberikan wujud dapat terlihat dalam bentuk: (1) Kebersamaan dengan 27 indikator; (2) Kepercayaan dengan 6 indikator; (3) Jaringan Sosial dan Dukungan Timbal Balik dengan 15 indikator; (4) Keterlibatan/partisipasi dengan 7 indikator; (5) Kelembagaan dengan 30 indikator; (6) Kepemimpinan sosial dengan 7 indikator; (7) Norma, adat dan nilai budaya dengan 9 indikator; dan 8. Kearifan dan pengetahuan lokal dengan 9 indikator. Masing-masing indikator modal sosial tersebut akan melalui uji realibitas dan validitas sebagai berikut:

##### Modal Sosial Kebersamaan

Berdasarkan Tabel 1 dan Tabel 2 pada Lampiran 2, setelah dilakukan pengujian reabilitas dan validitas pada pernyataan dalam variabel modal sosial kebersamaan, maka semua pertanyaan sebanyak 27 pertanyaan dapat digunakan karena dari keseluruhan item pertanyaan tersebut memenuhi syarat nilai *Corrected item-total correlation* ( $>0,365$ ) dan *Cronbach alpha*  $>0,60$  pada uji reliabilitas dan nilai *r*-hitung pada uji validitas melebihi batas minimum dari *r*-tabel yaitu 0,361. Jadi

pertanyaan yang dipergunakan untuk modal sosial kebersamaan dalam penelitian ini adalah KB1, KB2, KB3, KB4, KB5, KB6, KB7, KB8, KB9, KB10, KB11, KB12, KB13, KB14, KB15, KB16, KB17, KB18, KB19, KB20, KB21, KB22, KB23, KB24, KB25, KB26 DAN KB27.

#### Modal Sosial Kepercayaan

Berdasarkan Table 3 dan Tabel 4 pada Lampiran 2, setelah dilakukan pengujian reliabilitas dan validitas pada pertanyaan yang terdapat dalam variabel modal sosial kepercayaan, maka tidak semua pertanyaan dapat digunakan karena dari keseluruhan item pertanyaan tersebut ada yang tidak memenuhi syarat nilai *Corrected item-total correlation* pada uji reliabilitas dan nilai r-hitung pada uji validitas tidak seluruhnya melebihi batas minimum dari r-tabel yaitu 0,361. Jadi pertanyaan yang dapat digunakan dari 6 pertanyaan semula adalah sebanyak 4 pertanyaan, yaitu: KP3, KP4, KP5 dan KP6.

#### Modal Sosial Jaringan Sosial dan Dukungan Timbal Balik

Berdasarkan Table 5 dan Tabel 6 pada Lampiran 2, setelah dilakukan pengujian reliabilitas dan validitas pada pertanyaan yang terdapat dalam variabel modal sosial, ternyata tidak semua pertanyaan dapat digunakan karena dari keseluruhan item pertanyaan tersebut, karena ada pertanyaan yang tidak memenuhi syarat nilai *Corrected item-total correlation* pada uji reliabilitas dan nilai r-hitung pada uji validitas tidak seluruhnya melebihi batas minimum dari r-tabel yaitu 0,361. Dan pertanyaan yang dapat digunakan dari 15 pertanyaan modal sosial jaringan sosial dan dukungan timbal balik dalam penelitian ini adalah sebanyak 6 pertanyaan, yaitu: JS1, JS2, JS3, JS5, JS9, dan JS10.

#### Modal Sosial Keterlibatan/partisipasi

Berdasarkan Table 7 dan Tabel 8 pada Lampiran 2, setelah dilakukan pengujian reliabilitas dan validitas pada pertanyaan yang terdapat dalam variabel modal social, maka semua pertanyaan yaitu sebanyak 7 item pertanyaan dapat digunakan, karena dari keseluruhan item pertanyaan tersebut memenuhi nilai *Corrected item-total correlation* pada uji reliabilitas dan nilai r-hitung pada uji validitas melebihi batas minimum dari r-tabel yaitu 0,361.

### Modal Sosial Kelembagaan

Berdasarkan Tabel 9 dan Tabel 10 pada Lampiran 2, setelah dilakukan pengujian reliabilitas dan validitas pada pertanyaan yang terdapat dalam variabel modal social, ternyata tidak semua pertanyaan dapat digunakan karena dari keseluruhan item pertanyaan tersebut ada variabel yang tidak memenuhi syarat nilai *Corrected item-total correlation* pada uji reliabilitas dan nilai r-hitung pada uji validitas tidak seluruhnya melebihi batas minimum dari r-tabel yaitu 0,361. Dan pertanyaan yang dapat digunakan dari 30 pertanyaan di atas dalam penelitian ini adalah sebanyak 15 pertanyaan, yaitu: KL2, KL3, KL4, KL5, KL6, KL7, KL18, KL19, KL22, KL23, KL24, KL25, KL27, KL28 DAN KL30.

### Modal Sosial Kepemimpinan Sosial

Berdasarkan Table 11 dan Tabel 12 pada Lampiran 2, setelah dilakukan pengujian reliabilitas dan validitas pada pertanyaan yang terdapat dalam variabel modal social, ternyata semua pertanyaan sebanyak 7 item pertanyaan dapat digunakan, karena dari keseluruhan item pertanyaan tersebut memenuhi syarat nilai *Corrected item-total correlation* pada uji reliabilitas dan nilai r-hitung pada uji validitas melebihi batas minimum dari r-tabel yaitu 0,361. Jadi pertanyaan yang dipergunakan dalam penelitian ini untuk modal sosial kepemimpinan sosial adalah sejumlah 7 pertanyaan, yaitu: KS1, KS2, KS3, KS4, KS5, KS6, dan KS7.

### Modal Sosial Norma, Adat dan Nilai Budaya

Berdasarkan Tabel 13 dan Tabel 14 pada Lampiran2, setelah dilakukan pengujian reliabilitas dan validitas pada pertanyaan yang terdapat dalam variabel modal social, ternyata tidak semua pertanyaan dapat digunakan karena dari keseluruhan item pertanyaan tersebut ada 1 pertanyaan yang tidak memenuhi syarat nilai *Corrected item-total correlation* pada uji reliabilitas dan nilai r-hitung pada uji validitas tidak seluruhnya melebihi batas minimum dari r-tabel yaitu 0,361. Dan pertanyaan yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 8 pertanyaan, yaitu: NB1, NB2, NB3, NB4, NB5, NB6, dan NB8.

### Modal Sosial Kearifan Lokal dan Pengetahuan Lokal

Berdasarkan Tabel 15 dan Tabel 16 pada Lampiran2, setelah dilakukan pengujian reliabilitas dan validitas pada pertanyaan yang terdapat dalam variabel modal social, ternyata semua pertanyaan yaitu sebanyak 7 item pertanyaan dapat digunakan, karena dari keseluruhan item pertanyaan tersebut memenuhi syarat nilai *Corrected item-total correlation* pada uji reliabilitas dan nilai r-hitung pada uji validitas melebihi batas minimum dari r-tabel yaitu 0,361.

#### **b. Strategi Pemberdayaan Masyarakat**

Berdasarkan Tabel 17 dan Tabel 18 pada Lampiran2, setelah dilakukan pengujian reliabilitas dan validitas pada pertanyaan yang terdapat pada variabel Strategi Pemberdayaan Masyarakat, ternyata tidak semua pertanyaan dapat digunakan karena dari keseluruhan 10 item pertanyaan tersebut ada 1 (satu) pertanyaan yang tidak memenuhi syarat nilai *Corrected item-total correlation* pada uji reliabilitas dan nilai r-hitung pada uji validitas tidak seluruhnya melebihi batas minimum dari r-tabel yaitu 0,361. Jadi pertanyaan yang dapat digunakan dari 10 pertanyaan di atas dalam penelitian ini adalah sebanyak 9 pertanyaan, yaitu: SPM2, SPM3, SPM4, SPM5, SPM6, SPM7, SPM8, SPM9 dan SPM10.

#### **c. Keterlibatan dan Dukungan Stakeholders**

Berdasarkan Tabel 19 dan Tabel 20 pada Lampiran2, setelah dilakukan pengujian reliabilitas dan validitas pada pertanyaan yang terdapat pada variabel Keterlibatan dan Dukungan Stakeholders, ternyata tidak semua pertanyaan dapat digunakan karena dari keseluruhan 24 item pertanyaan tersebut ada 13 pertanyaan yang tidak memenuhi syarat nilai *Corrected item-total correlation* pada uji reliabilitas dan nilai r-hitung pada uji validitas tidak seluruhnya melebihi batas minimum dari r-tabel yaitu 0,361. Jadi pertanyaan yang dapat digunakan dari 24 pertanyaan di atas dalam penelitian ini adalah sebanyak 11 pertanyaan, yaitu: KDS1, KDS3, KDS4, KDS5, KDS6, KDS7, KDS11, KDS12, KDS14, KDS19 dan KDS20.

#### **d. Keberdayaan Masyarakat**

Keberdayaan masyarakat mempunyai level individual, level kelompok/organisasi dan level sistem. Penjumlahan berbentuk sinergi ketiga level adalah daya kekuatan dan kemampuan sebagai isi dari keberdayaan masyarakat. Esensi dari keberdayaan masyarakat terdiri dari (1) kepemilikan potensi dan ketrampilan; (2) partisipasi dalam pembangunan pada kelompok/organisasi dan (3) kemandirian masyarakat pada level system (UNDP, 1998). Karena keberdayaan masyarakat adalah suatu variabel, maka semua esensinya adalah sub variabel yang merupakan faktor pembentuk keberdayaan masyarakat. Pembentuk keberdayaan pengembangan potensi dan ketrampilan terdiri dari 10 indikator, partisipasi dalam pembangunan 6 indikator, kemandirian masyarakat terdiri atas 2 indikator. Masing-masing variabel pembentuk dan indikatornya melalui uji realibilitas dan validitas sebagai berikut:

##### Pengembangan Potensi dan Ketrampilan

Berdasarkan Table 21 dan Tabel 22 pada Lampiran2, setelah dilakukan pengujian reliabilitas dan validitas pada pertanyaan yang terdapat dalam keberdayaan masyarakat untuk variabel Pengembangan Potensi dan Ketrampilan, ternyata tidak semua pertanyaan dapat digunakan karena dari keseluruhan 10 item pertanyaan tersebut, karena ada 3 pertanyaan yang tidak memenuhi syarat nilai *Corrected item-total correlation* pada uji reliabilitas dan nilai r-hitung pada uji validitas tidak seluruhnya melebihi batas minimum dari r-tabel yaitu 0,361. Dan pertanyaan yang dapat digunakan dari 10 pertanyaan adalah sebanyak 7 pertanyaan, yaitu: PPK1, PPK2, PPK3, PPK4, PPK5, PPK6, dan PPK7.

##### Partisipasi Dalam Pembangunan

Berdasarkan Table 23 dan Tabel 24 pada Lampiran 2, setelah dilakukan pengujian reliabilitas dan validitas pada pertanyaan yang terdapat dalam variabel partisipasi dalam pembangunan, ternyata tidak semua pertanyaan dapat digunakan karena dari keseluruhan 6 item pertanyaan tersebut ada 2 pertanyaan yang tidak memenuhi syarat nilai *Corrected item-total correlation* pada uji reliabilitas dan nilai r-hitung pada uji validitas tidak seluruhnya melebihi batas



minimum dari r-tabel yaitu 0,361. Dan pertanyaan yang dapat digunakan dari 6 pertanyaan adalah sebanyak 4 pertanyaan, yaitu: PDP1, PDP2, PPDP3 dan PDP4.

#### Kemandirian masyarakat

Berdasarkan Tabel 25 dan Tabel 26 pada Lampiran2, setelah dilakukan pengujian reliabilitas dan validitas pada pertanyaan yang terdapat dalam variabel kemandirian masyarakat, maka semua 2 item pertanyaan dapat digunakan, karena keseluruhan item pertanyaan tersebut memenuhi syarat nilai *Corrected item-total correlation* pada uji reliabilitas dan nilai r-hitung pada uji validitas melebihi batas minimum dari r-tabel yaitu 0,361. Jadi pertanyaan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 2 pertanyaan, yaitu: KM1 dan KM2

#### **e. Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan**

Pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan sebagaimana telah dioperasionalkan dibatasi sebagai esensi sistem pengelolaan hutan yang menjamin keberlanjutan fungsi produksi/ekonomi, keberlanjutan fungsi sosial dan keberlanjutan lingkungan secara seimbang dan tidak saling mendominasi. Setiap esensi dari fungsi-fungsi tersebut merupakan faktor pembentuk variabel pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Keberlanjutan fungsi produksi/ekonomi dengan 10 indikator, keberlanjutan fungsi ekologi/lingkungan dengan 6 indikator dan keberlanjutan fungsi sosial dengan 12 indikator masing-masing esensi tersebut akan melalui uji reliabilitas dan validitas sebagai berikut:

#### Kelestarian Fungsi Produksi/Ekonomi

Berdasarkan Tabel 27 dan Tabel 28 pada Lampiran 2, setelah dilakukan pengujian reliabilitas dan validitas pada pertanyaan yang variabel kelestarian fungsi ekologi, semua 10 item pertanyaan dapat digunakan, karena seluruh 10 item pertanyaan tersebut memenuhi syarat nilai *Corrected item-total correlation* pada uji reliabilitas dan nilai r-hitung pada uji validitas melebihi batas minimum dari r-tabel yaitu 0,361. Jadi pertanyaan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 10 pertanyaan, yaitu: KFP1, KFP2, KFP3, KFP4, KFP5, KFP6, KFP7, KFP8, KFP9, dan KFP10.

### Kelestarian Fungsi Ekologi

Berdasarkan Tabel 29 dan Tabel 30 pada Lampiran 2, setelah dilakukan pengujian reliabilitas dan validitas pada pertanyaan yang terdapat dalam indikator kelestarian fungsi ekologi, maka semua 6 item pertanyaan dapat digunakan, karena dari keseluruhan item pertanyaan tersebut memenuhi syarat nilai *Corrected item-total correlation* pada uji reliabilitas dan nilai *r*-hitung pada uji validitas melebihi batas minimum dari *r*-tabel yaitu 0,361. Dan pertanyaan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 10 pertanyaan, yaitu: KFE1, KFE2, KFE3, KFE4, KFE5, KFE6, KFE7, KFE8, KFE9 dan KFE10.

### Kelestarian Fungsi Sosial

Berdasarkan Tabel 31 dan Tabel 32 pada Lampiran 2, setelah dilakukan pengujian reliabilitas dan validitas pada pertanyaan yang terdapat dalam indikator kelestarian fungsi social, ternyata tidak semua pertanyaan dapat digunakan karena dari keseluruhan item pertanyaan tersebut ada 4 pertanyaan yang tidak memenuhi syarat nilai *Corrected item-total correlation* pada uji reliabilitas dan nilai *r*-hitung pada uji validitas tidak seluruhnya melebihi batas minimum dari *r*-tabel yaitu 0,361. Dan pertanyaan yang dapat digunakan dari 12 pertanyaan di atas dalam penelitian ini adalah sebanyak 8 pertanyaan, yaitu: KFS4, KFS5, KFS6, KFS7, KFS9, KFS10, KFS11, dan KFS12.

#### **4.3.2. Analisis Statistik Inferensial**

Statistik Inferensial dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan model pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan. Melalui metode ini dapat ditafsirkan parameter suatu populasi dan dapat diuji kebenaran suatu hipotesa. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah SEM (*Structured Equation Modeling*). Namun setelah dilakukan penelitian, data kuantitatif hasil penelitian yang berhasil dikumpulkan memang cukup banyak jumlahnya. Variabel-variabel penelitian mempunyai data kuantitatif masing-masingnya adalah (a) modal sosial sebanyak 110 data (b) keberdayaan masyarakat sebanyak 18 (c) pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan sebanyak 23 data. Dengan pertimbangan (a) kuantitas data yang cukup banyak (b) kenyataan kebutuhan analisis serta (c) daya

tampung alat analisis maka dilakukan reduksi data. Reduksi data yang dilakukan lebih merupakan penyederhanaan jumlah bukan penyederhanaan isi (*content*), dan semua data tetap melalui uji reliabilitas dan validitas untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Reduksi data dilakukan dengan penggunaan prinsip bahwa nilai rata-rata dari keseluruhan indikator adalah nilai indikator dari setiap variabel. Melalui penggunaan prinsip ini maka jumlah data yang dianalisis lebih lanjut pada analisis kuantitatif masing-masingnya adalah (a) modal sosial sebanyak 8 (delapan) data; (b) keberdayaan masyarakat sebanyak 3 (tiga) data; (c) pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan sebanyak 3 (tiga) data.

Metode yang digunakan untuk menguji model pengukuran adalah dengan analisis faktor konfirmatori (CFA). Analisis faktor konfirmatori digunakan untuk menguji sebuah konsep dengan menggunakan indikator-indikator yang terukur. Hair *et al.* (2006: 779) mensyaratkan bahwa nilai *factor loadings* yang ditunjukkan oleh nilai harus mencapai atau lebih besar dari 0,5. *Factor loadings* pada perhitungan *Lisrel* (*Linear Structural Relationship*) ditunjukkan oleh *standard regression weight*. *Loading significant* dari *confirmatory factor analysis* dapat dilihat dari *critical ratio* (CR) yang terdapat pada hasil pengolahan data dengan *Lisrel* versi 8.7. Nilai CR yang lebih besar dari 1,96 dikatakan memiliki nilai *loading* yang signifikan dengan tingkat kepercayaan 95% (Hair *et al.* 2006: 390). CFA merupakan bukti tercapainya *construct validity* (Hair *et al.* 2006: 779).

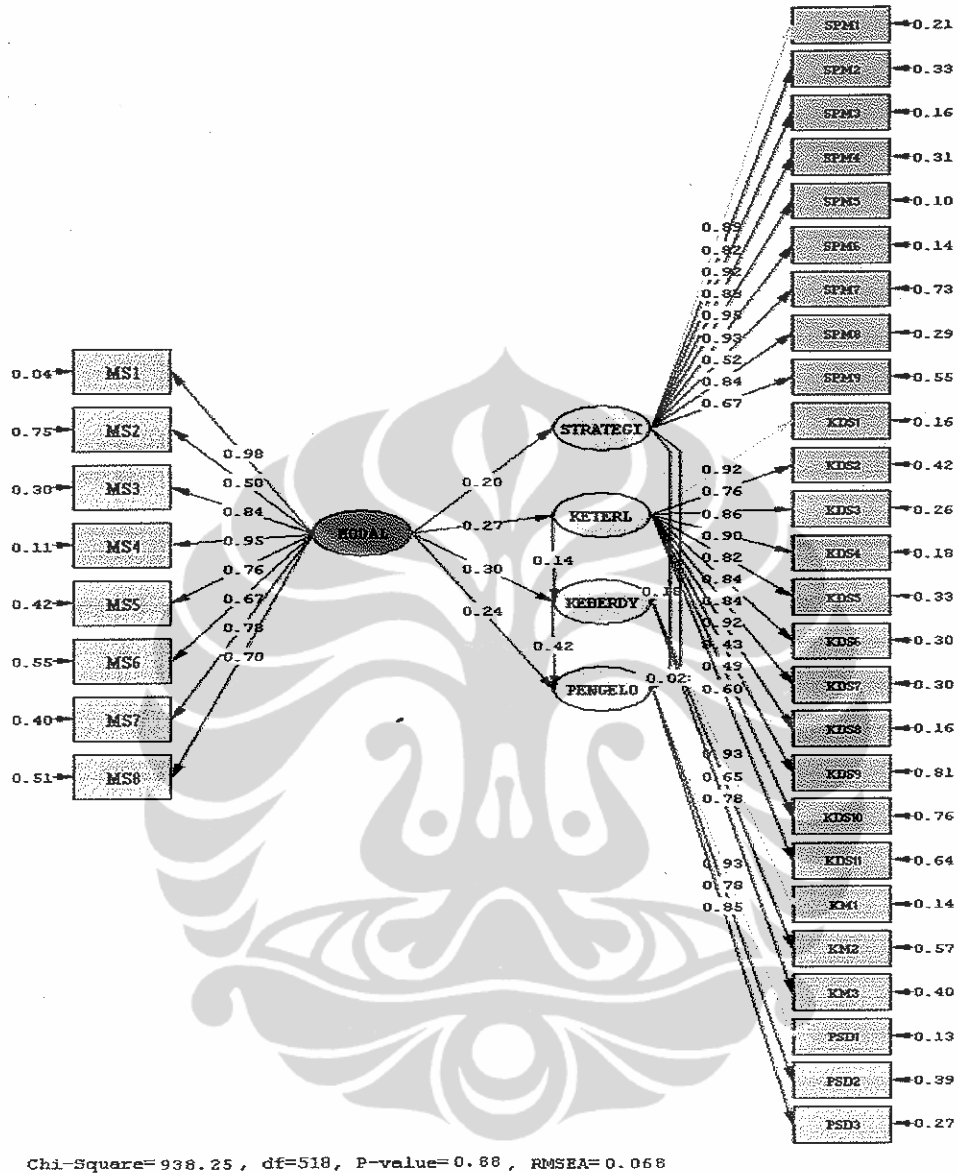
Pada Tabel 4.21 dapat dilihat bahwa keseluruhan instrumen penelitian yang digunakan memiliki nilai *factor loadings* (*Standard Regression Weight*) yang lebih besar dari yang disyaratkan yaitu sebesar 0,5. Maka dapat dikatakan terdapat hubungan yang signifikan dan *factor loading* yang lebih besar dari 0,5 menunjukkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan memiliki validitas konvergen atau disebut valid. Pada hasil pengolahan data dari analisis faktor konfirmatori dapat dinyatakan signifikan karena nilai CR yang dihasilkan oleh setiap variabel berada di atas 1,96. Gambar model pengukuran dari hasil analisis dengan menggunakan *Lisrel* versi 8.7 dapat dilihat pada Gambar 4.1. dan 4.2.

Tabel 4.21. Hasil Analisis Faktor Konfirmatori

<i>Path</i>	<i>Standard Regression Weight</i>	<i>CR</i>	<i>Absolute Fit</i>
KBM ← Modal Sosial	0,98	20,81	GFI = 0,95 CMIN/DF= 1,811 RMSEA = 0,068 RMR = 0,181
KP ← Modal Sosial	0,50	8,14	
JS ← Modal Sosial	0,84	15,99	
KPS ← Modal Sosial	0,95	19,57	
KL ← Modal Sosial	0,76	13,89	
KS ← Modal Sosial	0,67	11,69	
NB ← Modal Sosial	0,78	14,25	
KLP ← Modal Sosial	0,70	12,42	
SPM 1← Strategi Pemberdayaan Masyarakat	0,89		
SPM 2← Strategi Pemberdayaan Masyarakat	0,82	17,24	
SPM 3← Strategi Pemberdayaan Masyarakat	0,92	22,22	
SPM 4← Strategi Pemberdayaan Masyarakat	0,83	17,84	
SPM 5← Strategi Pemberdayaan Masyarakat	0,95	24,31	
SPM 6← Strategi Pemberdayaan Masyarakat	0,93	22,81	
SPM 7← Strategi Pemberdayaan Masyarakat	0,52	8,84	
SPM 8← Strategi Pemberdayaan Masyarakat	0,84	18,46	
SPM 9← Strategi Pemberdayaan Masyarakat	0,67	12,35	
KDS 1← Keterlibatan dan Dukungan Stakeholders	0,92		
KDS 2← Keterlibatan dan Dukungan Stakeholders	0,76	15,99	
KDS 3← Keterlibatan dan Dukungan Stakeholders	0,86	20,58	
KDS 4← Keterlibatan dan Dukungan Stakeholders	0,90	23,56	
KDS 5← Keterlibatan dan Dukungan Stakeholders	0,82	18,26	
KDS 6← Keterlibatan dan Dukungan Stakeholders	0,84	19,31	
KDS 7← Keterlibatan dan Dukungan Stakeholders	0,84	19,39	
KDS 8← Keterlibatan dan Dukungan Stakeholders	0,92	24,44	
KDS 9← Keterlibatan dan Dukungan Stakeholders	0,53	7,12	
KDS 10← Keterlibatan dan Dukungan Stakeholders	0,59	8,30	
KDS 11← Keterlibatan dan Dukungan Stakeholders	0,60	10,72	
PPK ← Keberdayaan Masyarakat	0,93		
PDP ← Keberdayaan Masyarakat	0,65	10,62	
KDM← Keberdayaan Masyarakat	0,78	12,84	
KFP ← Pengelolaan SDHB	0,93		
KFE ← Pengelolaan SDHB	0,78	15,11	
KFS ← Pengelolaan SDHB	0,85	17,36	

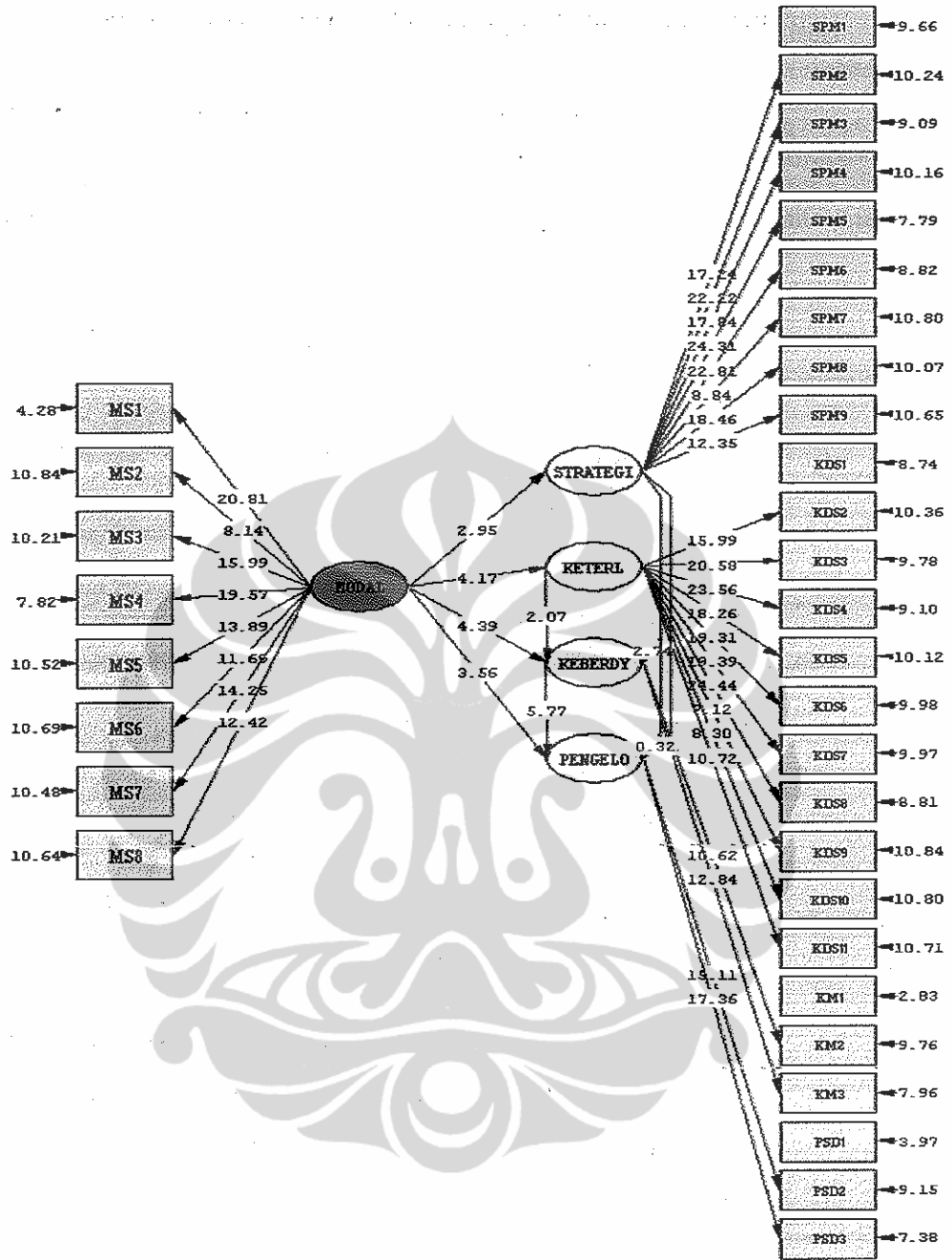
Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, tahun 2009

Hasil Model Pengukuran Modal Sosial sebagaimana gambar berikut:



Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, Tahun 2009

Gambar 4.1. Model Pengukuran Terhadap Modal Sosial, Strategi Pemberdayaan, Keterlibatan dan Dukungan Stakeholder serta Keberdayaan masyarakat dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan dengan masing-masing Nilai *Standardized*



Chi-Square= 938.25 , df=510, P-value= 0.88 , RMSEA= 0.068

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, Tahun 2009

Gambar 4.2. Model Pengukuran Terhadap Modal Sosial Strategi Pemberdayaan, Keterlibatan dan Dukungan Stakeholder serta Keberdayaan masyarakat dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan dengan masing-masing Nilai CR (*Critical Ratio*)

**Model Persamaan Struktural Secara Keseluruhan Responden:**

$$\text{SPM} = 0.20 * \text{MS} \quad \text{Persamaan (1)}$$

(0.066)  
2.95

$$\text{KDS} = 0.27 * \text{MS} \quad \text{Persamaan (2)}$$

(0.066)  
4.17

$$\text{KM} = 0.18 * \text{SPM} + 0.14 * \text{KDS} + 0.30 * \text{MS} \quad \text{Persamaan (3)}$$

(0.065)      (0.066)      (0.069)  
2.74          2.07          4.39

$$\text{PSDHB} = 0.031 * \text{SPM} + 0.020 * \text{KDS} + 0.24 * \text{MS} + 0.42 * \text{KM} \quad \text{Persamaan (4)}$$

(0.062)      (0.063)      0.068      (0.0729)  
0.51          0.32          3.56          5,77

**Keterangan:**

SPM = Strategi Pemberdayaan Masyarakat

MS = Modal Sosial

KDS = Keterlibatan dan Dukungan Stakeholders

KM = Keberdayaan Masyarakat

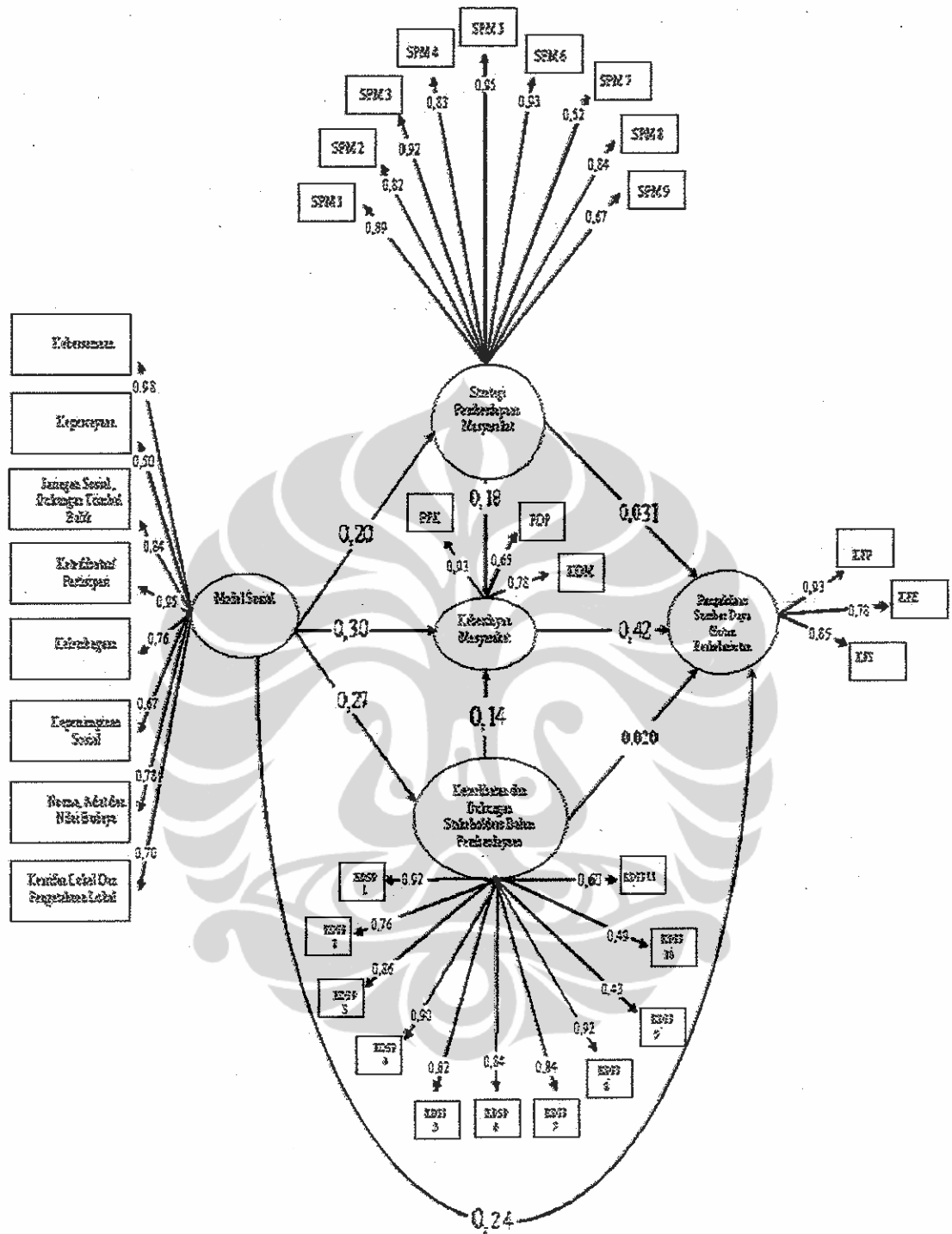
PSDHB = Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan

Nilai 0.20; 0.27; 0.18; 0.14; 0.30; 0.11; 0.31; 0.020; 0.24; 0.42 adalah nilai *Standard*

Nilai 2.95; 4.17; 2.74; 2.07; 4.39; 0.51; 0.32; 3.56; 5.77 adalah nilai CR

Nilai yang berada dalam kurung adalah nilai *error* persamaan

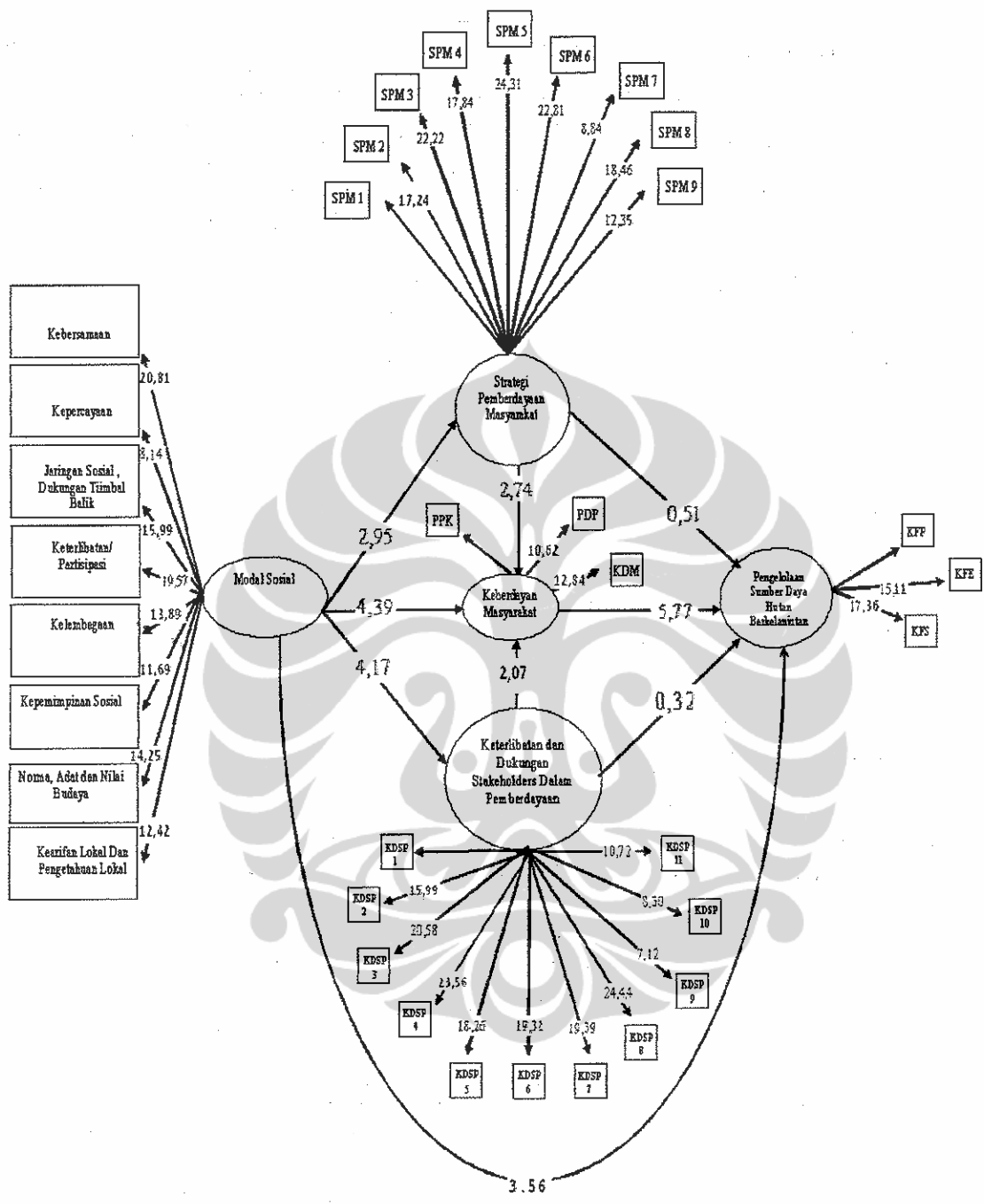
Jika hasil pengukuran digambarkan dalam suatu rangkaian desain model hubungan struktural, maka model pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan dengan memanfaatkan modal sosial adalah sebagaimana gambar berikut:



Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2010

Gambar 4.3. Model Struktural Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan dengan Nilai *Standard Regression Weight*





Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2010

Gambar 4.4. Model Struktural Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan dengan Nilai CR (*Critical Ratio*)

#### 4.3.2.1. Analisis Indeks Kesesuaian Model

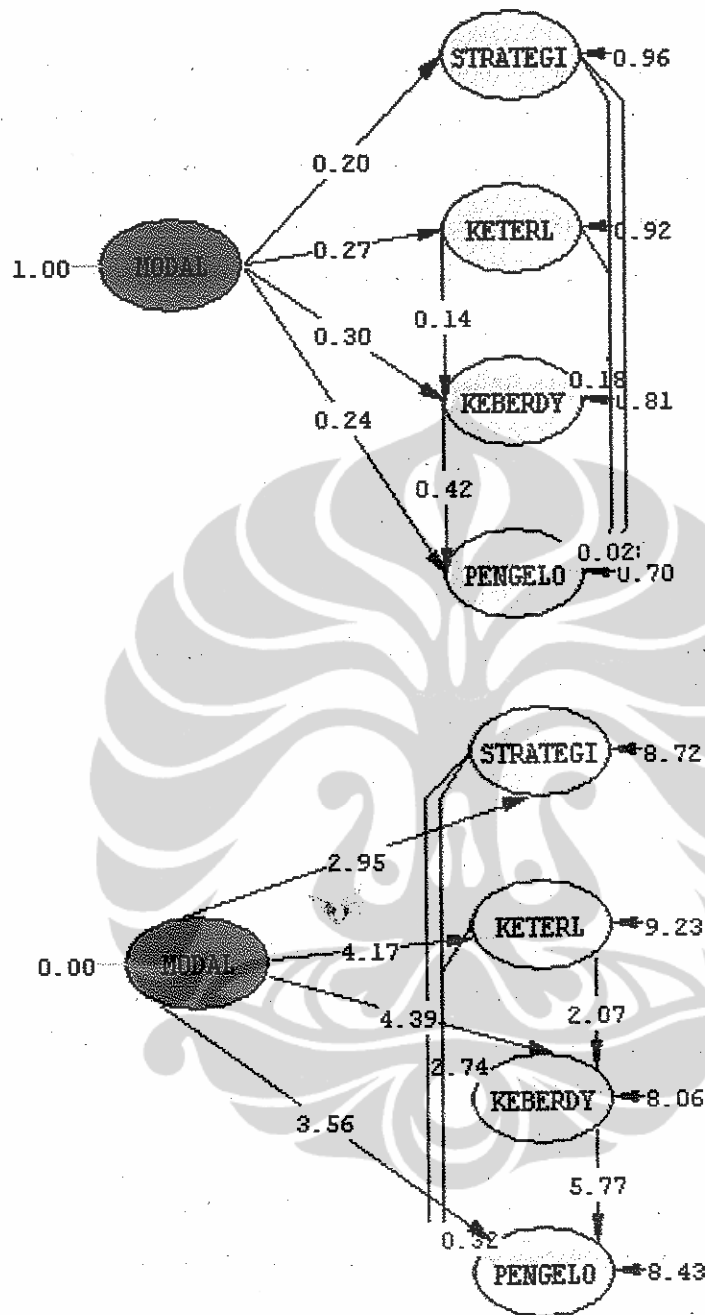
Analisis indeks kesesuaian model dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian konsep model yang dibangun secara teoritis dengan data empiris atau hubungan kausalitas antara variabel dalam penelitian. Analisis tersebut dilakukan dengan Pengujian model struktural yang terdapat variabel independen dan variabel dependen. Hasil indeks uji kesesuaian model dapat dilihat pada Tabel 4.22 berikut:

Tabel 4.22. Indeks Uji Kesesuaian Model

Kriteria	Nilai Kritis	Hasil Model	Evaluasi
CMIN/DF <i>Chi Square minimum/df</i>	$\leq 2,0$ (Arbuckle, 1997)	1,811	Baik
GFI <i>(Goodness of Fit Index)</i>	$\geq 0,90$ (Hair et al. 2006, 747)	0,95	Baik
RMR <i>(Root Mean Square Residual)</i>	$\leq 0,05$ (Hair et al. 1998, 657)	0,047	Baik
RMSEA <i>(Root Mean Square Error of Approximation)</i>	$\leq 0,08$ (Hair et al. 2006, 748)	0,068	Baik

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, tahun 2009

Pada Tabel 4.22 menjelaskan tentang indeks kesesuaian model, dimana dapat dilihat bahwa hasil evaluasi model adalah baik untuk kriteria GFI, karena nilai GFI lebih besar dari 0,9 yaitu sebesar 0,95, untuk hasil evaluasi model adalah baik untuk kriteria RMSEA karena nilainya lebih kecil dari 0,08 yaitu sebesar 0,06. Sedangkan untuk kriteria CMIN/DF hasil evaluasi modelnya adalah baik karena hasil modelnya kurang dari 2,00 yaitu sebesar 1,811. Hasil evaluasi model untuk kriteria RMR adalah baik karena nilainya lebih kecil 0,05 yaitu sebesar 0,042. Melalui hasil evaluasi pada Tabel 4.22 dapat disimpulkan bahwa rancangan model yang dibangun dapat diterima dan sesuai dengan teori, sehingga dapat dikatakan model tersebut dapat bersifat general. Kesesuaian pada model penelitian yang digunakan, sebagaimana gambar model struktural berikut:



Sumber: Hasil Pengolahan Data, tahun 2010

Gambar 4.5. Model Struktural Modal Sosial terhadap Strategi pemberdayaan, Keterlibatan dan dukungan stakeholders, keberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan

#### 4.3.2.2. Analisis Pengujian Hipotesis Jalur

Hasil pengujian hipotesis jalur pada hubungan struktural setiap variabel pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.23. Berdasarkan tabel tersebut bahwa dari hipotesis jalur yang ada, ada dua hipotesis jalur yang menunjukkan suatu hubungan yang tidak signifikan. Itu disebabkan nilai titik kritis (CR) yang dihasilkan lebih kecil dari 1,96. Pada tingkat kepercayaan 95% atau *error* 5%, nilai CR yang diterima adalah sebesar 1,96 (Hair *et al.* 2006: 390).

Tabel 4.23. Pengujian Hipotesis Jalur

Path	Standarized Regression Weight	CR	Hasil Uji Hipotesis
MS → SPM	0,20	2,95	Diterima
MS → KDS	0,27	4,17	Diterima
MS → KM	0,30	4,39	Diterima
MS → PSDH	0,24	3,56	Diterima
SPM → KM	0,18	2,74	Diterima
SPM → PSDH	0,031	0,51	Ditolak
KDS → KM	0,14	2,07	Diterima
KDS → PSDH	0,020	0,32	Ditolak
KM → PSDH	0,42	5,77	Diterima
MS → SPM → KM → PSDH	0,20→0,18→0,42 0,255	2,95→2,74→5,77	Diterima
MS → KDS → KM → PSDH	0,27→0,14→0,42 0,255	4,17→2,07→5,77	Diterima
MS → KM → PSDH	0,30→0,42 0,37	4,39→5,77	Diterima
Ho = berpengaruh H1 = tidak berpengaruh			

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, Tahun 2010

Keterangan: MS = Modal Sosial; SPM = Strategi pemberdayaan masyarakat  
KDS = Keterlibatan dan dukungan stakeholders;  
KM = Keberdayaan Masyarakat;  
PSDH = Pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan

#### Hubungan Modal Sosial dengan Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Hasil pengujian jalur MS→SPM pada Tabel 4.23 dengan analisis jalur (CFA), menjelaskan bahwa secara keseluruhan hubungan antara modal sosial dan strategi pemberdayaan mempunyai nilai kritis (CR) 2,95, nilai tersebut lebih besar dari 1,96 (nilai yang disyaratkan). Hal ini memberi arti bahwa jalur hubungan variabel modal sosial mempunyai pengaruh dan hubungan yang signifikan terhadap

strategi pemberdayaan dapat diterima. Sedang nilai faktor *loading* adalah 0,20 memberi arti bahwa pengaruh modal sosial pada strategi pemberdayaan masyarakat adalah sebesar 20 %, artinya setiap ada peningkatan kualitas modal sosial akan memberi berpengaruh signifikan sebanyak 20% dalam peningkatan pelaksanaan strategi pemberdayaan dari sebelumnya. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian dari Badaruddin (2008), Suharto (2005), Fukuyama (1995), dan Bank Dunia (1998) bahwa modal sosial akan sangat mempengaruhi tercapainya keberhasilan pembangunan, termasuk dalam proses pemberdayaan. Unsur-unsur pembentuk modal sosial yang semakin menguat akan memudahkan pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat.

#### **Hubungan Modal Sosial dengan Keterlibatan dan Dukungan Stakeholders**

Pada Tabel 4.23 Hasil pengujian hubungan jalur memperlihatkan nilai *factor loading* sebesar 0,27 dan nilai CR sebesar 4,17 ( $>1,96$ ), yang memberi arti bahwa jalur MS  $\rightarrow$  KDS terdapat hubungan pengaruh yang signifikan antara variabel modal sosial pada keterlibatan dan dukungan *stakeholders*, sehingga hipotesa tersebut dapat diterima, dan pengaruh modal sosial pada keterlibatan dan dukungan *stakeholders* tersebut adalah sebesar 27%. Setiap peningkatan kualitas modal sosial akan mempengaruhi keterlibatan dan dukungan *stakeholders* sebesar 27%. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Suharto (2005), dan Kilptrik (2000), bahwa semakin baik modal sosial masyarakat, maka keterlibatan para *stakeholders* pemberdayaan semakin baik.

#### **Hubungan Modal Sosial dengan Keberdayaan Masyarakat**

Uji hipotesis jalur MS $\rightarrow$ KM, menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan antara variabel modal sosial pada keberdayaan masyarakat. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis diterima/didukung karena memiliki nilai CR yang diperoleh sebesar 4,39 melebihi dari 1,96. Nilai *factor loading* menunjukkan 0,30 yang berarti bahwa terdapat pengaruh langsung dari variabel modal sosial pada keberdayaan masyarakat sebesar 30%, dan selain itu terdapat pengaruh tak langsung karena melalui strategi pemberdayaan sebesar 3,6%. Total pengaruh modal sosial pada keberdayaan adalah sebesar 33,6%. Hal tersebut memberi

gambaran kuatnya pengaruh modal sosial pada keberdayaan masyarakat. Selain itu ada juga pengaruh tak langsung modal sosial pada keberdayaan masyarakat melalui keterlibatan dan dukungan *stakeholders* sebesar 3,78%, sehingga total pengaruh langsung dan tak langsung modal sosial pada keberdayaan adalah sebesar 33,78%. Penjelasan tersebut dapat dijustifikasi oleh pendapat ADB (2000), Putnam (1993), Rahadiansah (2005) dan Suharto (2005), bahwa semakin tinggi modal sosial masyarakat, maka tingkat keberdayaan masyarakat juga semakin tinggi. Modal sosial dengan keberdayaan adalah saling melengkapi dan saling mempengaruhi satu sama lain.

### **Hubungan Modal Sosial Dengan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan**

Hasil uji hipotesis jalur MS→ PSDH, pada Tabel 4.23 memperlihatkan bahwa nilai *factor loading* sebesar 0,24 dan nilai CR sebesar 3,56 ( $>1,96$ ) memberi arti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel modal sosial terhadap pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan dan hipotesa tersebut dapat diterima. Angka *factor loading* 0,24 menggambarkan bahwa terdapat pengaruh langsung dari variabel modal sosial terhadap pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan sebesar 24%, selain itu ada pengaruh tidak langsung modal sosial terhadap pengelolaan sumber daya hutan yang melalui variabel strategi pemberdayaan sebesar 1,512%, kemudian pengaruh tak langsung modal sosial terhadap pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan melalui keberdayaan masyarakat sebesar 13%, dan pengaruh tak langsung melalui keterlibatan dan dukungan stakeholser sebesar 1,5876%. Total pengaruh modal sosial terhadap pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan adalah total penjumlahan pengaruh langsung dan tak langsung yaitu sebesar 40%.

Modal sosial sangat berpengaruh pada proses pembangunan termasuk pengelolaan sumber daya hutan telah terbukti dalam studi-studi empiris yang dilakukan oleh Barber et al (19997), Mehra (2006), Agus (2004), Grootaert et al (2003), Badaruddin (2008), World Bank (1993) dan Fukuyama (1995).

## **Hubungan Strategi Pemberdayaan Masyarakat dan Keberdayaan Masyarakat**

Pada Tabel 4.23. Uji hipotesis jalur SPM→KM, menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan antara variabel strategi pemberdayaan masyarakat pada keberdayaan masyarakat. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis diterima/didukung karena memiliki nilai CR yang diperoleh sebesar 2,74 yang melebihi dari 1,96. Hasil uji hipotesis memperlihatkan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat terhadap keberdayaan masyarakat mempunyai nilai *factor loading* 0,18 dan nilai CR 2,74 (>1,96). Hal tersebut menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel strategi pemberdayaan masyarakat terhadap keberdayaan masyarakat. Besaran pengaruh strategi pemberdayaan masyarakat terhadap keberdayaan masyarakat adalah sebesar 18%. Strategi pemberdayaan masyarakat memang senyatanya berpengaruh pada keberdayaan masyarakat, karena hasil dari suatu proses pemberdayaan adalah keberdayaan, sebagaimana telah diungkapkan Johnson (2002).

## **Hubungan Strategi Pemberdayaan Masyarakat dengan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan**

Hasil uji hipotesis jalur SPM→ PSDH pada Tabel 4.23 menyatakan bahwa ada pengaruh antara variabel strategi pemberdayaan masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan sebesar 3,1%. Namun hasil pengujian hipotesis tersebut menunjukkan bahwa hipotesis tidak diterima karena memiliki nilai CR sebesar 0,51 (<1,96). Seharusnya strategi pemberdayaan masyarakat berpengaruh dalam suatu proses pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan (pengembangan Sutomo, 2008; Albee & Boyd, 1997; Subejo & Supriyanto, 2004), karena salah satu prasyarat pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan adalah pemberdayaan masyarakat, sehingga hasil studi empiris ini seharusnya dikritisi atau kenyataan dilapangan strategi pemberdayaan masyarakat tidak begitu dipahami oleh para responden masyarakat sekitar hutan.

### **Hubungan Keterlibatan dan Dukungan Stakeholders Pemberdayaan Masyarakat dengan Keberdayaan Masyarakat**

Pada Tabel 4.23, uji hipotesis menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel keterlibatan dan dukungan *stakeholders* terhadap keberdayaan masyarakat. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis diterima karena memiliki nilai *loading factor* sebesar 0,14 dan nilai CR sebesar 2,07 (>1,96). Besaran pengaruh keterlibatan dan dukungan *stakeholders* terhadap keberdayaan masyarakat adalah sebesar 14%, artinya setiap perubahan peningkatan keterlibatan dan dukungan *stakeholders* akan mempengaruhi 14% keberdayaan masyarakat, sebagaimana dinyatakan oleh Agung (2004), bahwa keterlibatan dan dukungan *stakeholders* pemberdayaan mempunyai pengaruh pada keberdayaan masyarakat.

### **Hubungan Keterlibatan dan Dukungan Stakeholders dengan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan**

Uji hipotesis jalur KDS→PSDH pada Tabel 4.23, menunjukkan nilai *factor loading* diperoleh sebesar 0,020, artinya keterlibatan dan dukungan *stakeholders* mempunyai pengaruh sebesar 2%, namun hipotesis tidak diterima/tidak didukung karena memiliki nilai CR yang diperoleh sebesar 0,32 tidak melebihi dari nilai 1,96, nilai yang dipersyaratkan. Senyatanya keterlibatan dan dukungan *stakeholders* mempunyai pengaruh pada pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan, karena tanpa keterlibatan dan dukungan *stakeholder*, proses pengelolaan sumber daya hutan tidak akan berkalat (Agung, 2004).

### **Hubungan Keberdayaan Masyarakat dengan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan**

Uji hipotesis jalur KM→PSDH pada Tabel 4.23, menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan antara variabel keberdayaan masyarakat pada pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis diterima/didukung karena memiliki nilai CR yang diperoleh sebesar 5,77 melebihi dari 1,96. Sedang nilai *factor loading* adalah 0,42, artinya keberdayaan



masyarakat mempunyai pengaruh 42% pada pengelolaan sumber daya hutan keberlanjutan. Hal tersebut sejalan apa yang dikatakan Mariana (2000) dan Barber (1999) bahwa keberdayaan masyarakat sekitar akan sangat berpengaruh pada pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan, karena dengan keberdayaan yang tinggi, masyarakat telah mempunyai kemandirian dan wawasan yang baik dalam hubungannya dengan lingkungan.

### **Hubungan Tidak Langsung Modal Sosial dengan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan melalui Strategi Pemberdayaan Masyarakat dan Keberdayaan Masyarakat**

Pada uji hipotesis jalur  $MS \rightarrow SPM \rightarrow KM \rightarrow PSDH$  pada Tabel 4.23, menyatakan terdapat pengaruh tidak langsung modal sosial pada pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan melalui strategi pemberdayaan masyarakat dan melalui keberdayaan masyarakat. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis diterima/didukung karena memiliki nilai CR yang diperoleh melebihi dari 1,96. Nilai semua CR yang dilalui oleh jalur tersebut di atas nilai 1,96.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis diterima, karena memiliki nilai *factor loading* sebesar 0,515 dan nilai CR yang dilalui oleh jalur tersebut di atas nilai 1,96. Pengaruh tak langsung modal sosial terhadap pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan karena melalui strategi pemberdayaan masyarakat dan keberdayaan masyarakat adalah sebesar  $0,2 \times 0,18 \times 0,42$  adalah 0,01512 atau 1,512% dan pengaruh langsung modal sosial terhadap pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan adalah sebesar 24%, sehingga total pengaruh modal sosial terhadap pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan adalah penjumlahan pengaruh tak langsung dan pengaruh langsung, yaitu 25,512%. Modal sosial akan berpengaruh pada proses pemberdayaan, karena strategi pemberdayaan yang akan disusun dalam pemberdayaan akan sangat tergantung dari tingkat modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat sekitar hutan. Dengan memanfaatkan modal sosial tersebut dalam proses pemberdayaan, maka outputnya adalah keberdayaan masyarakat, yang selanjutnya tingkat keberdayaan tersebut akan berpengaruh pada pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan (dikembangkan dari grootaert, 20003).

### **Hubungan Tidak Langsung Modal Sosial dengan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan Melalui Keterlibatan dan Dukungan Stakeholders Pemberdayaan Masyarakat dan Keberdayaan Masyarakat**

Uji hubungan jalur MS→KDS→KM→PSDH pada tabel 4.23, menyatakan bahwa terdapat pengaruh tidak langsung modal sosial terhadap pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan melalui keterlibatan dan dukungan stakeholdres dan melalui keberdayaan masyarakat. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis diterima karena memiliki nilai *factor loading* 0,2588 dan nilai CR pada jalur yang dilewati semuanya melebihi nilai 1,96. Pengaruh tak langsung modal sosial terhadap pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan karena melalui keterlibatan dan dukungan stakeholders dan keberdayaan masyarakat adalah sebesar  $0,27 \times 0,14 \times 0,42 = 0,0159$  atau 1,59%, sedang pengaruh langsung modal sosial terhadap pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan adalah 24%, sehingga total pengaruh modal sosial terhadap pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan adalah penjumlahan keduanya yaitu sebesar 25,59%.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa telah banyak pendapat dan hasil penelitian yang telah membuktikan bahwa modal sosial secara langsung dan tak langsung sangat berpengaruh pada pengelolaan sumber daya hutan (Mariane, 2000).

### **Hubungan Tidak Langsung Modal Sosial dengan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan melalui Keberdayaan Masyarakat**

Uji hubungan jalur MS→KM→PSDH pada tabel 4.23, menyatakan terdapat pengaruh tidak langsung modal sosial terhadap pengelolaan sumber daya hutan melalui keberdayaan massyarakat. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis dapat diterima karena memiliki nilai *factor loading* sebesar 0,37 dan nilai CR yang melewati jalur tersebut diatas nilai 1,96. Pengaruh tak langsung modal sosial terhadap pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan adalah sebesar  $0,31 \times 0,42$  adalah 0,1302 atau 13,02%, dan pengaruh langsung 24%, sehingga total pengaruh modal sosial terhadap pengelolaan sumber daya hutan

berkelanjutan melalui keberdayaan masyarakat adalah penjumlahan pengaruh tersebut, yaitu sebesar 37%. Dengan nilai tersebut terlihat bahwa pengaruh modal sosial terhadap pengelolaan sumber daya hutan cukup besar.

Dari hasil pengujian jalur untuk hubungan jalur langsung, nilai *factor loading* terbesar (0,30) dan nilai CR (*Critical Ratio*) yang terbesar (4,39) adalah jalur modal sosial terhadap keberdayaan masyarakat. Dengan demikian terlihat bahwa keberdayaan masyarakat sekitar hutan dapat dipengaruhi langsung oleh kualitas modal sosial. Sedang hubungan tidak langsung adalah jalur modal sosial terhadap pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan melalui keberdayaan masyarakat, sebagaimana analisis pengaruh modal sosial berikut.

Dari analisis hubungan jalur langsung tersebut di atas, maka terlihat bahwa jalur hubungan yang terbesar yang mempunyai *factor loading* terbesar adalah hubungan jalur keberdayaan masyarakat dengan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan (0,42), kemudian berturut-turut; modal sosial dengan keberdayaan masyarakat (0,30), modal sosial dengan keterlibatan dan dukungan stakeholders (0,27), modal sosial dengan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan (0,24), modal sosial dengan strategi pemberdayaan (0,20), strategi pemberdayaan dengan keberdayaan (0,18), keterlibatan dan dukungan stakeholders dengan keberdayaan masyarakat (0,14), strategi pemberdayaan dengan pengelolaan sumber daya hutan (0,031), dan yang terakhir adalah jalur keterlibatan *stakeholder* pemberdayaan dengan pengelolaan sumber daya hutan (0,020).

Sedang hubungan jalur tak langsung, nilai *factor loading* yang terbesar adalah hubungan jalur modal sosial, keberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya hutan. Kemudian hubungan jalur modal sosial, strategi pemberdayaan, keberdayaan masyarakat, dan pengelolaan sumber daya hutan (0,255), sama dengan hubungan jalur modal sosial, keterlibatan dan dukungan *stakeholder*, keberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya hutan (0,255).

#### 4.3.2.3. Analisis Pengaruh Modal Sosial

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus kajian adalah tentang modal sosial dalam model pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, sehingga secara statistik dapat dilihat dari hasil pengujian tingkat besaran pengaruh modal sosial terhadap proses pemberdayaan masyarakat dan terhadap pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan.

Berdasarkan Tabel 4.23 dapat pula dianalisis sejauhmana besar kekuatan pengaruh langsung variabel modal sosial dengan variabel lain, baik pengaruh langsung maupun yang tak langsung. Besaran kekuatan pengaruh modal sosial tersebut dapat dilihat dari besaran nilai *standardized regression weight* strategi (SRW) yang diperoleh sebagaimana berikut:

1. Modal sosial mempunyai pengaruh langsung terhadap strategi pemberdayaan pemberdayaan masyarakat sebesar 20%;
2. Modal sosial mempunyai pengaruh langsung pada keterlibatan dan dukungan stakeholder sebesar 27%;
3. Modal sosial mempunyai pengaruh langsung pada keberdayaan masyarakat sebesar 30%
4. Modal sosial mempunyai pengaruh langsung pada pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan sebesar 37%

Untuk total pengaruh langsung dan tak langsung modal sosial terhadap variabel lainnya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Dari hasil uji hipotesis dan nilai besaran pengaruh yang ditunjukkan oleh *nilai standard regression weigh* pada Tabel 4.23, maka pada Tabel 4.24 di bawah memperlihatkan bahwa modal sosial mempunyai pengaruh langsung pada keberdayaan masyarakat sebesar 30% dan juga mempunyai pengaruh tidak langsung karena melalui strategi pemberdayaan masyarakat sebesar 3,6%. Sehingga total pengaruh modal sosial pada keberdayaan adalah sebesar 33,6%, hal tersebut menggambarkan kuatnya pengaruh variabel modal sosial terhadap keberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui strategi pemberdayaan masyarakat.

Tabel 4.24. Pengaruh Modal Sosial Terhadap Keberdayaan Melalui Strategi Pemberdayaan

Pengaruh langsung dan tidak langsung	Perhitungan	Pengaruh
1. Modal Sosial	0,30	0,30
2. Melalui Strategi Pemberdayaan Masyarakat (SPM)	0,20 x 0,18	0,036
Total Pengaruh Modal Sosial Terhadap Keberdayaan		0,336

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, Tahun 2010

2. Tabel 4.25 di bawah memperlihatkan bahwa modal sosial mempunyai pengaruh langsung terhadap keberdayaan masyarakat sebesar 30% dan juga mempunyai pengaruh tidak langsung pada keberdayaan dengan melalui keterlibatan dan dukungan *stakeholders* sebesar 3,78%. Total pengaruh modal sosial sebesar 34,78% yang menggambarkan kuatnya pengaruh variabel modal sosial pada keberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui keterlibatan dan dukungan *stakeholders*.

Tabel 4.25. Pengaruh Modal Sosial Terhadap Keberdayaan Melalui Keterlibatan dan Dukungan *Stakeholders*

Pengaruh langsung dan tidak langsung	Perhitungan	Pengaruh
1. Modal Sosial	0,30	0,30
2. Melalui Keterlibatan <i>Stakeholders</i> pemberdayaan	0,27 x 0,14	0,0378
Total Pengaruh Modal Sosial Terhadap Keberdayaan Masyarakat		0,3378

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, Tahun 2010

3. Tabel 4.26 di bawah memperlihatkan bahwa modal sosial mempunyai pengaruh langsung terhadap pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan sebesar 24% dan juga mempunyai pengaruh tidak langsung sebesar 1,512% melalui strategi pemberdayaan masyarakat, 13% melalui keberdayaan masyarakat, dan 1,587% melalui keterlibatan dan dukungan *stakeholders*. Total pengaruh sebesar 40% yang menggambarkan kuatnya pengaruh variabel modal sosial pada pengelolaan hutan berkelanjutan melalui strategi pemberdayaan masyarakat, keberdayaan masyarakat, dan keterlibatan dan dukungan *stakeholders*.

Tabel 4.26. Pengaruh Modal Sosial Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Hutan

Pengaruh langsung dan tidak langsung	Perhitungan	Pengaruh
1. Modal Sosial	0,24	0,240
2. Melalui Strategi	$0,20 \times 0,18 \times 0,42$	0,01512
3. Melalui Keberdayaan Masyarakat	$0,31 \times 0,42$	0,130
4. Melalui Keterlibatan dan Dukungan Stakeholders	$0,27 \times 0,14 \times 0,42$	0,015876
Total Pengaruh Modal Sosial Terhadap Pengelolaan		0,40

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, Tahun 2010

Berdasarkan hasil analisis pengaruh modal sosial pada variabel model pemberdayaan masyarakat tersebut, maka terlihat bahwa modal sosial mempunyai peran sangat penting dan sangat berpengaruh pada proses pemberdayaan masyarakat untuk menghasilkan keberdayaan masyarakat dan mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Dengan demikian menjadi sangat penting untuk memperhatikan dan menjadikan modal sosial sebagai landasan dalam pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan.

Uji Kesesuaian model pada Tabel 4.23. juga memperlihatkan bahwa model dengan unsur modal sosial, strategi pemberdayaan masyarakat, keterlibatan dan dukungan stakeholder, keberdayaan masyarakat serta pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan adalah model yang dapat diterima dan sesuai dengan teori serta saling terkait sehingga model tersebut dapat bersifat general.

Dari tinjauan ilmu lingkungan, maka model tersebut secara sosial dapat diterima (*socially acceptable*) karena model tersebut telah diawali dari modal sosial lingkungan sosial yang selama ini mendapat pengaruh dari lingkungan alam dan lingkungan ekonomi dan kemudian juga modal sosial akan memberi pengaruh terhadap kedua lingkungan tersebut. Model tersebut secara ekonomi dapat menguntungkan (*economically profitable*), karena modal sosial dengan unsur-unsurnya dapat menurunkan biaya, memperlancar arus informasi, memperkuat jaringan dan meningkatkan kerjasama, yang kesemuanya dapat memberi keuntungan secara ekonomi. Model tersebut secara teknologi dapat dikelola dan dilaksanakan (*technologically managable*), karena apa yang dilakukan dalam

proses pemberdayaan dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan tidak mempergunakan teknologi yang sulit, semua variabel-variabel dan proses yang terlaksana tidak melibatkan teknologi yang rumit. Model tersebut secara lingkungan berkelanjutan (*environmentally sustainable*), karena tujuan dari pembuatan model ini memang adalah kehidupan masyarakat yang berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan sehingga tercipta lingkungan yang berkelanjutan.

#### **4.4. Analisis Pengaruh Kekuatan Modal Sosial Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan**

Metode analisis perbandingan dilakukan bertujuan untuk mendalami objek tertentu secara lebih kritis. Metode komparasi sangat cocok digunakan untuk mendalami masalah sosial seperti halnya modal sosial masyarakat sekitar hutan dan hal-hal yang bersangkutan dengan masyarakat sekitar hutan itu sendiri. Untuk dapat melakukan komparasi tentu saja membutuhkan minimal adanya dua objek yang diperbandingkan karena tanpa ada kejelasan batasan objek yang diperbandingkan tidaklah mungkin dilakukan metode perbandingan. Model yang telah dibangun tentang modal sosial masyarakat sekitar hutan seperti telah dibahas terdahulu yang bersangkutan dengan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan telah memetakan eksistensi modal sosial. Model tersebut telah menunjukkan adanya hubungan pengaruh, arah pengaruh dan besaran pengaruh dari modal sosial pada pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan.

Peran modal sosial sebagai norma dan nilai yang telah terbentuk dan dipahami bersama untuk mencapai tujuan bersama pada masyarakat sekitar hutan tentu berbeda antar lokasi masyarakatnya. Modal sosial pada desa yang satu dengan desa yang lainnya tentu saja berbeda sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat desa itu sendiri. Untuk melihat seberapa jauh pengaruh kekuatan modal sosial terhadap proses pemberdayaan masyarakat dan terhadap pengelolaan

sumber daya hutan berkelanjutan, dilakukan analisis perbandingan terhadap LMDH maju dan LMDH Belum Maju.

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan terhadap kondisi eksisting pemberdayaan masyarakat (hasil Evaluasi Model Fujikake terlampir) dengan pengelompokan desa yang maju dan desa yang belum maju dari 12 (dua belas) LMDH lokasi penelitian dipilah menjadi 2 (dua) kelompok yang masing-masing diisi oleh enam LMDH dan tingkat keberdayaannya, yaitu seperti yang dijelaskan pada Tabel 4.24 di bawah ini.

Tabel 4.27. Hasil Evaluasi Kondisi Eksisting Keberdayaan LMDH Responden

No	LMDH Maju		LMDH Belum Maju	
	Nama LMDH	Nilai Rata-rata Keberdayaan	Nama LMDH	Nilai Rata-rata Keberdayaan
1	Lestari	6,1	Jaya Abadi	5,2
2	Harapan Mukti	6,7	Rimba Mekar	5,6
3	Agung Jaya	6,7	Wana Boga	5,6
4	Tani Sejati	7,4	Mandiri Putra	5,6
5	Sempur	8,4	Karya Bakti	5,7
6	Rimba Makmur	9,1	Mekar Makmur	5,9

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2009

Pengelompokan dan pemisahan adanya LMDH yang belum maju dengan LMDH yang maju seperti disebutkan di atas, selanjutnya digunakan untuk melakukan perbandingan dalam konteks modal sosial masyarakat sekitar hutan, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dan pengelolaan sumberdaya hutan berkelanjutan di lokasi desa yang bersangkutan. Berdasarkan pengelompokan tersebut ditemukan bahwa masyarakat pada LMDH yang maju mempunyai tingkat keberdayaan yang lebih tinggi daripada masyarakat LMDH yang belum maju.

Perbandingan antar model keterkaitan dan hubungan antara modal sosial, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan pada desa dengan LMDH yang maju dan desa dengan LMDH yang belum maju, digunakan untuk menemukan: (1) arah pengaruh dan besaran pengaruh modal sosial masyarakat sekitar hutan pada strategi pemberdayaan masyarakat, keberdayaan masyarakat sekitar hutan serta pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan; (2) merekomendasikan agar semua LMDH menjadi



LMDH yang senantiasa maju dan berdaya sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat sekitar hutan yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil analisis model secara utuh sebelumnya (12 LMDH) yang telah memperlihatkan bahwa modal sosial berpengaruh langsung dan tidak langsung secara signifikan pada (a) strategi pemberdayaan masyarakat, (b) keterlibatan dan dukungan stakeholders pemberdayaan masyarakat (c) keberdayaan masyarakat dan (d) pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan, maka untuk dapat diketahui peran modal sosial pada model pemberdayaan masyarakat secara lebih spesifik perlu dilakukan kajian peran modal sosial antara LMDH yang maju dan yang belum maju. Adapun hasil persamaan model pemberdayaan masyarakat pada LMDH yang maju dan belum maju adalah sebagai berikut:

**Persamaan struktural untuk LMDH yang Maju adalah :**

$$KDS = 0.32 * MS, \dots\dots\dots \text{Persamaan (5)}$$

(0.090)  
3.53

$$SPM = 0.21 * MS, \dots\dots\dots \text{Persamaan (6)}$$

(0.091)  
2.29

$$KM = 0.18 * KDS + 0.19 * SPM + 0.34 * MS \dots\dots\dots \text{Persamaan (7)}$$

(0.089)    (0.091)    (0.094)  
2.02        2.08        3.60

$$PSDHB = 0.11 * KM + 0.02 * KDS + 0.024 * SPM + 0.98 * MS, \dots\dots\dots \text{Persamaan (8)}$$

(0.033)    (0.030)    (0.030)    (0.080)  
3.35        0.52        0.81        12.25

Keterangan:

MS = Modal Sosial; KDS = Keterlibatan dan Dukungan Stakeholders

SPM = Strategi Pemberdayaan Masyarakat; KM = Keberdayaan Masyarakat

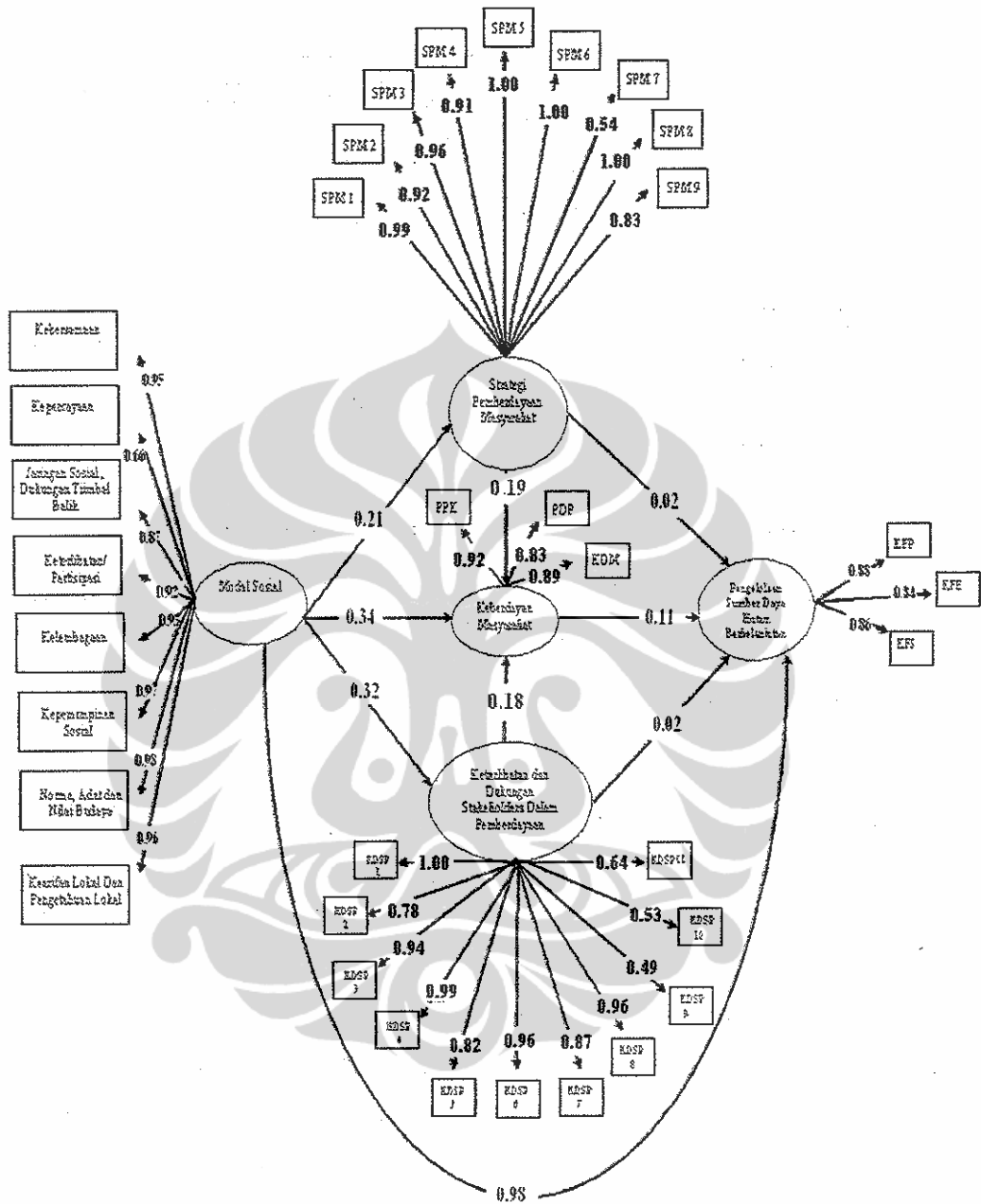
PSDHB = Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan

Nilai 0.32; 0.21; 0.18; 0.19; 0.34; 0.11; 0.02; 0.024; 0.98 adalah nilai Standard

Nilai 3.53; 2.29; 2.02; 2.08; 3.60; 3.35; 0.52; 0.81; 12.25 adalah nilai CR

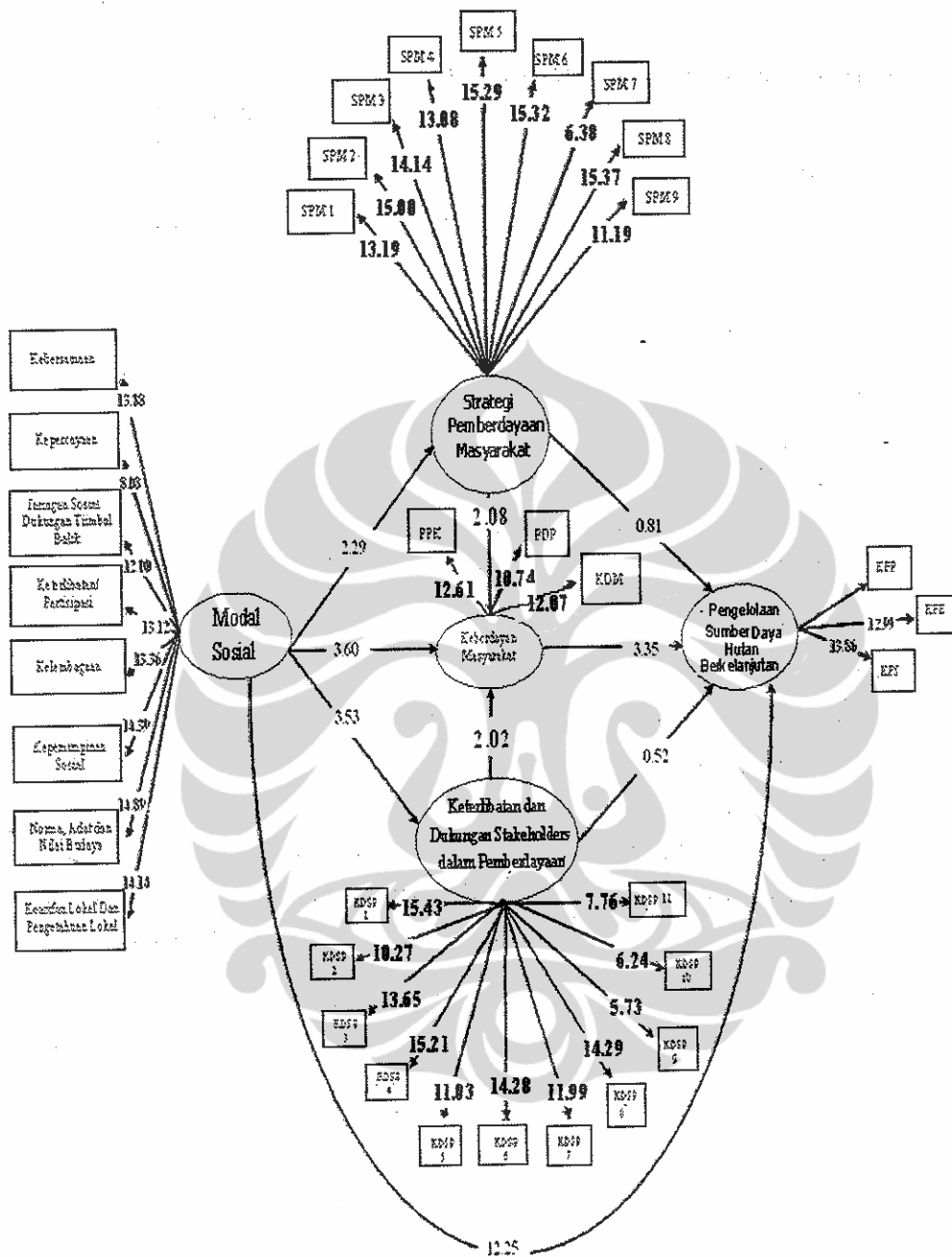
Nilai yang berada dalam kurung adalah nilai *error* persamaan

Desain gambar model pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan pada masyarakat dengan LMDH yang maju adalah sebagai berikut:



Sumber: Hasil Olahan data Primer, 2010

Gambar 4.6. Model Struktural pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan dengan Nilai *Standardized* pada LMDH Maju



Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2010

Gambar 4.7. Model Struktural Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan dengan Nilai CR pada LMDH Maju

Untuk Model struktural pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dengan nilai *Standardized* dan nilai CR pada LMDH yang belum maju adalah sebagai berikut:

**Persamaan Struktural LMDH Belum maju:**

$$\text{SPM} = 0.0038 * \text{MS}, \dots\dots\dots \text{Persamaan (9)}$$

(0.098)  
0.039

$$\text{KDS} = 0.020 * \text{MS}, \dots\dots\dots \text{Persamaan (10)}$$

(0.097)  
0.21

$$\text{KM} = 0.033 * \text{SPM} + 0.21 * \text{KDS} + 0.090 * \text{MS}, \dots\dots\dots \text{Persamaan (11)}$$

(0.099)      (0.099)      (0.097)  
0.33            2.16            0.93

$$\text{PSDHB} = 0.0068 * \text{SPM} + 0.010 * \text{KM} + 0.06 * \text{KDS} + 0.15 * \text{MS} \dots\dots \text{Persamaan (12)}$$

(0.100)      (0.10)      (0.10)      (0.098)  
0.068            0.098            0.57            1.51

Keterangan:

MS = Modal Sosial

KDS = Keterlibatan dan Dukungan Stakeholders

SPM = Strategi Pemberdayaan Masyarakat

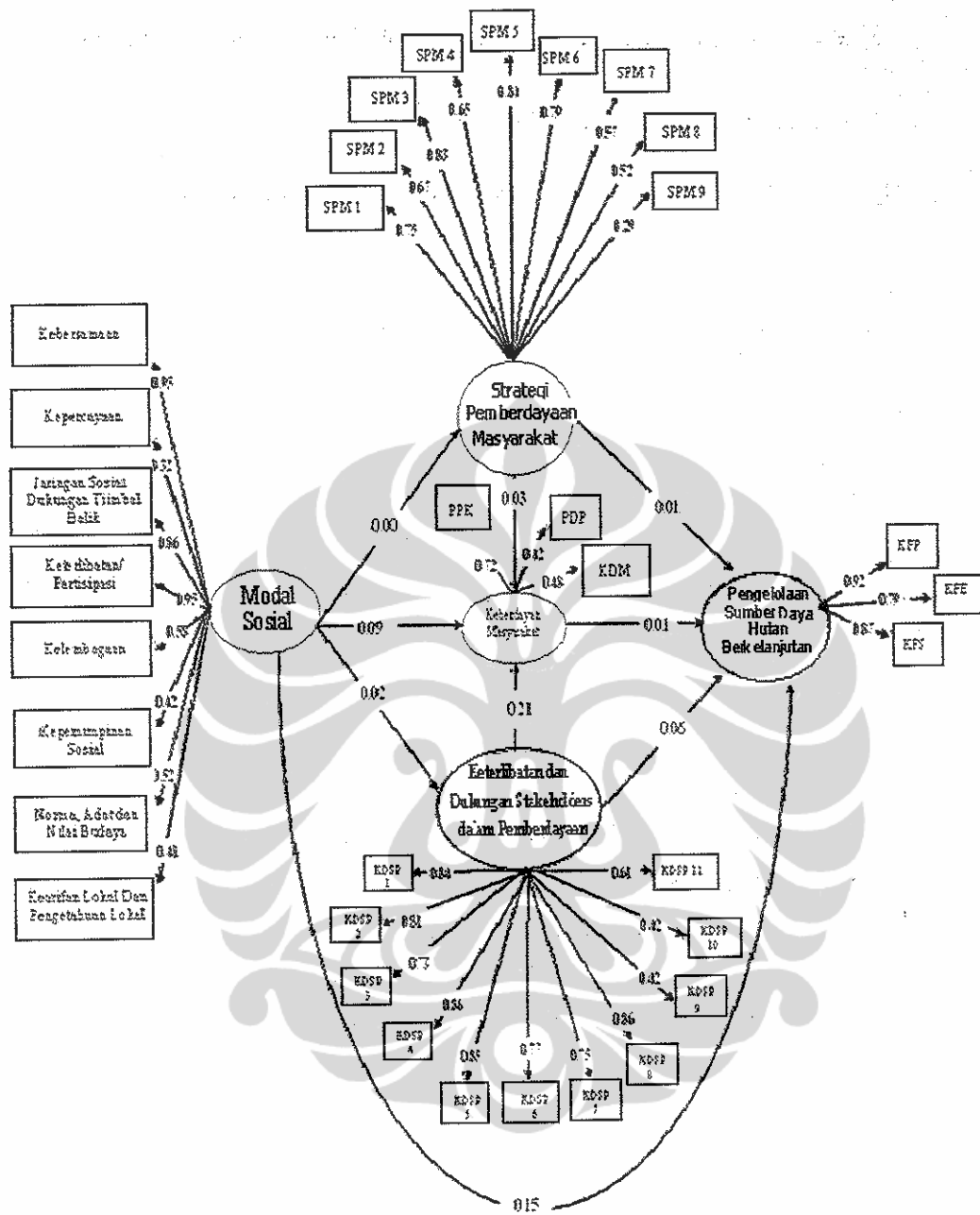
KM = Keberdayaan Masyarakat

PSDHB = Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan

Nilai 0.0038; 0.020; 0.033; 0.21; 0.090; 0.0068; 0.010; 0.06; 0.15 adalah nilai Standard

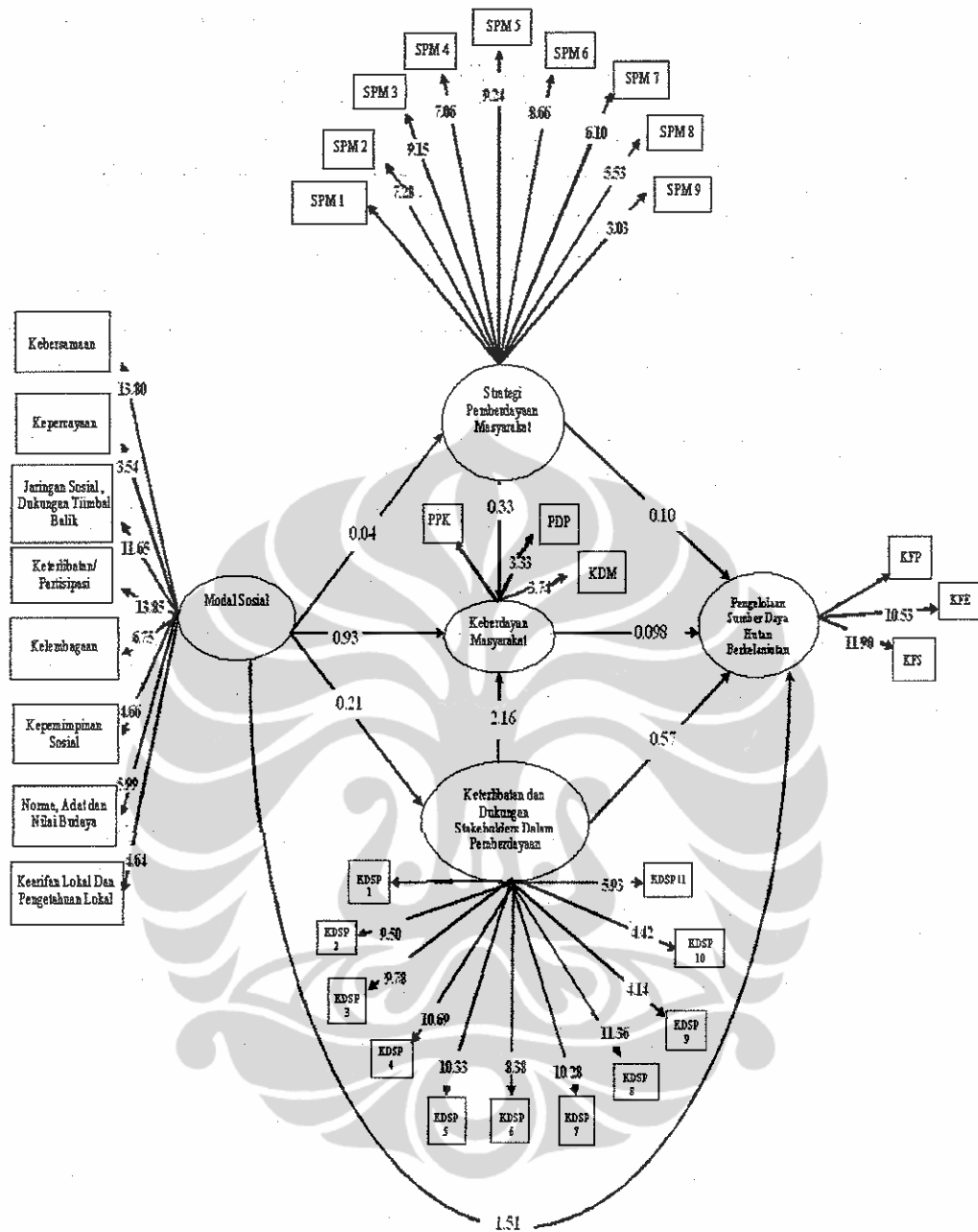
Nilai 0.039; 0.21; 0.33; 2.16; 0.93; 0.068; 0.098; 0.57; 1.51 adalah nilai CR

Nilai yang berada dalam kurung adalah nilai *error* persamaan



Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2010

Gambar 4.8. Model Struktural Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Dengan Nilai *Standardized* pada LMDH Belum Maju



Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2010

Gambar 4.9. Model Struktural Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Dengan Nilai CR pada LMDH Belum Maju

Untuk melihat seberapa jauh hubungan pengaruh dan pentingnya modal sosial pada masing-masing kriteria LMDH maju dan belum maju dapat dilihat pada tabel hubungan struktural pada jalur sebagaimana berikut:

Tabel 4.28. Perbandingan dalam Hubungan Struktural Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Pada LMDH Maju dan Belum Maju.

Hubungan Struktural	LMDH maju		LMDH Belum Maju	
	<i>Loading factor</i>	CR	<i>Loading factor</i>	CR
MS → SPM	0.21	2.29	0.00	0.04
MS → KDS	0.32	3.53	0.02	0.21
MS → KM	0.34	3.60	0.09	0.93
MS → PSDH	0.98	12.25	0.15	1.51
SPM → KM	0.19	2,08	0.03	0.33
SPM → PSDH	0.02	0.81	0.01	0.10
KDS → KM	0.18	2.02	0.21	2.16
KDS → PSDH	0.02	0.52	0.06	0.57
KM → PSDH	0.11	3.35	0.010	0.098
MS → SPM → KM → PSDH	0,21→0,19→0,11	2,29→2,08→3,35	0,00→0,03→0,01	0,04→0,33→0,098
MS → KDS → KM → PSDH	0,32→0,18,→0,11	3,53→2,02→3,35	0,02→0,21→0,01	0,21→2,16→0,098
MS → KM → PSDH	0,34→0,11	3,60→3,35	0,09→0,01	0,93→0,098

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2010

Keterangan:

MS = Modal Sosial; SPM= Strategi Pemberdayaan Masyarakat; KDS= Keterlibatan dan dukungan stakeholders; KM= Keberdayaan Masyarakat; PSDH= Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan; *factor loading* = *Standard Regression Weight* atau Nilai Besaran Pengaruh; CR = Titik Kritis

Sedang untuk melihat hubungan pengukuran pada setiap variabel dalam model pemberdayaan masyarakat sekitar hutan adalah sebagaimana Tabel 4.29 berikut:

Tabel 4.29. Hubungan Pengukuran pada setiap Variabel dalam Model Pemberdayaan masyarakat Sekitar Hutan

Hubungan Pengukuran	LMDH Maju		LMDH Belum Maju	
	<i>Standard Regression Weight</i>	CR	<i>Standard Regression Weight</i>	CR
MS1 ← Modal Sosial	0.95	13.88	0.95	13.80
MS2 ← Modal Sosial	0.66	8.08	0.32	3.54
MS3 ← Modal Sosial	0.87	12.00	0.86	11.65
MS4 ← Modal Sosial	0.92	13.12	0.95	13.85
MS5 ← Modal Sosial	0.93	13.36	0.58	6.75
MS6 ← Modal Sosial	0.97	14.39	0.42	4.66
MS7 ← Modal Sosial	0.98	14.89	0.52	5.99
MS8 ← Modal Sosial	0.96	14.14	0.41	4.64
SPM 1← Strategi Pemberdayaan Masyarakat	0.99	15.00	0.75	
SPM 2← Strategi Pemberdayaan Masyarakat	0.92	13.19	0.67	7.28
SPM 3← Strategi Pemberdayaan Masyarakat	0.96	14.14	0.83	9.15
SPM 4← Strategi Pemberdayaan Masyarakat	0.91	13.08	0.65	7.06
SPM 5← Strategi Pemberdayaan Masyarakat	1.0	15.29	0.84	9.2

Lanjutan Tabel 4.29

Hubungan Pengukuran	LMDH Maju		LMDH Belum Maju	
	<i>Standard Regression Weight</i>	CR	<i>Standard Regression Weight</i>	CR
SPM 6← Strategi Pemberdayaan Masyarakat	1.00	15.32	0.79	8.66
SPM 7← Strategi Pemberdayaan Masyarakat	0.54	6.38	0.57	6.10
SPM 8← Strategi Pemberdayaan Masyarakat	1.00	15.37	0.52	5.53
SPM 9← Strategi Pemberdayaan Masyarakat	0.83	11.19	0.29	3.03
KDS 1← Keterlibatan dan Dukungan Stakeholders	1.00	15.43	0.84	
KDS 2← Keterlibatan dan Dukungan Stakeholders	0.78	10.27	0.81	9.50
KDS 3← Keterlibatan dan Dukungan Stakeholders	0.94	13.65	0.73	9.78
KDS 4← Keterlibatan dan Dukungan Stakeholders	0.99	15.21	0.86	10.69
KDS 5← Keterlibatan dan Dukungan Stakeholders	0.82	11.03	0.85	10.33
KDS 6← Keterlibatan dan Dukungan Stakeholders	0.96	14.28	0.77	8.38
KDS 7← Keterlibatan dan Dukungan Stakeholders	0.87	11.99	0.75	10.28
KDS 8← Keterlibatan dan Dukungan Stakeholders	0.96	14.29	0.86	11.36
KDS 9← Keterlibatan dan Dukungan Stakeholders	0.51	5.73	0.42	4.14
KDS 10← Keterlibatan dan Dukungan Stakeholders	0.53	6.24	0.42	4.42
KDS 11← Keterlibatan dan Dukungan Stakeholders	0.64	7.76	0.61	5.93
KM1 ← Keberdayaan Masyarakat	0.92	12.61	0.72	
KM2 ← Keberdayaan Masyarakat	0.83	10.74	0.42	3.33
KM3 ← Keberdayaan Masyarakat	0.89	12.07	0.48	3.74
PSDH1 ← Pengelolaan SDH Berkelanjutan	0.88		0.92	
PSDH2 ← Pengelolaan SDH Berkelanjutan	0.84	12.99	0.79	10.53
PSDH3 ← Pengelolaan SDH Berkelanjutan	0.86	13.86	0.87	11.90

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2010

Berdasarkan hasil pengujian SEM pada Tabel 4.29 di atas dapat diketahui bahwa pada LMDH maju, terbukti bahwa LMDH Maju yang mempunyai modal sosial yang lebih kuat lebih berpengaruh terhadap keberdayaan masyarakat dan pengelolaan hutan berkelanjutan dibandingkan LMDH yang belum maju. Selain itu faktor pembentuk modal sosial pada LMDH yang maju lebih dominan atau signifikan dibandingkan dengan LMDH yang belum maju. Lemahnya peran modal sosial pada LMDH belum maju berdampak terhadap rendahnya keberdayaan masyarakat dan pengelolaan hutan berkelanjutan karena tidak didukung oleh strategi pemberdayaan dan dukungan stakeholders yang cukup.



## **Kekuatan Unsur Pembentuk Modal Sosial**

Untuk melihat tingkat kekuatan pengaruh masing-masing unsur-unsur modal sosial dapat dijelaskan sebagai berikut:

### Kebersamaan:

Pada Tabel 4.21, dan 4.29, terlihat bahwa secara keseluruhan responden modal sosial kebersamaan mempunyai nilai *factor loading* 0,98, untuk LMDH maju nilai *factor loading* kebersamaan 0,95 dan LMDH belum maju nilai *factor loading* kebersamaan 0,95. Dari nilai-nilai tersebut memberi gambaran bahwa unsur pembentuk kebersamaan mempunyai pengaruh yang besar terhadap modal sosial masyarakat sekitar hutan, semakin tinggi nilai kebersamaan suatu masyarakat, maka semakin tinggi modal sosial masyarakat tersebut.

Substansi pembentuk modal sosial **kebersamaan** adalah faktor penentu pembentuk kepercayaan, yang selanjutnya akan memperkuat jaringan sosial dan dukungan timbal dan yang saling menguntungkan. Sulasmi (2003) menjelaskan bahwa kebersamaan sangat berpengaruh pada sinergitas kerja lembaga/organsiasi. Kebersamaan dapat membuat masyarakat terlibat dan berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya hutan. Kebersamaan akan mendorong terbentuknya suatu kelembagaan, karena dengan kebersamaan tujuan, kebersamaan nilai, norma adat, suatu target dan tujuan bersama akan tercapai. Dengan kebersamaan yang terjalin dan terbentuk cukup lama akan memperkuat norma, nilai, adat, dan budaya serta kearifan dan pengetahuan lokal. Kepemimpinan sosial juga akan terbentuk dari nilai kebersamaan masyarakat yang telah memberi bentuk kepemimpinan sosial yang ditokohkan dalam masyarakat sosial. Dari semua keterkaitan unsur pembentuk modal sosial tersebut, tidak dapat dipisahkan satu sama lain, hanya memang setiap unsur pembentuk modal sosial tersebut, ada unsur-unsur yang lebih menonjol atau lebih kuat yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat sebagaimana dapat dilihat dari perbandingan pada LMDH yang maju dan yang belum maju.

Kebersamaan ini mempunyai nilai intrinsik dalam bentuk harmoni dengan lingkungannya. Kebersamaan dapat meningkatkan hubungan sosial masyarakat, meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar hutan, dan dapat pula meningkatkan pemahaman dan kesadaran serta praktek ekologi dalam pengelolaan sumber daya hutan. Kebersamaan yang sering dilakukan adalah saat mulai menanam atau memanen hasil pertanian atau hutan, kebersamaan itu ditunjukkan dalam bergotong royong yang disebut *meutemeunyan*" (artinya mengawali) yaitu memulai untuk menanam atau memanen dengan kebersamaan bergotong royong untuk berkumpul bersama membawa nasi dan lauk pauk sayur nangka. Disini ada etika lingkungan rasa terima kasih dan perilaku "*sopan satun*" terhadap alam yang telah memberinya rezeki. Ada nilai-nilai kebaikan dalam kebersamaan karena adanya sikap syukur dan menghargai apa yang diberikan oleh lingkungan alam (Pandey, 2002). Konsep ini juga sesuai dengan konsep Kates et, al (2001) dalam narayan (2002), bahwa kesejahteraan masyarakat sekitar hutan erat kaitannya dengan ekosistem alam. Konsep kebersamaan ini memberi nilai harmoni dan saling ketergantungan dengan lingkungan hidupnya. Nilai intrinsik kebersamaan ini dapat mendorong dan dimanfaatkan dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan.

#### Kepercayaan :

Pada Tabel 4.21, dan 4.29, terlihat bahwa secara keseluruhan responden, modal sosial kepercayaan mempunyai nilai *factor loading* 0,50, untuk LMDH maju nilai *factor loading* 0,66, dan LMDH belum maju nilai *factor loading* 0,32. Dari nilai-nilai tersebut memberi gambaran bahwa modal sosial kepercayaan tidak mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pengungkit modal sosial masyarakat sekitar hutan. Tetapi terlihat bahwa semakin maju suatu masyarakat, maka tingkat kepercayaan semakin baik, dan semakin lemah suatu masyarakat, maka tingkat kepercayaan juga semakin lemah.

Substansi pembentuk modal sosial **kepercayaan**. Kepercayaan akan memberi dorongan kepada masyarakat untuk meningkatkan kerjasama, memperkuat jaringan sosial dan dukungan timbal balik, meningkatkan keterlibatan/partisipasi,

memperkuat kelembagaan dan kepemimpinan sosial, dan memperkokoh norma, adat nilai budaya; dan menjadikan pedoman kearifan dan pengetahuan lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Menurut Fukuyama (1995) dengan hadirnya kepercayaan atau saling percaya antara anggota masyarakat dan masyarakat dengan pimpinan masyarakat, akan menimbulkan kekuatan kerjasama dan saling peduli yang selanjutnya akan sangat berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat.

Kepercayaan yang tinggi dalam suatu masyarakat akan memberi nilai intrinsik keseimbangan dan keberlanjutan dalam suatu lingkungan sosial, lingkungan ekonomi dan lingkungan alam. Hal ini terbukti pada kerjasama yang dilakukan dalam lahan garapan Perum Perhutani, ada nilai kebaikan saling percaya disitu, karena masyarakat mengharapkan lahan garapan, sedang Perum Perhutani berharap dan percaya bahwa masyarakat yang menggarap di lahan hutan tersebut akan menjaga pepohonan milik Perhutani.

#### Jaringan Sosial dan Dukungan Timbal Balik :

Pada Tabel 4.21, dan 4.29, terlihat bahwa secara keseluruhan responden modal sosial jaringan sosial dan dukungan timbal balik mempunyai nilai *factor loading* 0,84, untuk LMDH maju nilai *factor loading* 0,87, dan LMDH belum maju nilai *factor loading* 0,86. Dari nilai-nilai tersebut memberi gambaran bahwa unsur jaringan sosial dan dukungan timbal balik mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap modal sosial masyarakat sekitar hutan, semakin tinggi nilai jaringan sosial dan dukungan timbal balik suatu masyarakat, maka semakin tinggi modal sosial masyarakat tersebut.

Jaringan sosial dan dukungan timbal balik akan memberikan rasa kepercayaan dan kebersamaan yang tinggi, meningkatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat, mempermudah terbentuknya dan berjalannya suatu kelembagaan, memperkuat kepemimpinan sosial, memperkuat norma adat dan nilai budaya serta memperkuat tertanamnya kearifan dan pengetahuan lokal yang telah terbukti menjadi sumbangan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Jaringan sosial dan dukungan timbal balik sekitar

hutan akan melahirkan nilai-nilai intrinsik kepedulian kepada lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan ekonomi. Hal ini terbukti bahwa secara umum jaringan sosial dan dukungan timbal balik masyarakat sekitar hutan dalam setiap tahapan pengelolaan sumber daya hutan di kawasan hutan Perhutani cukup baik, antara LMDH maju dengan LMDH belum maju nampak sama kekuatannya, tetapi sesungguhnya secara kualitas terlihat belum sama. Jaringan sosial dan dukungan timbal balik LMDH maju lebih tinggi daripada LMDH belum maju.

#### Keterlibatan/partisipasi:

Pada Tabel 4.21, dan 4.29, terlihat bahwa secara keseluruhan responden modal sosial keterlibatan/partisipasi mempunyai nilai *factor loading* 0,95, untuk LMDH maju nilai *factor loading* 0,92, dan LMDH belum maju nilai *factor loading* 0,95. Dari nilai-nilai tersebut memberi gambaran bahwa modal sosial keterlibatan/patisipasi mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pengungkit modal sosial masyarakat sekitar hutan, semakin tinggi nilai keterlibatan/partisipasi suatu masyarakat, maka semakin tinggi modal sosial masyarakat tersebut. Keterlibatan/partisipasi ini akan melahirkan nilai intrinsik kebaikan terhadap sesama dan lingkungannya, karena dengan berpartisipasi dalam semua bentuk kegiatan akan mendatangkan manfaat pada dirinya dan pada orang lain dan lingkungannya. Keterlibatan/partisipasi juga akan melahirkan nilai saling peduli pada sesama dengan lingkungannya, sebagaimana anggota LMDH terlibat dalam setiap kegiatan pengelolaan sumber daya hutan, mulai menanam, pemeliharaan, penjarangan sampai peneenan, dan pemanfaatan dari produk-produk hutan yang telah disepakati seperti penggunaan kayu bakar pada tahun pertama penjarangan pohon.

Substansi keterlibatan/partisipasi masyarakat adalah modal sosial yang mempunyai peran memperkuat kebersamaan, kepercayaan, jaringan sosial dan dukungan timbal balik. Dengan keterlibatan/partisipasi masyarakat akan memberi penguatan terhadap kelembagaan, kepemimpinan sosial, norma adat dan nilai budaya serta keriafan dan pengetahuan lokal. Karena dengan keterlibatan masyarakat dalam semua kegiatan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan

akan mempermudah dalam penyusunan dan pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat, karena inti strategi pemberdayaan masyarakat adalah pelibatan masyarakat dalam setiap perencanaan, pelaksanaan dan melakukan evaluasi dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan.

#### Kelembagaan:

Pada Tabel 4.21, dan 4.29, terlihat bahwa secara keseluruhan responden modal sosial kelembagaan mempunyai nilai *factor loading* 0,76, untuk LMDH maju nilai *factor loading* 0,93 dan LMDH belum maju nilai *factor loading* 0,58. Dari nilai-nilai tersebut memberi gambaran bahwa modal sosial kelembagaan mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap pengungkit modal sosial masyarakat sekitar hutan, semakin tinggi nilai kelembagaan suatu masyarakat, maka semakin tinggi modal sosial masyarakat tersebut. Terlihat bahwa LMDH maju mempunyai kelembagaan yang lebih kuat dibanding dengan LMDH belum maju, dan secara umum kelembagaan di masyarakat KPH Sukabumi cukup kuat, walaupun masih perlu ditingkatkan kualitasnya.

Terbentuknya kelembagaan seperti LMDH, akan mempermudah dan memperkuat persatuan masyarakat, akan mempermudah menggalang kebersamaan dan meningkatkan kepercayaan, akan memperkuat jaringan sosial dan dukungan timbal balik baik secara internal maupun eksternal anggota kelembagaan, akan memperkuat kepemimpinan sosial yang akan menjadi ketua dalam kelembagaan, mempermudah terpeliharanya norma, adat dan nilai budaya serta kearifan dan pengetahuan lokal khususnya yang terkait dengan pengelolaan sumber daya hutan.

#### Kepemimpinan Sosial:

Pada Tabel 4.21, dan 4.29, terlihat bahwa secara keseluruhan responden modal sosial kepemimpinan sosial mempunyai nilai *factor loading* 0,67, untuk LMDH maju nilai *factor loading* 0,97 dan LMDH belum maju nilai *factor loading* 0,42. Dari nilai-nilai tersebut memberi gambaran bahwa modal sosial kepemimpinan sosial mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap pengungkit modal sosial masyarakat sekitar hutan, semakin tinggi nilai kepemimpinan suatu masyarakat,

maka semakin tinggi modal sosial masyarakat tersebut, sebagaimana terlihat pada LMDH maju. Kepemimpinan sosial pada LMDH belum maju terlihat sangat rendah, sehingga kekuatan untuk meningkatkan kebersamaan dan persatuan memang berkurang.

Kepemimpinan sosial terbentuk karena adanya norma dan nilai sosial sebagai pembentuk kepemimpinan. Kepemimpinan sosial menjadi panutan dalam masyarakat, karena yang menjadi pemimpin dalam sosial masyarakat adalah karena dijadikan oleh masyarakat sosial itu sendiri. Nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi perilaku pemimpin sosial adalah nilai dan norma-norma yang menjadi acuan atau keteladanan masyarakat. Sehingga dengan kepemimpinan sosial yang melekat pada seorang pemimpin dan tokoh masyarakat akan membantu satu panutan komando untuk memperkuat kebersamaan, kepercayaan, jaringan sosial dan dukungan timbal balik, keterlibatan/partisipasi, kelembagaan, norma adat nilai budaya serta keriafan dan pengetahuan lokal. Seorang pemimpin sosial akan melekat pada dirinya kekuatan mempengaruhi unsur modal sosial yang lainnya.

#### Norma, nilai, adat dan budaya:

Pada Tabel 4.21, dan 4.29, terlihat bahwa secara keseluruhan responden modal sosial norma, adat, nilai dan budaya mempunyai nilai *factor loading* 0,78, untuk LMDH maju nilai *factor loading* 0,98 dan LMDH belum maju nilai *factor loading* 0,52. Dari nilai-nilai tersebut memberi gambaran bahwa modal sosial norma, adat, adat dan budaya mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap pengungkit modal sosial masyarakat sekitar hutan, semakin tinggi nilai norma, adat, nilai dan budaya suatu masyarakat, maka semakin tinggi modal sosial masyarakat tersebut, sebagaimana terlihat pada LMDH maju.

Modal sosial Norma, adat, nilai, dan budaya ini adalah modal sosial yang terbentuk sebagai hasil interaksi yang panjang dalam suatu komunitas masyarakat. Norma adat dan nilai budaya tersebut terbentuk dan menjadi acuan dan pedoman dalam hidup bermasyarakat. Norma adat dan nilai budaya masyarakat Indonesia dan khususnya di pedesaan akan kuat membentuk nilai-nilai gotong royong,

kepedulian dan solidaritas sebagai fakta kebersamaan dan kepercayaan dan kekuatan jaringan sosial dan dukungan timbal balik. Norma, nilai, adat dan budaya ini sangat berpengaruh terhadap pola bersikap, berperilaku, berinteraksi dan berinterelasi yang kemudian diharapkan memberi nilai-nilai kesadaran lingkungan untuk pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan.

#### Kearifan dan Pengetahuan Lokal:

Pada Tabel 4.21, dan 4.29, terlihat bahwa secara keseluruhan responden modal sosial kearifan dan pengetahuan lokal mempunyai nilai *factor loading* 0,70, untuk LMDH maju nilai *factor loading* 0,96 dan LMDH belum maju nilai *factor loading* 0,41. Dari nilai-nilai tersebut memberi gambaran bahwa modal sosial kearifan dan pengetahuan lokal mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap pengungkit modal sosial masyarakat sekitar hutan, semakin tinggi nilai kearifan dan pengetahuan lokal suatu masyarakat, maka semakin tinggi modal sosial masyarakat tersebut sebagaimana terlihat pada LMDH maju. Kearifan dan pengetahuan lokal pada LMDH maju berkembang sesuai dengan dinamisasi masyarakat sekitar hutan, pengalaman-pengalaman turun temurun menjadi pedoman untuk selanjutnya dan telah terbukti dapat meningkatkan kualitas masyarakatnya. Sedang LMDH belum maju kearifan dan pengetahuan lokal telah mulai luntur atau karena memang masyarakatnya masih berkuat dengan kemiskinan dan upaya-upaya berjuang keras mencari sumber nafkah.

Berdasarkan hasil pengujian dan pembuktian uji setiap hubungan jalur di atas, serta gambar model struktural secara keseluruhan responden maupun yang dalam klasifikasi LMDH maju dan belum maju yang terdahulu, maka analisis pengaruh kekuatan modal sosial pada pemberdayaan masyarakat dalam model pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

#### **4.4.1. Pengaruh Modal Sosial pada Strategi Pemberdayaan Masyarakat**

Berdasarkan hasil hubungan struktural Tabel 4.28 model pemberdayaan masyarakat sekitar hutan pada LMDH yang maju membuktikan bahwa hubungan modal sosial dengan strategi pemberdayaan masyarakat mempunyai *faktor*

*loading* 0,21 dan nilai CR 2,29 yang berarti modal sosial mempunyai pengaruh dan hubungan yang signifikan pada strategi pemberdayaan masyarakat, sedang pada LMDH yang belum maju, pengaruh modal sosial pada strategi pemberdayaan masyarakat terlihat lemah dan tidak signifikan dengan nilai *faktor loading* 0,00 dan nilai CR 0,04. Namun secara keseluruhan modal sosial berpengaruh sebesar 20% terhadap strategi pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan nilai *factor loading* pada Tabel 4.29, untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat sekitar hutan dan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan untuk LMDH Maju, maka modal sosial yang perlu menjadi perhatian pertama untuk dimanfaatkan dalam pemberdayaan masyarakat adalah norma, adat nilai dan budaya, kemudian berturut-turut kepemimpinan sosial, kearifan dan pengetahuan lokal, kebersamaan, kelembagaan, keterlibatan/partisipasi, jaringan sosial dan dukungan timbal balik, dan yang terakhir adalah kepercayaan. Sedang untuk LMDH belum maju, modal sosial yang perlu mendapat perhatian utama yang dimanfaatkan adalah kebersamaan dan keterlibatan/partisipasi, kemudian berturut-turut jaringan sosial dan dukungan timbal balik, kelembagaan, norma, nilai adat dan budaya, kepemimpinan sosial, kearifan dan pengetahuan lokal dan terakhir kepercayaan. Para perencana dan pengelola sumber daya hutan harus memperhatikan hal-hal tersebut, karena potensi/kapasitas modal sosial setiap masyarakat sekitar hutan berbeda-beda.

Namun secara keseluruhan masyarakat sekitar hutan di KPH Sukabumi, modal sosial yang perlu diperhatikan untuk dimanfaatkan dalam pemberdayaan masyarakat adalah modal sosial kebersamaan, kemudian berturut-turut keterlibatan/partisipasi, jaringan sosial dan dukungan timbal balik, norma, nilai, adat dan budaya, kelembagaan, kearifan dan pengetahuan lokal, kepemimpinan sosial dan yang terakhir adalah kepercayaan.

Dari strategi pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan, jika dilihat dari pengaruh indikator dengan *factor loading*-nya, maka strategi yang adalah strategi yang sesuai dengan cara pengelolaan sumber daya hutan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sekitar hutan, kemudian berturut-turut strategi yang



pengelolaan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan; strategi keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan cara pengelolaan sumber daya hutan, dukungan masyarakat terhadap cara pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan, cara pengelolaan sumber daya hutan sesuai dengan harapan dan nilai-nilai masyarakat, cara pengelolaan sumber daya disetujui oleh masyarakat, dan yang terakhir adalah cara pengelolaan sumber daya hutan harus dapat meningkatkan potensi masyarakat.

Jika dilihat per bagian LMDH maju, maka strategi yang terbaik dilakukan adalah strategi cara pengelolaan sumber daya hutan yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup, yang sekaligus dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dan sesuai dengan harapan masyarakat. Sedang untuk LMDH yang belum maju, maka strategi pemberdayaan yang perlu mendapat perhatian utama adalah strategi keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan pengelolaan sumber daya hutan dan yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sekitar hutan.

Pada tingkat kekuatan pengaruh modal sosial, terlihat dan terbukti pada model hubungan struktural, bahwa peran modal sosial terhadap proses pemberdayaan dalam dimensi strategi pemberdayaan masyarakat sangat berpengaruh, semakin kuat modal sosial masyarakat sekitar hutan, maka akan semakin mudah dalam menyusun dan melaksanakan strategi pemberdayaan masyarakat. Dengan modal sosial yang kuat khususnya dalam dimensi kebersamaan, kepercayaan, jaringan sosial dan dukungan timbal balik, keterlibatan/partisipasi, kelembagaan, maka akan memberi kekuatan dan kemudahan dalam pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat.

Pada Tabel 4.29 memperlihatkan bahwa unsur-unsur pembentuk modal sosial mempunyai nilai *factor loading* dan nilai CR yang cukup besar, baik terhadap LMDH yang maju maupun yang belum maju, sedang unsur-unsur pembentuk strategi pemberdayaan masyarakat juga mempunyai nilai *factor loading* dan nilai CR yang memenuhi syarat. Hal ini berarti unsur-unsur pembentuk masing-masing modal sosial dan strategi pemberdayaan masyarakat adalah sangat berpengaruh secara signifikan pada variabelnya. Dengan demikian unsur

pembentuk kedua variabel tersebut perlu menjadi fokus perhatian dalam perumusan model pemberdayaan masyarakat.

Matra (*setting*) pemberdayaan masyarakat sekitar hutan diperlukan karena pemberdayaan adalah desain besar (*grand design*) yang akan diperlakukan terhadap masyarakat. Untuk itu matra pemberdayaan masyarakat yang mencakup (1) pemberdayaan individual, (2) pemberdayaan kelompok, dan (3) pemberdayaan masyarakat sebagai suatu system, membutuhkan suatu strategi untuk mengoperasionalkannya. Strategi pemberdayaan masyarakat adalah suatu kebijakan rencana yang cermat mengenai kegiatan, tahap-tahap pelaksanaan untuk mencapai keberdayaan sebagai sasaran pemberdayaan masyarakat, strategi yang akan dipergunakan adalah strategi pelibatan masyarakat dalam setiap menyusun kegiatan dalam pengelolaan sumber daya hutan.

Bagi masyarakat sekitar hutan, selain sistem dalam dirinya secara individual, maka ada sistem sosial masyarakat sekitar hutan yang menempatkan modal sosial sebagai sub sistem utamanya. Hal ini karena modal sosial tidak dapat diciptakan seorang individual, namun sangat tergantung kepada kapasitas masyarakat (atau organisasi) untuk membentuk asosiasi atau jaringan baru (Badan Litbang Pertanian, 2006). Strategi pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan kolektivitas adalah keharusan dalam strategi pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Kolektivitas masyarakat sebagai suatu sistem adalah merupakan wadah terbentuknya semua unsur modal. Hal ini langsung menunjukkan bahwa modal sosial masyarakat sekitar hutan adalah landasan bagi kolektivitas sebagai sasaran pemberdayaan masyarakat, yang langsung pula memperlihatkan bahwa modal sosial masyarakat sekitar hutan berpengaruh langsung terhadap strategi pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.

Penjelasan lebih lanjut, bahwa sebagaimana disebutkan terdahulu bahwa menurut Bourdieu, Coleman, dan Putnam, akar pemberdayaan adalah berkaitan dengan daya dan kekuasaan, sedang modal sosial adalah sesuatu nilai aset sumber daya yang merupakan tatanan nilai yang dimiliki bersama. Modal sosial adalah faktor pendukung dalam pembangunan masyarakat yang dapat menjadi sumber

peningkatan daya dan kualitas hidup masyarakat. Proses pemberdayaan adalah sebuah prakondisi untuk mendapatkan suatu daya dalam rangka meningkatkan kemandirian masyarakat yang secara langsung dapat memperkuat modal sosial, kemudian memiliki modal sosial juga diperlukan sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dan terlibat dalam sebuah proses pemberdayaan. Proses pemberdayaan ini mempunyai dimensinya dalam strategi pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan dan dukungan *stakeholders*.

Dengan titik angkat definisi operasional seperti telah disebutkan terdahulu, dapat ditemukan substansi pada setiap variabel termasuk substansi dari modal sosial. Sejalan dengan konsepsi definisi operasionalnya, maka substansi dari manfaat modal sosial adalah norma/nilai: (1) pemerkuat jaringan sosial; (2) penjalın kerjasama saling menguntungkan; (3) penumbuh kepedulian dan solidaritas; dan (4) pendorong saling percaya sesama warga masyarakat, dalam rangka pencapaian tujuan bersama dan norma/nilai itu telah terbentuk dan telah dipahami bersama; (5) pendorong partisipasi masyarakat; (6) perekat sosial yang mampu menyatukan dan mencegah konflik (Fukuyama, 1995; Grootart dan Baster, 2001; Pierre Bourdie, Putnam, Coleman).

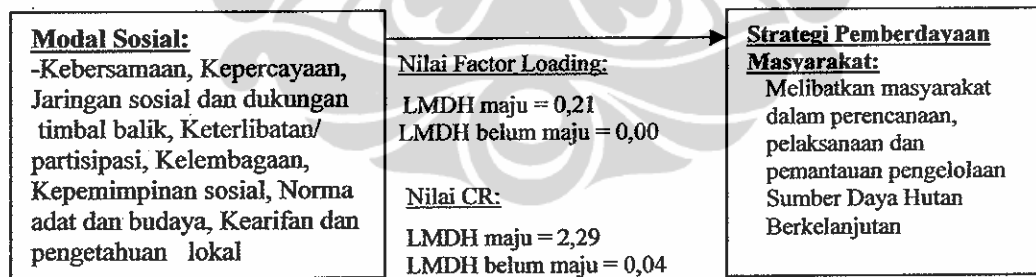
Dengan memperhatikan lebih mendasar definisi operasional pada strategi pemberdayaan masyarakat, maka yang menjadi substansi dari strategi pemberdayaan masyarakat sekitar hutan adalah strategi pelibatan masyarakat sekitar hutan bekerjasama dalam kelompok formal atau non-formal untuk: (1) melakukan kajian masalah pengelolaan sumber daya hutan; (2) merencanakan pengelolaan sumber daya hutan; (3) melakukan pengelolaan sumber daya hutan dan (4) melakukan evaluasi pengelolaan sumber daya hutan. Pengelolaan sumber daya hutan adalah suatu bentuk kegiatan mengelola sumber daya hutan yang dimulai dengan kajian, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi kegiatan mengelola sumber daya hutan.

Modal sosial dan srategi pemberdayaan masyarakat mempunyai keterkaitan yang sangat erat, apalagi bila beroperasi pada satuan masyarakat yang disebutkan sebagai komunitas. Modal sosial menjadi potensi yang dapat direalisasikan, dan

dimanfaatkan dalam suatu strategi pemberdayaan masyarakat seperti yang terjadi di lokasi penelitian ini. Karenanya berbagai substansi modal sosial dan substansi strategi pemberdayaan masyarakat, menjadi suatu keterkaitan dalam hubungan relasi pengaruh yang signifikan.

Substansi keseluruhan unsur pembentuk modal sosial kebersamaan, kepercayaan, jaringan sosial dan dukungan timbal balik, keterlibatan/partisipasi, kelembagaan, kepemimpinan sosial, norma adat dan budaya, serta kearifan dan pengetahuan lokal akan merupakan perekat masyarakat sekitar hutan yang telah hidup sekian lama berdampingan dan mempunyai tujuan yang sama dalam satu wadah kelembagaan LMDH, perekat tersebut menjadi fokus dalam implementasi penyusunan dan pelaksanaan strategi pemberdayaan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Strategi yang tersusun harus melibatkan masyarakat dengan segala potensi modal sosialnya, sehingga strategi pemberdayaan yang tersusun berlandaskan kepemilikan modal sosial masyarakat yang ada.

Untuk lebih detail, maka hubungan relasi pengaruh modal sosial pada strategi pemberdayaan masyarakat ditinjau dari setiap unsur pembentuknya pada masyarakat LMDH maju dan belum maju adalah sebagai berikut:



Gambar 4.10. Hubungan Pengaruh Modal Sosial pada Strategi Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan

Berdasarkan hasil pengukuran dan Gambar 4.10 di atas, terlihat bahwa setiap ada peningkatan modal sosial, akan mempengaruhi peningkatan pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat sebesar 21% untuk kategori LMDH maju yang telah mempunyai potensi modal sosial yang cukup tinggi. Sedang bagi LMDH yang belum maju dengan kepemilikan potensi modal sosial yang rendah, maka dalam pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat berjalan lambat, sehingga perlu

adanya penguatan modal sosial dalam menciptakan keberdayaan masyarakat untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan.

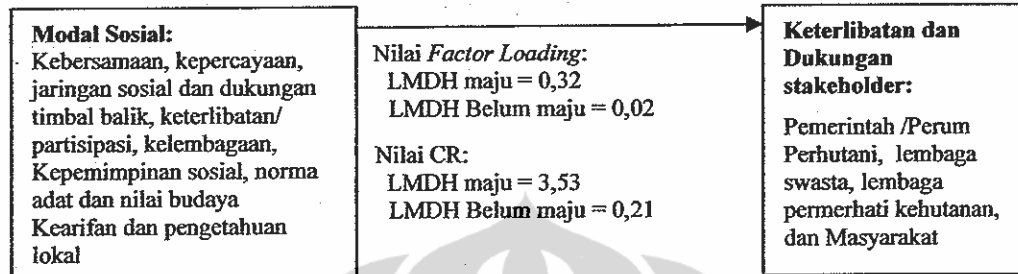
Manfaat dari seluruh unsur pembentuk modal sosial yang telah disebutkan di atas, akan memberi pengaruh yang signifikan pada strategi pemberdayaan masyarakat. Pengaruh langsung modal sosial adalah pemanfaatannya yang menjadi landasan dalam menyusun dan melaksanakan strategi pemberdayaan masyarakat, karena modal sosial adalah nilai-nilai kebaikan dalam bersikap, berperilaku, berinteraksi dan berinterelasi yang berdampak positif terhadap keterlibatan dalam proses pemberdayaan dan akhirnya dapat mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan.

#### **4.4.2. Pengaruh Modal Sosial pada Keterlibatan dan Dukungan Stakeholders Pemberdayaan Masyarakat**

Berdasarkan Tabel 4.28 dan persamaan struktural yang dihasilkan oleh SEM, memberi pengertian bahwa betapa pentingnya peran modal sosial dalam suatu proses pemberdayaan masyarakat dalam dimensi keterlibatan dan dukungan *stakeholders*. Semakin berdaya masyarakat dalam suatu LMDH dengan kepemilikan modal sosial yang tinggi, maka akan semakin mempengaruhi peningkatan keterlibatan dan dukungan *stakeholders* dalam proses pemberdayaan. Pentingnya peran modal sosial dalam LMDH yang maju memperlihatkan nilai hubungan dan pengaruh yang kuat terhadap keterlibatan dan dukungan *stakeholders* dibandingkan dengan masyarakat dengan keberdayaan yang rendah dan modal sosial yang lemah pula. Untuk masyarakat yang mempunyai modal sosial yang lemah diperlukan upaya penguatan modal sosial untuk mendorong peningkatan keberdayaan masyarakat.

Pada Gambar 4.11 di bawah ini, memperlihatkan nilai *factor loading* LMDH yang maju 0,32 dan nilai CR nya 3,53, sedang nilai *factor loading* LMDH belum maju 0,02 dan nilai CR nya 0,21. Berdasarkan nilai tersebut berarti pengaruh modal sosial terhadap keterlibatan dan dukungan *stakeholders* pada LMDH maju lebih besar dari nilai pengaruh modal sosial LMDH belum maju. Modal sosial LMDH belum maju terlihat sangat lemah dan tidak signifikan mempengaruhi

keterlibatan dan dukungan *stakeholders*. Hal tersebut bisa dipahami bahwa semakin tinggi keberdayaan dengan semakin kuat modal sosial masyarakat, maka akan menyebabkan peningkatan penguatan dalam keterlibatan para *stakeholder* dalam proses pemberdayaan masyarakat.



Gambar 4.11. Hubungan Modal Sosial dengan Keterlibatan Dan Dukungan Stakeholder

Keterkaitan modal sosial dan proses pemberdayaan adalah terletak pada saling menguatkan dan saling terkait satu sama lain. Proses pemberdayaan dengan pemanfaatan modal sosial akan memberikan manfaat langsung berupa peningkatan kualitas hidup dan menjadikan masyarakat berdaya dan masyarakat yang berdaya akan memperlihatkan peningkatan modal sosial (Bourdieu, Coleman dan Putnam, Hikmat).

*Stakeholders* yang memberikan dukungan keterlibatan pada proses pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses pemberdayaan itu sendiri. Proses pemberdayaan masyarakat sekitar hutan pasti merupakan bagian penting pembangunan komunitas terhadap masyarakat sekitar hutan, karena proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif (Parson, *et al.* dalam Suharto, 2005). Kolektivitas dari semua *stakeholders* pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, diharapkan memunculkan *stakeholders* tersebut sebagai praktisi pembangunan masyarakat atau praktisi pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.

Keterkaitan modal sosial dengan *stakeholders* pemberdayaan masyarakat sekitar hutan sebagai praktisi pemberdayaan masyarakat pada umumnya, dirasionalkan dengan mengikuti alur fikir Kilprick: 2001: 19 yang menegaskan bahwa:

*Social capital is an appropriate analytical framework for diagnosing the strengths and the weakness of the sosial capital present in a community and*

*identifying aspects where intervention, for example by community development practitioners, could usefully build community sosial capital.*

Modal sosial adalah suatu kerangka kerja analitis yang cocok untuk mendiagnosa kekuatan dan kelemahan yang dipresentasikan dalam suatu komunitas (apakah didefinisikan atas dasar geografis atau tujuan bersama) dan mengidentifikasi aspek-aspek yang akan diintervensi, contohnya oleh praktisi-praktisi pembangunan komunitas harus menggunakan dan membangun modal sosial komunitas. Hal itu semakin memperjelas bahwa modal sosial berpengaruh langsung terhadap *stakeholders* terutama dalam keterlibatan dan dukungan *stakeholders* pemberdayaan masyarakat sekitar hutan sebagai bagian integral yang utama dalam pembangunan komunitas masyarakat sekitar hutan.

Keterlibatan dan dukungan *stakeholders* pemberdayaan masyarakat memiliki pula sejumlah substansi keberadaannya. Berpijak dari definisi operasional dan bahasan terdahulu, substansi dari keterlibatan dan dukungan *stakeholders* pemberdayaan masyarakat adalah keterlibatan dan dukungan dari (1) Pemerintah/Perum Perhutani (2) masyarakat (3) lembaga swasta dan (4) lembaga pemerhati masalah kehutanan untuk bekerjasama dalam kelompok formal/non-formal untuk melakukan kajian masalah, merencanakan, melaksanakan dan melakukan evaluasi pengelolaan sumber daya hutan.

Semua unsur pembentuk modal sosial masyarakat mempunyai hubungan dan pengaruh yang signifikan terhadap keterlibatan dan dukungan *stakeholders*. Besaran pengaruh modal sosial pada keterlibatan dan dukungan *stakeholder* akan sangat tergantung pada kekuatan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat sekitar hutan. Semakin kuat modal sosial suatu masyarakat, maka semakin kuat pengaruhnya pada peningkatan keterlibatan dan dukungan *stakeholder* (Kilpatrick, 2001).

Untuk bekerjasama melakukan kajian masalah, merencanakan, melaksanakan dan melakukan evaluasi pengelolaan sumber daya hutan, maka Pemerintah/Perum Perhutani dalam melakukan misinya pengelolaan hutan lestari (sesuai dengan syarat LEI, 1999) tetap membutuhkan masyarakat dengan potensi modal sosialnya

berupa kepercayaan, jaringan sosial komunitas masyarakat sekitar hutan dan dukungan timbal balik, keterlibatan/partisipasi, kelembagaan, kepemimpinan sosial, norma adat dan nilai budaya serta kearifan dan pengetahuan lokal. Penjelasan saling keterkaitan unsur pembentuk modal sosial telah dijelaskan pada di atas, sehingga jika membicarakan modal sosial, maka berarti telah ikut memberi kejelasan semua unsur pembentuk modal sosial.

Modal sosial Jaringan sosial masyarakat sekitar hutan menjadi faktor penentu keberhasilan kerjasama Pemerintah/Perum Perhutani sebagai *stakeholders* pemberdayaan masyarakat. Masyarakat sebagai pemilik jaringan sosial komunitas masyarakat sekitar hutan menjadi obyek pengelolaan sumber daya hutan, dan karenanya hal itu mendasari keterlibatan dan dukungan dari Pemerintah/Perum Perhutani dalam pengelolaan sumber daya hutan. Artinya jaringan sosial komunitas masyarakat sekitar hutan mempunyai pengaruh pada keterlibatan dan dukungan Pemerintah/Perum Perhutani dalam pengelolaan sumber daya hutan, karena tanpa memperhatikan perkuatan jaringan sosial, keterlibatan dan dukungan Pemerintah/Perum Perhutani dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan tidak begitu banyak berarti.

Pada gilirannya masyarakat sekitar hutan itu sendiri adalah juga pemangku kepentingan yang utama dalam pemberdayaan masyarakatnya dan kekuatan jaringan sosialnya adalah penentu bagaimana keterlibatan dan dukungan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Jaringan sosial yang kuat dalam komunitas masyarakat sekitar hutan menjadi penentu munculnya masyarakat sebagai *stakeholders* pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, artinya substansi jaringan sosial berpengaruh langsung terhadap keterlibatan dan dukungan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat.

Lembaga swasta sebagai *stakeholders* pemberdayaan masyarakat sekitar hutan untuk mampu berbuat terlibat sepenuhnya dalam proses pemberdayaan, ditentukan oleh adanya jaringan sosial komunitas masyarakat sekitar hutan. Tanpa jaringan sosial yang kuat, keterlibatan dan dukungan lembaga swasta dalam pemberdayaan masyarakat hampir tidak berarti. Adanya perhatian dari lembaga



swasta dalam pemberdayaan masyarakat dapat saja menghilang karena ketiadaan jaringan sosial yang menjembatani masyarakat dengan individu anggotanya. Sekaligus menunjukkan bahwa jaringan sosial masyarakat sekitar hutan berpengaruh langsung terhadap keterlibatan dan dukungan lembaga swasta sebagai *stakeholders* pemberdayaan masyarakat.

Jaringan sosial masyarakat sekitar hutan dihubungkan dengan keterlibatan dan dukungan lembaga pemerhati masalah kehutanan sebagai *stakeholders* pemberdayaan masyarakat menunjukkan relasi yang cukup berarti. Lembaga pemerhati masalah kehutanan yang mendasari perhatiannya terhadap masalah kehutanan harus tetap memperhatikan keberadaan jaringan sosial, fokus perhatian tidak boleh hanya memperhatikan masalah hutan demi hutan dan bukan hutan demi manusia dan hutan serta alam. Yang dibutuhkan adalah perhatian terhadap hutan dan kawasannya, hutan sebagai suatu kesatuan manusia, hutan dan alam.

Modal sosial kebersamaan yang melahirkan aksi jalinan kerjasama yang saling menguntungkan pada komunitas masyarakat sekitar hutan memiliki relasi keterkaitan dengan keterlibatan dan dukungan dari Pemerintah /Perum Perhutani dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Adanya jalinan kerjasama akan mempermudah keterlibatan dan dukungan dari Pemerintah/Perum Perhutani dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Sekaligus hal itu berarti jalinan kerjasama sebagai substansi modal sosial menjadi berpengaruh langsung terhadap keterlibatan dan dukungan Pemerintah/Perum Perhutani dalam pemberdayaan masyarakat.

Keterlibatan dan dukungan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat sebagai suatu aksi sangat di dominasi oleh adanya kebersamaan pada komunitas masyarakat sekitar hutan. Tidak mungkin ada keterlibatan dan dukungan masyarakat tanpa adanya jalinan kerjasama dalam masyarakat itu sendiri dan sekaligus memperlihatkan kenyataan bahwa jalinan kerjasama yang nyata ada pada masyarakat berpengaruh langsung pada keterlibatan dan dukungan masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Jalinan kerjasama dalam masyarakat sekitar hutan memiliki relasi pula dengan keterlibatan dan dukungan lembaga swasta dalam pemberdayaan masyarakat. Efektivitas keterlibatan dan dukungan lembaga swasta dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan ditentukan oleh adanya jalinan kerjasama dalam masyarakat itu sendiri. Artinya jalinan kerjasama dalam masyarakat berpengaruh pada keterlibatan dan dukungan lembaga swasta dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Begitu pula dengan keterlibatan dan dukungan lembaga pemerhati masalah kehutanan, akan sangat membutuhkan jalinan kerjasama dalam masyarakat itu sendiri. Jalinan kerjasama dalam masyarakat sekitar hutan seberapapun besar atau kecil tetap berpengaruh pada keterlibatan dan dukungan lembaga pemerhati masalah kehutanan dalam suatu proses pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Bila diakumulasi semua substansinya, jalinan kerjasama masyarakat sekitar hutan memang berpengaruh terhadap keterlibatan dan dukungan *stakeholders* pemberdayaan masyarakat.

Kebersamaan dalam bentuk kepedulian dan solidaritas masyarakat sekitar hutan sebagai salah satu substansi manfaat dari modal sosial, ternyata memiliki hubungan relasi dengan keterlibatan dan dukungan Pemerintah/Perum Perhutani, masyarakat, lembaga swasta, dan lembaga pemerhati masalah kehutanan dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Pemerintah/Perum Perhutani ternyata tidak dapat berbuat banyak dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan tanpa adanya kepedulian dan solidaritas sesama warga masyarakat sekitar hutan. Jadi kepedulian dan solidaritas masyarakat sekitar hutan menjadi pengaruh langsung terhadap keterlibatan dan dukungan Pemerintah/Perum Perhutani dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.

Masyarakat itu sendiri adalah juga sebagai *stakeholders* pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, masyarakat sangat membutuhkan adanya kepedulian dan solidaritas antar masyarakat itu sendiri. Sulit membayangkan adanya keterlibatan masyarakat secara menyeluruh tanpa adanya kepedulian dan solidaritas dalam masyarakat, dan hal itu berarti kepedulian dan solidaritas masyarakat sekitar hutan berpengaruh langsung pada keterlibatan dan dukungan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Lembaga swasta sebagai *stakeholders* pemberdayaan masyarakat sekitar hutan terutama yang berbisnis dalam bidang kehutanan, sangat butuh kepedulian dan solidaritas dari masyarakat sekitar hutan. Kalau semakin tinggi kebersamaan dalam bentuk kepedulian dan solidaritas masyarakat, maka lembaga swasta akan semakin terlibat dalam proses pemberdayaan masyarakat. Bahkan keberadaan *stakeholders* lembaga swasta dalam pemberdayaan masyarakat adalah demi kepedulian dan solidaritas itu sendiri. Namun kepedulian dan solidaritas masyarakat menjadi pangkal tolak munculnya keterlibatan dan dukungan lembaga swasta dalam pemberdayaan masyarakat. Sekaligus berarti kepedulian dan solidaritas masyarakat sekitar hutan menjadi penentu dan berpengaruh pada keterlibatan dan dukungan lembaga swasta dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.

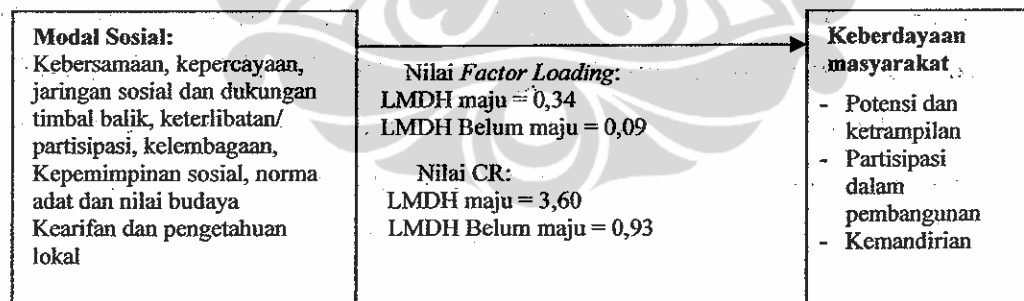
Lembaga pemerhati masalah kehutanan sebagai *stakeholders* pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam proses pemberdayaan akan sangat memperhatikan bagaimana kebersamaan kepedulian dan solidaritas dalam masyarakat sekitar hutan. Karena dengan modal sosial kebersamaan yang tinggi, lembaga pemerhati masalah kehutanan akan lebih mudah dalam keterlibatan dan pemberian dukungan dalam proses pemberdayaan. Kebersamaan yang memberi manfaat Kepedulian dan solidaritas mempunyai hubungan pengaruh signifikan terhadap keterlibatan dan dukungan *stakeholders* lembaga pemerhati masalah kehutanan dalam suatu proses pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.

Dalam tataran substansi, semua substansi modal sosial ternyata berpengaruh terhadap keseluruhan substansi keterlibatan dan dukungan *stakeholders* pemberdayaan masyarakat. Hal itu membenarkan bahwa modal sosial masyarakat sekitar hutan berpengaruh terhadap keterlibatan dan dukungan *stakeholders* pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, dan hal tersebut telah dibuktikan secara empiris pada uji hipotesa dan pengaruh signifikansi, baik secara keseluruhan model pada masyarakat sekitar hutan, maupun pada masyarakat dengan LMDH maju dan LMDH belum maju. Modal sosial dengan unsur-unsur pembentuknya melahirkan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran serta keindahan yang mendorong

meningkatkan keterlibatan dan dukungan stakeholders untuk akhirnya mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan.

#### 4.4.3. Pengaruh Modal Sosial pada Keberdayaan Masyarakat

Pada Tabel 4.28 dan Gambar 4.12 dibawah, hubungan struktural menggambarkan bahwa pada masyarakat maju mempunyai nilai *factor loading* sebesar 0,34 dan nilai CR nya sebesar 3,60, sedangkan pada masyarakat LMDH belum maju mempunyai nilai *factor loading* sebesar 0,09 dan nilai CR nya sebesar 0,93. Berdasarkan nilai tersebut memberi gambaran bahwa pengaruh modal sosial pada masyarakat maju lebih kuat dan signifikan terhadap keberdayaan masyarakat dibanding pada masyarakat LMDH belum maju. Pengaruh modal sosial pada masyarakat LMDH yang belum maju sangat lemah dan tidak signifikan terhadap keberdayaan masyarakat. Perbandingan tersebut memberi gambaran betapa berperannya modal sosial dalam suatu peningkatan keberdayaan masyarakat. Menurut hasil kajian sebelumnya dijelaskan bahwa semakin tinggi modal sosial dalam suatu masyarakat, maka akan memberi gambaran juga semakin tinggi kualitas masyarakat, termaksud tingkat keberdayaannya.



Gambar 4.12. Hubungan Modal Sosial dengan Keberdayaaan Masyarakat

Pengaruh modal sosial terhadap keberdayaan yang signifikan dan pengaruh langsung maupun tak langsung yang cukup besar, memperlihatkan bahwa antara modal sosial dan keberdayaan memang saling terkait dan saling melengkapi. Hal tersebut juga telah dinyatakan oleh ADB (2000), Putnam (1993) dan Rahadiansah (2005), bahwa modal sosial adalah merupakan landasan untuk suatu keberhasilan proses pembangunan termasuk pemberdayaan yang menghasilkan keberdayaan

masyarakat. Modal sosial tidak akan habis jika digunakan, melainkan semakin meningkat dan rusaknya modal sosial lebih sering disebabkan bukan karena dipakai, melainkan karena ia tidak dipergunakan (Suharto, 2003). Kuat atau lemahnya modal sosial jelas berpengaruh pada kondisi aktual komunitasnya (masyarakat sekitar hutan) dan kondisi aktual masyarakat sekitar hutan merupakan refleksi dari kondisi potensial keberdayaan masyarakat.

Keberdayaan masyarakat itu sendiri adalah kondisi potensial dari daya, kekuatan dan kemampuan masyarakat sebagai suatu entitas (*entity*) atau sistem yang diperlihatkan secara langsung. Setiap entitas seperti masyarakat sekitar hutan adalah entitas yang memiliki modal sosial yang dapat berdinamika menjadi kuat atau lemah, sehingga modal sosial mencerminkan entitas komunitas itu sendiri yaitu kondisi potensial keberdayaan masyarakat sekitar hutan. Kondisi potensial itu tercermin selanjutnya pada kondisi aktual keseharian masyarakat baik pada masyarakat dengan modal sosial kuat atau pun masyarakat dengan modal sosial yang lemah. Masyarakat yang memiliki modal sosial kuat cenderung bekerja secara gotong royong, merasa aman untuk berbicara dan mampu mengatasi perbedaan-perbedaan (Suharto, 2003).

Kecenderungan dan kenampakan pada masyarakat dengan modal sosial kuat ataupun lemah pada kondisi aktual keberdayaan masyarakat seperti gotong royong dan keberanian untuk berbicara serta mampu mengatasi perbedaan-perbedaan, menjadi petunjuk kuat bahwa modal sosial masyarakat sekitar hutan berpengaruh terhadap keberdayaan masyarakat sekitar hutan.

Berdasarkan definisi operasional keberdayaan masyarakat, maka yang menjadi substansi dari keberdayaan masyarakat sekitar hutan adalah daya, kekuatan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat sekitar hutan untuk secara mandiri mengidentifikasi potensi dan mengidentifikasi masalah serta menentukan alternative pemecahan masalah pengelolaan sumber daya hutan, dan indikator keberdayaan masyarakat tersebut dapat diukur dalam substansi kepemilikan potensi dan ketrampilan, partisipasi dalam pembangunan dan kemandirian

masyarakat, namun antara substansi-substansi tersebut adalah merupakan bentukan yang sama terhadap keberdayaan masyarakat.

Modal sosial dan keberdayaan masyarakat yang merupakan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat beroperasi pada domain ranah yang sama, sehingga keterkaitannya menjadi suatu kepastian, apalagi bila beroperasi pada satuan masyarakat yang disebutkan sebagai komunitas. Untuk mendalami lebih lanjut keterkaitan modal sosial dengan keberdayaan masyarakat, berbagai substansi modal sosial perlu direlasikan dengan substansi dari keberdayaan masyarakat. Hal ini untuk mengamati dan sekaligus mendalami berbagai substansi modal sosial dan substansi keberdayaan masyarakat dan relasinya.

Sebagai substansi modal sosial, norma/nilai pemerkuat jaringan sosial yang positif menjadi substansi yang berpengaruh terhadap daya kuat dan daya mampu masyarakat sekitar hutan untuk mengidentifikasi potensi sumber daya hutan. Hal ini mudah untuk dimengerti karena lazimnya sebagian besar dan bahkan hampir seluruh aktivitas keseharian masyarakat sekitar hutan tetap muncul melalui jaringan sosial kesehariannya. Apapun yang akan dilakukannya terutama yang berkaitan dengan apa yang nyata akan dikerjakan tidak terlepas dari jaringan sosial yang melingkupinya. Melalui jaringan sosial, baik dalam relasi bertetangga, berdesun dan berdesa ataupun hubungan antar lembaga LMDH, warga masyarakat sekitar hutan melakukan apapun termasuk mengidentifikasi sumber daya hutan yang tersedia disekitarnya. Lazim pula, ketersediaan sumber daya hutan saling diinformasikan sesama warga, dan lembaga yang digunakan sebagai saluran penyampaian hal-hal yang diketahuinya adalah jaringan sosial yang melingkupi kehidupannya. Adanya kontak langsung dalam jaringan sosial yang norma dan nilainya dibentuk dan disepakati bersama menjadi penguat munculnya daya kuat dan daya mampu warga masyarakat sekitar. Modal sosial yang antara lain terlihat sebagai norma dan nilai pemerkuat jaringan sosial ternyata menjadi penentu bagi daya mampu dan daya kuat masyarakat sekitar hutan untuk menghadapi berbagai masalah pengelolaan sumber daya.

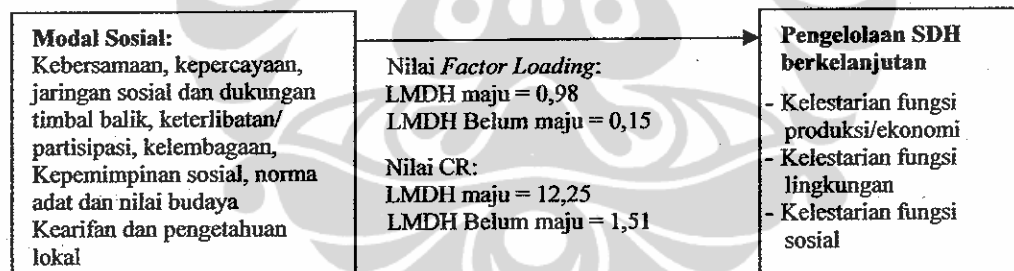
Jaringan sosial yang kuat segera menjadi saluran yang efektif untuk menyebarnya informasi dari dan ke sesama warga masyarakat sekitar hutan termasuk tentang masalah pengelolaan sumber daya hutan. Berarti pula jaringan sosial yang kuat sebagai substansi modal sosial berpengaruh pada substansi keberdayaan masyarakat sekitar hutan untuk mengembangkan suatu potensi dan ketrampilan, partisipasi dalam pembangunan dan kemandirian masyarakat.

Substansi modal sosial kebersamaan mempunyai hubungan relasi yang signifikan terhadap keberdayaan masyarakat sekitar hutan, karena dengan kebersamaan, masyarakat dapat saling bekerja sama untuk saling mendorong mempunyai daya mampu untuk menentukan alternative pemecahan masalah pengelolaan sumber daya hutan. Tanpa kehadiran atau minimnya kerjasama pada komunitas masyarakat sekitar hutan tidak mungkin dapat menghasilkan daya mampu masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan sumber daya hutan. Ketidakmungkinan menghasilkan daya mampu masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan, akan berlanjut pada kesemrawutan pengelolaan sumberdaya hutan, kesemrawutan tersebut bisa berbentuk kesalahan aktivitas atau ketiadaan aktivitas pengelolaan sumber daya hutan, baik oleh pihak diluar masyarakat sekitar hutan maupun oleh warga masyarakat sekitar hutan itu sendiri. Segenap substansi keberdayaan masyarakat mulai dari kepemilikan potensi dan ketrampilan, partisipasi dalam pembangunan dan kemandirian masyarakat dipengaruhi oleh jalinan kerjasama dalam komunitas masyarakat sekitar hutan, dengan kata lain jalinan kerjasama dalam komunitas masyarakat sekitar hutan sebagai substansi modal sosial berpengaruh terhadap keseluruhan substansi keberdayaan masyarakat sekitar hutan.

Kepercayaan, Saling percaya sebagai substansi modal sosial juga memiliki hubungan relasi penentu terhadap tingkat keberdayaan masyarakat. Saling percaya dengan tingkat kepercayaan yang tinggi antar sesama warga memungkinkan munculnya aktivitas komunitas masyarakat sekitar hutan untuk saling bekerjasama. Saling percaya menjadi awal bagi munculnya aktivitas melakukan pengelolaan sumber daya hutan yang terencana. Berarti adanya saling percaya pada komunitas masyarakat sekitar hutan adalah faktor yang berpengaruh

terhadap aktivitas pengelolaan sumber daya hutan. Dan bila secara keseluruhan diakumulasikan, keseluruhan substansi modal sosial berpengaruh terhadap semua substansi keberdayaan masyarakat pada komunitas masyarakat sekitar hutan. Pengaruh dalam tataran substansi dimaksud mengarahkan simpulan bahwa modal sosial masyarakat sekitar hutan berpengaruh langsung terhadap keberdayaan masyarakat sekitar hutan. Penjumlahan pengaruh langsung dan tak langsung memperlihatkan bahwa modal sosial mempunyai kekuatan dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat sekitar, sehingga untuk masyarakat dengan kondisi belum berdaya diperlukan penguatan modal sosial untuk menuju peningkatan keberdayaan dan kualitas masyarakat sekitar hutan. Modal sosial dengan unsur pembentuknya akan melahirkan nilai-nilai intrinsik kebaikan, kebenaran dan keindahan yang berpengaruh pada terwujudnya keberdayaan dan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan.

#### 4.4.4. Pengaruh Modal Sosial pada Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan



Gambar 4.13 Hubungan Modal Sosial dengan Pengelolaan Sumber daya Hutan Berkelanjutan

Pada Tabel 4.28 dan Gambar 4.13 tentang hubungan struktural variabel modal sosial dengan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan antara masyarakat LMDH maju dan belum maju memperlihatkan bahwa, besaran pengaruh modal sosial terhadap pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan pada masyarakat LMDH maju lebih kuat dan signifikan dibanding pengaruh modal sosial pada masyarakat LMDH yang belum maju terhadap pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Semakin kuat modal sosial dalam suatu masyarakat maka akan semakin berdaya suatu masyarakat dan semakin berpengaruh terhadap



pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Sehingga pada masyarakat dengan tingkat keberdayaan yang rendah diperlukan penguatan modal sosial untuk mendorong peningkatan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Penguatan modal sosial tersebut adalah penguatan terhadap keseluruhan unsur pembentuk modal sosial.

Pengaruh yang signifikan dari modal sosial masyarakat sekitar hutan terhadap pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan, dapat dirasionalkan oleh Barber *et al.* (1997) yang menyatakan bahwa pengelolaan kawasan hutan yang baik harus berpangkal pada keikutsertaan yang adil dan bijak oleh semua pihak yang berkepentingan. Masyarakat sekitar hutan dipastikan menjadi pihak yang berkepentingan dengan pengelolaan sumber daya hutan yang baik dan disebutkan sebagai pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan dan modal sosial masyarakat sekitar hutan adalah sesuatu yang berperan penting dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan.

*Social capital plays an important role in resource conservation* (Mehra: IFRI Working Paper: 23), menjelaskan bahwa modal sosial memainkan peranan penting dalam konservasi sumberdaya termasuk pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Peranan penting modal sosial dalam konservasi sumber daya hutan sebagai kegiatan utama dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan karena modal sosial adalah norma dan nilai yang dirangkai oleh masyarakat sekitar hutan melalui sistem sosialnya. Selanjutnya, Agung (2004) menyatakan bahwa sistem sosial lingkungan hutan adalah hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan, sehingga sistem sosial lingkungan hutan yang bermaterikan modal sosial masyarakat sekitar hutan adalah faktor penentu yang berpengaruh terhadap pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan.

Modal sosial komunitas masyarakat sekitar hutan yang dikritisasi dalam tataran substansinya, memungkinkan pula untuk upaya menemukan substansi dari pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan terutama dengan referensi dari pengelolaan sumber daya hutan di lokasi penelitian. Referensi itu dilanjutkan

dengan penelaahan pengelolaan sumber daya hutan dalam tataran substansi tetap dengan rujukan definisi operasional yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu. Dengan demikian maka substansi pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan adalah sistem pengelolaan hutan yang menjamin keberlanjutan fungsi produksi dan manfaat sumber daya hutan dengan memperhatikan secara seimbang dan tidak saling mendominasi diantara fungsi-fungsi (1) fungsi ekonomi (2) fungsi ekologi dan (3) fungsi sosial dari hutan.

Pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat akan muncul jika terdapat kesepakatan untuk memanfaatkan sumber daya hutan secara bersama. Kesepakatan ini akan terjadi karena terdapat interaksi secara reguler dan berkesinambungan antara masyarakat dengan pemanfaatan sumber daya hutan. Menurut Grootart *et al.* (2003) salah satu yang terpenting adalah bahwa hasil interaksi berupa kepedulian dan aksi bersama untuk mencapai tujuan bersama hanya dimungkinkan jika sejumlah modal sosial tersedia dalam suatu komunitas. Badaruddin (2008) telah menjelaskan dari hasil penelitiannya bahwa modal sosial adalah merupakan salah satu syarat bagi keberhasilan suatu program pembangunan, dan menurut peneliti termasuk dalam proses pemberdayaan dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan.

Melihat begitu besar pengaruh modal sosial terhadap pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan yaitu sebesar 40% yang telah dibuktikan dari hasil pengujian dan analisis tersebut dan melihat teori dan konsep tentang keterkaitan modal sosial dan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan, memberi esensi dan pengakuan bahwa modal sosial tidak boleh termarginalkan, tapi harus menjadi landasan dalam pemberdayaan masyarakat dalam mencapai pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Hal ini sejalan dengan pendapat World Bank (1993) bahwa dalam suatu pengembangan masyarakat (termasuk pemberdayaan masyarakat) perlu memberikan suatu fokus perhatian terhadap peranan dan implementasi modal sosial serta kemungkinan pemanfaatan serta kontribusinya dalam proses pengentasan kemiskinan khususnya di negara-negara berkembang. Menurutny untuk mendapatkan hasil yang optimal suatu proses pemberdayaan seharusnya mempertimbangkan secara

serius akan peran pemanfaatan modal sosial. Hasil penelitian Neela Mekhejee (2002) menyatakan bahwa modal sosial sangat berperan penting dalam proses pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan, bahwa proses transformasi modal sosial adalah penting, peningkatan modal sosial dalam suatu masyarakat akan membuat target pengelolaan hutan berkelanjutan tercapai.

Jaringan sosial masyarakat sekitar hutan sebagai substansi dari modal sosial ternyata langsung memiliki hubungan relasi dengan fungsi ekonomi hutan dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Jaringan sosial masyarakat sekitar hutan menjadi penentu bagi keberlangsungan fungsi ekonomi hutan secara proporsional (Fukuyama, 1995). Proporsionalitas dalam arti memperhatikan ambang batas yang dimungkinkan dikelola dari sumber daya hutan, terjadi karena adanya jaringan sosial yang kuat pada masyarakat sekitar hutan. Sebaliknya pengelolaan sumber daya hutan yang melewati ambang batas dapat dilakukan pihak tertentu karena jaringan sosial masyarakat sekitar hutan tidak kuat dan bahkan seakan-akan nyaris hampir musnah. Tanpa jaringan sosial ternyata pengelola sumber daya hutan cenderung tidak lagi peduli dengan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Karenanya pengaruh dari jaringan sosial terhadap fungsi ekonomi hutan demi pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan adalah sesuatu yang harus menjadi kenyataan.

Begitu juga dengan hubungan relasi antara jaringan sosial dengan fungsi ekologis hutan dan fungsi sosial hutan demi pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Jaringan sosial yang kuat dan kokoh menjadi penentu keberhasilan munculnya fungsi ekologis hutan dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan bersamaan dengan fungsi hutan yang lainnya. Kerusakan ekologis hutan atau pengelolaan sumber daya hutan tanpa pertimbangan fungsi ekologis terjadi karena memang jaringan sosial masyarakat setempat sudah demikian mengecil sehingga muncul ketidak berdayaan jaringan sosial. Karenanya mudah disebutkan bahwa jaringan sosial adalah faktor yang berpengaruh terhadap fungsi ekologis hutan dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan sesuai dengan faktual yang diketemukan di lapangan.

Munculnya fungsi sosial hutan dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan adalah suatu keharusan yang telah menjadi kriteria indikator dalam pengelolaan hutan lestari (LEI, ITTO) dan hal itu juga ditentukan oleh kekuatan jaringan sosial masyarakat sekitar hutan itu sendiri. Jaringan sosial yang semakin menguat atau melemah adalah penentu adanya fungsi sosial hutan. Pelemahan fungsi sosial hutan seperti resiko banjir karena melemahnya jaringan sosial masyarakat sekitar hutan dalam menjaga hutan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam kondisi ini tampak langsung bahwa jaringan sosial masyarakat berpengaruh langsung terhadap fungsi sosial hutan sebagai substansi tertentu dari pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Akumulasinya, jaringan sosial masyarakat sekitar hutan berpengaruh langsung terhadap semua substansi pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan atau pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan dipengaruhi oleh jaringan sosial masyarakat sekitar hutan.

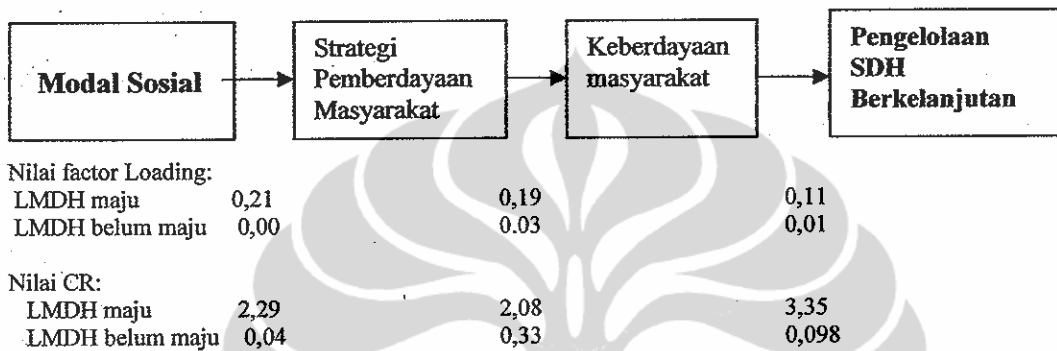
Modal sosial kebersamaan sebagai substansi modal sosial yang melahirkan kepedulian dan solidaritas masyarakat sekitar hutan memiliki hubungan relasi yang signifikan dengan fungsi ekonomi, fungsi ekologis dan fungsi sosial hutan dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Masyarakat sekitar hutan mempunyai kepentingan bersama terhadap sumber daya hutan sebagai sumber mata pencaharian dan energi kehidupan, sehingga masyarakat sekitar hutan secara bersama mempunyai kepentingan yang sama terhadap keberadaan keberlanjutan sumber daya hutan. Dengan kebersamaan dan adanya tujuan dan kepentingan bersama, masyarakat akan tetap memelihara, agar keberadaan sumber daya hutan tetap ada dan berlanjut, sehingga fungsi hutan sebagai fungsi produksi ekonomi, sosial dan lingkungan yang memberikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga hingga berakhirnya kehidupan manusia. Dengan Modal sosial kebersamaan yang kuat akan memungkinkan peningkatan fungsi ekonomi, sosial dan lingkungan hutan akan semakin baik. Sehingga dari substansinya terbukti bahwa modal sosial kebersamaan mempunyai pengaruh terhadap pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Modal sosial kebersamaan tidak hanya meningkat fungsi ekonomi, tetapi juga menjaga fungsi lingkungan hutan dan fungsi sosial sumber daya hutan.

Modal sosial kepercayaan yang menggambarkan sikap saling percaya pada masyarakat sekitar hutan menjadi faktor penting dalam menjaga keberadaan fungsi ekonomi, lingkungan dan fungsi sosial sumber daya hutan dalam rangka pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Sumber daya hutan yang menjadi tumpuan sumber energi kehidupan sebagian masyarakat sekitar hutan mempertunjukkan fungsi ekonomi hutan, yang harusnya dikelola atas dasar sikap saling percaya. Penumbuhan sikap saling percaya menjadi pemicu bagi kemunculan fungsi ekonomi dari hutan secara proporsionalitas. Modal sosial kepercayaan juga memiliki relasi dengan fungsi ekologi/lingkungan sumber daya hutan. Sikap saling percaya yang muncul dalam ikatan kebersamaan telah turut menjaga fungsi ekologis dari hutan. Ternyata kawasan hutan yang tidak lagi terjaga kelestarian fungsi ekologisnya lebih disebabkan masyarakat sekitar hutan telah meminimalkan dan bahkan hampir meniadakan sikap saling percaya sesamanya. Dalam artian lainnya, sikap saling percaya sesamanya menjadi faktor penentu yang berpengaruh terhadap fungsi sosial dari hutan.

Dengan analog terhadap substansi unsur pembentuk modal sosial dari berbagai substansi modal sosial yang ada, maka menjadi fakta bahwa modal sosial memang berpengaruh terhadap keseluruhan substansi pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan dengan besaran pengaruh yang berbeda, sangat tergantung dari kekuatan modal sosial masyarakat yang dimiliki. Walau demikian secara akumulatif dapat disebutkan bahwa modal sosial masyarakat sekitar hutan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan, dan hal ini merupakan kenyataan dan fakta lapangan yang tidak dapat diabaikan. Modal sosial dengan unsur pembentuknya melahirkan nilai-nilai intrinsik kenbaik, kebenaran untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan.

#### 4.4.5. Pengaruh Tidak Langsung Modal Sosial pada Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan melalui Strategi Pemberdayaan Masyarakat dan Keberdayaan Masyarakat

Untuk melihat perbandingan pengaruh modal sosial terhadap pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan melalui strategi pemberdayaan dan keberdayaan masyarakat pada masyarakat LMDH yang maju dan belum maju adalah sebagaimana gambar berikut:



Gambar 4.14. Hubungan tak Langsung Modal Sosial dengan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan Melalui Strategi Pemberdayaan dan Keberdayaan Masyarakat

Dari gambar tersebut di atas, terlihat bahwa hubungan modal sosial dengan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan pada masyarakat LMDH maju lebih kuat dari masyarakat LMDH belum maju. Sehingga semakin terbukti bahwa modal sosial yang kuat yang dimiliki oleh masyarakat yang lebih maju akan sangat berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan upaya penguatan modal sosial dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan terhadap masyarakat yang mempunyai modal sosial yang lemah.

Studi yang dilakukan Grootaert (The World Bank: 62) tentang *social capital, household welfare and Poverty in Indonesia* menyimpulkan bahwa:

*The basic data indicated a positive correlation between social capital and household welfare; household with high social capital have higher expenditure per capita, more assets and better access to credit.*

Basis data mengindikasikan suatu korelasi positif antara modal sosial dan kesejahteraan keluarga: keluarga dengan modal sosial yang tinggi mempunyai

pengeluaran per kapita yang tinggi, sejumlah aset serta akses yang baik terhadap kredit. Keluarga dengan modal sosial yang tinggi yang cenderung sejahtera, tentu bukan cerminan masyarakat sekitar hutan secara keseluruhan karena masih banyaknya keluarga miskin dan prasejahtera secara sosial ekonomi walau belum tentu miskin norma dan nilai modal sosialnya. Masyarakat sekitar hutan yang belum sejahtera namun menjadi bagian integral dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan, cukup rasional mengingat pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan tidak mengedepankan kesejahteraan sosial ekonomi semata mengingat perlunya keseimbangan fungsi ekonomi hutan dengan fungsi ekologi dan fungsi sosial hutan.

Masyarakat sekitar hutan yang belum sejahtera secara sosial ekonomi membutuhkan strategi pemberdayaan masyarakat sekitar hutan berlandaskan modal sosial yang dimilikinya agar memiliki keberdayaan dan adanya keberdayaan masyarakat memungkinkan adanya pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan dalam kaitannya dengan eksistensi modal sosial masyarakat sekitar hutan. Hal ini cukup menjelaskan bahwa modal sosial memang berpengaruh tidak langsung terhadap pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan melalui jalur strategi pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dan keberdayaan masyarakat sekitar hutan.

Alur fikir pada bagian terdahulu telah mengulas bahwa modal sosial (masyarakat sekitar hutan) berpengaruh langsung terhadap strategi pemberdayaan masyarakat (sekitar hutan), termasuk pada tataran substansinya. Karena seluruh substansi modal sosial yang terdiri dari (1) kebersamaan; (2) kepercayaan; (3) jaringan sosial dan dukungan timbal balik; (4) keterlibatan/partisipasi (5) kepemimpinan sosial (6) kelembagaan (7) norma, nilai adat budaya (8) kearifan dan pengetahuan lokal berpengaruh langsung terhadap semua substansi strategi pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari strategi pelibatan masyarakat (1) melakukan kajian masalah (2) merencanakan (3) melaksanakan dan (4) melakukan evaluasi pengelolaan sumber daya hutan, maka semua substansi modal sosial menjadi melekat (*inherent*) pada masing-masing substansi strategi pemberdayaan masyarakat.

Kemelekatan substansi modal sosial pada substansi strategi pemberdayaan masyarakat tentu menghasilkan pula bahwa modal sosial melekat pada semua substansi strategi pemberdayaan masyarakat. Setelah semua substansi strategi pemberdayaan masyarakat dilekati oleh modal sosial, maka muncullah substansi strategi pemberdayaan masyarakat dalam pola strategi pelibatan masyarakat (1) melakukan kajian masalah ( pengelolaan sumber daya hutan ) berlandaskan modal sosial (2) merencanakan ( pengelolaan sumber daya hutan ) berlandaskan modal sosial (3) melaksanakan ( pengelolaan sumber daya hutan ) berlandaskan modal sosial dan (4) melakukan evaluasi ( pengelolaan sumber daya hutan ) berlandaskan modal sosial.

Strategi pemberdayaan masyarakat secara umum berpengaruh langsung terhadap keberdayaan masyarakat, mudah untuk dirasionalkan karena strategi pemberdayaan masyarakat adalah strategi untuk menghasilkan output keberdayaan masyarakat. Sukar untuk dibayangkan adanya keberdayaan masyarakat tanpa didahului oleh strategi pemberdayaan masyarakat sebab keberdayaan masyarakat mempunyai cakupan yang meluas dan untuk menangani cakupan yang luas seperti keberdayaan masyarakat sangatlah dibutuhkan adanya strategi. Tanpa adanya strategi pastilah sukar untuk menghasilkan sesuatu yang memiliki cakupan yang luas dan karenanya strategi pemberdayaan masyarakat adalah suatu keharusan demi menghadirkan adanya keberdayaan masyarakat.

Keharusan menghadirkan strategi pemberdayaan masyarakat sebelum perwujudan keberdayaan masyarakat, tentu harus diverifikasi lebih lanjut pada tataran substansinya masing-masing. Pola substansi strategi pemberdayaan masyarakat yang muncul setelah strategi pemberdayaan masyarakat dipengaruhi langsung oleh modal sosial, tentulah memiliki keterkaitan langsung pula dengan keberdayaan masyarakat yang diderivasikan menjadi substansi keberdayaan masyarakat yaitu (1) kepemilikan potensi dan ketrampilalan pada level individu (2) Partisipasi pada level kelompok/masyarakat dan (3) kemandirian pada level sistem.



Pola substansi strategi pemberdayaan masyarakat melakukan kajian masalah berlandaskan modal sosial berpengaruh langsung terhadap substansi keberdayaan masyarakat. Hal ini mudah untuk dirasionalkan dengan memahami bahwa strategi yang telah sepenuhnya mendayagunakan modal sosial masyarakat kondusif sekali menghasilkan daya kuat dan daya mampu masyarakat untuk mengidentifikasi potensi, mengidentifikasi masalah dan menentukan alternatif pemecahan masalah pengelolaan sumber daya hutan. Sekaligus menyatakan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat dalam substansi melakukan kajian masalah sumberdaya hutan berpengaruh langsung terhadap keberdayaan masyarakat pada setiap substansinya.

Pola substansi strategi pemberdayaan masyarakat merencanakan (pengelolaan sumber daya hutan) berlandaskan modal sosial berpengaruh langsung terhadap substansi keberdayaan masyarakat. Berkemiripan dengan pola substansi sebelumnya, strategi perencanaan yang telah mendayagunakan modal sosial kondusif sekali menghadirkan daya mampu masyarakat sekitar hutan untuk semua substansinya. Artinya merencanakan sebagai pola substansi strategi pemberdayaan masyarakat berpengaruh langsung terhadap semua substansi keberdayaan masyarakat dan pada saatnya pasti pula berpengaruh langsung terhadap keberdayaan masyarakat secara keseluruhan.

Melaksanakan pengelolaan sumber daya hutan berlandaskan modal sosial sebagai substansi strategi pemberdayaan masyarakat berpengaruh langsung terhadap substansi keberdayaan masyarakat. Turut sertanya masyarakat melakukan pengelolaan sumber daya hutan pasti memunculkan keberdayaan masyarakat. Berarti substansi strategi pemberdayaan merencanakan berlandaskan modal sosial berpengaruh langsung terhadap semua substansi keberdayaan masyarakat atau substansi strategi pemberdayaan merencanakan berpengaruh langsung terhadap keberdayaan masyarakat.

Pola substansi strategi pemberdayaan masyarakat melakukan evaluasi (pengelolaan sumber daya hutan) berlandaskan modal sosial berpengaruh langsung terhadap substansi keberdayaan. Masyarakat yang telah mau mampu

melakukan evaluasi pengelolaan sumber daya hutan pastilah yang telah memiliki daya mampu untuk itu, termasuk mengidentifikasi potensi, mengidentifikasi masalah dan menentukan alternatif pemecahan masalahnya. Maknanya, pola substansi strategi melakukan evaluasi yang dibasis modal sosial memang berpengaruh terhadap keberdayaan masyarakat termasuk semua substansi keberdayaan masyarakat itu sendiri. Akumulasi semua pola substansi strategi pemberdayaan masyarakat, menjelaskan bahwa keseluruhan pola substansi strategi pemberdayaan masyarakat berpengaruh langsung terhadap potensi dan ketrampilan, partisipasi dan kemandirian.

Dengan demikian semua substansi keberdayaan masyarakat dilekati oleh semua pola substansi strategi pemberdayaan masyarakat atau strategi pemberdayaan masyarakat yang telah dipengaruhi oleh modal sosial melekat kepada semua substansi keberdayaan masyarakat, sehingga mudah dirasionalkan adanya pola substansi keberdayaan masyarakat. Pola substansi keberdayaan masyarakat yang pertama adalah daya kuat dan daya mampu mengidentifikasi potensi berlandaskan modal sosial dalam melakukan kajian masalah, merencanakan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi dalam pengelolaan sumber daya hutan. Pola substansi keberdayaan masyarakat yang kedua adalah daya kuat dan daya mampu mengidentifikasi masalah berlandaskan modal sosial dalam melakukan kajian masalah, merencanakan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi. Pola substansi keberdayaan masyarakat yang ketiga adalah daya kuat dan daya mampu menentukan alternatif pemecahan masalah berlandaskan modal sosial dalam melakukan kajian masalah, merencanakan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi.

Sesungguhnya, (pelibatan masyarakat) melakukan kajian masalah, merencanakan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi adalah merupakan substansi dari strategi pemberdayaan masyarakat. Sehingga pola substansi keberdayaan masyarakat seperti disebutkan terdahulu, dapat pula disebutkan sebagai adanya potensi dan ketrampilan, partisipasi dan kemandirian masyarakat.

Pola substansi keberdayaan masyarakat seperti itu adalah substansi keberdayaan masyarakat yang telah dilekati oleh substansi strategi pemberdayaan masyarakat karena adanya pengaruh langsung dari strategi pemberdayaan masyarakat terhadap keberdayaan masyarakat. Sedangkan pola substansi strategi pemberdayaan masyarakat adalah substansi strategi pemberdayaan masyarakat yang telah dilekati pula oleh keseluruhan substansi modal sosial karena adanya pengaruh langsung modal sosial terhadap strategi pemberdayaan masyarakat.

Pengaruh langsung modal sosial terhadap strategi pemberdayaan masyarakat dan adanya pengaruh langsung dari strategi pemberdayaan masyarakat terhadap keberdayaan masyarakat apalagi pengaruh itu ditunjukkan oleh substansi dan pola substansinya, menjadi rasional utama yang menyatakan bahwa keberdayaan masyarakat dipengaruhi secara tidak langsung oleh modal sosial atau modal sosial berpengaruh tidak langsung terhadap keberdayaan masyarakat.

Konsekuensi lanjutan dari rasional utama tadi yang membenarkan bahwa (1) modal sosial berpengaruh tidak langsung terhadap keberdayaan masyarakat (2) modal sosial berpengaruh langsung terhadap strategi pemberdayaan masyarakat dan (3) strategi pemberdayaan masyarakat berpengaruh langsung terhadap keberdayaan masyarakat, menunjukkan bahwa hubungan runtutan secara berurutan adalah modal sosial, strategi pemberdayaan masyarakat dan keberdayaan masyarakat.

Pada sisi yang lainnya, keberdayaan masyarakat adalah sebutan lain dari keberdayaan (yang dimiliki oleh) masyarakat (sekitar hutan). Keberdayaan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar hutan dalam acuan umum pasti memiliki relasi dengan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan karena tidak mungkin ada pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan tanpa memperhatikan masyarakat sekitar hutan yang memiliki keberdayaannya. Sebaliknya, masyarakat sekitar hutan yang memiliki keberdayaan tetap butuh hutan dan sumber daya hutan yang harusnya dikelola dalam acuan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Seterusnya, pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan menjadi sistem yang tidaklah akan berproses sebagaimana seharusnya karena kurang menyelami,

memperhatikan dan melibatkan masyarakat sekitar hutan dalam realita proses pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Sehingga acuan rasional umum menyatakan bahwa masyarakat sekitar hutan yang memiliki keberdayaan berpengaruh langsung terhadap pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan, atau lebih tegasnya keberdayaan masyarakat berpengaruh langsung terhadap pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan.

Acuan rasional umum tentang relasi pengaruh langsung keberdayaan masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan tentunya juga harus diverifikasi dalam tataran substansinya masing-masing. Pola substansi keberdayaan masyarakat yang muncul setelah keberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh strategi pemberdayaan masyarakat direlasikan langsung dengan substansi pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan yang terdiri dari (1) fungsi ekonomi hutan (2) fungsi ekologi hutan dan (3) fungsi sosial hutan sebagai substansi yang terpisah-pisah atau keseimbangan fungsi ekonomi, fungsi ekologi dan fungsi sosial hutan sebagai substansi yang menyatu dari pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan.

Pola substansi keberdayaan masyarakat yang terdiri dari pengembangan potensi dan ketrampilan, partisipasi dalam pembangunan dan kemandirian masyarakat adalah gambaran daya mampu mengidentifikasi potensi berlandaskan modal sosial dan memanfaatkan strategi pemberdayaan masyarakat, daya kuat dan daya mampu mengidentifikasi masalah berlandaskan modal sosial dan memanfaatkan strategi pemberdayaan masyarakat dan daya kuat dan daya mampu menentukan alternatif pemecahan masalah berlandaskan modal sosial dan memanfaatkan strategi pemberdayaan masyarakat, memiliki relasi langsung dengan keseimbangan fungsi ekonomi, fungsi ekologi dan fungsi sosial hutan.

Daya mampu mengidentifikasi potensi berlandaskan modal sosial dan memanfaatkan strategi pemberdayaan masyarakat memiliki relasi langsung dengan keseimbangan fungsi ekonomi, fungsi ekologi dan fungsi sosial hutan. Hal ini mudah untuk dirasionalkan karena keseimbangan fungsi-fungsi hutan sangatlah dideterminasi oleh masyarakat sekitar hutan itu sendiri yang tentunya

memiliki keberdayaan tersendiri. Sebaliknya masyarakat yang memiliki daya kuat dan daya mampu dan didukung oleh strategi pemberdayaan masyarakat yang tepat adalah penentu langsung terhadap keseimbangan fungsi ekonomi, fungsi ekologi dan fungsi sosial hutan. Sekaligus hal ini berarti bahwa daya kuat dan daya mampu mengidentifikasi potensi sebagai pola substansi keberdayaan masyarakat berpengaruh terhadap keseimbangan fungsi-fungsi hutan atau lebih tegasnya daya kuat dan daya mampu mengidentifikasi potensi yang dimiliki masyarakat sekitar hutan berpengaruh langsung terhadap pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan dengan substansi keseimbangan fungsi ekonomi, fungsi ekologi dan fungsi sosial hutan sejalan dengan sistem yang mengaturnya.

Daya mampu mengidentifikasi masalah berlandaskan modal sosial dan memanfaatkan strategi pemberdayaan masyarakat memiliki relasi langsung dengan keseimbangan fungsi ekonomi, fungsi ekologi dan fungsi sosial hutan. Hal ini dapat dibenarkan karena memang masyarakat yang telah kuat dan mampu mengidentifikasi masalah sumber daya hutan adalah prasyarat untuk munculnya keseimbangan fungsi-fungsi hutan. Fungsi-fungsi hutan menjadi tidak seimbang dalam realitanya adalah disebabkan karena ketidakmampuan dan ketidakberdayaan masyarakat mengidentifikasi masalah pengelolaan sumber daya hutan. Sekaligus memperlihatkan bahwa daya kuat dan daya mampu mengidentifikasi masalah berbasis modal sosial dengan memanfaatkan strategi pemberdayaan masyarakat berpengaruh langsung terhadap keseimbangan fungsi-fungsi hutan sebagai substansi pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan.

Daya mampu menentukan alternatif pemecahan masalah berlandaskan modal sosial dan memanfaatkan strategi pemberdayaan masyarakat memiliki relasi langsung dengan keseimbangan fungsi ekonomi, fungsi ekologi dan fungsi sosial hutan. Cukup mudah untuk dirasionalkan karena masyarakat yang memiliki daya kuat dan daya mampu menentukan alternatif pemecahan masalah pengelolaan sumber daya hutan adalah sebab utama yang dapat menghasilkan keseimbangan fungsi-fungsi hutan. Ketiadaan kemampuan masyarakat sekitar hutan menentukan alternatif pemecahan masalah pengelolaan sumber daya hutan berakibat tidak seimbang fungsi ekonomi, fungsi ekologi dan fungsi sosial hutan. Berarti daya

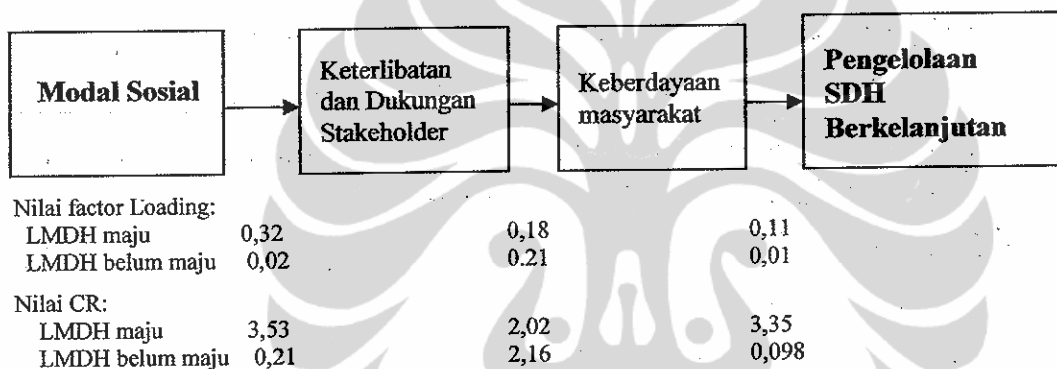
kuat dan daya mampu masyarakat sekitar hutan berbasis modal sosial dan dengan memanfaatkan strategi pemberdayaan masyarakat berpengaruh langsung terhadap keseimbangan fungsi ekonomi, fungsi ekologi dan fungsi sosial hutan sebagai substansi pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan.

Akumulasi semua pola substansi keberdayaan masyarakat, menjelaskan bahwa keseluruhan pola substansi keberdayaan masyarakat berpengaruh langsung terhadap keseimbangan fungsi ekonomi, fungsi ekologi dan fungsi sosial hutan sebagai substansi yang menyatu dari pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Dengan melakukan pembulatan semua pola substansi keberdayaan masyarakat menjadi keberdayaan masyarakat dan substansi keseimbangan fungsi ekonomi, fungsi ekologi dan fungsi sosial hutan sebagai pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan, langsung terbukti bahwa pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan dipengaruhi oleh keberdayaan masyarakat atau sebaliknya keberdayaan masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Keberdayaan masyarakat yang berpengaruh langsung terhadap pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan dan adanya runtutan hubungan pengaruh langsung secara berurutan mulai dari modal sosial, strategi pemberdayaan masyarakat dan keberdayaan masyarakat, melengkapi runtutan hubungan pengaruh langsung menjadi dimulai dari modal sosial, strategi pemberdayaan masyarakat, keberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan.

Konsekuensi lanjutan dari runtutan hubungan pengaruh langsung itu adalah pembenaran yang terbukti atas adanya (1) modal sosial berpengaruh langsung terhadap strategi pemberdayaan masyarakat (2) strategi pemberdayaan masyarakat berpengaruh langsung terhadap keberdayaan masyarakat (3) keberdayaan masyarakat berpengaruh langsung terhadap pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan (4) strategi pemberdayaan masyarakat berpengaruh tidak langsung terhadap pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan (5) modal sosial berpengaruh tidak langsung terhadap keberdayaan masyarakat dan (6) modal sosial berpengaruh tidak langsung terhadap pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan.

#### 4.4.6. Pengaruh Tidak Langsung Modal Sosial dengan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan Melalui Keterlibatan dan Dukungan Stakeholders Pemberdayaan Masyarakat dan Keberdayaan Masyarakat

Sedang untuk melihat perbandingan pengaruh tak langsung modal sosial terhadap pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan yang melalui keterlibatan dan dukungan stakeholders dan keberdayaan masyarakat terhadap masyarakat LMDH maju dan yang belum maju adalah sebagaimana pada gambar berikut:



Gambar 4.15. Hubungan tak Langsung Modal Sosial Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan Melalui Keterlibatan dan Dukungan Stakeholders dan Keberdayaan Masyarakat

Dari gambar tersebut di atas, terlihat bahwa hubungan pengaruh modal sosial terhadap pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan melalui keterlibatan dan dukungan stakeholders dan keberdayaan masyarakat pada masyarakat LMDH maju adalah lebih kuat dan signifikan dibanding dengan masyarakat LMDH yang belum maju. Hal tersebut menjadikan bukti bahwa masyarakat maju yang mempunyai modal sosial yang kuat sangat berpengaruh terhadap pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Semakin kuat modal sosial suatu masyarakat, maka pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan akan semakin baik. Demikian juga sebaliknya, semakin lemah modal sosial suatu masyarakat, maka pengelolaan sumber daya hutan akan semakin sulit.

Dalam hal ini, pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan yang diasosiasikan sebagai perencanaan pembangunan sektor kehutanan maka cukup nampak adanya modal sosial, komponen *stakeholders* dan pembangunan sektor kehutanan. Dalam kaitan dengan perencanaan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) digambar dengan baik oleh Dalle (2008) bahwa pemerintah memiliki pengetahuan dan sumber daya bersama dengan *stakeholders* lainnya berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan. Hal ini semakin menunjukkan bahwa *stakeholders* pembangunan berkelanjutan yang diidentifikasi sebagai *stakeholders* lainnya pastilah termasuk masyarakat dan masyarakat yang memiliki keberdayaan yang mampu berperan dalam pembangunan berkelanjutan termasuk pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Karena pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan dipengaruhi oleh keberdayaan masyarakat, dan keberdayaan masyarakat muncul setelah adanya posisi *stakeholders* perencanaan yang membawa modal sosial sebagai bahan olahannya, terlihat langsung bahwa modal sosial berpengaruh langsung terhadap pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan melalui *stakeholders* perencanaan pembangunan termasuk pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan dan keberdayaan masyarakat sebagai keberdayaan salah satu komponen *stakeholders*.

Jalur berfikir pada bagian terdahulu telah mengulas bahwa modal sosial (masyarakat sekitar hutan) berpengaruh langsung terhadap strategi pemberdayaan masyarakat (sekitar hutan), termasuk pada tataran substansinya. Karena seluruh substansi modal sosial yang terdiri dari (1) kebersamaan; (2) kepercayaan; (3) jaringan sosial dan dukungan timbal balik; (4) keterlibatan/partisipasi; (5) kepemimpinan sosial; (6) kelembagaan; (7) Norma, nilai adat dan budaya; (8) Kearifan dan pengetahuan lokal, berpengaruh langsung terhadap semua substansi keterlibatan dan dukungan *stakeholders* pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari keterlibatan dan dukungan (1) Pemerintah / Perum Perhutani (2) lembaga swasta (3) masyarakat dan (4) lembaga pemerhati masalah kehutanan, maka semua substansi modal social menjadi melekat (*inherent*) pada masing-masing substansi keterlibatan dan dukungan *stakeholders* pemberdayaan masyarakat.



Kemelekatan substansi modal sosial pada substansi keterlibatan dan dukungan *stakeholders* pemberdayaan masyarakat tentu menghasilkan pula bahwa modal social melekat pada semua substansi keterlibatan dan dukungan *stakeholders* pemberdayaan masyarakat. Setelah semua substansi keterlibatan dan dukungan *stakeholders* pemberdayaan masyarakat dilekati oleh modal sosial, maka muncullah substansi keterlibatan dan dukungan *stakeholders* pemberdayaan masyarakat dalam pola keterlibatan dan dukungan (1) Pemerintah/Perum Perhutani berlandaskan modal sosial (2) lembaga swasta berlandaskan modal social (3) masyarakat berlandaskan modal sosial dan (4) lembaga pemerhati masalah kehutanan berlandaskan modal sosial.

Keterlibatan dan dukungan *stakeholders* pemberdayaan masyarakat secara umum berpengaruh langsung terhadap keberdayaan masyarakat, mudah untuk dirasionalkan karena keterlibatan dan dukungan *stakeholders* pemberdayaan masyarakat adalah pihak-pihak yang senyatanya terlibat dan mendukung untuk menghasilkan output keberdayaan masyarakat. Sukar untuk dibayangkan adanya keberdayaan masyarakat tanpa didahului oleh keterlibatan dan dukungan *stakeholders* pemberdayaan masyarakat sebab keberdayaan masyarakat mempunyai cakupan yang yang luas dan sangat dibutuhkan adanya keterlibatan dan dukungan banyak pihak. Tanpa adanya keterlibatan dan dukungan banyak pihak sebagai *stakeholders* pastilah sukar untuk menghasilkan sesuatu yang memiliki cakupan yang luas dan karenanya keterlibatan dan dukungan *stakeholders* pemberdayaan masyarakat adalah suatu keharusan demi menghadirkan adanya keberdayaan masyarakat.

Keharusan menghadirkan *stakeholders* pemberdayaan masyarakat sebelum perwujudan keberdayaan masyarakat, tentu harus diverifikasi lebih lanjut pada tataran substansinya masing-masing. Pola substansi keterlibatan dan dukungan *stakeholders* pemberdayaan masyarakat yang muncul setelah *stakeholders* pemberdayaan masyarakat dipengaruhi langsung oleh modal sosial, tentulah memiliki keterkaitan langsung pula dengan keberdayaan masyarakat yang diderivasikan menjadi keberdayaan masyarakat berupa kepemilikan potensi dan ketrampilan, partisipasi dan kemandirian.

Pola substansi keterlibatan dan dukungan *stakeholders* pemberdayaan masyarakat yaitu keterlibatan dan dukungan dari (1) Pemerintah/Perum Perhutani berlandaskan modal sosial (2) lembaga swasta berlandaskan modal sosial (3) masyarakat berlandaskan modal sosial dan (4) lembaga pemerhati masalah kehutanan berlandaskan modal sosial, berpengaruh langsung terhadap substansi keberdayaan masyarakat yang mempunyai substansi kepemilikan potensi dan ketrampilan, berpartisipasi dan mandiri .

Pemerintah/Perum Perhutani sebagai *stakeholders* pemberdayaan masyarakat berlandaskan modal sosial berpengaruh terhadap substansi keberdayaan masyarakat. Posisi dan peran Pemerintah/Perum Perhutani untuk memungkinkan adanya realisasi daya mampu masyarakat sekitar hutan tidaklah diragukan lagi, apalagi kalau Perum Perhutani dalam melakukan regulasi dan aktivitas telah melandasi kepada modal sosial masyarakat sekitar hutan, maka daya mampu masyarakat untuk mengidentifikasi potensi, mengidentifikasi masalah dan menentukan alternatif pemecahan masalah mudah untuk menjadi kenyataan. Rasionalnya menjadikan hubungan antara Perum Perhutani dengan masyarakat sekitar hutan adalah relasi dalam bentuk pengaruh. Tegasnya Perum Perhutani selaku *stakeholders* pemberdayaan masyarakat sekitar hutan berpengaruh langsung terhadap keberdayaan masyarakat sekitar hutan.

Lembaga swasta sebagai *stakeholders* pemberdayaan masyarakat berlandaskan modal sosial berpengaruh terhadap substansi keberdayaan masyarakat yaitu mempunyai kepemilikan potensi dan ketrampilan, partisipasi dan kemandirian masyarakat. Kalau lembaga swasta yang bergerak disektor kehutanan telah melandasi geraknya dengan modal sosial masyarakat sekitar hutan, otomatis pasti muncul masyarakat yang kuat dan mampu melakukan identifikasi potensi, identifikasi masalah dan penentuan alternative pemecahan masalah, sehingga akan tergambar akan adanya kepemilikan potensi dan ketrampilan, partisipasi dan kemandiriannya. Yang dipertanyakan justru apakah kesediaan lembaga swasta sebagai *stakeholders* pemberdayaan masyarakat sekitar hutan benar-benar dilandasi oleh modal sosial atau hanya sekedar memenuhi persyaratan formal

belaka. Masih adanya lembaga swasta yang bergerak disektor kehutanan yang seakan-akan tidak acuh dengan masyarakat sekitar hutan sehingga membawa dampak berkurangnya keberdayaan masyarakat, khususnya yang terkait dengan pengelolaan sumber daya hutan. Sekaligus berarti bahwa lembaga swasta sebagai *stakeholders* pemberdayaan masyarakat sekitar hutan mempunyai relasi pengaruh langsung terhadap substansi keberdayaan masyarakat sekitar hutan.

Demikian juga masyarakat sebagai *stakeholders* pemberdayaan masyarakat berlandaskan modal sosial berpengaruh terhadap substansi keberdayaan masyarakat yaitu mempunyai potensi dan ketrampilan, partisipasi dalam pembangunan dan kemandirian sebagai output daya kuat dan daya mampu mengidentifikasi potensi, mengidentifikasi masalah dan menentukan alternative pemecahan masalah. Sejalan dengan posisi masyarakat sebagai subjek dan sekaligus objek dalam pemberdayaan masyarakat maka dipastikan masyarakat akan mampu untuk menghadirkan daya kuat dan daya mampu untuk mengidentifikasi potensi, mengidentifikasi masalah maupun menentukan alternative pemecahan masalah pengelolaan sumber daya hutan. Artinya, masyarakat berpengaruh langsung terhadap tingkat keberdayaan masyarakat. Logisnya, masyarakat adalah faktor penentu yang berpengaruh paling pertama dan utama terhadap keberdayaan masyarakat itu sendiri.

Lembaga pemerhati masalah kehutanan sebagai *stakeholders* pemberdayaan masyarakat berlandaskan modal sosial berpengaruh terhadap substansi keberdayaan masyarakat yaitu mempunyai potensi dan ketrampilan, partisipasi dalam pembangunan dan kemandirian masyarakat. Kondisi masyarakat sekitar hutan dengan segala keterbatasannya tentu saja menyebabkan minimalnya tehnik dan cara yang dapat difikirkannya tentang hutan selain memanfaatkan hutan sebagai sumber daya kehidupannya. Lembaga pemerhati masalah kehutanan yang melakukan advokasi dan penasehatan secara aktif dan positif terhadap masyarakat sekitar hutan sangat didambakan masyarakat sekitar hutan. Karena itu kehadiran lembaga pemerhati masalah kehutanan yang memperhatikan sungguh-sungguh hutan dan masyarakat sekitar hutan pasti berpengaruh terhadap masyarakat sekitar hutan termasuk keberdayaannya. Akumulasi semua pola substansi

keterlibatan dan dukungan stakeholders pemberdayaan masyarakat, menjelaskan bahwa keseluruhan pola substansi stakeholders pemberdayaan masyarakat berpengaruh langsung terhadap substansi keberdayaan berupa mempunyai potensi dan ketrampilan, partisipasi dalam pembangunan dan kemandirian masyarakat.

Dengan demikian semua substansi keberdayaan masyarakat dilekati oleh semua pola substansi *stakeholders* pemberdayaan masyarakat atau *stakeholders* pemberdayaan masyarakat yang telah dipengaruhi oleh modal sosial melekat kepada semua substansi keberdayaan masyarakat, sehingga mudah dirasionalkan adanya pola substansi keberdayaan masyarakat. Pola substansi keberdayaan masyarakat yang pertama adalah berkembangnya kepemilikan potensi dan ketrampilan, partisipasi dalam pembangunan dan kemandirian masyarakat yang berlandaskan modal sosial dengan keterlibatan dan dukungan Pemerintah/Perum Perhutani, lembaga swasta, masyarakat dan lembaga pemerhati masalah kehutanan. Pola substansi keberdayaan masyarakat yang kedua adalah daya kuat dan daya mampu mengidentifikasi masalah berlandaskan modal sosial dengan keterlibatan dan dukungan Pemerintah/Perum Perhutani, lembaga swasta, masyarakat dan lembaga pemerhati masalah kehutanan. Pola substansi keberdayaan masyarakat yang ketiga adalah daya kuat dan daya mampu menentukan alternative pemecahan masalah berlandaskan modal sosial dengan keterlibatan dan dukungan Pemerintah/Perum Perhutani, lembaga swasta, masyarakat dan lembaga pemerhati masalah kehutanan.

Sesungguhnya, keterlibatan dan dukungan Pemerintah/Perum Perhutani, lembaga swasta, masyarakat dan lembaga pemerhati masalah kehutanan adalah merupakan substansi dari keterlibatan dan dukungan stakeholders pemberdayaan masyarakat. Sedang pola substansi keberdayaan masyarakat berupa kepemilikan potensi dan ketrampilan, partisipasi dan kemandirian adalah merupakan substansi yang dipengaruhi dan berlandaskan modal sosial dan memanfaatkan keterlibatan dan dukungan *stakeholders* pemberdayaan masyarakat. Pola substansi keberdayaan masyarakat seperti itu adalah substansi keberdayaan masyarakat yang telah dilekati oleh substansi keterlibatan *stakeholders* pemberdayaan masyarakat karena adanya pengaruh langsung dari stakeholders pemberdayaan masyarakat

terhadap keberdayaan masyarakat. Sedangkan pola substansi *stakeholders* pemberdayaan masyarakat adalah substansi *stakeholders* pemberdayaan masyarakat yang telah dilekati pula oleh keseluruhan substansi modal sosial karena adanya pengaruh langsung modal sosial terhadap *stakeholders* pemberdayaan masyarakat.

Pengaruh langsung modal sosial terhadap keterlibatan dan dukungan *stakeholders* pemberdayaan masyarakat dan adanya pengaruh langsung dari *stakeholders* pemberdayaan masyarakat terhadap keberdayaan masyarakat apalagi pengaruh itu ditunjukkan oleh substansi dan pola substansinya, menjadi rasional utama yang menyatakan bahwa keberdayaan masyarakat dipengaruhi secara tidak langsung oleh modal sosial atau modal sosial berpengaruh tidak langsung terhadap keberdayaan masyarakat.

Konsekuensi lanjutan dari rasional utama tadi yang membenarkan bahwa (1) modal sosial berpengaruh tidak langsung terhadap keberdayaan masyarakat (2) modal sosial berpengaruh langsung terhadap *stakeholders* pemberdayaan masyarakat dan (3) *stakeholders* pemberdayaan masyarakat berpengaruh langsung terhadap keberdayaan masyarakat, menunjukkan bahwa hubungan runtutan secara berurutan adalah modal sosial, *stakeholders* pemberdayaan masyarakat dan keberdayaan masyarakat.

Pada sisi yang lainnya, keberdayaan masyarakat adalah sebutan lain dari keberdayaan (yang dimiliki oleh) masyarakat sekitar hutan. Keberdayaan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar hutan dalam acuan umum pastilah memiliki relasi dengan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan karena tidak mungkin ada pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan tanpa memperhatikan masyarakat sekitar hutan yang memiliki keberdayaannya. Sebaliknya, masyarakat sekitar hutan yang memiliki keberdayaan tetap membutuhkan hutan dan sumber daya hutan yang harus dikelola dalam acuan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Seterusnya, pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan menjadi system yang tidak akan berproses sebagaimana seharusnya karena kurang menyelami, memperhatikan dan melibatkan masyarakat sekitar hutan dalam

realita proses pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Sehingga acuan rasional umum menyatakan bahwa masyarakat sekitar hutan yang memiliki keberdayaan berpengaruh langsung terhadap pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan, atau lebih tegasnya keberdayaan masyarakat berpengaruh langsung terhadap pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan.

Acuan rasional umum tentang relasi pengaruh langsung keberdayaan masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan tentunya juga harus diverifikasi dalam tataran substansinya masing-masingnya. Pola substansi keberdayaan masyarakat yang muncul setelah keberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh *stakeholders* pemberdayaan masyarakat direlasikan langsung dengan substansi pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan yang terdiri dari (1) fungsi ekonomi hutan (2) fungsi ekologi hutan dan (3) fungsi sosial hutan sebagai substansi yang terpisah-pisah atau keseimbangan fungsi ekonomi, fungsi ekologi dan fungsi sosial hutan sebagai substansi yang menyatu dari pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan.

Pola substansi keberdayaan masyarakat yang terdiri dari kepemilikan potensi dan ketrampilan, partisipasi dan kemandirian adalah daya mampu mengidentifikasi potensi berlandaskan modal sosial dan memanfaatkan *stakeholders* pemberdayaan masyarakat, dan juga daya mampu mengidentifikasi masalah berlandaskan modal sosial dan memanfaatkan *stakeholders* pemberdayaan masyarakat serta daya mampu menentukan alternative pemecahan masalah berlandaskan modal sosial dan memanfaatkan *stakeholders* pemberdayaan masyarakat memiliki relasi langsung dengan keseimbangan fungsi ekonomi, ekologi dan fungsi sosial hutan.

Daya mampu masyarakat sekitar hutan yang berhasil mengembangkan potensi dan ketrampilan dan berpartisipasi dan juga mandiri akan mempunyai kemampuan mengidentifikasi potensi berlandaskan modal sosial dan memanfaatkan *stakeholders* pemberdayaan masyarakat memiliki relasi langsung dengan keseimbangan fungsi ekonomi, fungsi ekologi dan fungsi sosial hutan. Keseimbangan fungsi-fungsi hutan mudah untuk terwujud manakala daya mampu masyarakat sekitar hutan memperoleh dukungan dari *stakeholders* pemberdayaan

masyarakat berbasis modal sosial masyarakat itu sendiri. Ketidak seimbangan fungsi-fungsi hutan terjadi karena tidak kuat dan tidak mempunya masyarakat mengidentifikasi potensi apalagi tanpa ditunjang oleh keterlibatan *stakeholders* pemberdayaan masyarakat dan dengan mengabaikan modal sosial masyarakat sekitar hutan. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa daya mampu masyarakat sekitar hutan berbasis modal sosial dan ditunjang keterlibatan dan dukungan *stakeholdersnya* berpengaruh langsung terhadap pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan yang memiliki substansi menyatu pada keseimbangan fungsi ekonomi, fungsi ekologi dan fungsi sosial hutan.

Daya mampu mengidentifikasi masalah berlandaskan modal sosial dan memanfaatkan *stakeholders* pemberdayaan memiliki relasi langsung dengan keseimbangan fungsi ekonomi, fungsi ekologi dan fungsi sosial hutan. Relasi langsung yang rasionalnya sebagai relasi pengaruh mudah untuk disebutkan. Tanpa potensi dan ketrampilan serta ikut berpartisipasi dan kemandirian tidak akan mempunyai daya mampu mengidentifikasi masalah pasti akan terjadi ketidakseimbangan fungsi-fungsi hutan. Sebaliknya, dengan penguatan terhadap daya mampu masyarakat sekitar hutan mengidentifikasi masalah pengelolaan sumber daya hutan maka pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan mudah untuk menjadi kenyataan. Berarti daya mampu masyarakat sekitar hutan berbasis modal sosial dan didukung oleh keterlibatan dan dukungan *stakeholdersnya* berpengaruh langsung terhadap pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan.

Seterusnya daya mampu menentukan alternative pemecahan masalah berlandaskan modal sosial dan memanfaatkan keterlibatan dan dukungan *stakeholders* pemberdayaan masyarakat memiliki relasi langsung dengan keseimbangan fungsi ekonomi, fungsi ekologi dan fungsi sosial hutan. Artinya secara langsung daya mampu masyarakat berbasis modal sosialnya dan keterlibatan dan dukungan *stakeholders* pemberdayaan masyarakat berpengaruh langsung terhadap pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan.

Akumulasi semua substansi keberdayaan masyarakat, menjelaskan bahwa keseluruhan substansi keberdayaan masyarakat berpengaruh langsung terhadap

keseimbangan fungsi ekonomi, fungsi ekologi dan fungsi sosial hutan sebagai substansi yang menyatu dari pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Dengan melakukan pembulatan semua substansi keberdayaan masyarakat menjadi keberdayaan masyarakat dan substansi keseimbangan fungsi ekonomi, fungsi ekologi dan fungsi sosial hutan sebagai pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan, langsung terbukti bahwa pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan dipengaruhi oleh keberdayaan masyarakat atau sebaliknya.

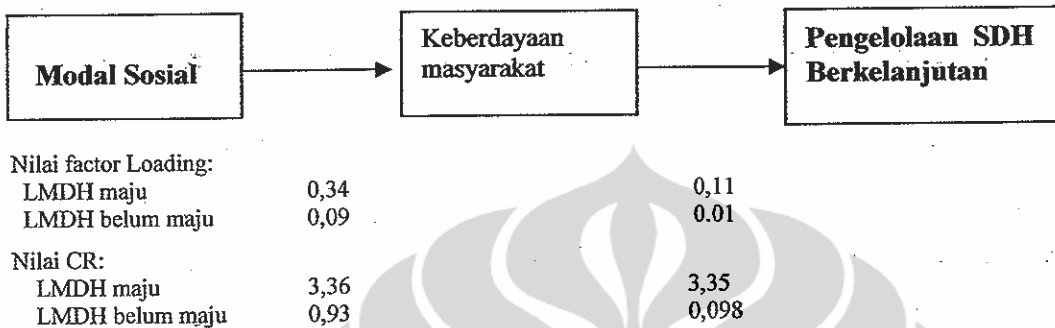
Keberdayaan masyarakat yang berpengaruh langsung terhadap pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan dan adanya runtutan hubungan pengaruh langsung secara berurutan mulai dari modal sosial, stakeholders pemberdayaan masyarakat dan keberdayaan masyarakat, melengkapi runtutan hubungan pengaruh langsung menjadi dimulai dari modal sosial, keterlibatan dan dukungan stakeholders pemberdayaan masyarakat, keberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan.

Konsekuensi lanjutan dari runtutan hubungan pengaruh langsung itu adalah pembenaran yang terbukti atas adanya (1) modal sosial berpengaruh langsung terhadap keterlibatan dan dukungan stakeholders pemberdayaan masyarakat (2) keterlibatan dan dukungan stakeholders pemberdayaan masyarakat berpengaruh langsung terhadap keberdayaan masyarakat (3) keberdayaan masyarakat berpengaruh langsung terhadap pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan (4) keterlibatan dan dukungan stakeholders pemberdayaan masyarakat berpengaruh tidak langsung terhadap pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan (5) modal sosial berpengaruh tidak langsung terhadap keberdayaan masyarakat dan (6) modal sosial berpengaruh tidak langsung terhadap pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan.



#### 4.4.7. Pengaruh Tidak Langsung Modal Sosial pada Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan melalui Keberdayaan Masyarakat

Sedang untuk melihat perbandingan pengaruh tak langsung modal sosial terhadap pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan melalui keberdayaan masyarakat pada adalah sebagai berikut:



Gambar 4.16. Hubungan tak Langsung Modal Sosial Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan Melalui Keberdayaan Masyarakat

Pada gambar tersebut di atas, terlihat bahwa pengaruh modal sosial terhadap pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan melalui keberdayaan masyarakat pada masyarakat LMDH maju lebih kuat dan signifikan dibanding pada masyarakat yang belum maju. Hal tersebut membuktikan lagi bahwa modal sosial yang kuat yang dimiliki suatu masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Semakin kuat modal sosial, maka pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan akan semakin baik. Demikian pula sebaliknya, semakin lemah modal sosial yang dimiliki masyarakat, maka pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan akan semakin sulit terwujud.

Melalui studi yang intensif tentang modal sosial, Grootaert: Draft Revisi The World Bank: 62, menegaskan bahwa:

*The effect of sosial capital operate through (at least) three mechanisms: sharing of information among association member, reduction of opportunistic behavior and improved collective decision making.*

Efek dari modal sosial menyelesaikan operasi (sekurangnya) tiga mekanisme: berbagi informasi antara sesama anggota asosiasi, mereduksi tingkah laku oportunistik dan mengembangkan pembuatan kepuasan kolektif.

Tiga mekanisme yang beroperasi dari efek modal sosial dan kalau hal itu dilokalisasi pada masyarakat sekitar hutan langsung menunjukkan bahwa tiga mekanisme itu adalah kekuatan yang dimiliki secara potensial oleh masyarakat sekitar hutan, yang berdaya karena memang mereka memiliki modal sosial. Bararti cukup jelas adanya pengaruh langsung dari modal sosial terhadap keberdayaan masyarakat sekitar hutan.

Pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan pada saatnya identik dengan pengelolaan sumber daya berbasis komunitas karena pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan tetap memusatkan perhatian pada komunitas sekitar hutan sebagai bagian tak terpisahkan dari pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya berbasis komunitas (*community based resources management*) merupakan strategi pembangunan masyarakat yang memberi peran kepada masyarakat pada tingkat komunitas untuk mengontrol dan mengelola sumber daya produktif yang memungkinkan warga masyarakat memanfaatkan sumber daya lokal yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan individual dan kolektif (Sutomo: 2008: 384).

Masyarakat yang mampu mengontrol dan mengelola sumber daya produktif seperti melakukan pengelolaan sumber daya hutan bagi masyarakat sekitar hutan menunjukkan bahwa keberdayaan masyarakat memiliki pengaruh langsung untuk terwujudnya pengelolaan sumber daya berbasis komunitas termasuk pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Setelah diawali dengan adanya efek modal sosial yang mengoperasikan adanya keberdayaan masyarakatnya, terbukti bahwa modal sosial berpengaruh tidak langsung terhadap pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan melalui keberdayaan masyarakat.

Pada bagian terdahulu telah diulas bahwa modal sosial (masyarakat sekitar hutan) berpengaruh langsung terhadap keberdayaan masyarakat (sekitar hutan), termasuk pada tataran substansinya. Karena seluruh substansi modal sosial yang terdiri dari (1) kebersamaan; (2) kepercayaan; (3) jaringan sosial dan dukungan timbal balik; (4) keterlibatan/partisipasi; (5) Kepemimpinan sosial; (6) Kelembagaan dan (7) Norma nilai adat budaya; (8) Keriafan dan pengetahuan lokal, berpengaruh

langsung terhadap semua substansi keberdayaan masyarakat yang terdiri dari (1) kepemilikan potensi dan ketrampilan; (2) partisipasi dalam pembangunan dan (3) kemandirian masyarakat, maka semua substansi modal sosial menjadi melekat (inherent ) pada masing-masing substansi keberdayaan masyarakat.

Kemelekatan substansi modal sosial pada substansi keberdayaan masyarakat tentu menghasilkan pula bahwa modal sosial melekat pada semua substansi keberdayaan masyarakat. Setelah semua substansi keberdayaan masyarakat dilekati oleh modal sosial, maka muncullah substansi keberdayaan masyarakat berupa potensi dan ketrampilan, partisipasi dalam pembangunan, dan kemandirian masyarakat yang memberi gambaran daya mampu mengidentifikasi potensi berlandaskan modal social, daya kuat dan daya mampu mengidentifikasi masalah dan berlandaskan modal sosial dan daya mampu menentukan alternative pemecahan masalah berlandaskan modal sosial.

Keberdayaan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar hutan dalam acuan umum pastilah memiliki relasi dengan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan karena tidak mungkin ada pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan tanpa memperhatikan masyarakat sekitar hutan yang memiliki keberdayaannya. Sebaliknya, masyarakat sekitar hutan yang memiliki keberdayaan tetap membutuhkan hutan dan sumber daya hutan yang harusnya dikelola dalam acuan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Seterusnya, pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan menjadi system yang tidaklah akan berproses sebagaimana seharusnya karena kurang menyelami, memperhatikan dan melibatkan masyarakat sekitar hutan dalam realita proses pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Sehingga acuan rasional umum menyatakan bahwa masyarakat sekitar hutan yang memiliki keberdayaan berpengaruh langsung terhadap pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan , atau lebih tegasnya keberdayaan masyarakat berpengaruh langsung terhadap pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan.

Acuan rasional umum tentang relasi pengaruh langsung keberdayaan masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan tentunya juga harus

diverifikasi dalam tataran substansinya masing-masingnya. Pola substansi keberdayaan masyarakat yang muncul setelah keberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh modal sosial direlasikan langsung dengan substansi pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan yang terdiri dari (1) fungsi ekonomi hutan (2) fungsi ekologi hutan dan (3) fungsi sosial hutan sebagai substansi yang terpisah-pisah atau keseimbangan fungsi ekonomi, fungsi ekologi dan fungsi social hutan sebagai substansi yang menyatu dari pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Pola substansi keberdayaan masyarakat yang terdiri dari pengembangan potensi dan ketrampilan, partisipasi dalam pembangunan dan kemandirian masyarakat memiliki hubungan relasi langsung dengan keseimbangan fungsi ekonomi, fungsi ekologi dan fungsi sosial hutan.

Relasi antara daya mampu mengidentifikasi potensi berlandaskan modal sosial dengan keseimbangan fungsi ekonomi, fungsi ekologi dan fungsi social hutan cukup mudah untuk dimengerti. Masyarakat sekitar hutan yang kuat dan mampu mengidentifikasi potensi berlandaskan modal social menjadi prasyarat untuk menghadirkan keseimbangan fungsi ekonomi, fungsi ekologi dan fungsi social hutan. Ketidak seimbangan berbagai fungsi hutan pastilah disebabkan oleh tidak kuat dan tidak mempunya masyarakat sekitar hutan mengidentifikasi potensi sumber daya hutannya untuk dimanfaatkan masa mendatang. Berfikir hanya untuk hari ini dan kondisi sekarang oleh sebagian diantara masyarakat sekitar hutan, adalah penyebab menonjolnya fungsi ekonomi hutan dan itu berarti tidak ada keseimbangan fungsi hutan secara totalitas demi pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Hal ini sekaligus berarti bahwa daya kuat dan daya mampu mengidentifikasi potensi (sumber daya hutan) berpengaruh langsung terhadap keseimbangan fungsi ekonomi, fungsi ekologi dan fungsi sosial hutan sebagai substansi pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan.

Daya mampu mengidentifikasi masalah berlandaskan modal sosial yang dipunyai masyarakat sekitar hutan memiliki relasi langsung dengan keseimbangan fungsi ekonomi, fungsi ekologi dan fungsi social hutan. Ketidak seimbangan antar fungsi-fungsi hutan terhadi karena ketiadaan kemampuan dan kekuatan masyarakat mengidentifikasi masalah yang timbul dari pengelolaan sumber daya

hutan yang dilakukan oleh banyak pihak yang mengelola sumber daya hutan. Sebaliknya masyarakat yang kuat dan mampu mengidentifikasi masalah-masalah dari pengelolaan sumber daya hutan yang hanya mengedepankan fungsi ekonomi, berpengaruh langsung terhadap keseimbangan fungsi ekonomi, fungsi ekologi dan fungsi sosial hutan secara totalitas. Tentunya kondisi seperti ini berarti bahwa daya kuat dan daya mampu mengidentifikasi masalah berlandaskan modal social yang dimiliki masyarakat sekitar hutan berpengaruh langsung terhadap pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan.

Selanjutnya, daya mampu menentukan alternative pemecahan masalah berlandaskan modal social memiliki relasi langsung dengan keseimbangan fungsi ekonomi, fungsi ekologi dan fungsi social hutan. Kalaulah masyarakat sekitar hutan senyatanya mampu dan kuat untuk menentukan alternative pemecahan masalah yang timbul dari pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan secara serampangan oleh pihak yang melakukan pengelolaan sumber daya hutan, ketidak seimbangan fungsi hutan tidak mudah untuk muncul. Tetapi karena belum kuat dan belum mampunya masyarakat menentukan alternative pemecahan masalah pengelolaan sumber daya hutan yang serampangan, terjadilah aktivitas itu seakan-akan berlanjut saja adanya dan kerusakan fungsi hutan seperti fungsi ekologi dan fungsi sosial adalah akibatnya. Dengan demikian daya mampu masyarakat berlandaskan modal sosial yang dimilikinya untuk menentukan alternative pemecahan masalah memiliki relasi dalam bentuk pengaruh langsung terhadap pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan.

Akumulasi semua substansi keberdayaan masyarakat, menjelaskan bahwa keseluruhan substansi keberdayaan masyarakat berpengaruh langsung terhadap keseimbangan fungsi ekonomi, fungsi ekologi dan fungsi sosial hutan sebagai substansi yang menyatu dari pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Dengan melakukan pembulatan semua substansi keberdayaan masyarakat menjadi keberdayaan masyarakat dan substansi keseimbangan fungsi ekonomi, fungsi ekologi dan fungsi sosial hutan sebagai pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan, langsung terbukti bahwa pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan dipengaruhi oleh keberdayaan masyarakat atau sebaliknya.

Keberdayaan masyarakat yang berpengaruh langsung terhadap pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan dan adanya runtutan hubungan pengaruh langsung dari modal social terhadap keberdayaan masyarakat, melengkapi runtutan hubungan pengaruh langsung menjadi dimulai dari modal social, keberdayaan masyarakat, dan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan.

Konsekuensi lanjutan dari runtutan hubungan pengaruh langsung itu adalah pembenaran yang terbukti atas adanya (1) modal sosial berpengaruh langsung terhadap keberdayaan masyarakat (2) keberdayaan masyarakat berpengaruh langsung terhadap pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan (3) modal sosial berpengaruh tidak langsung terhadap pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan .

#### **Analisis Pengaruh Kekuatan Modal Sosial masyarakat Sekitar Hutan Terhadap Pemberdayaan masyarakat dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan Pada LMDH Maju**

Pada tabel 4.29, diperlihatkan bahwa seluruh nilai Critical Ratio (CR) pada semua hubungan jalur variabel Modal Sosial terhadap strategi pemberdayaan, keberdayaan masyarakat dan keterlibatan stakeholder serta terhadap pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan mempunyai nilai di atas 1,96, yang berarti bahwa modal sosial mempunyai pengaruh langsung yang signifikan terhadap proses pemberdayaan dan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Sedang Pengaruh tak langsung modal sosial terhadap proses pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan juga melalui nilai CR di atas nilai 1,96 yang berarti secara tak langsung modal sosial juga berpengaruh signifikan terhadap proses pemberdayaan dan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Namun dari nilai *factor loading* masing-masing jalur yang terbentuk terlihat bahwa besaran pengaruh modal sosial tersebut belum optimal terhadap proses pemberdayaan dan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan.

Peran modal sosial pada LMDH yang telah maju tentu saja karena memang modal sosialnya telah menunjukkan kondisi aktual sesuai dengan yang diharapkan dari kondisi potensialnya. Yang dimaksudkan sebagai kondisi potensial modal sosial

masyarakat sekitar hutan adalah akumulasi dan formulasi norma dan nilai yang telah terbentuk, dipahami bersama untuk mencapai tujuan bersama oleh masyarakat sekitar hutan dalam tataran ide dan konsepsi masyarakatnya. Sedangkan kondisi aktual modal sosial masyarakat sekitar hutan adalah implementasi dari akumulasi dan formulasi modal sosial dalam realita keseharian masyarakat sekitar hutan itu sendiri.

Kondisi potensial dari modal sosial masyarakat sekitar hutan sebagai akumulasi dan formulasi norma dan nilai, dari hasil observasi menunjukkan banyak kesamaan karena desa yang telah maju dan desa yang belum maju memiliki sejarah kemasyarakatan dan latar belakang kemasyarakatan yang hampir sama. Semua desa yang dikelompokkan dalam LMDH maju yang dimiliki masyarakatnya adalah masyarakat yang terbiasa dengan kondisi fisik desa yang telah ada dan semua warga desa merasa senasib karena sama-sama menggantungkan hidupnya untuk sebagian besar di lahan garapan kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani.

Dengan demikian yang menjadi pembeda perkembangan modal sosial antar desa adalah kondisi faktual modal sosial masyarakat sekitar hutan. Kondisi faktual modal sosial masyarakat sekitar hutan sebagai norma dan nilai yang diimplementasikan oleh warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sekitar hutan itu sendiri. Kondisi faktual modal sosial adalah kondisi realita dari potensi modal sosial yang dimiliki masyarakat sekitar hutan..

Faktor pembentuk modal sosial seperti telah diulas terdahulu adalah (1) kebersamaan (2) kepercayaan (3) jaringan sosial dan dukungan timbal balik (4) keterlibatan / partisipasi (5) kelembagaan (6) kepemimpinan sosial (7) norma, adat dan nilai budaya serta (8) kearifan lokal dan pengetahuan lokal. Dengan memfokuskan kondisi aktual modal sosial di desa dengan LMDH yang telah maju, faktor pembentuk modal sosial masyarakat sekitar hutan tersebut dapat diidentifikasi apakah berperan sebagai faktor pendorong atau faktor penghambat bagi realisasi kondisi aktual modal sosial masyarakat sekitar hutan tersebut. Maksudnya sebutan maju dan belum maju sekaligus merupakan manifestasi dari

kondisi aktual pemberdayaan masyarakatnya yang dideteksi melalui kondisi eksisting pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dimaksud.

Kondisi aktual atau kondisi eksisting pemberdayaan masyarakat sekitar hutan yang telah maju sekaligus berarti strategi pemberdayaan masyarakat, keterlibatan dan dukungan *stakeholders* pemberdayaan masyarakat telah pula maju menghasilkan keberdayaan masyarakat sekitar hutan. Hal ini karena memang pemberdayaan masyarakat sekitar hutan telah dielaborasi melalui variabel dan dimensi strategi, *stakeholders* dan keberdayaan masyarakat sekitar hutan. Untuk itu dapat dinyatakan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, keterlibatan dan dukungan *stakeholders* pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dan keberdayaan masyarakat sekitar hutan berkembang selaras dengan perkembangan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan di desa dengan LMDH yang bersangkutan.

Konsekuensi selanjutnya, materi subjek dari strategi, *stakeholders* dan keberdayaan masyarakat sekitar hutan tentu dalam status kuat dalam proses pemberdayaan. Sehingga secara lebih rinci, strategi pemberdayaan masyarakat sekitar hutan yang materi subjeknya strategi pelibatan masyarakat sekitar hutan berada dalam posisi yang lebih kuat pula. Keterlibatan dan dukungan *stakeholders* pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dengan materi subjek Perum Perhutani, lembaga swasta, lembaga pemerhati masalah kehutanan serta (lembaga) masyarakat juga telah dalam status lebih mapan. Dalam kondisi yang demikian sangat logis jika keberdayaan masyarakat sekitar hutan dengan materi subjek daya, kekuatan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat sekitar hutan berada dalam kondisi keberdayaan yang lebih baik dan lebih maju.

Status maju yang melekat kepada strategi, keterlibatan dan dukungan *stakeholders* serta keberdayaan masyarakat sekitar hutan adalah cerminan dari kondisi eksisting pemberdayaan masyarakat di desa dengan LMDH yang bersangkutan. Diperlukan elaborasi lebih lanjut bagaimana keterkaitan modal sosial masyarakat sekitar hutan dengan kondisi eksisting pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dengan status kemajuan tersebut.



Keterkaitan modal sosial dengan status maju dan kuat dalam suatu strategi, keterlibatan dan dukungan stakeholders serta keberdayaan masyarakat sekitar hutan, sesungguhnya juga memetakan kondisi aktual modal sosial di desa yang pemberdayaan masyarakatnya telah meningkat maju. Kondisi aktual modal sosial masyarakat sekitar hutan pada dasarnya juga merupakan kondisi eksisting dari potensi modal sosial di desa yang bersangkutan.

Potensi modal sosial masyarakat sekitar hutan sebagai norma dan nilai yang telah terbentuk, dipahami bersama untuk mencapai tujuan bersama masyarakat sekitar hutan, menampakan diri sebagai faktor pembentuk modal sosial dalam kondisi aktual. Karena itulah maka kebersamaan, kepercayaan, jaringan sosial dan dukungan timbal balik, keterlibatan/partisipasi, kelembagaan, kepemimpinan sosial, norma, adat dan nilai budaya, serta kearifan lokal dan pengetahuan lokal sebagai norma yang telah terbentuk dipahami untuk mencapai tujuan bersama menjadi objek untuk dikritisi lebih lanjut pada desa dengan LMDHnya dan pemberdayaan masyarakat pada statusnya dalam kondisi maju.

Peran modal sosial masyarakat sekitar hutan yang cenderung menguat di desa dengan LMDH yang maju berhubungan langsung dengan kondisi aktual atau kondisi eksisting pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Karena kondisi aktual atau kondisi eksisting pemberdayaan masyarakat sekitar hutan berdimensikan kondisi aktual strategi, keterlibatan dan dukungan stakeholders serta keberdayaan masyarakat sekitar hutan, maka akumulasi ulasan diatas mengkerangkakan konklusi bahwa modal sosial masyarakat sekitar hutan yang kuat akan sangat berpengaruh langsung terhadap (1) strategi pemberdayaan masyarakat sekitar hutan yang tepat (2) keterlibatan dan dukungan stakeholders pemberdayaan masyarakat sekitar hutan yang efektif serta (3) keberdayaan masyarakat sekitar hutan yang menguat. Dengan demikian, strategi, keterlibatan dan dukungan stakeholders pemberdayaan serta keberdayaan masyarakat sekitar hutan dengan memperhatikan substansinya tetap mengarah kepada pengelolaan sumber daya hutan agar terwujud pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Karena itu mudah dirasionalkan bahwa strategi pemberdayaan yang tepat, keterlibatan dan

dukungan stakeholders pemberdayaan yang efektif serta keberdayaan masyarakat yang menguat pada desa dengan LMDH yang maju berpengaruh langsung terhadap pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan.

Disamping itu, berdasarkan materi subjek modal sosial masyarakat sekitar hutan yang cenderung menguat pada LMDH yang maju, maka pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan cenderung pula untuk dijadikan tujuan bersama oleh masyarakat sekitar hutan. Hal ini disebabkan karena materi subjek modal sosial adalah norma dan nilai yang terbentuk, dipahami bersama dan digunakan untuk mencapai tujuan bersama. Artinya pada masyarakat sekitar hutan yang memiliki modal sosial yang kuat, maka perwujudan pengelolaan sumber daya hutan sebagai pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan menjadi lebih mudah, karena pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan dijadikan satu tujuan penting diantara banyak tujuan bersama masyarakat sekitar hutan.

Dari berbagai argumen konklusi di atas, telah menempatkan modal sosial yang kuat sebagai sebab pertama terhadap strategi pemberdayaan yang tepat, keterlibatan dan dukungan stakeholders pemberdayaan yang efektif serta keberdayaan masyarakat sekitar hutan yang menguat serta kondisi aktual pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Berarti modal sosial yang kuat pada masyarakat sekitar hutan berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap (1) strategi pemberdayaan masyarakat sekitar hutan yang tepat (2) keterlibatan dan dukungan stakeholders pemberdayaan masyarakat yang efektif dan (3) keberdayaan masyarakat sekitar hutan yang menguat serta (4) pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan yang optimal.

#### **Analisis Pengaruh Kekuatan Modal Sosial Masyarakat Sekitar Hutan Terhadap Proses Pemberdayaan dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan pada LMDH Belum Maju**

Padatabel 4.29 diperlihatkan bahwa Pengaruh Modal Sosial Terhadap Proses Pemberdayaan dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan mempunyai nilai CR di bawah nilai 1,96 yang berarti modal sosial masyarakat pada LMDH belum maju tidak berpengaruh secara signifikan proses pemberdayaan masyarakat

dan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Hal tersebut memperjelas bahwa LMDH yang belum maju dengan modal sosial yang lemah membuat proses pemberdayaan dan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan berjalan lambat dan sulit tercapai.

Pada dasarnya, perbedaan antara desa dengan LMDH yang maju dengan tingkat keberdayaan yang lebih baik dengan yang belum maju dengan tingkat keberdayaan lebih rendah adalah hasil evaluasi kondisi eksisting pemberdayaan masyarakat sekitar hutan yang telah dilakukan selama ini dan sampai saat sekarang. Namun tetap harus dicatat bahwa pemberdayaan masyarakat tetap merupakan aksi selama masih belum tercapainya output pemberdayaan masyarakat yaitu keberdayaan masyarakat sekitar hutan. Jadi kondisi eksisting atau kondisi aktual pemberdayaan masyarakat sekitar hutan di desa dengan LMDH yang belum maju diharapkan senantiasa berubah kearah yang diinginkan agar semua desa dari masyarakat sekitar hutan berstatus sebagai desa dengan LMDH yang maju.

Sangatlah disadari bahwa kondisi aktual atau kondisi eksisting sebagai kondisi saat ini memang bukanlah kondisi potensial pemberdayaan masyarakat sekitar hutan itu sendiri. Sesuai dengan arah yang diinginkan diyakini bahwa kondisi potensial pemberdayaan masyarakat sekitar hutan terutama di desa dengan LMDH yang belum maju belum terwujud sebagai kondisi aktual.

Karena itu dapat dirasionalkan bahwa masih cukup banyak kesamaan sejarah dan latar belakang desa dengan LMDH yang belum maju dan desa dengan LMDH yang telah maju. Dan sampai batas tertentu kesamaan sejarah kemasyarakatan dan latar belakang kemasyarakatan desa yang bersangkutan layaknnya menghadirkan kondisi potensial pemberdayaan masyarakat sekitar hutan yang hampir sama. Yang menjadi pembeda antara yang maju dengan yang belum maju dari pemberdayaan masyarakatnya hanya kondisi aktual pemberdayaan masyarakat sekitar hutan itu sendiri.

Kondisi aktual pemberdayaan masyarakat sekitar hutan yang belum maju menegaskan bahwa dimensi pemberdayaan masyarakatnya belum seperti yang

diharapkan. Dalam kondisi aktual pemberdayaan masyarakat yang belum maju, tentu saja muncul rincian bahwa (1) strategi pemberdayaan masyarakat sekitar hutan yang belum tepat (2) keterlibatan dan dukungan stakeholders pemberdayaan yang belum efektif serta (3) keberdayaan masyarakat yang masih minimal. Rincian ini tentu saja dapat bervariasi antar desa dengan LMDH yang tidak berkembang.

Dengan tetap fokus pada desa dengan LMDH yang belum maju, pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses untuk mendapatkan output (keluaran) adalah proses yang beroperasi pada masyarakat sekitar hutan. Proses pemberdayaan masyarakat sekitar hutan berproses pada masyarakat sekitar hutan yang berdinamika sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat sekitar hutan itu sendiri. Untuk masyarakat sekitar hutan pada LMDH yang belum maju tetap membutuhkan adanya modal sosial sebagai norma dan nilai yang telah terbentuk. Modal sosial dengan materi subjek seperti itu, tetap ada pada masyarakat sekitar hutan pada LMDH yang belum maju sekalipun.

Materi subjek modal sosial yang terkerangka pada faktor pembentuk modal sosial pada LMDH yang belum maju perlu dielaborasi dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan yang belum berdaya tersebut. Hasil observasi dan data kualitatif yang dikumpulkan akan menonjolkan bagaimana modal sosial itu menjadi kondisi aktualnya di desa dengan LMDH yang belum maju. Modal sosial pada kelompok pada LMDH yang belum maju di bentuk atas dasar faktor (1) kebersamaan (2) kepercayaan (3) jaringan sosial dan dukungan timbal balik (4) keterlibatan/partisipasi (5) norma, adat dan nilai budaya (6) kepemimpinan sosial (7) kelembagaan (8) kearifan lokal dan pengetahuan lokal. Kesemua faktor pembentuk modal sosial tersebut tetap dalam makna sebagai materi subjek modal sosial yaitu norma dan nilai yang terbentuk, dipahami bersama untuk mencapai tujuan bersama oleh masyarakat sekitar hutan.

Melemahnya kondisi aktual modal sosial seperti diatas, juga dapat dirasionalkan melalui penalaran karakter modal sosial sebagai sistem sosial yang komplementer dan saling substitusi. Karakter modal sosial sebagai suatu sistem sosial yang

komplementer atau saling melengkapi ternyata tidaklah mencukupi untuk menutupi melemahnya peran kepemimpinan sosial karena kepercayaan masyarakat yang masih belum mencukupi pula.

Begitu pulalah selanjutnya dengan faktor pembentuk modal sosial yang lainnya, yang juga tidak mampu menutupi kelemahan faktor pembentuk modal sosial diluar dirinya termasuk menutupi pelemahan yang terjadi pada kepemimpinan sosial dan kepercayaan masyarakat. Hal yang lebih kurang sama juga diperlihatkan oleh karakter modal sosial sebagai sistem sosial yang saling substitusi jika diperlukan. Kepemimpinan sosial yang melemah ditambah dengan tingkat kepercayaan yang belum seperti yang didambakan masyarakat sekitar hutan mengakibatkan tidak ada yang dapat disubstitusikan antar sesamanya termasuk dari faktor pembentuk modal sosial yang lainnya.

Tidak berjalannya karakter sistem sosial pada modal sosial masyarakat sekitar hutan terutama di desa dengan pemberdayaan masyarakat yang belum optimal, mengakumulasikan bahwa semua faktor pembentuk modal sosial dalam kondisi aktualnya menjuruskan modal sosial sebagai modal sosial yang melemah. Modal sosial yang melemah dalam kondisi aktual tentu saja menghasilkan pemberdayaan masyarakat yang belum optimal, karena modal sosial masyarakat sekitar hutan adalah sebab pertama yang berpengaruh terhadap semua hal yang bersangkutan dengan masyarakat sekitar hutan apalagi pemberdayaan masyarakatnya.

Selanjutnya, modal sosial yang lemah berpengaruh langsung terhadap (1) strategi pemberdayaan masyarakat sekitar hutan yang belum tepat (2) keterlibatan dan dukungan stakeholders pemberdayaan masyarakat sekitar hutan yang belum efektif serta (3) keberdayaan masyarakat sekitar hutan yang masih minimal. Seterusnya, karena modal sosial tetap sebagai sebab pertama untuk semua hal yang bersangkutan dengan masyarakat sekitar hutan termasuk dalam pengelolaan sumber daya hutan, maka modal sosial yang lemah tentu saja berpengaruh langsung pula dan menyebabkan pengelolaan sumber daya hutan belum optimal dan belum berkelanjutan.

Masih sekitar pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, dimana strategi pemberdayaan, keterlibatan dan dukungan stakeholders pemberdayaan serta keberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam kondisi potensial diarahkan untuk perwujudan pengelolaan sumber daya hutan sebagai pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan, maka kondisi potensial ini pasti dipengaruhi oleh modal sosial masyarakat sekitar hutan. Sehingga dalam lajur dan jalur ini terlihat bahwa modal sosial berpengaruh tidak langsung terhadap pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan yang melengkapi adanya pengaruh langsung modal sosial terhadap pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan.

Pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung modal sosial terhadap strategi pemberdayaan, keterlibatan dan dukungan stakeholders pemberdayaan, keberdayaan masyarakat sekitar hutan serta pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan baik di desa dengan pemberdayaan yang telah optimal maupun yang belum optimal, menyimpulkan bahwa kondisi aktual modal sosial yang lemah atau kuat berpengaruh terhadap optimal tidaknya pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Berarti modal sosial harus tetap dijadikan titik tumpuan dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan serta pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan yang tetap memposisikan masyarakat sekitar hutan sebagai pemangku kepentingan pada pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan.

Kondisi aktual modal sosial telah dieksplorasi baik pada desa LMDH dengan pemberdayaan yang telah maju maupun yang belum maju, terutama dengan mendalami materi subjek atau faktor pembentuk modal sosial masyarakat sekitar hutan itu sendiri. Pendalaman yang mencermati kondisi aktual faktor pembentuk modal sosial pada desa dengan pemberdayaan masyarakat yang telah optimal seperti diulas terdahulu memperlihatkan bahwa kepemimpinan sosial yang berperan efektif serta kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap lembaga interaksinya mampu menjadikan modal sosial cenderung menguat. Sedangkan pada desa dengan pemberdayaan masyarakat yang belum maju, kepemimpinan sosial yang belum berperan efektif dan kepercayaan masyarakat yang merendah

setidaknya dalam kondisi aktual belumlah dapat menutupi kelemahan kondisi aktual faktor pembentuk modal sosial yang lainnya.

Dari perbandingan dan pendalaman diatas disimpulkan bahwa kepemimpinan sosial dan kepercayaan masyarakat sekitar hutan adalah faktor pembentuk modal sosial yang strategis, yang menempati posisi kunci dan utama baik di desa dengan pemberdayaan masyarakat yang berkembang atau belum berkembang. Sebagai faktor pembentuk yang strategis, yang berposisi sebagai faktor pembentuk kunci dan utama, maka kondisi aktual kepemimpinan sosial dan kepercayaan masyarakat menjadi faktor pembentuk yang menentukan terhadap kondisi aktual modal sosial secara totalitas.

#### **4.5. Perumusan Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan Dengan Pemanfaatan dan Penguatan Modal Sosial Secara Optimal.**

Sebagaimana pembahasan terdahulu, telah dilakukan perumusan model pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan dengan memanfaatkan modal sosial masyarakat sekitar hutan (kondisi existing), dan telah membuktikan pula bahwa modal sosial sangat berpengaruh dan berperan penting dalam proses pemberdayaan masyarakat untuk menghasilkan keberdayaan masyarakat dan terwujudnya pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan.

Pembuktian selanjutnya memperlihatkan bahwa semakin kuat modal sosial masyarakat sekitar hutan, maka proses pemberdayaan menghasilkan keberdayaan dan mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan semakin lebih baik, semakin lemah modal sosial masyarakat sekitar hutan, maka tercapainya keberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan akan semakin sulit dan semakin lambat. Model hipotetik yang telah dikonsepskan tersebut digambarkan sesuai pula fakta di lapangan sebagai hasil observasi sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.30. Perbandingan LMDH Maju dan LMDH Belum Maju Menurut masing-masing Komponen Model Pemberdayaan dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan di KPH Sukabumi

No.	Komponen Model Pemberdayaan Masyarakat	LMDH Maju	LMDH Belum Maju
1.	Sarana prasarana pendukung	Relatif cukup	Relatif sangat kurang
2.	Proses Pemanfaatan dan Penguatan Modal Sosial	Relatif baik	Relatif kurang
3.	Penyelenggaraan Pemerintahan desa	Relatif maju	Relatif kurang maju
4.	Kualitas SDM	Relatif cukup	Relatif kurang
5.	Kekuatan Modal Sosial		
	a.Kebersamaan	Relatif kuat	Relatif kuat
	b.Kepercayaan	Relatif cukup kuat	Relatif sangat lemah
	c.Jaringan Sosial dan Dukungan Timbal Balik	Relatif kuat	Relatif kuat
	d.Keterlibatan/Partisipasi	Relatif kuat	Relatif cukup kuat
	e.Kelembagaan	Relatif kuat	Relatif sangat lemah
	f.Kepemimpinan Sosial	Relatif kuat	Relatif Lemah
	g.Normat, adat dan nilai budaya	Relatif kuat	Relatif lemah
	h.Kearifan dan pengetahuan lokal	Relatif kuat	Relatif lemah
6.	Strategi Pemberdayaan		
	a.Dukungan dlm strategi	Relatif baik	Relatif kurang baik
	b.Keterlibatan dlm strategi	Relatif baik	Relatif kurang
	c.Kesesuaian strategi dgn modal sosial	Relatif cukup baik	Relatif sangat kurang sesuai
	d.Pengaruh strategi thd pemberdayaan	Relatif kuat	Relatif kurang
	e.Persetujuan dlm keputusan strategi	Relatif cukup baik	Relatif kurang
7.	Keterlibatan dan dukungan stakeholders		
	a.keterlibatan stakeholder	Relatif cukup	Relatif kurang
	b.Kesesuaian keterlibatan dlm peran	Relatif cukup baik	Relatif kurang
	c.dukungan stake holder	Relatif cukup	Relatif kurang
	d.pengaruh keterlibatan dan dukungan	Relatif cukup	relatif
	e.Pengaruh motivasi peningkatan kesejahteraan thd dukungan dan keterlibatan	Relatif kuat	Relatif kurang
	f.Pengaruh keterkaitan thd keterlibatan thd dukungan yg diberikan	Relatif cukup baik	Relatif merasa kurang
8.	Keberdayaan MSH		
	a.Potensi dan Ketrampilan	Relatif sangat baik	Relatif cukup baik
	b.Partisipasi	Relatif baik	Relatif sangat kurang
	c.Kemandirian	Relatif baik	Relatif sangat kurang
9.	Pengelolaan SDH Berkelanjutan		
	a.Kelestarian Fungsi Produksi	Relatif baik	Relatif baik
	b.Kelestarian Fungsi Ekologi	Relatif baik	Relatif cukup baik
	c.Kelestarian Fungsi Sosial	Relatif baik	Relatif baik

Sumber: Diolah dari hasil data primer dan hasil wawancara, 2009

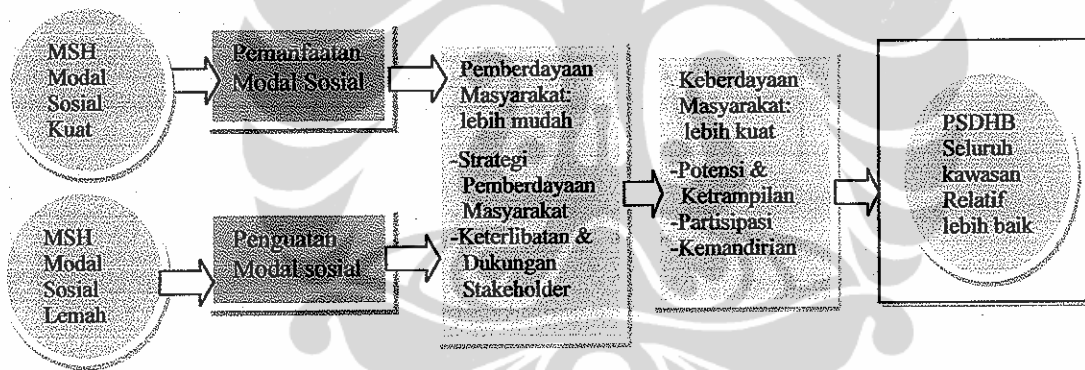


Gambaran model pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh Perhutani dan gambaran model perbaikan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan dan penguatan modal sosial adalah sebagai berikut:

Model Pemberdayaan Masyarakat Saat ini :



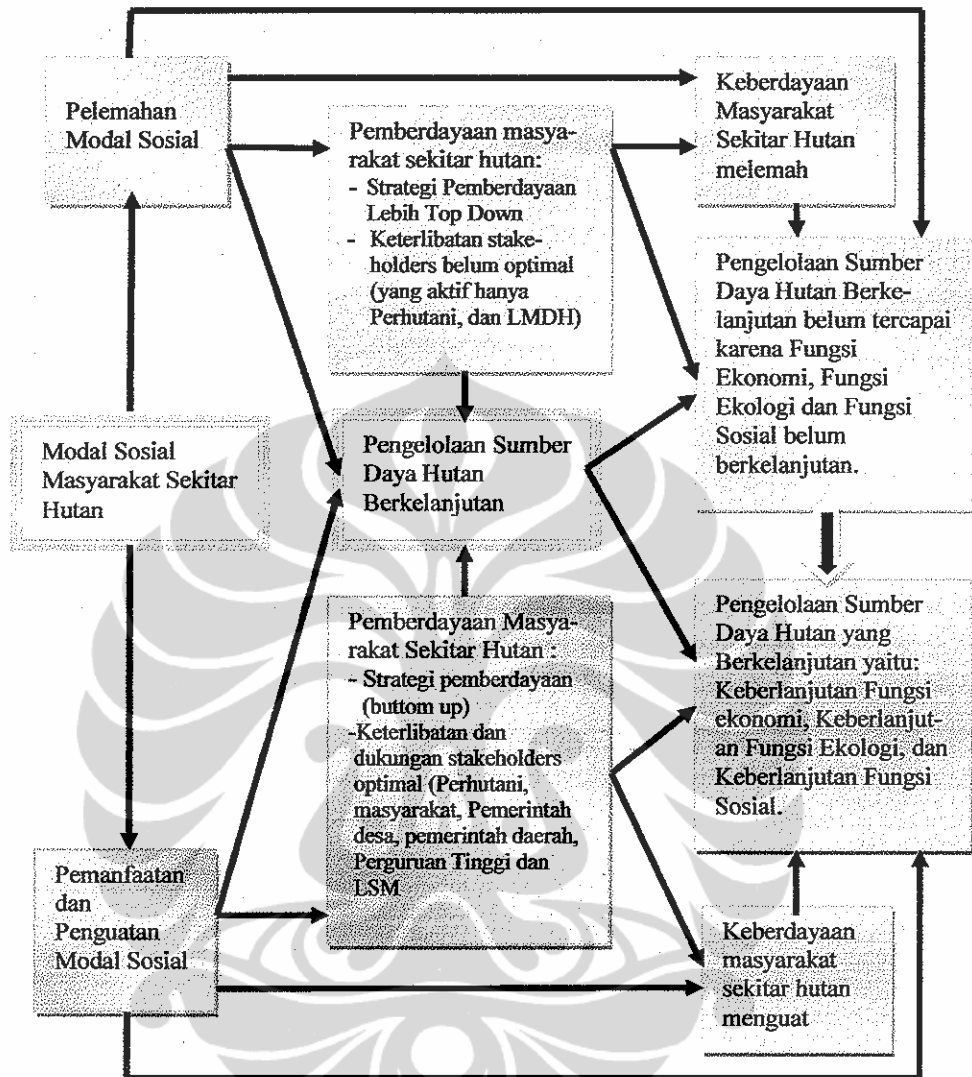
Model Pemberdayaan Masyarakat dengan Pemanfaatan dan Penguatan Modal Sosial yang diusulkan:



Keterangan: MSH = Masyarakat Sekitar Hutan  
LMDH = Lembaga Masyarakat Desa Hutan  
PSDHB = pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan

Gambar 4.17. Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan dengan Memanfaatkan Modal Sosial Masyarakat Sekitar Hutan Saat Ini dan Model Pemberdayaan masyarakat dengan Pemanfaatan dan Penguatan Modal Sosial

Jika kedua Model tersebut di atas digambarkan dalam suatu kesatuan model dengan lebih detail, maka dapat terlihat sebagai berikut:



Gambar 4.18. Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan Melalui Pemanfaatan dan Penguatan Modal Sosial (agar Modal Sosial dapat Dimanfaatkan Secara Optimal).

Untuk mempercepat terwujudnya keberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan, maka diperlukan upaya pemanfaatan modal sosial yang optimal pada masyarakat modal sosial yang telah kuat dan melakukan upaya-upaya penguatan modal sosial yang lemah. Menurut Pierre Bourdieu pada 1972, Modal sosial adalah sebuah konsep kebersamaan yang lahir dari adanya

kepekaan pemimpin yang ditindaklanjuti dengan menggagas untuk membangun kesadaran masyarakat yang memiliki saling keterkaitan sosial, sehingga terwujud rasa peduli dan tanggungjawab yang memiliki nilai jaringan sosial.

Untuk melihat proses pemanfaatan dan penguatan modal sosial melalui kerja struktur dinamis modal sosial, dan melihat hubungan modal sosial yang memberi manfaat di tingkat komunitas, maka diperlukan pembuatan model modal sosial untuk memperlihatkan kerja dan fungsi serta mekanisme modal sosial dalam memberi manfaat yang optimal. Peneliti mengembangkan gagasan Coleman (1988) yang telah memberikan pandangan dasar bahwa ada 3 (tiga) gagasan mode operasi mekanisme modal sosial dalam memberi manfaat bagi komunitas, yaitu (1) Konsep *reciprocity*, (2) Konsep saluran informasi dan (3) Konsep norma dan sanksi berhasil guna.

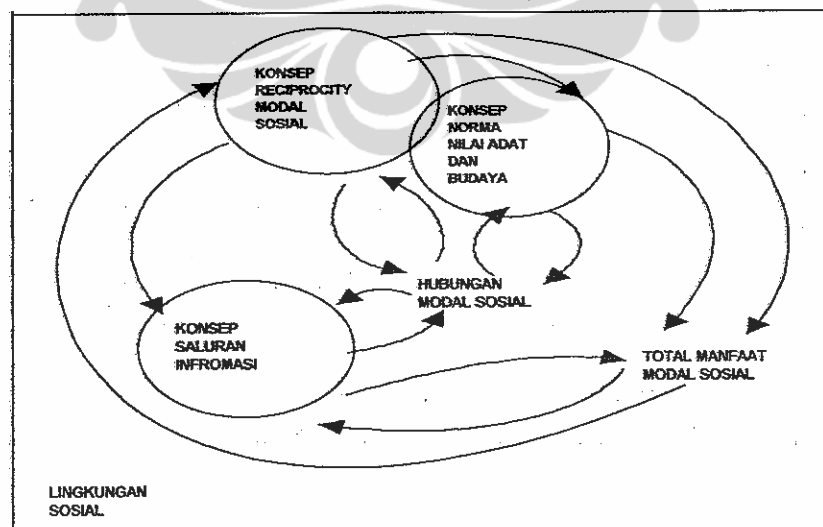
Dalam mekanisme tersebut, Coleman menggambarkan dalam konsep *reciprocity* hanya ada tiga modal sosial yaitu kepercayaan, kerjasama dan jaringan sosial yang saling timbal balik. Kemudian dalam konsep saluran informasi yang memberi manfaat peningkatan hubungan modal sosial, dan pada konsep norma dan sanksi berhasil guna memberi dampak pada kesuksesan dalam kegiatan yang berhasil dan memberi peningkatan manfaat modal sosial.

Apabila menggunakan modal sosial untuk meningkatkan dan mempengaruhi proses pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan, maka diperlukan suatu model modal sosial untuk memberikan manfaat-manfaat bagi komunitas masyarakat sekitar hutan. Pendekatan dinamika sistem akan berguna dalam menganalisis mekanisme modal sosial dalam memberikan manfaat. Apabila menstimulasi pembentukan modal sosial dan menggunakannya untuk memberi manfaat pada masyarakat, maka dilakukan dengan mengeksplorasi keberfungsian sistem modal sosial.

Manfaat Modal Sosial disebabkan oleh adanya saling hubungan antara anggota masyarakat melalui tiga mekanisme yang telah disebutkan di atas. Hubungan tersebut membantu kepercayaan yang membuat kerjasama dan kebersamaan terjadi, hubungan tersebut juga memungkinkan masyarakat untuk bertukar

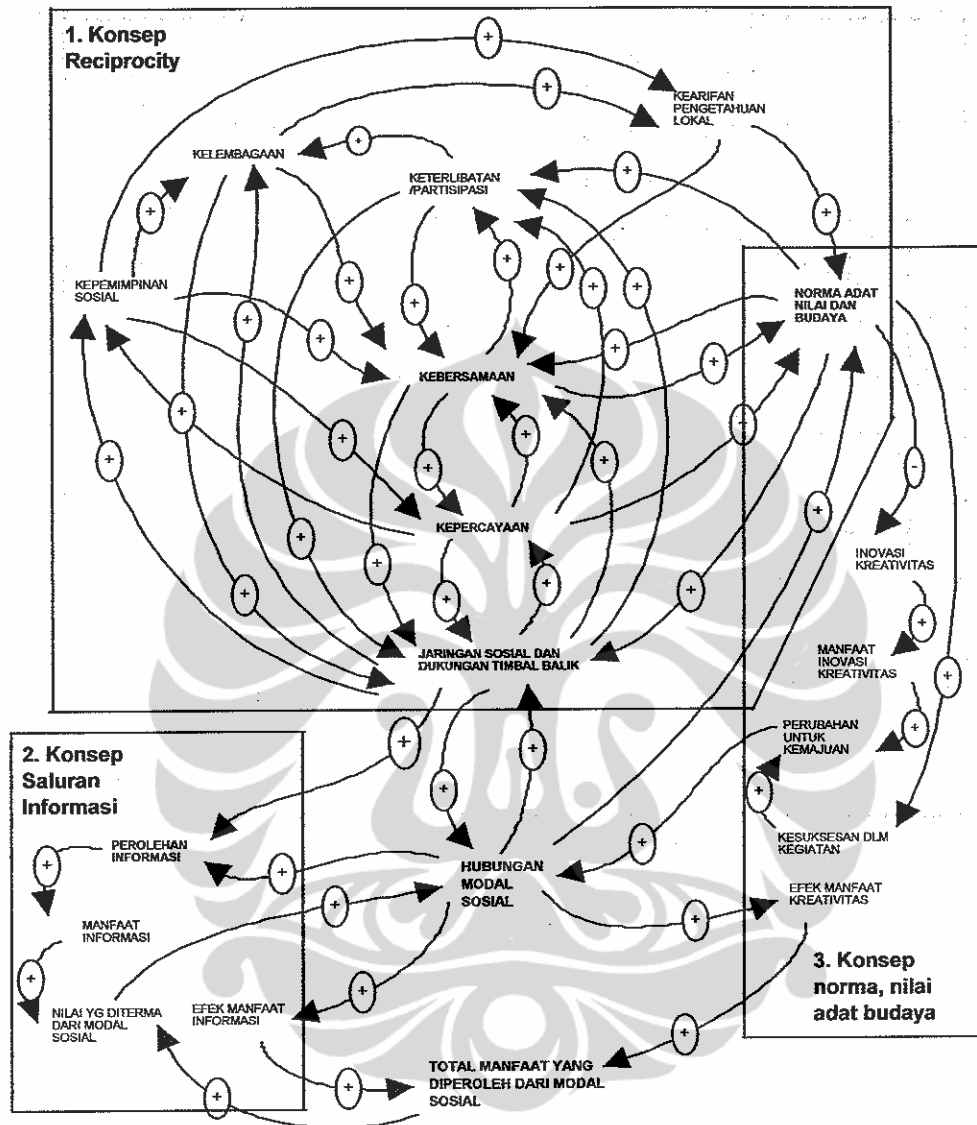
informasi yang berguna dan membangun norma dan prosedur nilai dan budaya mengatur perilaku anggota masyarakat. Tiga mode aksi ini menciptakan peluang untuk peningkatan kegiatan ekonomi dan yang lainnya dan kegiatan ini memberi manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Manfaat ini mendorong dan menghendaki masyarakat akan mempertahankan hubungan antar masyarakat, sehingga pelaksanaan proses pemberdayaan dan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan berjalan lebih mudah dan lebih cepat.

Dalam suatu model modal sosial yang lengkap akan memberi gambaran bagaimana hubungan antara unsur pembentuk modal sosial diantara masyarakat menciptakan manfaat. Manfaat akan berakumulasi dan menghilang pula dengan berjalannya waktu, sesuai dengan penggunaan modal sosial. Mekanisme modal sosial menciptakan manfaat dapat dianalisis melalui gambar-gambar berikut sesuai dengan konsep-konsep yang menunjukkan efek modal sosial dalam penciptaan manfaat. Peneliti mengembangkan 3 (tiga) mode operasi gagasan Coleman dalam pembentukan model modal sosial yang memberi manfaat bagi masyarakat sekitar hutan, (yang selanjutnya akan meningkatkan pula pemanfaatan dan penguatan modal sosial) yang berada dalam lingkungan sosial, yang peneliti gabungkan dalam satu pendekatan dinamik dalam hubungan causal loop sederhana sebagaimana Gambar 4.19 berikut:



Gambar 4.19. Model Modal Sosial yang memberi manfaat melalui 3 Konsep (dikembangkan dari gagasan Coleman 1978).

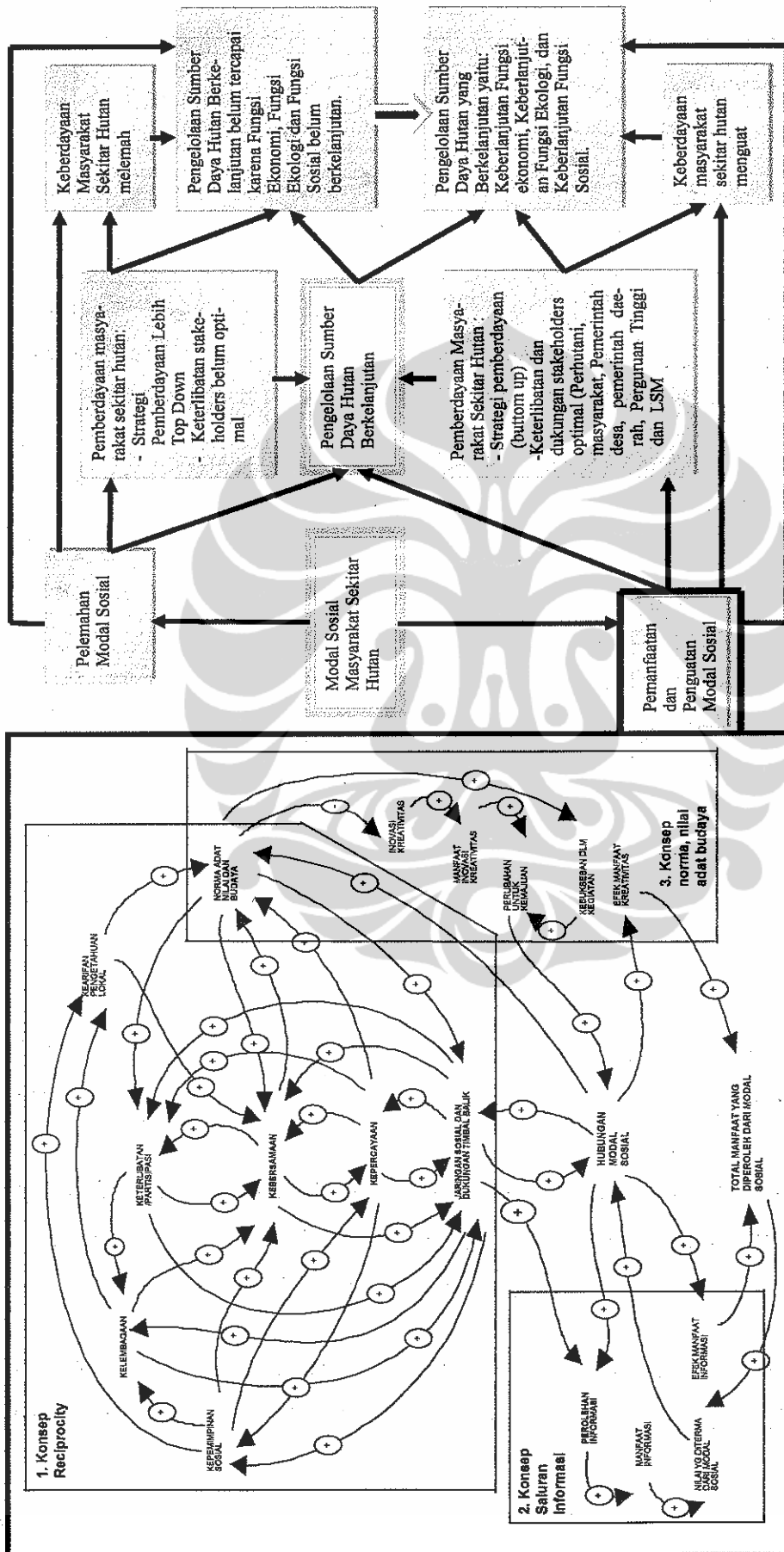
Jika secara detail mekanisme khusus model modal sosial yang memberi manfaat secara optimal, maka dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Dikembangkan dari Gagasan Coleman (1978)

Gambar 4.20. Mekanisme Model Modal Sosial Yang Memberi Manfaat Bagi masyarakat dalam Pemanfaatan dan Penguatan Modal Sosial Masyarakat.

Jika secara keseluruhan proses di atas disatukan, maka dapat digambarkan secara keseluruhan sebagaimana gambar 4.21 berikut.



Gambar 4.21. Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan Melalui Pemanfaatan dan Penguatan Modal Sosial (agar Modal Sosial dapat Dimanfaatkan Secara Optimal).

Model dinamik modal sosial tersebut di atas pada gambar 4.20, akan memberikan gagasan tentang bagaimana modal sosial dapat berfungsi memberi manfaat bagi masyarakat sekitar hutan yang selanjutnya dalam proses pemanfaatan dan penguatan modal sosial dengan melalui mekanisme 3 (tiga) konsep (sebagaimana gagasan Coleman yang peneliti kembangkan) yang kemudian memberi pengaruh pada lingkungan sosial dan langsung terkait dengan lingkungan sumber daya hutan produksi dan lingkungan buatan sebagai berikut:

1. Konsep *reciprocity*, yaitu bahwa terdapat hubungan dan dukungan timbal balik dalam setiap unsur pembentuk modal sosial, seperti ketika tingkat kepercayaan masyarakat semakin tinggi, maka akan tercipta pula kerjasama dan kebersamaan yang lebih baik dalam upaya meningkatkan keberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan, demikian pula sebaliknya ketika kerjasama dan kebersamaan semakin baik, maka tingkat kepercayaan akan tercipta semakin baik. Setiap keterkaitan hubungan unsur modal sosial akan memberi hubungan timbal balik dalam memberi manfaat dan pengaruh satu sama lain. Apabila ada peningkatan hubungan modal sosial secara sebab akibat dikaitkan dengan manfaat yang diwujudkan, maka akan ada sebuah hubungan timbal balik antara unsur pembentuk modal sosial. Hubungan timbal balik tersebut selalu diarahkan pada pencapaian sasaran keberdayaan masyarakat sekitar hutan dan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan.

*Pertama, kebersamaan:* kebersamaan memiliki keterkaitan dalam bentuk memberikan efek langsung terhadap kepercayaan (Fukuyama, 1995, 2002; Iwanto & Subeji, 2004; Cox, 1995), keterlibatan/partisipasi, jaringan sosial dan dukungan timbal balik, dan norma, adat nilai dan budaya (Putnam, 2002; Fukuyama, 2002). Kebersamaan mempunyai hubungan pengaruh secara timbal balik dengan kepercayaan, jaringan sosial dan dukungan timbal balik, keterlibatan/partisipasi dan norma, adat, nilai dan budaya.

Hubungan timbal balik antara kebersamaan dengan kepercayaan, kebersamaan dengan jaringan sosial dan dukungan timbal balik, kebersamaan dengan

keterlibatan/partisipasi dan kebersamaan dengan norma adat dan nilai budaya, adalah hubungan yang menggambarkan sebab akibat dan membentuk masing-masing *causal loop* positif. Jika salah satu dari dua modal sosial tersebut meningkat, maka modal sosial lainnya akan meningkat pula dan selanjutnya akan mempengaruhi modal-modal sosial lainnya yang langsung menerima pengaruh. Demikian pula jika salah satu modal sosial menurun, maka modal sosial yang lain juga akan menurun dan selanjutnya memberi dampak pada modal-modal sosial lainnya.

Kondisi hubungan timbal balik tersebut terlihat secara empiris di lapangan dalam kehidupan keseharian masyarakat sekitar hutan. Mereka hidup dalam keadaan yang sama, mata pencaharian yang sama, merasa senasib karena berjuang melangsungkan kehidupan dengan sumber daya hutan yang sama. Selama kebersamaan ini terus terpelihara dengan baik, maka saling percaya akan semakin baik, sehingga muncul rasa kebersamaan untuk saling bekerjasama meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, yang menyebabkan semakin meningkatnya kepercayaan, semakin kuatnya jaringan sosial dan dukungan timbal balik, terbentuknya kepemimpinan sosial yang kokoh dan semakin kuatnya norma adat dan nilai budaya sebagai dampak timbal balik dari hubungan sebab akibat modal sosial tersebut.

*Kedua*, kepercayaan memiliki efek langsung terhadap kebersamaan (Fukuyama, 1995, 2002; Iwanto & Subeji, 2004; Cox, 1995), norma adat dan nilai budaya, keterlibatan/partisipasi, jaringan sosial dan dukungan timbal balik, kelembagaan melalui jaringan sosial (Putnam, 2002; Teguh, 2008), dan kepemimpinan sosial. Kepercayaan mempunyai hubungan pengaruh timbal balik terhadap kebersamaan (Coleman, 1978; Putnam, 1993; Lesser, 2000), dan jaringan sosial dan dukungan timbal balik, dan kepemimpinan sosial. Hubungan timbal balik tersebut membentuk masing-masing *causal loop* positif, artinya jika salah satu modal sosial meningkat, maka modal sosial lainnya akan meningkat pula, demikian sebaliknya jika salah satu modal sosial menurun, maka modal sosial lainnya akan menurun pula.



Kepercayaan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi prinsip-prinsip yang melandasi kemakmuran sosial dan kemakmuran ekonomi yang dicapai oleh masyarakat. Dengan kepercayaan, masyarakat dapat bekerjasama secara lebih efektif, karena ada kesediaan untuk menempatkan kepentingan kelompok di atas kepentingan individu. Dengan kepercayaan, masyarakat dapat melakukan tindakan kolektif, meningkatkan partisipasi untuk membangun bersama mencapai tujuan bersama. Kekuatan kepercayaan akan membentuk solidaritas sosial yang tinggi dalam masyarakat sekitar hutan, sehingga akan mendorong terhadap ketaatan pada nilai-nilai norma adat dan budaya yang telah diakui dan dipercayai bersama dan menjadi pedoman berperilaku dalam masyarakat.

Pada desa lokasi observasi dan data kualitatif yang berhasil diamati menunjukkan bahwa kebersamaan dimunculkan oleh adanya kepercayaan masyarakat. Karena memang tanpa adanya kepercayaan tentu saja sangat sukar untuk terwujudnya kebersamaan termasuk pada masyarakat sekitar hutan. Kepercayaan masyarakat juga yang mudah memunculkan ketaatan masyarakat terhadap norma, adat dan nilai budaya dan hal ini mudah untuk dimengerti karena adanya ketaatan terhadap norma, adat dan nilai budaya pastilah karena dihayatinya kebersamaan oleh warga masyarakat.

Pada sisi yang lainnya kepercayaan masyarakat juga memberi efek langsung terhadap keterlibatan/partisipasi masyarakat. Hal ini secara umum mudah untuk dirasionalkan karena tanpa adanya kepercayaan masyarakat terutama terhadap tokoh masyarakat sebagai penggerak partisipasi masyarakat tentu tidak mungkin ada partisipasi masyarakat. Disamping itu dari hasil observasi juga terlihat bahwa kepercayaan masyarakat pasti mendahului munculnya jaringan sosial dan dukungan timbal balik. Tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sesama warga dibanding kepercayaan terhadap pihak lain termasuk kepada Perum Perhutani pada desa tertentu menjadi prasyarat untuk berkembangnya jaringan sosial dan munculnya dukungan dari masyarakat terhadap lembaga yang berinteraksi dengan masyarakat sekitar hutan.

Kepercayaan masyarakat memberikan efek langsung terhadap kepemimpinan sosial masyarakat sekitar hutan. Kondisi seperti ini dengan mudah dapat dilihat pada desa LMDH yang telah maju, pengurus LMDH mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakatnya merupakan perilaku kepemimpinan sosial yang efektif dan aktual bagi anggota LMDH dan masyarakat sekitar hutan. Begitu pula dengan pemerintah desa dengan tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat sekitar hutan dapat berperan efektif dan aktif dalam melaksanakan kepemimpinan sosial disamping kepemimpinan formal yang melekat kepadanya.

*Ketiga, jaringan sosial dan dukungan timbal balik* memberikan efek langsung dan hubungan timbal balik terhadap kebersamaan (Iwanto & Subejo, 2004; Putnam, 20002), kepercayaan (Putnam, 20002), keterlibatan/partisipasi (Putnam, 20002), kelembagaan (Collin, 1981) dan kepemimpinan sosial. Hubungan timbal balik tersebut membentuk masing-masing *causal loop* positif, artinya jika salah satu modal sosial meningkat, maka modal sosial lainnya akan meningkat pula, demikian sebaliknya jika salah satu modal sosial menurun, maka modal sosial lainnya akan menurun pula.

Modal sosial diwarnai oleh adanya kecenderungan saling tukar menukar kebaikan yang berbentuk dukungan timbal balik. Pada masyarakat yang di dalamnya mempunyai dukungan timbal balik yang kuat, akan melahirkan suatu masyarakat yang memiliki tingkat modal sosial yang tinggi (kuat). Hal ini juga akan terefleksikan dengan tingkat kepedulian sosial yang tinggi, saling membantu dan saling memperhatikan. Pada masyarakat yang demikian akan mampu menyelesaikan problem sosial dan lebih mudah membangun dan mencapai tujuan bersama yang diinginkan.

Hasil observasi menunjukkan bahwa berperan/tidaknya kelembagaan dalam kehidupan masyarakat sekitar hutan ditentukan oleh adanya jaringan sosial dan dukungan timbal balik dari warga masyarakat. Belum berperannya LMDH di beberapa desa, karena LMDH belum memiliki jaringan sosial yang cukup kuat dengan semua warga desa, memberikan petunjuk bahwa kelembagaan

menerima efek langsung dari jaringan sosial dan dukungan timbal balik dalam kehidupan masyarakat sekitar hutan.

Munculnya tokoh dalam kehidupan masyarakat sekitar hutan ternyata dibuktikan oleh adanya jaringan sosial yang kuat dari tokoh dimaksud, hal tersebut memberikan petunjuk bahwa kepemimpinan sosial menjadi prasyarat oleh adanya jaringan sosial yang dibentuk oleh tokoh yang memunculkan lemah atau kuatnya kepemimpinan sosial. Karena kepemimpinan sosial lebih ditentukan oleh siapa orangnya dan bukan lembaganya, maka yang lebih menentukan ketokohan adalah kuat tidaknya jaringan sosial yang dimiliki oleh tokoh tersebut. Karena itu pula tokoh masyarakat yang bersangkutan pasti mendapatkan dukungan dari warga sebab sang tokoh berperan melakukan kepemimpinan sosial terlebih dahulu yang sebelumnya telah mendukung warga masyarakat untuk berbagai aktivitas-aktivitas warga pada umumnya.

*Keempat, keterlibatan/pertisipasi* memberikan efek langsung terhadap jaringan sosial dan dukungan timbal balik, kebersamaan dan kelembagaan (Teguh, 2008). Keterlibatan/partisipasi mempunyai hubungan pengaruh timbal balik dengan modal sosial kebersamaan dan jaringan sosial dan dukungan timbal balik. Hubungan timbal balik tersebut membentuk masing-masing *causal loop* positif, artinya jika salah satu modal sosial semakin meningkat, maka modal sosial lainnya akan meningkat pula, demikian sebaliknya jika salah satu modal sosial menurun, maka modal sosial lainnya akan menurun pula.

Keterlibatan/partisipasi memberikan efek langsung terhadap jaringan sosial/dukungan timbal balik diperlihatkan oleh dukungan yang diberikan warga terhadap masalah-masalah desa pada umumnya. Keterlibatan/partisipasi yang masih minimal menjadikan dukungan terhadap masalah desa seakan-akan bukan menjadi tanggung jawab warga tetapi lebih diposisikan oleh warga sebagai masalah untuk dicarikan solusi oleh pemerintah atau organisasi desa. Keterlibatan/pertisipasi sebagai bentuk keterlibatan mental, fisik, psikis dan emosional juga berdampak langsung terhadap kelembagaan yang ada di tengah

masyarakat sekitar hutan. Lembaga yang berfungsi dengan baik karena adanya proses pelembagaan memunculkan oleh tingginya keterlibatan dan partisipasi anggotanya sehingga memperlihatkan bahwa keterlibatan partisipasi warga memang memberikan efek langsung terhadap kelembagaan yang ada pada masyarakat sekitar hutan.

Kemampuan masyarakat dalam ikut menyatukan diri dalam bentuk keterlibatan dan partisipasi akan sangat sangat besar pengaruhnya dalam menentukan kuat atau tidaknya modal sosial yang terbentuk dan terbangun. Kemampuan berpartisipasi akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap kuat tidaknya jaringan sosial yang terbentuk. Tingkat Keterlibatan/partisipasi masyarakat sekitar hutan dalam suatu pengelolaan sumber daya hutan akan sangat terkait erat dengan perolehan manfaat akses sumber daya hutan yang diperoleh dan nilai-nilai norma yang berlaku dalam masyarakat.

*Kelima, Kelembagaan:* kelembagaan memberikan efek langsung terhadap kebersamaan (Iwanto & Subejo, 2004; Grootaert, 2003) serta kearifanan pengetahuan lokal. Kelembagaan mempunyai hubungan timbal balik dengan jaringan sosial dan dukungan timbal balik. Hubungan timbal balik tersebut membentuk *causal loop* positif, artinya jika salah satu modal sosial meningkat, maka modal sosial lainnya akan meningkat pula, demikian sebaliknya jika salah satu modal sosial menurun, maka modal sosial lainnya akan menurun pula.

Dari hasil observasi dan data kualitatif yang dikumpulkan ternyata faktor kelembagaan yang kuat di beberapa desa memang membawa dampak terhadap kebersamaan warga. Di desa dengan LMDH yang telah maju ternyata pengurusnya cukup aktif dan muncul kebersamaan yang kuat terutama dalam mengelola lahan yang dikerjasamakan dengan pihak Perum Perhutani. Hal ini agaknya cukup memberi bukti bahwa kelembagaan memberikan efek langsung terhadap kebersamaan pada masyarakat sekitar hutan.

Begitu juga di desa yang masih menerapkan kearifan dan pengetahuan lokal seperti upacara turun kesawah atau upacara memanen hasil hutan, lebih

disebabkan karena adanya kelembagaan masyarakat yang cukup kuat. Sehingga pelaksanaan upacara kemasyarakatan seperti itu sekaligus cerminan dari penerapan pengetahuan dan kearifan lokal adalah dampak dari masih kuatnya kelembagaan masyarakat pada masyarakat sekitar hutan.

Kelembagaan baik formal maupun non formal menjadi lebih efektif karena adanya kepemimpinan sosial. Tokoh masyarakat yang sekaligus merangkap pimpinan lembaga kemasyarakatan berhasil melaksanakan kepemimpinan sosial berperan menjadikan organisasi yang beroperasi dalam masyarakat semakin melembaga/menunjukkan kelembagaan yang lebih berarti bagi masyarakat. Tokoh masyarakat merangkap pimpinan organisasi formal desa dan merangkap menjadi pengurus LMDH, ternyata menjadikan LMDH semakin eksis dan berkembang dalam kehidupan masyarakat sekitar hutan, menjadi petunjuk kuat bahwa kepemimpinan sosial memberikan efek langsung terhadap kelembagaan.

*Keenam, kepemimpinan sosial* memberikan efek langsung terhadap jaringan sosial/dukungan timbal balik, kelembagaan, kearifan dan pengetahuan lokal, kebersamaan dan kepercayaan masyarakat. Kepemimpinan sosial mempunyai hubungan pengaruh timbal balik dengan kepercayaan dan jaringan sosial dan dukungan timbal balik. Hubungan timbal balik tersebut membentuk masing-masing *causal loop* positif, artinya jika salah satu modal sosial meningkat, maka modal sosial lainnya akan meningkat pula, demikian sebaliknya jika salah satu modal sosial menurun, maka modal sosial lainnya akan menurun pula.

Kepemimpinan sebagaimana dirasakan warga masyarakat memang memberikan efek langsung terhadap jaringan sosial/dukungan timbal balik. Hal ini berdasarkan pernyataan bahwa yang berhasil meredakan resolusi konflik antara warga masyarakat dengan perum perhutani beberapa waktu yang lalu adalah tokoh masyarakat yang berperan selaku pimpinan untuk melaksanakan kepemimpinan sosial masyarakat sekitar hutan,

Kepemimpinan sosial memberikan efek langsung terhadap kearifan dan pengetahuan lokal setidaknya dalam penerapan kearifan dan pengetahuan lokal olah masyarakat sekitar hutan di desa tertentu. Selagi masih ada tokoh masyarakat yang diakui kepemimpinan sosialnya oleh masyarakat yang memberikan perhatian, selama itu pula penerapan kearifan lokal dan pengetahuan lokal masih akan tetap bertahan.

Kebersamaan dalam kehidupan masyarakat sekitar hutan adalah efek dari adanya kepemimpinan sosial yang kuat. Kepemimpinan sosial yang berperan efektif menjadi perekat kebersamaan antar sesama warga termasuk antara elit desa dan massa pada level desa. Kepemimpinan sosial yang umumnya dilaksanakan oleh elit desa ternyata memang memberikan efek langsung terhadap kebersamaan karena efektifnya pelaksanaan kepemimpinan sosial oleh elit desa yang bersangkutan.

Kepemimpinan sosial juga memiliki relasi langsung dengan kepercayaan masyarakat. Kepemimpinan sosial yang efektif dan berperan dengan baik dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat sebagaimana massa terhadap elit desa atau tokoh yang didengar dan diikuti oleh warga karena kepemimpinan sosialnya. Tokoh masyarakat sebagai aktor kepemimpinan sosial di desa yang semakin berperan dan mencukupi jumlahnya tentu saja membangkitkan kepercayaan masyarakat terhadap elit desa dan semua pihak yang berinteraksi dengan masyarakat sekitar hutan melalui elit desa yang bersangkutan.

**Ketujuh, norma, adat, nilai, dan budaya** memberikan efek langsung terhadap keterlibatan/partisipasi, kebersamaan (Putnam, 20002; Fukuyama, 2002; Iwanto & Subejo, 2004), jaringan sosial dan dukungan timbal balik. Norma, adat, nilai, dan budaya mempunyai hubungan timbal balik dengan kebersamaan (Coleman, 1978; Fukuyama, 2002). Hubungan timbal balik tersebut membentuk *causal loop* positif, artinya jika salah satu modal sosial semakin baik maka modal sosial lainnya akan meningkat pula, demikian sebaliknya jika salah satu modal sosial menurun, maka modal sosial lainnya akan menurun pula.

Hal ini lumrah terjadi pada masyarakat sekitar hutan karena keterlibatan/pertisipasi yang belum optimal adalah efek dari belum optimalnya ketaatan terhadap norma, adat dan nilai budaya. Keterlibatan/parisipasi masyarakat sekitar hutan untuk sebagiannya adalah partisipasi yang ditimbulkan oleh ketaatan terhadap pemicu partisipasi. Ketaatan yang tinggi terhadap subjek dan objek yang memicu munculnya partisipasi adalah ketaatan terhadap norma/nilai agama yang lebih tinggi telah diperlihatkan oleh tingginya minat dan animo untuk mengikuti acara dan upacara keagamaan seperti yang terlihat pada masyarakat sekitar hutan.

Norma, nilai, adat, dan budaya akan sangat berperan dalam mengontrol bentuk perilaku yang tumbuh dalam masyarakat. Norma nilai adat dan budaya adalah sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat. Norma ini juga telah menampung sanksi sosial yang dapat mencegah masyarakat berbuat sesuatu yang menyimpang dari kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Apabila ketaatan terhadap norma nilai adat dan budaya tetap tumbuh terpelihara dan menjadi kuat, maka akan merangsang keberlangsungan dan memperkuat modal sosial.

*Kedelapan, kearifan dan pengetahuan lokal* memberikan efek langsung terhadap kebersamaan (Sunaryo & Joshi, 2002), dan ketaatan terhadap norma adat nilai budaya. Walau tidak merata disemua desa, ternyata adanya acara adat dan upacara kemasyarakatan telah memupuk dan memberi norma, adat, nilai, dan budaya masyarakat sekitar hutan. Acara dan upacara turun ke sawah atau melaksanakan panen hasil hutan dengan memotong kambing menjadi acara dan upacara yang cukup menggembirakan karena diikuti oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. Hal ini memberikan petunjuk bahwa kearifan dan pengetahuan lokal yang masih dilakukan memiliki efek langsung terhadap kebersamaan dan ketaatan pada norma, adat nilai dan budaya pada masyarakat sekitar hutan.

Akumulasi dari efek yang diberikan antar sesama subsistem sebagai faktor pembentuk modal sosial masyarakat sekitar hutan seperti diulas terdahulu telah

memperlihatkan permodelan modal sosial masyarakat sekitar hutan. Permodelan modal sosial sebagai proses pembentukan model dari modal sosial masyarakat sekitar hutan memperlihatkan dinamika antar subsistem pembentuk modal sosial masyarakat sekitar hutan itu sendiri. Sehingga pada saatnya model sistem dinamis dari modal sosial masyarakat sekitar hutan sebagaimana digambarkan seperti pada Gambar 4.21.

Reciprocity adalah mengaitkan hubungan yang timbal balik dari unsur-unsur modal sosial dan membentuk *feedback loop* yang melibatkan kegiatan yang bermanfaat. Kegiatan yang berhasil dan memberi manfaat bagi masyarakat, tidak hanya meningkatkan peluang untuk melanjutkan kebersamaan, tetapi juga membangun kepercayaan dalam masyarakat sekitar hutan, kepercayaan yang semakin meningkat antara masyarakat akan memberi efek kesuksesan kerjasama dan kebersamaan, dan selanjutnya peningkatan dorongan kerjasama akan memberi suatu aksi kegiatan kerjasama yang berhasil dan memberi efek untuk meningkatkan kepercayaan dan efek nilai modal sosial yang diterima masyarakat, sehingga hal tersebut akan menguatkan jaringan sosial dan dukungan timbal balik karena telah merasakan manfaat kebersamaan. Jaringan ini akan membuat keterlibatan/partisipasi semakin bertambah. Dengan semakin kuatnya jaringan dan keterlibatan, maka akan memberi peluang untuk semakin kuatnya kelembagaan yang ada yang kemudian disusul dengan peningkatan ketaatan pada norma, nilai adat budaya untuk menjadi aturan dan nilai yang menjadi pedoman dalam berperilaku dan melakukan kegiatan dan hubungan sosial masyarakat sekitar hutan. Norma nilai adat dan budaya juga akan diperkuat dengan kearifan dan pengetahuan lokal yang telah terbentuk sebelumnya, apalagi yang berkaitan dengan peningkatan akses pemanfaatan sumber daya hutan. Selain itu Norma nilai dan budaya serta jaringan sosial yang terbentuk akan memberi peningkatan kekuatan kepemimpinan sosial bagi pemimpin yang telah dianggap mempunyai ketokohan sosial dan telah telah memberi bukti manfaat bagi seluruh pemanfaatan sumber daya hutan.

2. Konsep **Saluran informasi**, yaitu saluran informasi dalam suatu masyarakat akan memberi manfaat memperkuat modal sosial. Dengan saluran informasi



akan memungkinkan anggota masyarakat untuk saling berhubungan dan mempermudah mendapatkan akses manfaat lain, sehingga akan membantu masyarakat dalam kegiatan ekonomi atau yang lainnya. Saluran informasi akan menurunkan biaya transaksi (Paldam dan Svendsen 1999) atau membantu mencari sebuah pekerjaan. Peranan pertukaran informasi sangat penting ketika individu memiliki pengetahuan khusus. Saluran informasi yang terhambat karena keterbatasan pendidikan akan menurunkan manfaat informasi yang diperoleh, sehingga nilai modal sosial yang diterima akan menurun dan kemudian memberi dampak pada menurunnya kualitas modal sosial.

*Causal loop* yang terbentuk dari konsep saluran informasi membentuk *causal loop* positif, yaitu hubungan modal sosial akan memberi efek pada masyarakat untuk memperoleh informasi, setelah masyarakat memperoleh informasi, maka masyarakat akan mendapat manfaat dari perolehan informasi tersebut. Manfaat informasi tersebut akan memberikan efek pada penerimaan nilai-nilai modal sosial, yang selanjutnya memberi efek lagi pada nilai pemeliharaan dan peningkatan hubungan modal sosial yang kemudian selanjutnya masyarakat akan merasakan efek manfaat informasi yang memberi peningkatan manfaat yang diperoleh dari modal sosial

3. Konsep **norma, adat, nilai dan budaya**. Norma, adat, nilai dan budaya termasuk sanksi yang berhasil guna dalam sebuah masyarakat akan menempatkan tekanan pada masyarakat untuk berperilaku dengan cara tertentu dan diharapkan bertanggung jawab. Hal ini akan memungkinkan masyarakat secara keseluruhan untuk mendapatkan manfaat karena masyarakat akan menyesuaikan diri dengan pola perilaku yang dapat diterima secara sosial. Norma masyarakat dapat dipengaruhi secara terbuka oleh kepemimpinan sosial, individu yang kharismatik atau anggota masyarakat yang memiliki otoritas. Norma nilai dan sanksi menumbuhkan manfaat kepada masyarakat, tetapi pada situasi lain juga dapat membelenggu kreatifitas dan menghancurkan keragaman serta mengunci masyarakat ke dalam pola perilaku yang tetap dan sulit untuk dirubah.

Hubungan modal sosial akan memberi efek pada kestabilan dan terpeliharanya norma (aturan dan prosedur), adat dan nilai budaya. Kekuatan dan kestabilan norma adat dan nilai budaya akan memberi efek pada kestabilan lingkungan yang selanjutnya akan memberi keberhasilan pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan masyarakat sekitar hutan, sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat dari kestabilan tersebut, walaupun kestabilan tersebut akan menghambat adanya perubahan kebutuhan masyarakat.

Norma dan sanksi mengilustrasikan suatu peraturan dan prosedur yang mengarahkan pada kegiatan yang berhasil dan memberi manfaat bagi masyarakat akan memperkuat modal sosial. Kewajiban diantara masyarakat akan menyebabkan efek pada pembangunan dan mempertahankan peraturan dan prosedur serta nilai adat budaya yang positif memperkuat peraturan dan prosedur masyarakat yang akhirnya akan memberikan efek perkuatan modal sosial. Namun di sisi lain, aturan norma dan nilai akan membelenggu inovasi dan kreatifitas masyarakat. Inovasi dan kreatifitas akan memberi manfaat untuk perubahan kemajuan menuju suatu hubungan modal sosial yang lebih kuat. Hubungan sosial yang semakin kuat akan meningkatkan efek manfaat kreatifitas yang selanjutnya akan memberi peningkatan manfaat yang diperoleh dari modal sosial.

Ketiga konsep tersebut mengarah pada peningkatan manfaat modal sosial secara keseluruhan, sehingga hampir seluruh gambaran *causal loop* adalah membentuk *causal loop* positif. Untuk Konsep norma, adat, nilai, dan budaya tidak membentuk *causal loop*, tetapi memberi pengaruh pada peningkatan manfaat modal sosial.

Semua pemanfaatan dan penguatan modal sosial tersebut di atas adalah dalam rangka proses pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Proses pemberdayaan dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan dilakukan mulai dari awal perencanaan, pelaksanaan sampai pada evaluasi dan pemantauan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan.

Selain konsep *reciprocity* tersebut, seperti dijelaskan di atas, bahwa hubungan modal sosial yang kuat juga dipengaruhi akan adanya konsep norma, adat dan nilai budaya. Walaupun norma adat dan nilai budaya tersebut pada titik tertentu dapat mengurangi kreatifitas, tapi kreatifitas tersebut tetap memberi dorongan inovasi yang bermanfaat untuk suatu perubahan kemajuan, apalagi jika inovasi tersebut memberi suatu kegiatan yang berhasil dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar hutan. Hubungan Modal sosial juga dapat diperkuat melalui saluran informasi yang diperoleh dari suatu jaringan sosial dan dukungan timbal balik. Informasi yang diperoleh akan memberi manfaat dan dapat meningkatkan nilai modal sosial yang diterima.

Dari konsep *reciprocity*, konsep norma, adat, nilai, dan budaya serta konsep saluran informasi yang masing-masing memberi manfaat, maka secara total ketiga konsep tersebut memberi total manfaat yang dapat diperoleh dari keberfungsian modal sosial, sehingga modal sosial dapat bermanfaat secara optimal.

Selain melalui mekanisme model modal sosial tersebut di atas, maka secara keseluruhan pemanfaatan dan penguatan modal sosial masyarakat sekitar hutan adalah prioritas utama dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan, penguatan modal sosial tersebut mengharuskan adanya akumulasi sejumlah upaya yang secara simultan dan sinergis, masing-masingnya seperti dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, melakukan **revitalisasi modal sosial** masyarakat sekitar hutan secara keseluruhan. Tujuannya adalah menjadikan norma dan nilai yang telah terbentuk pada masyarakat sekitar hutan sebagai sesuatu yang tetap dipentingkan terutama oleh para pihak yang melakukan aksi bersentuhan dengan masyarakat sekitar hutan agar kondisi aktual modal sosial semakin mendekati ke kondisi potensialnya.

Kedua, melakukan **penguatan kepemimpinan sosial** pada masyarakat sekitar hutan. Penguatan kepemimpinan sosial merupakan elemen penguatan kunci karena kepemimpinan sosial ternyata merupakan faktor pembentuk modal sosial yang strategis untuk menambah kekuatan modal sosial dalam kondisi aktualnya. Pemilihan Ketua LMDH yang difasilitasi oleh Perum Perhutani hendaknya

memilih ketua LMDH dari kepemimpinan sosial yang kuat, karena kepemimpinan sosial yang sudah telah terbentuk lama dan menjadi panutan masyarakat sekitar.

Ketiga, melakukan **penumbuhan dan pemeliharaan kepercayaan masyarakat** terhadap pihak-pihak yang melakukan interaksi dengan masyarakat sekitar hutan. Penumbuhan dan pemeliharaan kepercayaan masyarakat ini terutama harus dilakukan oleh pihak Perum Perhutani dan Pemerintah sebagai mitra masyarakat sekitar hutan dalam menjalani kehidupan sehari-hari termasuk dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan.

Keempat, rancangan tahapan pelaksanaan pemberdayaan sebagai **suatu strategi pemberdayaan yang dilakukan Perum Perhutani harus sejalan dengan kondisi potensial modal sosial masyarakat sekitar hutan**. Strategi tersebut benar-benar memanfaatkan potensi modal sosial yang kuat yang ada dalam masyarakat, sehingga pemanfaatan modal sosial tersebut merupakan pengungkit (leverage) keberdayaan masyarakat. Strategi pemberdayaan tersebut juga dapat menguatkan modal sosial masyarakat, sehingga keduanya mempunyai hubungan timbal balik yang saling menguatkan.

Kelima, **memperbesar aksi para stakeholders pemberdayaan** masyarakat sekitar hutan yang mencerminkan modal sosial masyarakatnya. Semua stakeholders pemberdayaan masyarakat sekitar hutan termasuk lembaga masyarakat yang direpresentasikan oleh pemuka masyarakat melakukan aksi pemberdayaan yang tetap dalam koridor modal sosial masyarakat sekitar hutan..

Keenam, **mendayagunakan keberdayaan masyarakat** sekitar hutan atas landasan modal sosial yang positif kearah keberdayaan masyarakat pada level organisasi dan level sistem masyarakat sekitar hutan. Pemanfaatan keberdayaan masyarakat untuk tujuan yang individual harusnya diminimalisir sehingga keberdayaan masyarakat yang dilandasi modal sosial yang kuat dan positif menghindarkan pemanfaatan keberdayaan masyarakat untuk tujuan yang tidak selaras dengan kondisi potensial modal sosial masyarakat sekitar hutan.

## BAB 5

### KESIMPULAN

#### 5.1. Kesimpulan

Pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan adalah suatu pengelolaan sumber daya hutan yang memenuhi keberlanjutan lingkungan, keberlanjutan sosial dan keberlanjutan ekonomi. Untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan tersebut, maka keberlanjutan fungsi sosial hutan sangat berpengaruh dan harus menjadi perhatian karena di dalamnya ada lingkungan sosial dimana manusia di dalamnya berada dengan segala nilai-nilai sosialnya. Nilai-nilai sosial yang terlahir dari hasil interaksi dan adaptasi masyarakat dengan sumber daya hutan telah melahirkan pola hubungan bersikap, berperilaku, berinteraksi dan berinterelasi yang kemudian melahirkan nilai-nilai sosial yang disebut modal sosial yang sangat berpengaruh dan merupakan prasyarat untuk keberhasilan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan.

Rancangan model pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan dengan memanfaatkan modal sosial secara optimal dibangun dari lima variabel, yaitu: modal sosial, strategi pemberdayaan, keterlibatan dan dukungan stakeholders, keberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Masing-masing variabel dijelaskan oleh indikatornya masing-masing: modal sosial dijelaskan oleh indikator unsur pembentuk modal sosial, yaitu kebersamaan, kepercayaan, jaringan sosial dan dukungan timbal balik, keterlibatan/partisipasi, kelembagaan, kepemimpinan sosial, norma, nilai, adat dan budaya serta kearifan dan pengetahuan lokal. Proses pemberdayaan dijelaskan oleh strategi pemberdayaan dan keterlibatan dan dukungan *stakeholders* pemberdayaan, sedang pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan dijelaskan oleh indikator keberlanjutan fungsi produksi hutan, keberlanjutan fungsi ekologi/lingkungan hutan dan keberlanjutan fungsi ekonomi hutan.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil uji statistik *Structural Equation Modelling* (SEM) terhadap model yang dibangun dari teori dan konsep menyatakan bahwa rumusan hipotetik konsep model pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan dengan memanfaatkan modal sosial masyarakat adalah model yang menggambarkan adanya hubungan pengaruh langsung dan tidak langsung yang signifikan dari modal sosial, pada (1) strategi pemberdayaan masyarakat sekitar hutan (2) keterlibatan dan dukungan *stakeholders* pemberdayaan masyarakat sekitar hutan serta (3) keberdayaan masyarakat sekitar hutan dan (4) pengelolaan sumberdaya hutan berkelanjutan. Model tersebut sesuai dan dapat diterima karena hasil ujian kesesuaian model menghasilkan nilai GFI 0,95, artinya model tersebut 95% diterima dan sesuai dengan teori, sehingga dapat berlaku secara general. Model ini menjadi *novelty* peneliti.
2. Berdasarkan hasil uji statistik dan hasil analisis pengaruh kekuatan modal sosial pada masyarakat LMDH yang maju dan LMDH belum maju, maka model pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan dengan memanfaatkan modal sosial adalah model yang memberi gambaran bahwa kekuatan modal sosial sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan, karena hasil SEM memperlihatkan bahwa nilai-nilai *factor loading* dan CR (*Critical Ratio*) LMDH maju lebih besar daripada LMDH belum maju. Semakin kuat modal sosial suatu masyarakat, maka akan semakin kuat pengaruhnya terhadap kemudahan pelaksanaan proses pemberdayaan dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan, demikian pula sebaliknya, semakin lemah modal sosial suatu masyarakat, maka akan menyebabkan sulitnya pelaksanaan proses pemberdayaan dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan.
3. Modal sosial masyarakat menjadi sebab yang pertama terhadap semua hal yang bersangkutan dengan masyarakat sekitar hutan termasuk keberdayaan masyarakat serta pengelolaan sumberdaya hutan berkelanjutan, maka untuk menghasilkan keberdayaan masyarakat serta terwujudnya pengelolaan

sumber daya hutan berkelanjutan harus memanfaatkan modal sosial masyarakat sekitar hutan secara optimal. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan tidak akan berhasil tanpa pemanfaatan dan penguatan potensi modal sosial secara optimal. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan penguatan modal sosial mengharuskan adanya proses pemanfaatan dan penguatan modal sosial masyarakat sekitar hutan. Pemanfaatan dan Penguatan modal sosial tersebut dilalui dengan model mekanisme (1) konsep reciprocity, yaitu peningkatan hubungan timbal balik semua unsur pembentuk modal sosial; (2) melalui mekanisme saluran informasi serta; (3) melalui konsep norma nilai budaya dan sanksi yang berhasil guna. Model pemanfaatan dan penguatan modal sosial dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan adalah *novelty* peneliti.

## 5.2. Saran

1. Hasil uji statistik memberikan kesimpulan bahwa model pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dapat diterima dan sesuai dengan teori, sehingga dapat berlaku secara universal. Sehingga disarankan bagi para perencana dan pengambil kebijakan dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan untuk melihat setiap variabel-variabel yang menjadi fokus perhatian dalam model pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan.
2. Untuk percepatan proses menghasilkan keberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan, maka diperlukan suatu proses yang seiring dengan pemanfaatan dan penguatan modal sosial masyarakat sekitar hutan. Penguatan modal sosial pada setiap masyarakat sekitar hutan dimulai dengan unsur pembentuk modal sosial yang paling lemah yang mempunyai hubungan dan sangat berpengaruh terhadap keberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Sedangkan masyarakat yang mempunyai unsur pembentuk modal sosial yang telah kuat dan dominan, dimanfaatkan secara optimal. Pemanfaatan modal sosial berarti dengan sendirinya berarti juga penguatan modal sosial.

3. Hasil penelitian memberi rekomendasi untuk menindak lanjuti pengkajian terhadap variabel-variabel pembentuk modal sosial yang lebih spesifik dan menonjol dari setiap masyarakat sekitar hutan yang lebih dominan berpengaruh terhadap keberdayaan dan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Variabel-variabel bahasan hendaknya menyeluruh untuk semua modal sosial yang berkaitan langsung dengan faktor-faktor lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan ekonomi.
4. Hasil penelitian ini juga memberi rekomendasi pada tataran praktis kepada:
  - a. Pemerintah/Perum Perhutani sebagai pembuat kebijakan bahwa dalam rangka pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan agar segera mengambil langkah-langkah perbaikan proses pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, dan memberi perhatian terhadap yang mendalam terhadap potensi-potensi tatanan sosial budaya (modal sosial) yang telah dimiliki oleh masyarakat sekitar hutan, dan melibatkan masyarakat sekitar hutan dalam setiap tahap proses pengelolaan sumber daya hutan;
  - b. Para Perguruan Tinggi dan Pemerhati Lingkungan/Kehutanan hendaknya dapat terlibat lebih intensif dalam upaya mengembangkan keberdayaan masyarakat dengan melihat potensi-potensi tatanan sosial budaya atau potensi modal sosial yang telah dimiliki masyarakat sekitar hutan; dan
  - c. Masyarakat Sekitar Hutan itu sendiri agar tetap berupaya untuk mempunyai rasa kemasyarakatan ikut terlibat dalam setiap pengembangan keberdayaannya sendiri dan terlibat dalam setiap tahap pengelolaan sumber daya hutan sebagai upaya untuk melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap lingkungannya sebagai sumber nafkah keberlangsungan hidupnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Sufian Abu Bakar dan Anizah Md Ali. 2004. "Kepentingan Modal Sosial dalam Pertumbuhan Ekonomi". Fakultas Ekonomi Universitas Utara Malaysia.
- Adams and Someshwar. 1996. *Social Capital and Development: Implications for policy and Program*. Paper. Tidak diterbitkan.
- Adiprasetyo. 2006. "Pengelolaan Hutan System Masyarakat". <http://adhi.prasetyo.blog.com/2006/04/pengelolaan-hutan-sistem-masyarakat.html>.
- A Hamudy Moh. Ilham. "Pengentasan Rakyat Miskin dan Pembangunan Manusia di Jawa Bara". 28-04-2008.
- Amien, A. Mappadjantji. 2005 . *Kemandirian Lokal*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- APHI. 2005."Konsep APHI tentang Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan". Jakarta.
- Arief A, 2001. *Hutan dan Kehutanan*, Kanisius, 2001
- Arief Yuwono, 2008. *Kearifan Lingkungan Budaya Indonesia*. Pousat Pengelolaan Lingkungan Hidup, Regional Jawa, 2008.
- Australian Government. 2005. *Focus on Region No. 4 : Social Capital*. Bureau of Reansport and Regional Economics. November 2005
- Badaruddin. 2003. "Modal Sosial dan Reduksi Kemiskinan Nelayan di Provinsi Sumatera Utara". Penelitian Hibah Bersaing Perguruan Tinggi. Dikti.
- Badaruddin, 2008. "Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Masyarakat Melalui Pemanfaatan Potensi Modal Sosial, Alternatif Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Indonesia". Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Sosiologi Perkotaan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Kampus USU Medan 12 April 2008.
- \_\_\_\_\_. 2006. "Modal Sosial dan Pengembangan Model Transmisi Modal Sosial Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (Studi Pada Tiga Komunitas Petani Karet di Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Sumatera Barat)". Penelitian Hibah Bersaing Perguruan Tinggi. Dikti. Tidak diterbitkan.
- Balai BRLKT. 2004. Laporan kegiatan BRLKT Wilayah IV.

- Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai BPDAS Citarum. "Kondisi Lahan Kritis". <http://bpdasctw.info>, tanggal 11 Januari 2007.
- Bambang Hidayana dan Emilians Elip. 2003. "Belajar dari Pengalaman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia". Makalah Paper untuk pertemuan Sarasehan masyarakat Adat di Lombok, 19-25 September 2003.
- Bambang Ismawan. 2000. "Pemberdayaan Masyarakat Miskin". Penerbit Puspa Swara. Jakarta.
- Barber, Charles Victor., Johnson, Nels C., & Hafild, Emmy. 1997. "Menyelamatkan Sisa Hutan di Indonesia dan Amerika Serika". Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Bourdie Pierre. 1986 *The Forms of Social Capital dalam John G. Rihardson. 1986: Handbook of Theory and Reserch for the Sociology of Education*. New York: Greenwood Press.
- Brown, Thomas F. 2004. *Theoretical Perspectives on Social Capital*. <http://hal.lamar.edu/~browntf/soccap>.
- BPS. 2008. Data Base IPM Provinsi Jawa Barat.
- Budiman, 2003. "Pemberdayaan: Kajian Teoritis". Lembaga Penelitian Universitas Gunadarma. Depok
- Budiono Pitojo, 2006. "Karakteristik Petani Tepi Hutan dan Kompetensinya Dalam Melestarikan Hutan Lindung di 12 Desa Di Provinsi Lampung". Disertasi Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan. Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Cernia, Michael M. 1995. *Putting People First: Sociological Variables in Rural Development*. Oxford University Press, Washington DC.
- Citra Amongraga. 2008. "Mengenal Program PHBM". Jakarta
- Chambers, Robert. 1995. *Poverty and Livelihood: Whose Reality Counts? Uner Kirdar dan Leonard Silkk (eds.), People: From Improverishment to Empowerment*. New York University Press. Dale, Ann. 2001. *Social Capital and Sustainable Development*. *Journal of Interdisciplinary Studies*, Vol. 17.
- Claridge, T. 2004. *Social Capital and Natral Resource Management*. Thesis University of Quesland, Brisbane, Australia. *Journal Social Capital Research*.

- Cohen and Prusak. 2001. *In Good Company: How Social Capital makes Organization Work*. London Harvard Busienez Press.
- Coleman, James.S, 1988, *Social Capital in the Creation of Human Capital*, The American Journal of Sociology, Vol. 94, Supplement: Organization and Institutio; Sociological and Economic Approach to the Analysis of Social Structure, JSTOR.
- Colleta, Nat J dan Michelle LC, 2000. *Violent Conflict and The Trasnformation of Social Capital*. Washington DC. World Bank.
- Cooperrider D.L & Whitney D. 2006. *A Positive Revoplution in Change: Appreciative Inquiry* (Vol. 1, pp. 2-3)
- Cox. E. 1995. *Background Material and Boyer Lecture*.  
<http://www.leta.edu.au/coxp.htm>
- Dadang Solihin. 2004. "Teknik Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kota". Makalah pada Seminar Peningkatan Wawasan Aparatur Kotamady Jakarta Utara, 27 Mei 2004. Jakarta.
- Dalle Daniel Sulekale. 2008. "Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonimi Daerah". Makalah: Yayasan Kurnia Bekasi.  
<http://emperordeva.wordpress.com>
- Darsono Wisadirana. 2004. "Penguatan Sosiokultur Sebagai Modal Sosial Untuk mendukung Pembangunan Peternakan Berkelanjutan".
- Darundono. 2007. "Peran Modal Sosial Dalam Proyek Perbaikan Kampung". Disertasi. Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Lingkungan. Universitas Indoensia. Jakarta
- Darusman D. 2000. "Bila Hutan Ingin Selamat. Mari Rubah Sikap Kita". Majalah Surili Edisi 18/2000 Dinas Kehutanan Jawa Barat.
- Darusman & Bahruni. 1999. *Training Course on Forest Health Monitoring For South East Asian Scintist. Socio Economic and Cultural Aspect*. Seameo Biotrop. Bogor.
- Dasgupta, P. 1997. *Social Capital and Economic Performance*. Washington DC. The World Bank.
- Deni Ruhyat. 2005. "Gerakan Kepedulian Publik dalam Penataan Ruang Untuk Menunjang Pembangunan Daerah". Makalah disampaikan dalam acara TOT Kelompok Peduli Tata Ruang Jabodetabek, Cisarua Bogor, 6 – 9 Desember.

- Departemen Kehutanan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Departemen Kehutanan dengan Departemen for International Development (DFID). 2005. "Strategi Nasional Multistakeholders Forestr Programme", Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997. "Kamus Besar Bahasa Indonesia". Balai Pustaka. Jakarta
- Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Direktorat Penataan Ruang Wilayah Tengah. 2003. "Buku Profil Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Tahun 2003".
- Departemen Sosial, 2004. "Model Pemberdayaan Keluarga Dalam Mencegah Tindak Tuna susila remaja di Perkotaan". Jakarta.
- Departemen Kehutanan. 2005. "Pembangunan Kehutanan".
- Djainal Abidin Simanjutak. 2008. *Modal Sosial Penting bagi Pembinaan UKM*. Disertasi Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Djamaluddin Ancok. 2003. "Modal Sosial dan Kualitas Masyarakat". Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada. 3 Mei 2003. Yogyakarta.
- Dubois, Brenda dan Karla Krogsrud Miley. 1992. *Social Work: An Empowering Profession*, Boston: Allyn and Bacon
- Dunham, Athur. December 1994. *Outlook for Community Development Review*. United Nation.
- Edi Suharto. 2006. "Modal Sosial dan Kebijakan Publik".
- Elvida Y.S. dan Sukardi DS, 2002, Reformasi Kebijakan Otda Bidang Kehutanan, Buletin Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Vol.3, No.1, 2002
- Emin Zeki dan Ahmed Yolasigma. 2003. "Pengelolaan Ekosistem Hutan".
- Eriyatno, 2003. " Ilmu Sistem, Meningkatkan Mutu dan Efektifitas Manajemen". IPB Press. Bogor.
- Fatchamps, Marcel dan Bart Minten. 1999. *Social Capital and The Firm: Evidence from Agriculture Trade*.  
[http://www.appropriate-economic.org/materials/social\\_capital\\_and\\_the\\_firm.pdf](http://www.appropriate-economic.org/materials/social_capital_and_the_firm.pdf). 4 Desember 2007

- Fauzi, A dan Anna, S. 2005. "Permodelan Sumber Daya Perikanan dan Lautan untuk Analisis Kebijakan". Gramedia Pustaka Utama.
- Faizal. Fz. 2010. Kepemimpinan Sosial. <http://faizal.blog.iainlampung.ac.id/?p=8>. Tanggal 30-6.21010.
- Fetterman. 2007. *Empowerment Evaluation: Principle in Practice*. Stanford University.
- Fetterman David. 2002. *Stanford University. Empowerment Evaluation: Building Communities of Practice and a Culture of Learning*. American Journal of Community Psychology, Vol. 1, February 2002.
- Fetterman and Thereza. 2004. *Empowerment Evaluation in Brazil" Building Capacity and Facilitating Self-Determination*. Journal Vol. 12 No. 45 Rio de Janeiro Oct/Dec. 2004.
- Forest Wacth Indonesia. 2009. "Perjalanan Panjang Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di Indonesia".
- Friedman, John. 1992. *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Blackwell Publisher. Cambridge, USA.
- Fujikake Yoko. 2008. *Qualitative Evaluation: Evaluation People's Empowerment*. Japanese Journal of Evaluation Studies Vo. 8. No. 2, pp25-37. Tokyo Kasei-Gakun University.
- Fukuyama Francis. 1999. "Social Capital and Civil Society". The Institut of Public George Mason University. <http://www.imf.org/external/pubs/ft/seminar/1999/reform/fukuyama.htm>
- Fukuyama, Francis. 1995. *Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity*. New York: The Free Press.
- Fukuyama. Francis. 2002. *Social Capital and Development. The Coming Agenda SAIS Review*. Vol 22 No. 1
- Grootaert, Christian. 1998. *Social Capital: The Missing Link? Social Capital Initiative*. Working Paper. No. 3. World Bank.
- Grootaert, C and Baster, 2002. *Understanding and Measuring Social Capital: A Multidisciplinary Tool for Practitioners*. The Worl Bank. Washington, D.C.
- Grootaert, C and Narayan, Deepa. 2003. *Measuring Social Capital. An Integrated Questionare*. World Bank. Washington DC.
- Guidelines for Sustainable Management of Natural Tropical Forest. IFTO Policy Development Series 1. Japan, International Tropical Timber Organization.
- Hair, Jr., et al. 2006. *Multivariate Data Analysis*. 6<sup>th</sup> ed. Upper Saddle River , NJ : Prentice Hall

- Hanifan. 1916. *The Rural School Community Centre. Annals of the American Academy of Political and Social Science* 67: 130-138
- Herry Darwanto. 2003. "Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Berbasis Masyarakat Terpencil". *Bulletin Kawasan Direktorat PKKTR Bappenas*. Edisi 8 Tahun 2003. Jakarta.
- Hobbs, Graham. 2000. *What is Social Capital?*. *Journal of Theoretical Politics*, Vol. 6.
- Hikmat, Harry. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Penerbit; Humaniora Utama, Bandung. 2004
- Hutomo Mardi Yatmo. 2000. "Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi". Makalah disampaikan pada seminar sehari Bappenas tanggal 6 Maret 2000 di Jakarta.
- Hyakumura, Kimiho; Inoue, Makato. 2006. *The Significance of Social Capital in Local Forest Management in Laos. Overcoming Latent Conflict between Local People and Local Forestry Officials*. *The International Journal of Sustainable Development and World Ekologi*, Volume 13, Nomor 1 Februari 2006, hal 16-24 (). Sapiens Publishing. <http://www.ingenta.com>
- Ibrahim, Linda D. 2006. "Memanfaatkan Modal Sosial Komunitas Lokal Dalam Program Kepedulian Korporasi". Dalam *Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani GALANG*. Vol. 1. No. 2.
- Ife, J., 1995. *Community Development: Creating Community-Vision, Analysis and Practice*. Longman. Australia.
- Ihsan. 2007. "Analisis Interaksi Masyarakat Desa dengan SEkitar Hutan di Desa Simnara, Kecamatan Cisolak Sukabumi. Penelitian".
- Iwanto dan Subejo. 2004. *Social Capital and Sustainable Rural Development Characteristic and Functions of Labor Institutions in Rural Java. Paper is presented in the Workshop JSPS-DGHE Core University Program in Applied Bioscience*. Pajajaran University Bandung 6-7<sup>th</sup> Janusry 2004.
- ITTO, International Tropical Timber Organization, 1992. *ITTO Guidelines for Sustainable Management of Natural Tropical Forest*. ITTO Policy Development Series 1. Japan, International Tropical Timber Organization.
- Johan Iskandar, 2008. "Menumbuhkan Pemberdayaan Masyarakat Lokal dalam Melestarikan Hutan di Indonesia".

- Johnson, Gerry., & Scholes, Kevan 2002. *Exploring Corporate Strategy: Sixth Edition*. Pearson Education. Italy.
- Jhonson N & Cabarle B, 1993. *Surviving The Cut: Natural Forest Management in The Humid Tropic*. Washington DC. World Resource Institute.
- Kartasasmita Ginanjar. 1996. *Power dan Empowerment: Sebuah Telaah Mengenai Konsep Pemberdayaan Masyarakat. Pidato Kebudayaan pada Peringatan Hari Jadi ke-28 Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki*, Jakarta, 19 November 1996.
- Kartasasmita Ginanjar. 1997. "Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat". *Makalah disampaikan pada Sarasehan DPD Golkar Tk. I Jawa Timur*. Surabaya, 14 Maret 1997.
- Keele, Luke. 2005. "Macro Measures and Mechanics of Socail Capital". *Political Analysis*. Vol 13:139-156.
- Kellomaki, Seppo, 2003. *Forest Resources and Sustainable Management*. New York: TAPPI Press.
- Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Sukabumi. 2008. "Sekilas KPH Sukabumi".
- Kimmins, JP, 2003. *Forest Ecosystem Management. A Paper submitted to the XII World Forestry Congress, 2003*. Canada
- Koentjaraningrat, 1964. "Masyarakat Desa Masa Kini". Balai Penerbitan, Fakultas Ekonomi UI, Jakarta
- Krishna, A Uphoff. 1999. *Mapping and Measuring Social Capital: A Conceptual and Empirical Study of Collective Action for Conserving and Developing Watersheds in Rajashtan, India*. Social Capital Initiative Working Paper. No. 13. World Bank.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Understanding Social Capital: Learning from The Analysis and Experience of Participation: A Multifaceted Perspective*. Daasgupta, P. Serageldin I (eds). World Bank.
- Kilpatrick, Sue. 2002 . *Learning and Building Social Capital in a Community of Family Farm Businesses*. *Journal of Vocational Education and Training*, Vol. 50.
- Kilpatrick, Sue., Field, John., & Falk, Ian. 2001 . *Social Capital: An Analytical Tool for Exploring Lifelong Learning and Community Development*. *Journal of Vocational Education Research*, Vol. 9.
- Lembaga Ekolabel Indonesia. 1999. "LEI-V/5000-1/1, *LEI Guideline 5000-1: Sustainable Natural Production Forest Management System*".

- Lesser, E. 2000. *Knowledge and Social Capital. Foundation and Application*, Boston: Butterwoth-Heinemenn.
- Levine. N.D. (ed), 1975. "*Human Ecology*" Duxbury Press, Mass. USA
- Lie, Antonius. Anton. "Kapital Sosial dalam Organisasai Bisnis: Studi Kasus Asuransi Kendaraan Bermotor PT. Asia Krimere di Jakarta. Disertasi Program Pascasarjana Sosiologi. Universitas Indonesia
- Lubis, Zulkifli. 2002. "Resistensi, Persistensi, dan Model Transmisi Modal Sosial Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Milik Bersama: Kajian Antropologis Terhadap Pengelolaan Lubuk Larangan di Sumatera Utar". Proyek RUKK-I. Menristek. Laporan Penelitian.
- Lucky Zamzami. 2005. "Konsepsi dan Nilai Budaya Lokal Terhadap Pelestarian Hutan". [Http://Izamzami.Multiply.com/review/item/](http://Izamzami.Multiply.com/review/item/)
- Mariana. 2000. Pengelolaan sumber daya Hutan berkelanjutan?
- Marten, Gerald G, 2001, *Human Ecology, Basic Concept for Sustainable Development*, London
- Mefi Hermawati dan Hesti Rinandari. 2003. Penguatan dan Pengembangan Modal Sosial Masyarakat Adat. Modul Pemberdayaan Masyarakat Adat. IRE Yogyakarta.
- Mehra, Deepshikha. 2006. *Social Capital and its Performance in Forest Conservation in Traditional and Non-traditional Communities*. Journal of Economic Perspective, Vol. 14.
- Moh. Ihsan. 1999. Analisis Interaksi Masyarakat Desa dengan hutan: Studi kasus di Desa Sirnarasa Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Thesis S2 Development Studies.
- Mubyarto, et al. 1992. "Desa dan Perhutanan Sosial, Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan (P3PK)", Yogyakarta:UGM
- Muhammadi dkk. 2001.
- Mulyadi Kamad dan David Ardhian. 2008. "enanggulangan Kemiskinan Berbasis Perhutanan Sosial". [www.koridor-institut.org](http://www.koridor-institut.org)
- Mustofa Agung Sardjono. 2004. "Relevansi Prinsip Dalam Sertifikasi Guna Mengoptimalkan Kesenambungan Sumberdaya Hutan dan Usaha Kehutanan". Dipresentasikan pada Sarasehan "Sertifikasi di Simpang Jalan: Politik Perdagangan, Kelestraian Sumberdaya Alam dan Pemberantasan Kemiskinan" dan Kongres "Transformasi Kelembagaan LEI Menjadi Organisasi Berbasis Konstituen". Jakarta, 19-22 Oktober 2004.



- Nababan, Abdon. 2003. "Pengelolaan Sumber daya alam Berbasis Masyarakat Adat" (Tantangan dan Peluang). Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, IPB, Bogor. 2003
- Nana Sudiana. 2007. "Manuju Pemberdayaan Masyarakat. Membumikan Harapan Menuju Masa Depan". <http://nsudiana.wordpress.com/2007/12/22/menuju-pemberdayaan-masyarakat>.
- Nanang Sutisna. "70,000 hektar hutan di Jawa Barat Banten kriti"s. Tempointeraktif. Rabu 11 Juli 2007.
- Napitu, Ja Posman. 2007. "Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan dalam Pengelolaan Hutan Lestari di Wilayah Borneo". Terjemahan dari Empowering Forest Dwellers and Managing Forest More Sustainability in The Landscape of Borneo oleh Campbell. Program Studi Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Program Pascasarjana, Universitas Gajah Mada.
- Narayan, Deepa. 1995. "The Contribution of People's Participation: Evidence from 121 Rural Water Supply Project." ESD Occasional Paper Series 1, World Bank, Washington, DC.
- Narayan, Deepa. 1999. *Bonds and Bridges: Social Capital and Poverty. Policy Research Working Paper 2167. Poverty Division, Poverty Reduction and Economic Management Network.* Washington, D.C.: World Bank
- Narayan, Deepa dan Pritchett, May. 1997. *Cents and Sociability: Household Income and Social Capital in Rural Tanzania.* World Bank Research Working Paper No 1796. Washington DC: World Bank  
<<http://www.worldbank.org/html/dec/Publications/Workpapers/WPS1700series/wps1796/wps1796.pdf>> Diakses tanggal 5 April 2007.
- Narayan, Deepa. 2002. *Sustainability Science.* <http://www.conseco.org/vol.6/Resp3>.
- Neela Mukherjee. 2002. *Measuring Social Capital: Forest Protection Committee in West Bengal.* Economic and Political Weekly.
- Nyoman Nurjaya. 2008. "Kearifan Lokal dan Pengelolaan Sumber Daya Alam".
- Nyoman Nurjaya. 2001. "Mergersari Studi Kasus Dalam Pola Hubungan Kerja Penduduk Setempat Dalam Pengusahaan Hutan". Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Jakarta.
- Nyoman Nurjaya, 2007. "Kearifan Lokal dan Pengelolaan Sumber Daya Alam". Filed under Jurnal 40/XIII/2007

- OECD (Organization For Economic Co-operation and Development). 2001. *The Well-being of Nation: The Role Of Human and Social Capital*. Paris: Centre for Educational Reserach and Innovation.
- Ohama, Yutaka. 2001. *Conceptual Framework of Participatory Local Social Development*. Diselenggarakan oleh JICA, Nagoya.
- Ostrom, Elinor. 1993. *Crafting Institution, Self-Governing Irrigation Systems*. San Fancisco: ICS Press.
- Overview Report. 2002. *Social Capital, Local Capacity, and Government: Findings from the Second Indonesian Local Level Institutions Study*. Journal of Economics.
- Ozmond Roshan D'Souza. 20005. *Promoting Forest Conservation Through Social Capital: A case Study of Hubbanahalli in Shimoga District in Karnataka*.
- Palmira Permata Bachtiar, Agus Ediawan, Sinawaty, Gill Shepherd, Adrian Wells, AKP-FK. 2006. "Analisis Kemiskinan Partisipatif Fokus Kehutanan Multipihak, Pemberdayaan serta Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Dalam dan sekitar Hutan".  
[Http://209.85.175.104/serach?q=cacher:rKcaohDIpUJ:www.mfp.or.id/v3/images/uploads/dol-pov](http://209.85.175.104/serach?q=cacher:rKcaohDIpUJ:www.mfp.or.id/v3/images/uploads/dol-pov)
- Paul A. Gray, 2000. *An Ecosystem Approach to Management: A Context for Wilderness Protection*. USDA Forest Proceedings RMRS-P-15-VOL-2. 2000.
- Paul L Tobing. 2007. "Rapuhnya Modal Intelektual kita". Kompas 5 November 2007. [Http://caniklunik.blogspot.com/2007/11/rapunya-modal-intelektual-hta.html](http://caniklunik.blogspot.com/2007/11/rapunya-modal-intelektual-hta.html)
- Payne, Malcolm 1987. *Social care in The Community*, London: MacMillan
- Perum Perhutani. 2006. "Laporan Perkembangan Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Perum Perhutani".
- Perum Perhutani. 2008. KPH Bandung Utara. Sekilas KPH Bandung Utara. Bahan Kunjungan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi IV.
- Perum Perhutani. 2008. KPH Sukabumi. " Sekilas KPH Sukabum". Bahan Kunjungan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi IV.
- Phil Bartle. 2007. "Enam Belas Kekuatan Masyarakat. Pengukuran Pemberdayaan Masyarakat".t. Terjemahan oleh Desy Yasri. <http://www.scn.org/mpc>.

- Poore, D, Burgess, Palmer, P, Rietbergen, J, and Synnot, T, 1989. *No Timber Without Trees, Sustainability in Tropical Forest*. London, Eartscan Publication Ltd.
- Prante, Tyler; Thacher, Jennifer A; McCollum, Daniel W.; Berreens, Robert P. 2007. *Building Social Capital in Forest Community: Analysis of New Mexico's Collaborative Forest Restoration Program*. *Natural Resources Journal*, 47 (4): 867 – 915
- Pranaka dan Vidhyandika. 1996. "Pemberdayaan (Empowerment)". Jakarta: Centre of Strategic and International Studies (CSIS).
- Pratikno, dkk. 2001 "Penyusunan Konsep Perumusan Pengembangan Kebijakan Pelestarian Nilai-Nilai Kemasyarakatan (Social Capital) untuk Integrasi Sosial". Laporan Akhir Penelitian. FISIPOL UGM bekerjasama dengan Kantor Eks Menteri Negara Masalah Kemasyarakatan.
- Prayitno, Ujianto Singgih, 2004. "Modal Sosial dan Ketahanan Ekonomi Keluarga Miskin". Disertasi S3 Program Pascasarjana Sosiologi. Universitas Indonesia
- Pretty, Jules dan Hugh Ward. 2001. *Social Capital and The Environment*. Paper Submitted to World Bank. *Journal World Development*, Vol. 29 No. 2, pp 209-227, 2001. [www.Elsevier.com/locate/worlddev](http://www.Elsevier.com/locate/worlddev).
- Pretzch H, Grote R, Reineking B, Rotzer T, Seifer S, 2008. *Model for Forest Ecosystem Management: a European Perspective*. *Forestry Research Today*. Publish 1 May 008 in Ann Bot (Lond).
- Prijono, O.S & A.M.W Pranarka. 1996. "Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi", Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta.
- Pupu Saeful. 2008. "Memupuk Intitusi Lokal dan Modal Sosial dalam Kehidupan Bermasyarakat".  
[www.rachimuddin.com/.../memupuk+institusi+lokal+dan+modal+sosial+dalam+kehidupan](http://www.rachimuddin.com/.../memupuk+institusi+lokal+dan+modal+sosial+dalam+kehidupan)
- Purnomo, Heri. 2003. *A modeling Approach to Collaborative Forest Management*. Disertasi Doktor. Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Putnam Robert D, Leonardi R, Nanetti. 1993. *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*, Princeton University Press.
- Putnam RD. 1995. *Bowling Alone America's Declining Social Capital*. Dalam *Journal of Democracy* Vol. 16. No.1, Hal. 65-78

- \_\_\_\_\_. 2000. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*, Journal of Political Science and Politics.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Doemocracies in Flux : The Evolution of Social Capital in Contemporary Society*. Oxpport University Press.
- Putut Maryahadi. 2006. "Model Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat". Disertasi S3. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor
- Raharjo, dalam ko;om "Modal Sosial dan Islam". 3 Desember 2001.
- Rachmad K. Dwi Susilo, 2008. *Sosiologi Lingkungan*. Raajawali Pers. PT. Rajagrafindo Persada.
- Randy R. Wrihatnolo; Riant Nugroho Dwidjowijoto. 2007. "Manajemen Pemberdayaan". Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat. Penerbit PT Alex Media Komputerindo, Gramedia. Jakarta tahun.
- Rappaport. 1987. "*Terms of Empowerment: Toward a theory for Community Psychology*". American Journal of Community Psychology. Vol. 15. No.2: 15-16
- Reni Renoati. 2001. "Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Yang Berkelanjutan Dalam Rangka Menyongsong Otonomi Daerah di Kabupaten Sleman". Tesis Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
- Richard G. Dudley. 2004. *The Dynamic Structure os Social Capital: How Interpersonal Connectionn Create Communitywide Benefits. A Paper prepared for presentation at the 22<sup>nd</sup> International Conference of The System Dynãmics Society, July 25-29, 2004*
- Riddell, Mike (1997), "*Bringing Back Balance: The Role of Social Capital in Public Policy*) dalam David Robinson, *Social Capital and Policy Development*. Wellington: Institute of Policy Studies, hal. 13-33
- Riyanto, Boedi. 2005. "Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Dalam Perlindungan Kawasan Pelestarian Alam". Disertasi Program Pascasarjana Ilmu Hukum. Universitas Indonesia.
- Robert M.Z Lawang. 2005." *Kapital Sosial Dalam Perspektif Sosiologik*". FISIP UI Press. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Robinson, R.J. 1982. "*The Transformation of the State in Indonesia*." Bulletin of Concerned Asian Scholars: Vol.14

- Robinson, J.R. 1994. *Community Development in Perspective*. Ames: Iowa State University Press.
- Robinson, Lindon J., Marcelo E Siles, 2002. *The Use Of Social Capital For Development and Poverty Reduction*, <http://inweb18.worldbank.org/essd/sdvext.nsf62bydocname>
- Rubin, Herbert J, and Irene. Rubin. 1992. *Community Organizing and Development*. Macmillan Publishing Company, USA.
- Sadjad, Sjamsoe'oed, 2000, "Memberdayakan Petani Desa.", Kompas 22 September 2000.
- Salmah Sjarifah. 2008. "Penataan Bantaran Sungai Ditinjau Dari Aspek Lingkungan". Disertasi Program Studi Ilmu Lingkungan. Program Pascasarjana. Universitas Indonesia. Jakarta
- Samole, V. Valaric. Nels Jhonson. Gregory H. Aplet and Jeffrey T. Olson. 1997. *Defining Sustainable Forestry*, Bogor. Cifor
- Sangaji, Anton, 2001. *Penghancuran Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Sulawesi Tengah*. Yayasan Tengah Merdeka. Palu
- Sastrosupeno. 1984. "Manusia, Alam dan Lingkungan". Majalah Umum dan Profesi Dep. Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta
- Scott, James C, 1976, *The Moral Economy of The Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*, New Heaven and London, Yale University Press.
- Sebastian Saragih . 2007. "Prinsip Kehidupan Masyarakat Berkelanjutan".
- Spellerberg Anne (1997). *Toward a Framework for The Measurement of Social Capital*. Wellington: The Institut of Policy Studies.
- Setiawati Sri Endang. 2006. Analisis Pemberdayaan Masy. Pesisir. Dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan SDA Kec. Tepus dan Tanjungsari Kab. Gunung Kidul. Disertasi Program Pascasarjana Ilmu Lingkungan. Universitas Indonesia.
- Simon. 1990. *Rethinking Empowerment*.
- Shopi Higman, James Mayers, Stephen Bass, Neil Judd, and Ruth Nussbaum. 2007. *Buku Pegangan Hutan Lestari*. Penerjemah Happy Tarumadevyyanto dan Sri Karna. Cetakan I, Persaki. Bogor.
- Soerjani. M, 1987. "Ekologi Manusia". PPSML – UI, Jakarta

- Soeraatmadja. R.E. 1997. "Ilmu Lingkungan". Bandung. Penerbit ITB
- Speller, Anne, 1997. "Toward a Framework for the Measurement of Social Capital" dalam David Robinson (ed), *Social Capital dan Policy Development*, Wellington: The Institute of Policy Studies.
- Suara Pembaharuan. 2007. "Kemiskinan di Jawa Barat". Suara Pembaharuan , 1 Agustus 2007.
- Subejo & Supriyanto, 2004. "Metodologi Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat. Short Paper disampaikan pada Kuliah Intensif Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan". Dewan Mahasiswa Fakultas Pertanian UGM, 16 Mei 2004.
- Subejo, 2004. "Peranan Social Capital dalam Pembangaun Ekonomi: Suatu Pengantar Untuk Studi Social Capital di Pedesaan Jawa Indonesia". Artikel dalam Jurnal Agro Ekonomi Vo. 11. No. 1 Juni 2004.
- Sudradjat. 1999. *Lingkungan Hidup (Suatu Pengantar)*. UI Press. Jakarta
- Suharto, Edi. 2006 . *Modal Sosial dan Kebijakan Publik*. Journal of Democracy.
- Suharto, E (1997). "Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial": Spektrum Pemikiran, Bandung. Lembaga Studi Pembangunan – STKS.
- Suharto, E & Yuliani. 2005. "Analisis Jaringan Sosial: Menerapkan Metode Asesment Cepat dan Partisipatif (MACPA) pada Lembaga Sosial Lokal di Subang, Jawa Bara". [Http://www.policy.hu/suharto/mak-Indo4.html](http://www.policy.hu/suharto/mak-Indo4.html).
- Suhendang Endang. Et al. 2002. "Pengantar Ilmu Kehutanan". Bogor. YPFK
- Suhendang Endang et. Al. 1996. "Ekologi, Ekologisme dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan". Gagasan, Pemikiran, dan Karya Prof. Dr. Ir. H. Ishemat Soerianegara, MSc. Jurusan Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor bekerja sama dengan Himpunan Alumni Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.
- Sunderlin, W, D., Angelsen, A., Wunder, S. 2006. *Forest and Poverty Alleviation*.
- Sumardjo, 1999. "Transformasi Model Penyuluhan Pertanian Menuju Pengembangan Kemandirian Petani. Kasus di Provinsi Jawa Barat. Disertasi Doktor. Bogor: Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Sutaryono. 2008, Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan. [www.kabarindonesia.com](http://www.kabarindonesia.com). 17 Oktober 2008.
- Sutaryono. 2008. "Pemberdayaan Setengah Hati: Subordinasi Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Hutan". STPN & Laper Pustaka Utama, Yogyakarta.

- Sutro Eko. 2003. "Modal Sosial, Desentralisasi dan Demokrasi Lokal". Institut For Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta.
- Stiglitz, J.E. 2000. *Formal and informal institutions*. In P. Dasgupta and I. Serageldin, eds. *Social Capital: A Multifaceted Perspective*, 59-68. Sociological Perspectives on Development series. Washington, D.C.: World Bank.
- Stiglitz, J. 1996. "Some Lessons from the East Asian Miracle." *The World Bank Research Observer* 11 (2): 151-77.
- Sutomo. 2008. "Strategi – strategi Pembangunan Masyarakat". Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Syahyuti. 2008. "Pengembangan Modal Sosial Masyarakat dalam upaya Membangun Kelembagaan dan Pemberdayaan Petani Miskin". *Journal of Sociology*, Vol. 94.
- Syahyuti. 2008. "Peran Modal Sosial Dalam Perdagangan Hasil Pertanian. Forum Penelitian Agro Ekonomi". Volume 26 No 1, Juli 2008:32-43
- Teguh Iman Prasetya. 2008. *Social Capital*. <http://fisip.ac.id/teguh/?p=40>. Januari.
- Tempo Interaktif. 70.000 Hektare Hutan di Jawa Barat Banten Kritis. Tempo Interaktif 11 Juli 2008.  
<http://www.tempointeractive.com/hg/nusa/jawamadura/2007/07/11/brk.20070711-103531.id.html>
- Tjondronegoro, M. 2005. "Pembangunan, Modal dan Modal". *Jurnal Sosiologi Indonesia*. Vol. I. No.7:21-22.
- Undang-Undang No. 41 Tahun 1999. "Kehutanan"
- Undang-undang No. 23 Tahun 1997. "Pengelolaan Lingkungan Hidup".
- UNDP (United Nation Development Program. 2001. *Human Development Report 2001*. New York:Oxford University Press.
- Wahyudinata. 2001. "Pemberdayaan ekonomi masyarakat miski".
- Webster's New World Dictionary. 1995. 2nd Edition. By Neufeldt Victoria.
- Woolcock, M. 1998. *Social Capital and Economic Development: Towards a Theoretical Synthesis and Policy Framework*. *Theory and Society* 27 (2): 151-208
- World Commission on Environment and Development (WCED). 1987. UN Document. Report of WCED, Chapter 2: *Toward Sustainable Development*.

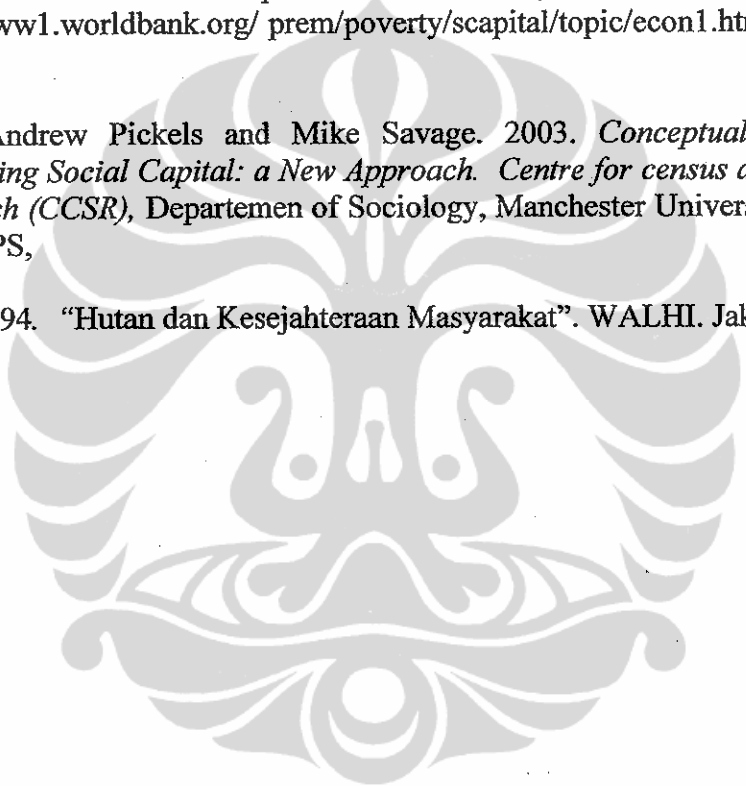
World Bank. 1998. *“The Initiative on Defining, Monitoring and Measuring Social Capital: Text of Proporsal Approved for Funding”*. Social Capital Initiative Working Paper No. 2. The World Bank, Social Development Family, Environmentally and Socially Sustainable Development Networking. June 1998. (dalam <http://www.worldbank.org/prem/poverty/scapital/wkrppr/seiwp2.pdf>. 9 Mei 2009.)

The World Bank (1999). 'What is Social Capital?', *PovertyNet* <http://www.worldbank.org/poverty/scapital/whatsc.htm>

World Bank. 2006. Social Capital in Economics, Trade and Migration. <http://www1.worldbank.org/prem/poverty/scapital/topic/econ1.htm>. 10 Mei 2008

Yaojin LI, Andrew Pickels and Mike Savage. 2003. *Conceptualising and Measuring Social Capital: a New Approach*. Centre for census and Survey Reserach (CCSR), Departemen of Sociology, Manchester University. Paper for BHPS,

Zakaria, Y, 1994. *“Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat”*. WALHI. Jakarta.





## LAMPIRAN 1 : KUESIONER PENELITIAN

### MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN BERKELANJUTAN (SUATU KAJIAN PEMANFAATAN MODAL SOSIAL, STUDI KASUS DI KPH SUKABUMI, PERUM PERHUTANI JAWA BARAT)

---

#### KETERANGAN JAWABAN

- a. Sangat setuju sekali = SSS
- b. Sangat Setuju = SS
- c. Setuju = S
- d. Ragu-ragu = R
- e. tidak setuju = TS
- f. Sangat Tidak Setuju = STS
- g. Sangat tidak setuju sekali = STSS

#### 1. MODAL SOSIAL

##### a. Kebersamaan

1 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa ferkuensi kebersamaan antara masyarakat dengan pemerintah dan para pemimpin politis dalam mengajukan usulan pengembangan desa telah mencukupi?

- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

2 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa tingkat kesuksesan kegiatan kebersamaan antara masyarakat dengan pemerintah dan para pemimpin politis dengan masyarakat dalam mengajukan usulan pengembangan desa telah mencukupi?

- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

3 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa frekuensi kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah dan pimpinan politis dengan masyarakat untuk mengatasi isu tertentu dalam masyarakat pda tahun yang lalu sudah mencukupi?

- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

4 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa, frekuensi aktivitas pribadi berkaitan dengan politik, sosial, ekonomi, budaya dan keamanan dalam tiga tahun terakhir di desa ini telah mencukupi?

- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

- 5 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa, frekuensi anda didekati seseorang untuk melakukan kegiatan politik, sosial, ekonomi, budaya dan keamanan dalam tiga tahun terakhir di desa ini telah mencukupi?
- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS
- 6 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa jumlah isu penting masyarakat yang ditemui dalam kehidupan bermasyarakat di desa ini sudah cukup banyak?
- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS
- 7 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa tingkat kemudahan akses terhadap pelayanan publik di desa ini telah cukup mudah.
- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS
8. Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa upaya masyarakat dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik atau mengatasi masalah publik di desa ini telah mencukupi?
- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS
- 9 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa jumlah kelompok masyarakat yang berperan penting untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat atau mengatasi masalah masyarakat di desa ini telah mencukupi?
- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS
- 10 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa tingkat keberhasilan aksi kolektif dari masyarakat di desa ini telah mencukupi?
- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS
- 11 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa frekuensi kerja sama masyarakat untuk mengatasi masalah yang bersangkutan dengan hutan di desa ini telah mencukupi?
- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS
- 12 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa frekuensi aktifitas yang menunjukkan partisipasi masyarakat di desa ini telah mencukupi?
- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

- 13 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa frekuensi pendorong munculnya partisipasi masyarakat di desa ini telah mencukupi?
- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS
- 14 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa jumlah pendukung kegiatan untuk mencapai suatu kebaikan masyarakat di desa ini telah mencukupi?
- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS
- 15 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa frekuensi kegiatan kebersamaan antara masyarakat dengan perum perhutani di desa ini telah mencukupi?
- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS
- 16 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa jumlah orang/institusi yang membantu jika masyarakat mengalami kesulitan atau musibah di desa ini telah cukup banyak?
- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS
- 17 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa jumlah orang/institusi yang membantu jika masyarakat mengalami kerugian ekonomi/keuangan di desa ini sudah cukup banyak?
- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS
- 18 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa frekuensi hubungan yang terjadi untuk pemecahan masalah dan kesulitan masyarakat di desa ini telah mencukupi?
- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS
- 19 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa tingkat kepedulian masyarakat terhadap kesulitan sesama anggota masyarakat di desa ini telah mencukupi?
- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS
- 20 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa tingkat kepedulian terhadap kesejahteraan sesama warga masyarakat di desa ini telah mencukupi?
- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

- 21 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa tingkat dukungan warga terhadap kegiatan proyek baru yang bermanfaat bagi masyarakat di desa ini telah mencukupi?
- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS
- 22 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa frekuensi bantuan yang diberikan terhadap warga masyarakat yang membutuhkan bantuan di desa ini telah mencukupi?
- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS
- 23 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa tingkat kerja sama masyarakat untuk mengelola sumber daya hutan di desa ini telah mencukupi?
- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS
- 24 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa tingkat kepedulian perum perhutani terhadap masyarakat sekitar hutan di desa ini telah mencukupi?
- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS
- 25 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa tingkat kepedulian masyarakat terhadap sumber daya hutan di desa ini telah mencukupi?
- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS
- 26 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa tingkat penghargaan masyarakat terhadap pendapat warga masyarakat lain di desa ini telah mencukupi?
- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS
- 27 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa tingkat peluang yang diberikan kepada setiap warga untuk berbicara dan bersikap yang berbeda dengan warga yang lainnya di desa ini telah mencukupi?
- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

**b. Kepercayaan**

1 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sesama warga dalam hal pinjam meminjam keuangan di desa ini telah mencukupi?

- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

2 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sesama warga dalam hal kepedulian warga terhadap kesulitan warga yang lain di desa ini telah mencukupi?

- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

3 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sesama warga pada hal penitipan barang dan penitipan anak di desa ini telah mencukupi?

- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

4 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap nilai/norma masyarakat di desa ini telah mencukupi?

- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

**c. Jaringan Sosial, Dukungan Timbal Balik**

1 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa tingkat kekompakan dan kepedulian masyarakat untuk mengatasi masalah yang mempengaruhi masyarakat termasuk masalah pelestarian sumber daya hutan di desa ini telah mencukupi?

- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

2 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa tingkat kepedulian masyarakat untuk pengembangan jaringan sosial di desa ini telah mencukupi?

- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

3. Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa tingkat kerjasama masyarakat/lembaga untuk mengatasi masalah dan situasi yang mempengaruhi masyarakat di desa ini telah mencukupi?
- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS
4. Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa jumlah organisasi lembaga masyarakat yang ada dalam kehidupan bermasyarakat di desa ini sudah cukup banyak?
- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS
5. Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa frekuensi hubungan antara warga dengan warga yang lainnya di desa ini telah mencukupi?
- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS
6. Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa tingkat keharmonisan hubungan antara swsama warga masyarakat di desa ini telah mencukupi?
- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

**d. keterlibatan/pertisipasi**

1. Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa tingkat akses masyarakat terhadap pelayanan umum di desa ini telah mencukupi?
- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS
2. Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa tingkat akses masyarakat untuk memperoleh pinjaman keuangan di desa ini telah mencukupi?
- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS
3. Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa tingkat akses masyarakat untuk memperoleh sumber daya hutan di desa ini telah mencukupi?
- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

4 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa tingkat partisipasi/keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang pengelolaan sumber daya hutan di desa ini telah mencukupi?

- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

5 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa tingkat keterlibatan masyarakat pada kegiatan pemerintah melakukan pengelolaan sumber daya hutan di desa ini telah mencukupi?

- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

6 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa tingkat keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan sumber daya hutan di desa ini telah mencukupi?

- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

7 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa perbandingan keterlibatan wanita dan pria dalam pengelolaan sumber daya hutan di desa ini telah mencukupi?

- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

**e. KELEMBAGAAN**

1 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa jumlah kelompok yang paling berpengaruh untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat di desa ini sudah cukup banyak?

- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

2 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa tingkat pengetahuan tentang prosedur dan kebijakan organisasi masyarakat di desa ini telah mencukupi?

- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

3 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa frekuensi kegiatan lembaga masyarakat di desa ini telah mencukupi?

- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

- 4 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa frekuensi hubungan kerjasama antar kelembagaan masyarakat di desa ini telah mencukupi?
- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS
- 5 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa tingkat partisipasi lembaga masyarakat dalam kegiatan pemerintah dan pengelolaan sumber daya hutan di desa ini telah mencukupi?
- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS
- 6 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa tingkat pengaruh lembaga untuk pengambilan keputusan terhadap masyarakat di desa ini telah mencukupi?
- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS
- 7 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa masyarakat yang menikmati dan merasa terwakili dalam organisasi masyarakat di desa ini sudah cukup besar?
- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS
- 8 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa Tingkat kapasitas lembaga masyarakat untuk menyelesaikan tugasnya di desa ini telah mencukupi?
- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS
- 9 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa Jumlah kehadiran anggota keluarga dalam pertemuan keluarga di desa ini telah mencukupi?
- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS
- 10 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa Tingkat kesamaan agama dalam kelompok masyarakat di desa ini telah mencukupi?
- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS
- 11 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa Kesamaan jenis kelamin dalam kelompok organisasi masyarakat di desa ini telah mencukupi?
- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS



12 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa Kesamaan pandangan politik dalam kelompok/organisasi masyarakat di desa ini telah mencukupi?

- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

13 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa Kesamaan usia dalam kelompok/organisasi masyarakat di desa ini telah mencukupi?

- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

14 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa Kesamaan pendidikan dalam kelompok/organisasi masyarakat di desa ini telah mencukupi

- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

15 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa Pengaruh kelompok terhadap perolehan keterampilan individual anggota kelompok di desa ini telah mencukupi?

- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

**f. Kepemimpinan sosial**

1. Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa Tingkat Perubahan kepemimpinan sosial di desa ini telah mencukupi?

- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

2. Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa Tingkat dukungan masyarakat terhadap kepemimpinan sosial di desa ini telah mencukupi?

- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

3. Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa Frekuensi hubungan personal keagamaan antar sesama warga di desa ini telah mencukupi?

- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

4. Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa Frekuensi kemunculan kepemimpinan sosial dalam proses demokrasi di desa ini telah mencukupi?

- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

5. Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa Tingkat ketaatan terhadap kepemimpinan sosial di desa ini telah mencukupi?
- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS
6. Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa Tingkat pengaruh kepemimpinan sosial terhadap masyarakat di desa ini telah mencukupi?
- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS
7. Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa Tingkat aktifitas keterlibatan kepemimpinan sosial dalam masyarakat di desa ini telah mencukupi?
- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

**g. Norma, adat dan nilai Budaya**

1. Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa Tingkat ketaatan masyarakat terhadap nilai kultur budaya lokal di desa ini telah mencukupi?
- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS
2. Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa Persentase masyarakat yang masih memakai nilai kultur budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari desa ini sudah cukup banyak?
- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS
3. Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa Tingkat keberhasilan nilai kultur budaya untuk memberi solusi masalah masyarakat di desa ini telah mencukupi?
- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS
4. Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa Tingkat ketaatan masyarakat terhadap agama di desa ini telah mencukupi?
- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS
5. Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa Tingkat ketaatan masyarakat terhadap nilai/norma di desa ini telah mencukupi?
- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

6. Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa Tingkat ketaatan masyarakat terhadap tokoh masyarakat di desa ini telah mencukupi?

- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

7. Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa Tingkat ketaatan masyarakat terhadap pihak luar/ LSM di desa ini telah mencukupi?

- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

8. Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa Tingkat ketaatan masyarakat terhadap pemerintah di desa ini telah mencukupi?

- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

**h. Kearifan lokal dan pengetahuan lokal**

1. Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa Tingkat penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai lokal dalam pengelolaan hutan di desa ini telah mencukupi?

- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

2. Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa Jumlah dan bentuk kearifan dan pengetahuan lokal yang ada dalam pengelolaan sumber daya hutan di desa ini sudah cukup banyak?

- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

3. Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa kearifan dan pengetahuan lokal yang dipakai untuk pengelolaan sumber daya hutan dalam waktu yang lama di desa ini sudah cukup banyak?

- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

4. Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa Tingkat ketaatan masyarakat terhadap kearifan dan pengetahuan lokal yang diimplementasikan oleh masyarakat di desa ini telah mencukupi?

- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

5. Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa Tingkat keberhasilan pemakai kearifan dan pengetahuan lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan di desa ini telah mencukupi?
- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS
6. Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aplikasi kearifan dan pengetahuan lokal di desa ini telah mencukupi?
- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS
7. Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa Jenis kearifan dan pengetahuan lokal tentang pengelolaan sumber daya hutan yang telah digunakan dan dimiliki masyarakat di desa ini sudah cukup banyak?
- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS
8. Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa Pengaruh kearifan dan pengetahuan lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan di desa ini telah mencukupi?
- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS
9. Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa banyak Kearifan dan pengetahuan lokal yang berpengaruh terhadap pelestarian sumber daya hutan di desa ini sudah cukup banyak?
- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

## 2. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

1. Bagaimana pendapat Anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa tingkat dukungan masyarakat cukup tinggi terhadap cara-cara yang telah dilakukan pemerintah/perum perhutani dalam pengelolaan sumber daya hutan?
- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS
2. Bagaimana pendapat Anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa dalam menentukan cara pengelolaan sumber daya hutan yang ditetapkan Pemerintah/Perum Perhutani telah melibatkan masyarakat sekitar hutan?
- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

- 3 Bagaimana pendapat Anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan cara yang dilakukan pemerintah perum perhutani untuk pengelolaan sumber daya hutan cukup memadai?
- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS
- 4 Bagaimana pendapat Anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa cara pengelolaan sumberdaya hutan yang ditetapkan oleh Pemerintah/Perum Perhutani sudah sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sekitar hutan.
- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS
- 5 Bagaimana pendapat Anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa tingkat kesesuaian antara cara yang dilakukan pemerintah /Perum Perhutani dengan kondisi masyarakat sudah cukup sesuai?
- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS
- 6 Bagaimana pendapat Anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa cara pengelolaan sumber daya hutan yang ditetapkan oleh Pemerintah/Perum Perhutani telah meningkatkan kemampuan masyarakat sekitar hutan untuk turut serta mengelola sumber daya hutan?
- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS
- 7 Bagaimana pendapat Anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa pengaruh dari cara-cara yang ditetapkan pemerintah/perum perhutani dalam pengelolaan sumber daya hutan terhadap potensi masyarakat sudah memadai?
- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS
- 8 Bagaimana pendapat Anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa cara pengelolaan sumber daya hutan yang ditetapkan oleh Pemerintah/Perum Perhutani telah sesuai dengan harapan sebagian besar masyarakat sekitar hutan?
- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS
- 9 Bagaimana pendapat Anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa tingkat persetujuan masyarakat terhadap cara-cara yang ditetapkan pemerintah/Perum Perhutani dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan sudah cukup memadai?
- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

### 3. Keterlibatan dan Dukungan Stakeholders Pemberdayaan

1. Bagaimana pendapat Anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa keterlibatan Pemerintah/Perum Perhutani sudah mencukupi dalam menentukan cara pengelolaan sumberdaya hutan?  
 a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS
2. Bagaimana pendapat Anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa keterlibatan lembaga swasta sudah mencukupi dalam menentukan cara pengelolaan sumber daya hutan?  
 a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS
3. Bagaimana pendapat Anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa keterlibatan lembaga pemerhati kehutanan seperti Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat sudah mencukupi dalam menentukan cara pengelolaan sumber daya hutan?  
 a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS
4. Bagaimana pendapat Anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa keterlibatan Pemerintah/Perum Perhutani dalam menentukan cara pengelolaan sumber daya hutan sudah sesuai dengan perannya?  
 a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS
5. Bagaimana pendapat Anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam menentukan cara pengelolaan sumber daya hutan sudah sesuai dengan perannya?  
 a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS
6. Bagaimana pendapat Anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa keterlibatan lembaga swasta dalam menentukan cara pengelolaan sumber daya hutan sudah sesuai dengan perannya?  
 a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS
7. Bagaimana pendapat Anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa lembaga swasta mendukung usaha peningkatan peran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sumber daya hutan?  
 a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

8 Bagaimana pendapat Anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa lembaga pemerhati kehutanan seperti Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat mendukung usaha peningkatan peran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sumber daya hutan?

- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

9 Bagaimana pendapat Anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa keberhasilan peningkatan peran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sumber daya hutan adalah karena dukungan sebagian besar masyarakat?

- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

10 Bagaimana pendapat Anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa motivasi peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi dasar bagi lembaga swasta untuk terlibat dan mendukung dalam pengelolaan sumber daya hutan?

- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

11 Bagaimana pendapat Anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa motivasi peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi dasar bagi lembaga pemerhati kehutanan untuk terlibat dan mendukung kegiatan pengelolaan sumber daya hutan?

- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

#### 4. Keberdayaan Masyarakat

##### a. Pengembangan potensi dan keterampilan

1 Bagaimana pendapat Anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa cara yang dilakukan dalam pengelolaan sumber daya hutan telah menambah kekayaan material individu anggota masyarakat?

- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

2. Bagaimana pendapat Anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa dukungan dan keterlibatan semua pihak dalam pengelolaan sumber daya hutan telah menambah kekayaan material individu anggota masyarakat?

- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

3. Bagaimana pendapat Anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa cara yang dilakukan dalam pengelolaan sumber daya hutan dapat menghasilkan kekuatan fisik individu anggota masyarakat?

- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

4. Bagaimana pendapat Anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa dukungan dan keterlibatan semua pihak dalam pengelolaan sumber daya hutan dapat menghasilkan kekuatan fisik individu anggota masyarakat?

- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

5. Bagaimana pendapat Anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa cara yang dilakukan dalam pengelolaan sumber daya hutan dapat menghapus keterasingan dalam masyarakat?

- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

6. Bagaimana pendapat Anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa dukungan dan keterlibatan semua pihak dalam pengelolaan sumber daya hutan dapat menghapus keterasingan dalam masyarakat?

- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

7. Bagaimana pendapat Anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa cara yang dilakukan dalam pengelolaan sumber daya hutan dapat meningkatkan keterampilan individu anggota masyarakat?

- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

**b. Partisipasi Dalam Pembangunan**

1. Bagaimana pendapat Anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa cara yang dilakukan dalam pengelolaan sumber daya hutan telah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan tentang pengelolaan sumber daya hutan?

- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS



2. Bagaimana pendapat Anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa dukungan dan keterlibatan semua pihak dalam pengelolaan sumber daya hutan telah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan tentang pengelolaan sumber daya hutan?

- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

3. Bagaimana pendapat Anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa cara yang dilakukan dalam pengelolaan sumber daya hutan telah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan keputusan bersama tentang pengelolaan sumber daya hutan?

- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

4. Bagaimana pendapat Anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa dukungan dan keterlibatan semua pihak dalam pengelolaan sumber daya hutan telah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan keputusan bersama tentang pengelolaan sumber daya hutan?

- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

### c. Kemandirian Masyarakat

1. Bagaimana pendapat Anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa cara yang dilakukan dalam pengelolaan sumber daya hutan telah mengurangi ketergantungan masyarakat kepada bantuan pihak luar dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat?

- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

2. Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa dukungan dan keterlibatan semua pihak dalam pengelolaan sumber daya hutan telah mengurangi ketergantungan masyarakat kepada bantuan pihak luar dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat?

- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

#### 4. PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN

##### a. KELESTARIAN FUNGSI EKONOMI

- 1 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa pengelolaan sumber daya hutan disekitar wilayah ini pada waktu yang lalu telah memperjelas adanya kepastian penggunaan lahan sebagai kawasan hutan?
- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS
- 2 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa pengelolaan sumber daya hutan disekitar wilayah ini pada waktu yang lalu telah memperjelas status penetaan batasan kawasan hutan?
- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS
- 3 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa pengelolaan sumber daya hutan disekitar wilayah ini pada waktu yang lalu telah memperjelas kualitas fisik tata batas hutan?
- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS
- 4 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa pengelolaan sumber daya hutan disekitar wilayah ini pada waktu yang lalu telah dilaksanakan sesuai perencanaan dan pelaksanaan penataan hutan menurut tipe hutan?
- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS
- 5 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa pengelolaan sumber daya hutan disekitar wilayah ini pada waktu yang lalu telah dilaksanakan sesuai perencanaan dan pelaksanaan penetaan hutan menurut fungsi-fungsi hutan?
- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS
- 6 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa pengelolaan sumber daya hutan disekitar wilayah ini pada waktu yang lalu telah mengorganisasikan kawasan hutan yang menjamin kegiatan produksi?
- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS
- 7 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa pengelolaan sumber daya hutan disekitar wilayah ini pada waktu yang lalu telah berproduksi sesuai dengan produktivitas hutan?
- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

8 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa pengelolaan sumber daya hutan disekitar wilayah ini pada waktu yang lalu telah meminimalkan pengambilan hasil hutan secara illegal (pembalakan liar)?

- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

9 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa pengelolaan sumber daya hutan disekitar wilayah ini pada waktu yang lalu telah meminimalkan dampak perubahan penutupan lahan akibat perambahan hutan?

- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

10 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa pengelolaan sumber daya hutan disekitar wilayah ini pada waktu yang lalu telah mengurangi adanya alih fungsi kawasan hutan?

- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

**b. KELESTARIAN FUNGSI EKOLOGI**

1 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa pengelolaan sumber daya hutan disekitar wilayah ini pada waktu yang lalu dapat mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan gangguan terhadap sumber daya hutan?

- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

2 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa pengelolaan sumber daya hutan disekitar wilayah ini pada waktu yang lalu dapat dilakukan secara proporsional antara pemanfaatan hutan dengan fungsi ekologi hutan?

- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

3 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa pengelolaan sumber daya hutan disekitar wilayah ini pada waktu yang lalu tidak menimbulkan dampak perusakan hutan?

- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

4 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa pengelolaan sumber daya hutan disekitar wilayah ini pada waktu yang lalu tidak menimbulkan kerisakan lingkungan hutan?

- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

5 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa pengelolaan sumber daya hutan disekitar wilayah ini pada waktu yang lalu tidak menimbulkan hilangnya keanekaragaman hayati sumber daya hutan?

- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

6 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa pengelolaan sumber daya hutan disekitar wilayah ini pada waktu yang lalu telah memperjelas batas antara kawasan konsesi dengan kawasan komunitas setempat yang terpisah secara jelas?

- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

**c. KELESTARIAN FUNGSI SOSIAL**

1 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa pengelolaan sumber daya hutan disekitar wilayah ini pada waktu yang lalu telah memberikan kompensasi formal atas penggunaan pengetahuan tradisional masyarakat adat setempat?

- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

2 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa pengelolaan sumber daya hutan disekitar wilayah ini pada waktu yang lalu telah mamungkinkan komunitas masyarakat sekitar hutan untuk memperoleh kesempatan kerja?

- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

3 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa pengelolaan sumber daya hutan disekitar wilayah ini pada waktu yang lalu telah mengurangi dampak kerusakan sumber daya hutan terhadap kesehatan masyarakat?

- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

4 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa pengelolaan sumber daya hutan disekitar wilayah ini pada waktu yang lalu telah memperhatikan terjaminnyahak asasi manusia?

- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

5 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa pengelolaan sumber daya hutan disekitar wilayah ini pada waktu yang lalu telah mengadakan kerjasama dengan aparat kesehatan dalam pelayanan kesehatan?

- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

6 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa pengelolaan sumber daya hutan disekitar wilayah ini pada waktu yang lalu telah memperhatikan keberadaan dan pelaksanaan kesepakatan kerja bersama terutama pada industry/usaha sumber daya hutan?

- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

7 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa pengelolaan sumber daya hutan disekitar wilayah ini pada waktu yang lalu telah melaksanakan upah minimum regional bagi buruh/pekerja industry kehutanan?

- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

8 Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan yang mengatakan bahwa pengelolaan sumber daya hutan disekitar wilayah ini pada waktu yang lalu telah menjamin kesehatan dan keselamatan kerja bagi buruh/ pekerja industri kehutanan?

- a. SSS  b. SS  c. S  d. R  e. TS  f. STS  g. STSS

## LAMPIRAN 2. UJI REABILITAS DAN VALIDITAS VARIABEL

### a. Uji Realibitas dan Validitas terhadap Variabel Modal Sosial

Tabel 1. Uji Reliabilitas terhadap modal sosial kebersamaan

Variabel	Cronbach alpha	Corrected item-total correlation
<b>Kebersamaan (KB)</b>	0.952	
KB 1		0.782
KB 2		0.738
KB 3		0.676
KB 4		0.670
KB 5		0.556
KB 6		0.772
KB 7		0.700
KB 8		0.470
KB 9		0.584
KB 10		0.604
KB 11		0.678
KB 12		0.484
KB 13		0.601
KB 14		0.535
KB 15		0.631
KB 16		0.524
KB 17		0.625
KB 18		0.544
KB 19		0.577
KB 20		0.605
KB 21		0.630
KB 22		0.568
KB 23		0.589
KB 24		0.638
KB 25		0.795
KB 26		0.836
KB 27	0.692	

Tabel 2. Uji Validitas terhadap Modal Sosial Kebersamaan

Kebersamaan	r-Tabel	r-Hitung	Signifikansi
KB 1	0,361	0.805	0,000
KB 2	0,361	0.764	0,000
KB 3	0,361	0.710	0,000
KB 4	0,361	0.704	0,000
KB 5	0,361	0.592	0,000
KB 6	0,361	0.798	0,000
KB 7	0,361	0.734	0,000
KB 8	0,361	0.509	0,000
KB 9	0,361	0.617	0,000
KB 10	0,361	0.630	0,000
KB 11	0,361	0.702	0,000
KB 12	0,361	0.522	0,000
KB 13	0,361	0.637	0,000
KB 14	0,361	0.575	0,000
KB 15	0,361	0.661	0,000
KB 16	0,361	0.565	0,000
KB 17	0,361	0.657	0,000
KB 18	0,361	0.585	0,000
KB 19	0,361	0.611	0,000
KB 20	0,361	0.636	0,000
KB 21	0,361	0.660	0,000
KB 22	0,361	0.604	0,000
KB 23	0,361	0.621	0,000
KB 24	0,361	0.671	0,000
KB 25	0,361	0.818	0,000
KB 26	0,361	0.851	0,000
KB 27	0,361	0.723	0,000

Tabel 3. Uji Reliabilitas Terhadap Modal Sosial **Kepercayaan**

Variabel	Cronbach alpha	Corrected item-total correlation
<b>Kepercayaan (KP)</b>	0.727	
KP 1		0.051
KP 2		0.134
KP 3		0.709
KP 4		0.635
KP 5		0.644
KP 6		0.684

Tabel 4. Uji Validitas Terhadap modal Sosial **Kepercayaan**

Kepercayaan	r-Tabel	r-Hitung	Signifikansi
KP 1	0,361	0,260	0,069
KP 2	0,361	0,394	0,005
KP 3	0,361	0,823	0,000
KP 4	0,361	0,759	0,000
KP 5	0,361	0,796	0,000
KP 6	0,361	0,821	0,000

Tabel 5. Uji Reliabilitas Terhadap Modal Sosial **Jaringan Sosial dan Dukungan Timbal Balik**

Variabel	Cronbach alpha	Corrected item-total correlation
<b>Jaringan Sosial Dukungan Timbal Balik (Js)</b>	0.752	
JS 1		0.538
JS 2		0.631
JS 3		0.557
JS 4		0.268
JS 5		0.396
JS 6		0.108
JS 7		-0.003
JS 8		0.128
JS 9		0.708
JS 10		0.633
JS 11		0.645
JS 12		0.263
JS 13		0.237
JS 14		0.154
JS 15	0.097	

Tabel 6. Uji Validitas Terhadap Modal Sosial **Jaringan Sosial Dukungan dan Timbal Balik**

Jaringan Sosial Dukungan Timbal Balik	r-Tabel	r-Hitung	Signifikansi
JS 1	0,361	0,628	0,000
JS 2	0,361	0,725	0,000
JS 3	0,361	0,669	0,000
JS 4	0,361	0,384	0,006
JS 5	0,361	0,500	0,000
JS 6	0,361	0,251	0,079
JS 7	0,361	0,128	0,376
JS 8	0,361	0,266	0,062
JS 9	0,361	0,775	0,000
JS 10	0,361	0,710	0,000
JS 11	0,361	0,250	0,000
JS 12	0,361	0,374	0,008
JS 13	0,361	0,370	0,008
JS 14	0,361	0,279	0,080
JS 15	0,361	0,724	0,050

Tabel 7. Uji Reliabilitas Terhadap Modal Sosial **Keterlibatan/Partisipasi**

Variabel	Cronbach alpha	Corrected item-total correlation
<b>Keterlibatan/Partisipasi (KPs)</b>	0.966	
KPs 1		0.905
KPs 2		0.844
KPs 3		0.869
KPs 4		0.908
KPs 5		0.905
KPs 6		0.913
KPs 7		0.823

Tabel 8. Uji Validitas Terhadap Modal Sosial **Keterlibatan/Partisipasi**

Keterlibatan/Partisipasi	r-Tabel	r-Hitung	Signifikansi
KPs 1	0,361	0.930	0,000
KPs 2	0,361	0.886	0,000
KPs 3	0,361	0.904	0,000
KPs 4	0,361	0.933	0,000
KPs 5	0,361	0.930	0,000
KPs 6	0,361	0.938	0,000
KPs 7	0,361	0.876	0,000

Tabel 9. Uji Reliabilitas Terhadap Modal Sosial **Kelembagaan**

Variabel	Cronbach alpha	Corrected item-total correlation
<b>Kelembagaan (KL)</b>	0.811	
KL 1		0.052
KL 2		0.569
KL 3		0.476
KL 4		0.393
KL 5		0.393
KL 6		0.556
KL 7		0.398
KL 8		0.321
KL 9		0.251
KL 10		0.261
KL 11		0.183
KL 12		0.099
KL 13		0.203
KL 14		0.043
KL 15		0.152
KL 16		0.071
KL 17		0.327
KL 18		0.540
KL 19		0.394
KL 20		0.345
KL 21		0.306
KL 22		0.431
KL 23		0.370
KL 24		0.638
KL 25		0.365
KL 26		0.330
KL 27		0.372
KL 28		0.444
KL 29		0.258
KL 30	0.435	



Tabel 10. Uji Validitas Terhadap Modal Sosial Kelembagaan

Kelembagaan	r-Tabel	r-Hitung	Signifikansi
KL 1	0,361	0,024	0,866
KL 2	0,361	0,624	0,000
KL 3	0,361	0,537	0,000
KL 4	0,361	0,455	0,001
KL 5	0,361	0,455	0,001
KL 6	0,361	0,612	0,000
KL 7	0,361	0,471	0,001
KL 8	0,361	0,391	0,005
KL 9	0,361	0,319	0,024
KL 10	0,361	0,333	0,018
KL 11	0,361	0,270	0,058
KL 12	0,361	-0,014	0,924
KL 13	0,361	0,285	0,045
KL 14	0,361	0,123	0,395
KL 15	0,361	0,238	0,096
KL 16	0,361	0,170	0,237
KL 17	0,361	0,416	0,003
KL 18	0,361	0,604	0,000
KL 19	0,361	0,470	0,001
KL 20	0,361	0,418	0,003
KL 21	0,361	0,389	0,005
KL 22	0,361	0,517	0,000
KL 23	0,361	0,435	0,002
KL 24	0,361	0,684	0,000
KL 25	0,361	0,429	0,002
KL 26	0,361	0,395	0,005
KL 27	0,361	0,440	0,001
KL 28	0,361	0,505	0,000
KL 29	0,361	0,339	0,016
KL 30	0,361	0,509	0,000

Tabel 11. Uji Reliabilitas Terhadap Modal Sosial Kepemimpinan Sosial

Variabel	Cronbach alpha	Corrected item-total correlation
<b>Kepemimpinan Sosial (KS)</b>	0.904	
KS 1		0.853
KS 2		0.641
KS 3		0.762
KS 4		0.703
KS 5		0.808
KS 6		0.686
KS 7		0.605

Tabel 12. Uji Validitas (Kepemimpinan Sosial)

Kepemimpinan Sosial	r-Tabel	r-Hitung	Signifikansi
KS 1	0,361	0,890	0,000
KS 2	0,361	0,730	0,000
KS 3	0,361	0,841	0,000
KS 4	0,361	0,788	0,000
KS 5	0,361	0,869	0,000
KS 6	0,361	0,770	0,000
KS 7	0,361	0,724	0,000

Tabel 13. Uji Reliabilitas Terhadap Modal Sosial **Norma, adat dan nilai Budaya**

Variabel	Cronbach alpha	Corrected item-total correlation
<b>Norma, adat dan nilai Budaya</b>	0.792	
NB 1		0.421
NB 2		0.447
NB 3		0.495
NB 4		0.482
NB 5		0.486
NB 6		0.549
NB 7		0.531
NB 8		0.554
NB 9		0.356

Tabel 14. Uji Validitas Terhadap Modal Sosial **Norma, adat dan nilai Budaya**

Norma, adat dan nilai Budaya	r-Tabel	r-Hitung	Signifikansi
NB 1	0,361	0.565	0,000
NB 2	0,361	0.581	0,000
NB 3	0,361	0.619	0,000
NB 4	0,361	0.614	0,000
NB 5	0,361	0.611	0,000
NB 6	0,361	0.678	0,000
NB 7	0,361	0.663	0,000
NB 8	0,361	0.669	0,000
NB 9	0,361	0.515	0,000

Tabel 15. Uji Reliabilitas Terhadap Modal Sosial **Kearifan lokal dan pengetahuan lokal**

Variabel	Cronbach alpha	Corrected item-total correlation
<b>Kearifan lokal dan pengetahuan lokal</b>	0.894	
KLP 1		0.393
KLP 2		0.649
KLP 3		0.671
KLP 4		0.787
KLP 5		0.811
KLP 6		0.587
KLP 7		0.750
KLP 8		0.655
KLP 9		0.632

Tabel 16. Uji Validitas Terhadap Modal Sosial **Kearifan lokal dan pengetahuan lokal**

Kearifan lokal dan pengetahuan lokal	r-Tabel	r-Hitung	Signifikansi
KLP 1	0,361	0.512	0,000
KLP 2	0,361	0.725	0,000
KLP 3	0,361	0.760	0,000
KLP 4	0,361	0.841	0,000
KLP 5	0,361	0.856	0,000
KLP 6	0,361	0.691	0,000
KLP 7	0,361	0.813	0,000
KLP 8	0,361	0.726	0,000
KLP 9	0,361	0.722	0,000

**b. Uji Realibilitas dan Validitas Terhadap Variabel Strategi Pemberdayaan Masyarakat**

**Tabel 17. Uji Reliabilitas Terhadap Strategi Pemberdayaan Masyarakat**

Variabel	Cronbach alpha	Corrected item-total correlation
<b>Strategi Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>0.787</b>	
SPM 1		0.348
SPM 2		0.576
SPM 3		0.511
SPM 4		0.565
SPM 5		0.519
SPM 6		0.413
SPM 7		0.496
SPM 8		0.489
SPM 9		0.372
SPM 10		0.375

**Tabel 18. Uji Validitas Terhadap Strategi Pemberdayaan Masyarakat**

Strategi Pemberdayaan Masyarakat	r-Tabel	r-Hitung	Signifikansi
SPM 1	0,361	0,540	0,000
SPM 2	0,361	0,696	0,000
SPM 3	0,361	0,634	0,000
SPM 4	0,361	0,657	0,000
SPM 5	0,361	0,644	0,000
SPM 6	0,361	0,522	0,000
SPM 7	0,361	0,596	0,000
SPM 8	0,361	0,607	0,000
SPM 9	0,361	0,516	0,000
SPM 10	0,361	0,514	0,000

c. Uji Reliabilitas dan Validitas Terhadap Variabel Keterlibatan dan Dukungan Stakeholders

Tabel 19. Uji Reliabilitas Terhadap Keterlibatan dan Dukungan Stakeholders

Variabel	Cronbach alpha	Corrected item-total correlation
<b>Keterlibatan dan dukungan stakeholders</b>	0.756	
KDS 1		0.426
KDS 2		0.293
KDS 3		0.431
KDS 4		0.482
KDS 5		0.452
KDS 6		0.432
KDS 7		0.477
KDS 8		-0.057
KDS 9		0.071
KDS 10		0.071
KDS 11		0.439
KDS 12		0.545
KDS 13		0.292
KDS 14		0.479
KDS 15		0.268
KDS 16		0.134
KDS 17		0.236
KDS 18		0.097
KDS 19		0.367
KDS 20		0.437
KDS 21		0.292
KDS 22		0.169
KDS 23		0.281
KDS 24	0.254	

Tabel 20. Uji Validitas Terhadap Keterlibatan dan Dukungan Stakeholders

Keterlibatan dan dukungan stakeholders	r-Tabel	r-Hitung	Signifikansi
KDS 1	0,361	0.500	0,000
KDS 2	0,361	0.388	0,005
KDS 3	0,361	0.509	0,000
KDS 4	0,361	0.551	0,000
KDS 5	0,361	0.529	0,000
KDS 6	0,361	0.520	0,000
KDS 7	0,361	0.549	0,000
KDS 8	0,361	0.049	0,737
KDS 9	0,361	0.167	0,246
KDS 10	0,361	0.168	0,245
KDS 11	0,361	0.496	0,000
KDS 12	0,361	0.605	0,000
KDS 13	0,361	0.393	0,005
KDS 14	0,361	0.552	0,000
KDS 15	0,361	0.368	0,008
KDS 16	0,361	0.254	0,075
KDS 17	0,361	0.326	0,021
KDS 18	0,361	0.213	0,137
KDS 19	0,361	0.450	0,001
KDS 20	0,361	0.522	0,000
KDS 21	0,361	0.407	0,003
KDS 22	0,361	0.289	0,042
KDS 23	0,361	0.406	0,003
KDS 24	0,361	0.379	0,007

**d. Uji Reabilitas dan Validitas terhadap Variabel Keberdayaan Masyarakat**

**Tabel 21. Uji Reliabilitas Terhadap Pengembangan Potensi dan Keterampilan**

Variabel	Cronbach alpha	Corrected item-total correlation
<b>Pengembangan Potensi dan keterampilan</b>		
PPK 1	0.747	0.476
PPK 2		0.552
PPK 3		0.680
PPK 4		0.646
PPK 5		0.598
PPK 6		0.466
PPK 7		0.580
PPK 8		0.184
PPK 9		0.250
PPK 10		-0.032

**Tabel 22. Uji Validitas Terhadap Pengembangan Potensi dan Keterampilan**

Pengembangan Potensi dan keterampilan	r-Tabel	r-Hitung	Signifikansi
PPK 1	0,361	0.609	0,000
PPK 2	0,361	0.664	0,000
PPK 3	0,361	0.751	0,000
PPK 4	0,361	0.741	0,000
PPK 5	0,361	0.704	0,000
PPK 6	0,361	0.605	0,000
PPK 7	0,361	0.692	0,000
PPK 8	0,361	0.381	0,006
PPK 9	0,361	0.395	0,004
PPK 10	0,361	0.197	0,170

**Tabel 23. Uji Reliabilitas Terhadap Partisipasi Dalam Pembangunan**

Variabel	Cronbach alpha	Corrected item-total correlation
<b>partisipasi dalam pembangunan</b>		
PDP 1	0.775	0.373
PDP 2		0.602
PDP 3		0.607
PDP 4		0.419
PDP 5		0.337
PDP 6		0.149

**Tabel 24. Uji Validitas Terhadap Partisipasi Dalam Pembangunan**

partisipasi dalam pembangunan	r-Tabel	r-Hitung	Signifikansi
PDP 1	0,361	0.621	0,000
PDP 2	0,361	0.783	0,000
PDP 3	0,361	0.773	0,000
PDP 4	0,361	0.584	0,000
PDP 5	0,361	0.513	0,000
PDP 6	0,361	0.414	0,003

Tabel 25. Uji Reliabilitas Terhadap **Kemandirian Masyarakat**

Variabel	Cronbach alpha	Corrected item-total correlation
<b>Kemandirian Masyarakat</b>	0.719	
KM 1		0.372
KM 2		0.372

Tabel 26. Uji Validitas **Kemandirian Masyarakat**

Kemandirian Masyarakat	r-Tabel	r-Hitung	Signifikansi
KM 1	0,361	0.887	0,000
KM 2	0,361	0.758	0,000

**e. Uji Reliabilitas dan Validitas terhadap Variabel Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan**

Tabel 27. Uji Reliabilitas Indikator **Kelestarian fungsi produksi (ekonomi)**

Variabel	Cronbach alpha	Corrected item-total correlation
<b>Kelestarian fungsi produksi (ekonomi)</b>	0.922	
KFP 1		0.719
KFP 2		0.663
KFP 3		0.754
KFP 4		0.749
KFP 5		0.705
KFP 6		0.795
KFP 7		0.674
KFP 8		0.795
KFP 9		0.598
KFP 10		0.638

Tabel 28. Uji Validitas Indikator **Kelestarian fungsi produksi (ekonomi)**

Kelestarian fungsi produksi (ekonomi)	r-Tabel	r-Hitung	Signifikansi
KFP 1	0,361	0.779	0,000
KFP 2	0,361	0.737	0,000
KFP 3	0,361	0.805	0,000
KFP 4	0,361	0.799	0,000
KFP 5	0,361	0.765	0,000
KFP 6	0,361	0.842	0,000
KFP 7	0,361	0.735	0,000
KFP 8	0,361	0.841	0,000
KFP 9	0,361	0.692	0,000
KFP 10	0,361	0.710	0,000

Tabel 29. Uji Reliabilitas Terhadap Indikator **Kelestarian fungsi Ekologi**

Variabel	Cronbach alpha	Corrected item-total correlation
<b>Kelestarian fungsi ekologi</b>	0.907	
KFE 1		0.771
KFE 2		0.738
KFE 3		0.767
KFE 4		0.823
KFE 5		0.659
KFE 6		0.707

Tabel 30. Uji Validitas Terhadap Indikator **Kelestarian fungsi Ekologi**

Kelestarian fungsi ekologi	r-Tabel	r-Hitung	Signifikansi
KFE 1	0,361	0.845	0,000
KFE 2	0,361	0.828	0,000
KFE 3	0,361	0.849	0,000
KFE 4	0,361	0.883	0,000
KFE 5	0,361	0.749	0,000
KFE 6	0,361	0.803	0,000

Tabel 31. Uji Reliabilitas Terhadap Indikator **Kelestarian fungsi Sosial**

Variabel	Cronbach alpha	Corrected item-total correlation
<b>Kelestarian fungsi sosial</b>	0.820	
KFS 1		0.259
KFS 2		0.206
KFS 3		0.191
KFS 4		0.570
KFS 5		0.567
KFS 6		0.652
KFS 7		0.695
KFS 8		0.358
KFS 9		0.587
KFS 10		0.632
KFS 11		0.723
KFS 12		0.361

Tabel 32. Uji Validitas Terhadap Indikator **Kelestarian fungsi Sosial**

Kelestarian fungsi sosial	r-Tabel	r-Hitung	Signifikansi
KFS 1	0,361	0.390	0.005
KFS 2	0,361	0.338	0.016
KFS 3	0,361	0.354	0.012
KFS 4	0,361	0.674	0.000
KFS 5	0,361	0.676	0.000
KFS 6	0,361	0.741	0.000
KFS 7	0,361	0.773	0.000
KFS 8	0,361	0.454	0.001
KFS 9	0,361	0.662	0.000
KFS 10	0,361	0.703	0.000
KFS 11	0,361	0.780	0.000
KFS 12	0,361	0.463	0.001

### LAMPIRAN 3. STATISTIK

L I S R E L 8.70

BY

Karl G. Jöreskog & Dag Sörbom

This program is published exclusively by  
Scientific Software International, Inc.  
7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100  
Lincolnwood, IL 60712, U.S.A.

Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140  
Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2004  
Use of this program is subject to the terms specified in the  
Universal Copyright Convention.  
Website: [www.ssicentral.com](http://www.ssicentral.com)

The following lines were read from file C:\Program Files\SPSS Evaluation\data  
silvana tgl 12 febr.spj:

MODEL STRUKTURAL  
Raw Data from file 'C:\Program Files\SPSS Evaluation\DATA SILVANA TGL 12  
FEBRU.psf'  
Latent Variables MODAL STRATEGI KETERL KEBERDY PENGELO  
Relationships  
MS1-MS8 = MODAL  
SPM1 - SPM9 = STRATEGI  
KDS1-KDS11 = KETERL  
KM1-KM3 = KEBERDY  
PSD1-PSD3 = PENGELO  
STRATEGI KETERL KEBERDY PENGELO = MODAL  
KEBERDY PENGELO = STRATEGI KETERL  
PENGELO = KEBERDY  
Path Diagram  
End of Problem

Sample Size = 240

Number of Iterations = 16

LISREL Estimates (Maximum Likelihood)



### Measurement Equations

$$\text{SPM1} = 1.11 \cdot \text{STRATEGI}, \text{ Errorvar.} = 0.34, R^2 = 0.79$$

(0.035)  
9.66

$$\text{SPM2} = 0.82 \cdot \text{STRATEGI}, \text{ Errorvar.} = 0.53, R^2 = 0.67$$

(0.060)                      (0.052)  
17.24                              10.24

$$\text{SPM3} = 0.92 \cdot \text{STRATEGI}, \text{ Errorvar.} = 0.21, R^2 = 0.84$$

(0.047)                      (0.023)  
22.22                              9.09

$$\text{SPM4} = 0.83 \cdot \text{STRATEGI}, \text{ Errorvar.} = 0.44, R^2 = 0.69$$

(0.055)                      (0.043)  
17.84                              10.16

$$\text{SPM5} = 0.95 \cdot \text{STRATEGI}, \text{ Errorvar.} = 0.14, R^2 = 0.90$$

(0.045)                      (0.017)  
24.31                              7.79

$$\text{SPM6} = 0.93 \cdot \text{STRATEGI}, \text{ Errorvar.} = 0.20, R^2 = 0.86$$

(0.048)                      (0.023)  
22.81                              8.82

$$\text{SPM7} = 0.52 \cdot \text{STRATEGI}, \text{ Errorvar.} = 0.86, R^2 = 0.27$$

(0.064)                      (0.080)  
8.84                                10.80

$$\text{SPM8} = 0.84 \cdot \text{STRATEGI}, \text{ Errorvar.} = 0.41, R^2 = 0.71$$

(0.055)                      (0.041)  
18.46                              10.07

$$\text{SPM9} = 0.67 \cdot \text{STRATEGI}, \text{ Errorvar.} = 0.85, R^2 = 0.45$$

(0.067)                      (0.080)  
12.35                              10.65

$$\text{KDS1} = 0.92 \cdot \text{KETERL}, \text{ Errorvar.} = 0.17, R^2 = 0.84$$

(0.020)  
8.74

$$\text{KDS2} = 0.76 \cdot \text{KETERL}, \text{ Errorvar.} = 0.46, R^2 = 0.58$$

(0.051)                      (0.045)  
15.99                              10.36

$$\text{KDS3} = 0.86 \cdot \text{KETERL}, \text{ Errorvar.} = 0.26, R^2 = 0.74$$

(0.042)                      (0.026)  
20.58                              9.78

$$\text{KDS4} = 0.90 \cdot \text{KETERL}, \text{ Errorvar.} = 0.21, R^2 = 0.82$$

(0.042)                      (0.023)  
23.56                              9.10

$$\text{KDS5} = 0.82 \cdot \text{KETERL}, \text{ Errorvar.} = 0.38, R^2 = 0.67$$

(0.048)                      (0.037)  
18.26                              10.12

KDS6 = 0.84\*KETERL, Errorvar.= 0.36 , R<sup>2</sup> = 0.70  
 (0.048) (0.036)  
 19.31 9.98

KDS7 = 0.84\*KETERL, Errorvar.= 0.29 , R<sup>2</sup> = 0.70  
 (0.043) (0.029)  
 19.39 9.97

KDS8 = 0.92\*KETERL, Errorvar.= 0.18 , R<sup>2</sup> = 0.84  
 (0.039) (0.020)  
 24.44 8.81

KDS9 = 0.53\*KETERL, Errorvar.= 0.94 , R<sup>2</sup> = 0.19  
 (0.065) (0.087)  
 7.12 10.84

KDS10 = 0.59\*KETERL, Errorvar.= 0.94 , R<sup>2</sup> = 0.24  
 (0.066) (0.087)  
 8.30 10.80

KDS11 = 0.60\*KETERL, Errorvar.= 0.91 , R<sup>2</sup> = 0.36  
 (0.066) (0.085)  
 10.72 10.71

KM1 = 0.93\*KEBERDY, Errorvar.= 0.10 , R<sup>2</sup> = 0.86  
 (0.037)  
 2.83

KM2 = 0.65\*KEBERDY, Errorvar.= 0.58 , R<sup>2</sup> = 0.43  
 (0.062) (0.059)  
 10.62 9.76

KM3 = 0.78\*KEBERDY, Errorvar.= 0.35 , R<sup>2</sup> = 0.60  
 (0.057) (0.044)  
 12.84 7.96

PSD1 = 0.93\*PENGELo, Errorvar.= 0.11 , R<sup>2</sup> = 0.87  
 (0.029)  
 3.97

PSD2 = 0.78\*PENGELo, Errorvar.= 0.38 , R<sup>2</sup> = 0.61  
 (0.051) (0.042)  
 15.11 9.15

PSD3 = 0.85\*PENGELo, Errorvar.= 0.21 , R<sup>2</sup> = 0.73  
 (0.043) (0.029)  
 17.36 7.38

MS1 = 0.98\*MODAL, Errorvar.= 0.029 , R<sup>2</sup> = 0.96  
 (0.038) (0.0068)  
 20.81 4.28

MS2 = 0.50\*MODAL, Errorvar.= 0.78 , R<sup>2</sup> = 0.25  
 (0.062) (0.072)  
 8.14 10.84

MS3 = 0.84\*MODAL, Errorvar.= 0.17 , R<sup>2</sup> = 0.70  
 (0.039) (0.016)  
 15.99 10.21

$$\text{MS4} = 0.95 \cdot \text{MODAL}, \text{ Errorvar.} = 0.088, R^2 = 0.89$$

(0.044)	(0.011)
19.57	7.82

$$\text{MS5} = 0.76 \cdot \text{MODAL}, \text{ Errorvar.} = 0.24, R^2 = 0.58$$

(0.041)	(0.022)
13.89	10.52

$$\text{MS6} = 0.67 \cdot \text{MODAL}, \text{ Errorvar.} = 0.46, R^2 = 0.45$$

(0.053)	(0.043)
11.69	10.69

$$\text{MS7} = 0.78 \cdot \text{MODAL}, \text{ Errorvar.} = 0.24, R^2 = 0.60$$

(0.042)	(0.023)
14.25	10.48

$$\text{MS8} = 0.70 \cdot \text{MODAL}, \text{ Errorvar.} = 0.32, R^2 = 0.49$$

(0.045)	(0.030)
12.42	10.64

### Structural Equations

$$\text{STRATEGI} = 0.20 \cdot \text{MODAL}, \text{ Errorvar.} = 0.96, R^2 = 0.038$$

(0.066)	(0.11)
2.95	8.72

$$\text{KETERL} = 0.27 \cdot \text{MODAL}, \text{ Errorvar.} = 0.92, R^2 = 0.075$$

(0.066)	(0.10)
4.17	9.23

$$\text{KEBERDY} = 0.18 \cdot \text{STRATEGI} + 0.14 \cdot \text{KETERL} + 0.30 \cdot \text{MODAL}, \text{ Errorvar.} = 0.81, R^2 = 0.19$$

(0.065)	(0.066)	(0.069)	(0.10)
2.74	2.07	4.39	8.06

$$\text{PENGELO} = 0.031 \cdot \text{STRATEGI} + 0.020 \cdot \text{KETERL} + 0.42 \cdot \text{KEBERDY} + 0.24 \cdot \text{MODAL}, \text{ Errorvar.} = 0.70, R^2 = 0.30$$

(0.062)	(0.063)	(0.073)	(0.068)	(0.083)
0.51	0.32	5.77	3.56	8.43

### Reduced Form Equations

$$\text{STRATEGI} = 0.20 \cdot \text{MODAL}, \text{ Errorvar.} = 0.96, R^2 = 0.038$$

(0.066)
2.95

$$\text{KETERL} = 0.27 \cdot \text{MODAL}, \text{ Errorvar.} = 0.92, R^2 = 0.075$$

(0.066)
4.17

$$\text{KEBERDY} = 0.37 \cdot \text{MODAL}, \text{ Errorvar.} = 0.86, R^2 = 0.14$$

(0.067)
5.56

$$\text{PENGELO} = 0.39 \cdot \text{MODAL}, \text{ Errorvar.} = 0.85, R^2 = 0.15$$

(0.067)
5.83

## Goodness of Fit Statistics

Degrees of Freedom = 518  
Minimum Fit Function Chi-Square = 938.25 (P = 0.38)  
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 929.79 (P = 0.40)  
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 7.79  
90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 35.62)

Minimum Fit Function Value = 0.53  
Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.021  
90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.17)  
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.068  
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.07)  
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.88

Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 1.47  
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (1.38 ; 1.60)  
ECVI for Saturated Model = 1.98  
ECVI for Independence Model = 15.30

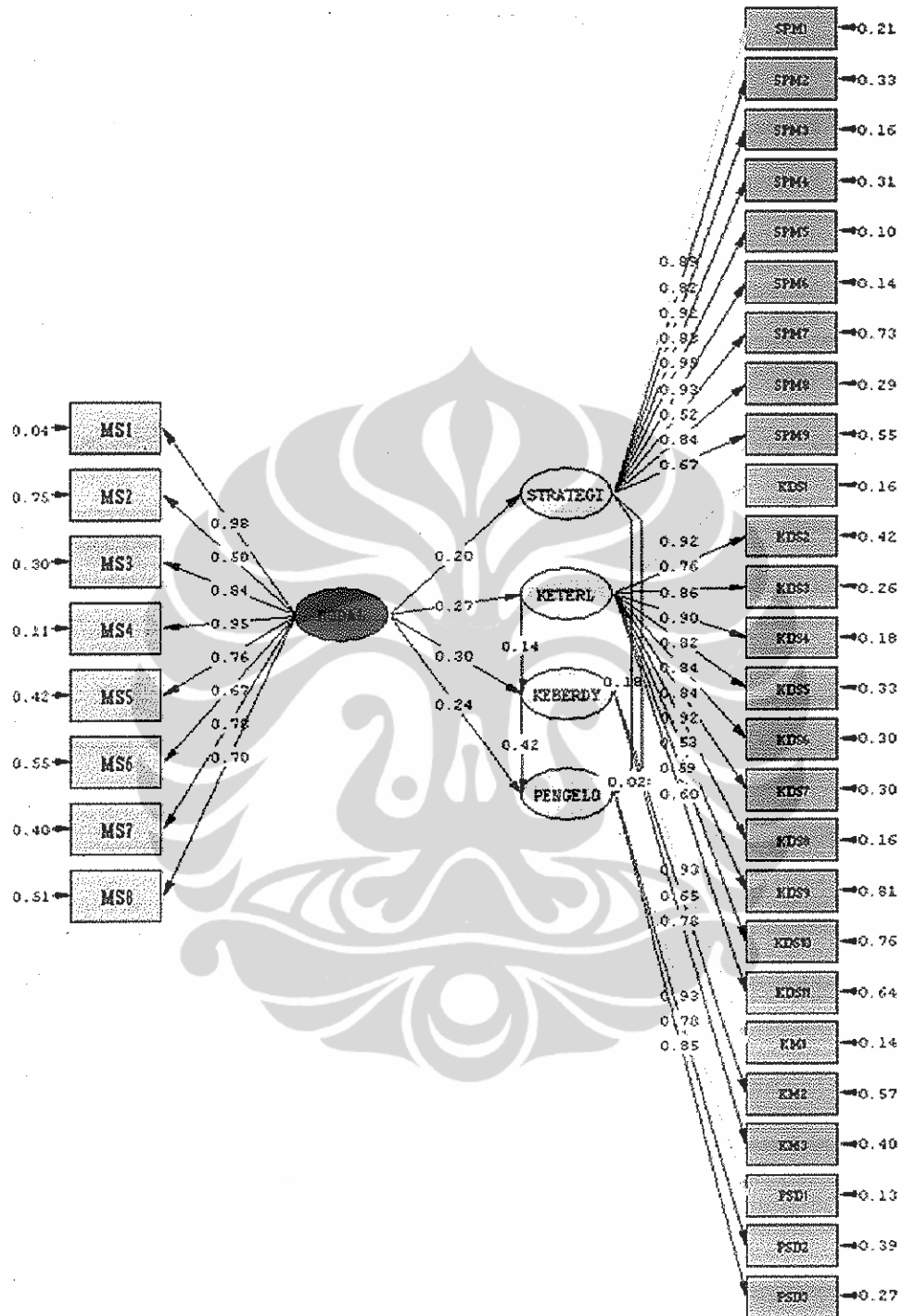
Chi-Square for Independence Model with 61 Degrees of Freedom = 5538.31  
Independence AIC = 5606.31  
Model AIC = 383.79  
Saturated AIC = 190.00  
Independence CAIC = 5758.65  
Model CAIC = 728.80  
Saturated CAIC = 855.98

Normed Fit Index (NFI) = 0.92  
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.96  
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.80  
Comparative Fit Index (CFI) = 0.94  
Incremental Fit Index (IFI) = 0.94  
Relative Fit Index (RFI) = 0.91

Critical N (CN) = 70.86

Root Mean Square Residual (RMR) = 0.181  
Standardized RMR = 0.047  
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.95  
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.59  
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.56

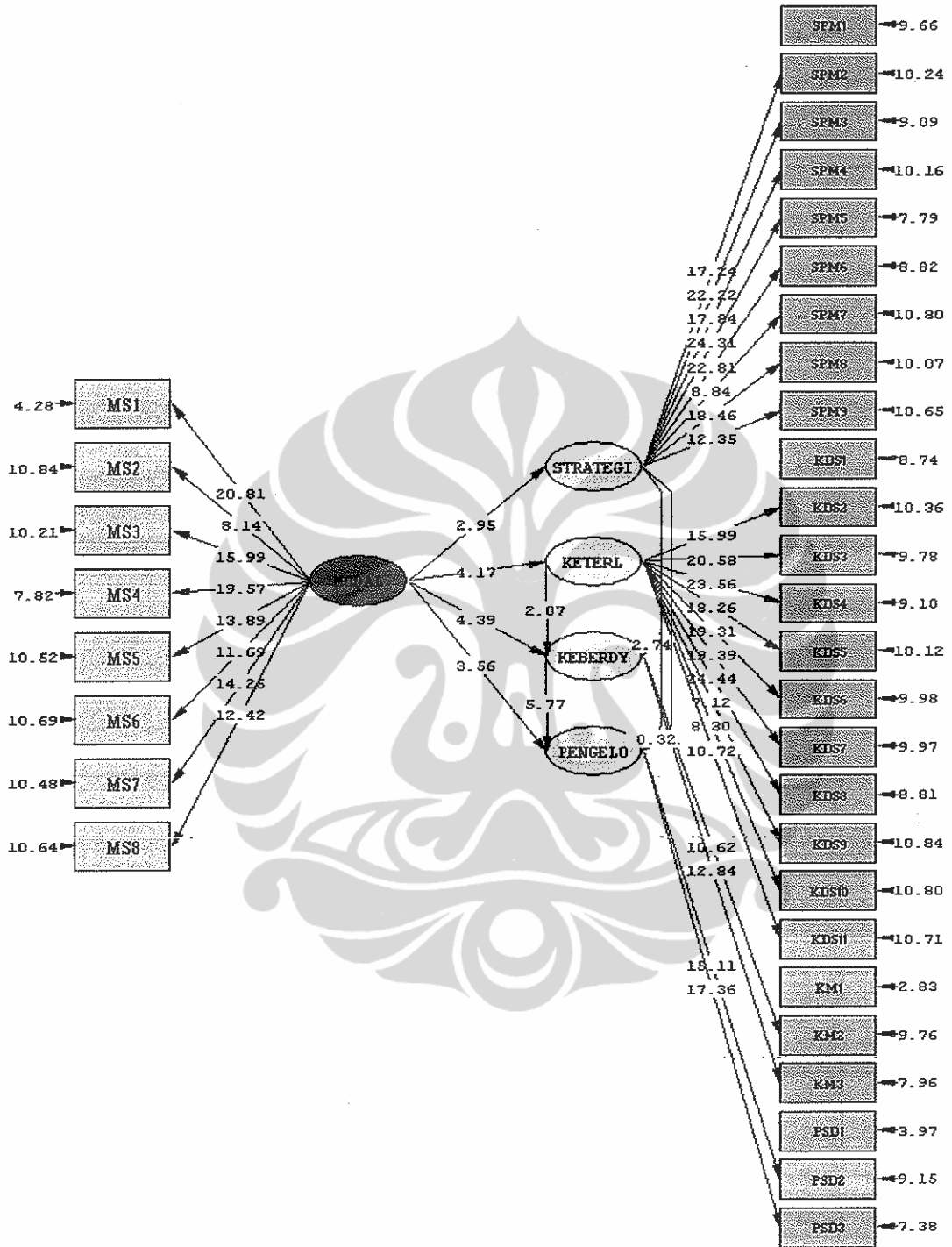
HASIL PERSAMAAN PENGUKURAN DENGAN STANDARDIZED REGRESSION  
(Lampiran 3)



Chi-Square=938.25, df=518, P-value=0.88, RMSEA=0.068

HASIL PERSAMAAN PENGUKURAN DENGAN NILAI CR

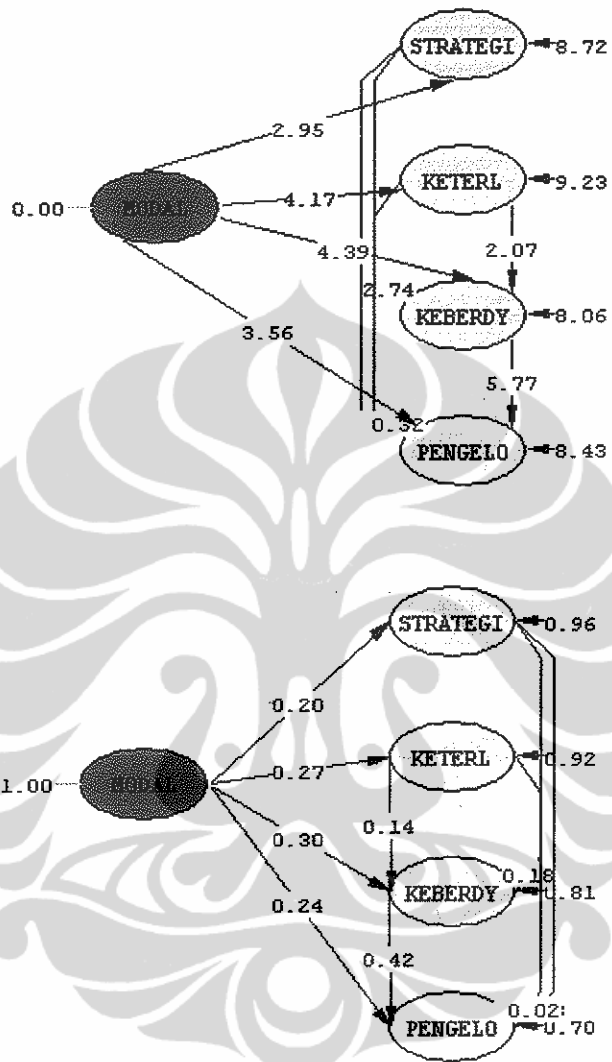
(Lampiran 3)



Chi-Square= 938.25 , df=518, P-value= 0.88 , RMSEA= 0.068

HASIL PERSAMAAN STRUKTURAL

(Lampiran 3)



LAMPIRAN 4

KONDISI EKSTING PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN  
YANG TERGABUNG DALAM 12 LMDH RESPONDEN

No,	Indikator	LMDH RM	LMDH RMK	LMDH TS	LMDH JA	LMDH AJ	LMDH WB	LMDH HM	LMDH KB	LMDH LT	LMDH MP	LMDH MM	LMDH SR
1.	Partisipasi	9	5	6,8	6	7,6	6	5,5	6	6	5	7	8
2.	Mengeluarkan Pendapatan	9	5	7,9	5	7,5	5	8	6	8	5,5	5	8
3.	Perubahan Kesadaran	9	6	7,6	5	6	6	7	6	6	5,5	7	8
4.	Melakukan Aksi	9	6	7,2	5	7	6	6,5	6	6	5,5	6	8
5.	Solidaritas	9	7	7,5	7	6,5	7	5,6	7	7	7	7	9
6.	Kerjasama	9	7	7,8	7	7,5	6	7	7	6	6,5	8	9
7.	Penciptaan Kreasi	9	5	6,9	5,2	6	4,5	5,5	5	6	5	5	9
8.	Menentukan Tujuan Baru	9	5	7,1	4,5	5,6	6	6	4,5	6	5,5	5	8
9.	Negoisasi	10	6	8,4	5	6,5	5	7	5	8	6	5	8
10.	Kepuasan	9	5	6,9	6	7,3	6	5,5	5,5	7	6	6	9
11.	Kepercayaan Diri	9	6	7,4	6	7,3	6	6,5	6	7	5	6	8
12.	Pengelolaan Administrasi dan ekonomi	9	5	7,2	4,5	5,7	4,5	6,6	4,5	6	4,5	4,5	9
	Jumlah	109	68	88,7	66,2	80,5	68	76,7	68,5	73	67	71,5	107
	Rata-rata	9,1	5,6	7,4	5,2	6,7	5,6	6,4	5,7	6,1	5,6	5,9	8,4

Sumber: Diolah peneliti dari data primer

Catatan: Nilai < 5,6 adalah tidak atau hampir tidak mempunyai sama sekali indikator yang dimaksud

Nilai 5,6 – 6,9 masih kurang mempunyai indikator yang dimaksud

Nilai 7,0 – 8,0 adalah cukup mempunyai indikator yang dimaksud

Nilai 8,1 – 10 adalah sangat mempunyai indikator yang dimaksud

RM= Rimba Makmur; RMk= Rimba Mekar, TS= Tani Sejahti, JA= Jaya Abadi, AJ= Agung Jaya, WB= Wana Boga,  
HM= Harapan Mukti, KH = Karya Bakti, LT = Lestari, MP = Mandiri Putra, MM = Mekar Makmur, SR = Sempur



## LAMPIRAN 5

### STATISTIK LMDH MAJU

L I S R E L 8.70

BY

Karl G. Jöreskog & Dag Sörbom

This program is published exclusively by  
Scientific Software International, Inc.  
7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100  
Lincolnwood, IL 60712, U.S.A.

Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140  
Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2004  
Use of this program is subject to the terms specified in the  
Universal Copyright Convention.  
Website: [www.ssicentral.com](http://www.ssicentral.com)

The following lines were read from file C:\Program Files\SPSS Evaluation\  
\SILVANA LMDHMAJU.spj:

Raw Data from file 'C:\Program Files\SPSS Evaluation\SILVANA BERKMBNG 30 MAR.psf'  
Latent Variables MS KM KDS PSD SPM  
Relationships  
MS1-MS8 = MS  
KDS1-KDS11 = KDS  
SPM1-SPM9 = SPM  
KM1-KM3 = KM  
PSD1-PSD3 = PSD  
SPM KM KDS PSD = MS  
PSD = KM KDS SPM

Path Diagram  
End of Problem

Sample Size = 120

Number of Iterations = 27

LISREL Estimates (Maximum Likelihood)

## Measurement Equations

$$\text{SPM1} = 0.99 \cdot \text{SPM}, \text{ Errorvar.} = 0.049, R^2 = 0.97$$

(0.0068)  
7.23

$$\text{SPM2} = 0.92 \cdot \text{SPM}, \text{ Errorvar.} = 0.28, R^2 = 0.84$$

(0.052) (0.036)  
13.19 7.64

$$\text{SPM3} = 0.96 \cdot \text{SPM}, \text{ Errorvar.} = 0.15, R^2 = 0.91$$

(0.040) (0.019)  
14.14 7.57

$$\text{SPM4} = 0.91 \cdot \text{SPM}, \text{ Errorvar.} = 0.28, R^2 = 0.84$$

(0.052) (0.037)  
13.08 7.64

$$\text{SPM5} = 1.00 \cdot \text{SPM}, \text{ Errorvar.} = 0.016, R^2 = 0.99$$

(0.023) (0.0026)  
15.29 6.10

$$\text{SPM6} = 1.00 \cdot \text{SPM}, \text{ Errorvar.} = 0.012, R^2 = 0.99$$

(0.023) (0.0022)  
15.32 5.48

$$\text{SPM7} = 0.54 \cdot \text{SPM}, \text{ Errorvar.} = 0.81, R^2 = 0.29$$

(0.083) (0.10)  
6.38 7.71

$$\text{SPM8} = 1.00 \cdot \text{SPM}, \text{ Errorvar.} = 0.0069, R^2 = 1.00$$

(0.022) (0.0017)  
15.37 4.06

$$\text{SPM9} = 0.83 \cdot \text{SPM}, \text{ Errorvar.} = 0.59, R^2 = 0.69$$

(0.073) (0.077)  
11.19 7.68

$$\text{KDS1} = 1.00 \cdot \text{KDS}, \text{ Errorvar.} = -0.00016, R^2 = 1.00$$

(0.0018)  
-0.087

$$\text{KDS2} = 1.00 \cdot \text{KDS}, \text{ Errorvar.} = 0.41, R^2 = 0.61$$

(0.059) (0.053)  
10.27 7.71

$$\text{KDS3} = 0.94 \cdot \text{KDS}, \text{ Errorvar.} = 0.13, R^2 = 0.88$$

(0.033) (0.016)  
13.65 7.69

$$\text{KDS4} = 0.99 \cdot \text{KDS}, \text{ Errorvar.} = 0.017, R^2 = 0.99$$

(0.012) (0.0029)  
15.21 5.89

$$\text{KDS5} = 0.82 \cdot \text{KDS}, \text{ Errorvar.} = 0.36, R^2 = 0.68$$

(0.055) (0.047)  
11.03 7.71

KDS6 = 0.96\*KDS, Errorvar.= 0.090 , R<sup>2</sup> = 0.92  
 (0.028) (0.012)  
 14.28 7.64

KDS7 = 0.87\*KDS, Errorvar.= 0.27 , R<sup>2</sup> = 0.75  
 (0.048) (0.035)  
 11.99 7.71

KDS8 = 0.96\*KDS, Errorvar.= 0.088 , R<sup>2</sup> = 0.92  
 (0.027) (0.012)  
 14.29 7.64

KDS9 = 0.51\*KDS, Errorvar.= 0.80 , R<sup>2</sup> = 0.24  
 (0.082) (0.10)  
 5.73 7.71

KDS10 = 0.53\*KDS, Errorvar.= 1.00 , R<sup>2</sup> = 0.28  
 (0.092) (0.13)  
 6.24 7.71

KDS11 = 0.64\*KDS, Errorvar.= 0.87 , R<sup>2</sup> = 0.40  
 (0.085) (0.11)  
 7.76 7.71

KM1 = 0.92\*KM, Errorvar.= 0.14 , R<sup>2</sup> = 0.85  
 (0.039)  
 3.65

KM2 = 0.83\*KM, Errorvar.= 0.34 , R<sup>2</sup> = 0.68  
 (0.071) (0.056)  
 10.74 6.19

KM3 = 0.89\*KM, Errorvar.= 0.22 , R<sup>2</sup> = 0.79  
 (0.067) (0.047)  
 12.07 4.69

PSD1 = 0.88\*PSD, Errorvar.= 0.19 , R<sup>2</sup> = 0.78  
 (0.027)  
 7.15

PSD2 = 0.84\*PSD, Errorvar.= 0.27 , R<sup>2</sup> = 0.70  
 (0.061) (0.035)  
 12.99 7.50

PSD3 = 0.86\*PSD, Errorvar.= 0.22 , R<sup>2</sup> = 0.75  
 (0.058) (0.031)  
 13.86 7.33

MS1 = 0.95\*MS, Errorvar.= 0.078 , R<sup>2</sup> = 0.90  
 (0.059) (0.011)  
 13.88 6.94

MS2 = 0.66\*MS, Errorvar.= 0.46 , R<sup>2</sup> = 0.43  
 (0.073) (0.060)  
 8.08 7.65

MS3 = 0.87\*MS, Errorvar.= 0.13 , R<sup>2</sup> = 0.76  
 (0.052) (0.017)  
 12.00 7.44

$MS4 = 0.92*MS$ , Errorvar.= 0.14 ,  $R^2 = 0.84$   
 (0.065) (0.019)  
 13.12 7.24  
 $MS5 = 0.93*MS$ , Errorvar.= 0.086 ,  $R^2 = 0.86$   
 (0.054) (0.012)  
 13.36 7.17  
 $MS6 = 0.97*MS$ , Errorvar.= 0.046 ,  $R^2 = 0.93$   
 (0.055) (0.0072)  
 14.39 6.49  
 $MS7 = 0.98*MS$ , Errorvar.= 0.023 ,  $R^2 = 0.97$   
 (0.053) (0.0043)  
 14.89 5.20  
 $MS8 = 0.96*MS$ , Errorvar.= 0.056 ,  $R^2 = 0.91$   
 (0.055) (0.0083)  
 14.14 6.75

### Structural Equations

$KM = 0.34*MS + 0.18*KDS + 0.19*SPM$  Errorvar.= 0.88 ,  $R^2 = 0.12$   
 (0.094) (0.094) (0.091) (0.14)  
 3.60 2.02 2.08 6.28  
 $KDS = 0.32*MS$ , Errorvar.= 0.90 ,  $R^2 = 0.10$   
 (0.090) (0.12)  
 3.53 7.70  
 $PSD = 0.11*KM + 0.016*KDS + 0.024*SPM + 0.98*MS$ , Errorvar.= 0.029 ,  $R^2 = 1.03$   
 (0.033) (0.030) (0.030) (0.080) (0.017)  
 3.35 0.52 0.81 12.25 1.74  
 $SPM = 0.21*MS$ , Errorvar.= 0.96 ,  $R^2 = 0.044$   
 (0.091) (0.13)  
 2.29 7.50

### Reduced Form Equations

$KM = 0.34*MS$ , Errorvar.= 0.88,  $R^2 = 0.12$   
 (0.094)  
 3.60  
 $KDS = 0.32*MS$ , Errorvar.= 0.90,  $R^2 = 0.10$   
 (0.090)  
 3.53  
 $PSD = 1.01*MS$ , Errorvar.= -0.018,  $R^2 = 1.02$   
 (0.081)  
 12.45  
 $SPM = 0.21*MS$ , Errorvar.= 0.96,  $R^2 = 0.044$   
 (0.091)  
 2.29

**Goodness of Fit Statistics**  
(Lampiran 5)

Degrees of Freedom = 520  
Minimum Fit Function Chi-Square = 980.93 (P = 0.39)  
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 979.43 (P = 0.41)  
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 1217.43  
90 Percent Confidence Interval for NCP = (1094.73 ; 1347.70)

Minimum Fit Function Value = 15.52  
Population Discrepancy Function Value (F0) = 10.23  
90 Percent Confidence Interval for F0 = (9.20 ; 11.33)  
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.051  
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.01 ; 0.071)  
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.89

Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 15.86  
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (14.83 ; 16.96)  
ECVI for Saturated Model = 10.00  
ECVI for Independence Model = 104.70

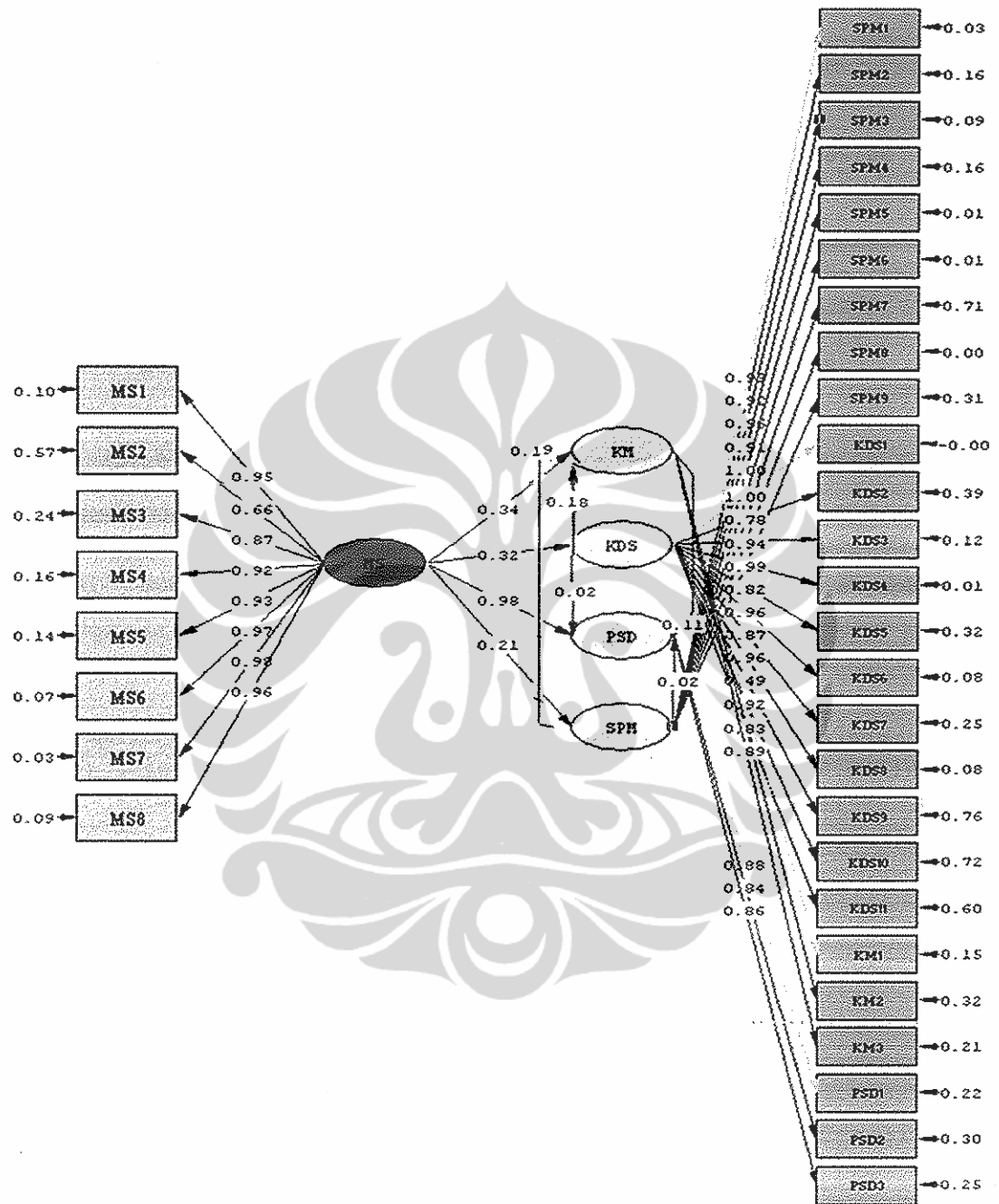
Chi-Square for Independence Model with 561 Degrees of Freedom = 12391.04  
Independence AIC = 12459.04  
Model AIC = 1887.43  
Saturated AIC = 1190.00  
Independence CAIC = 12587.81  
Model CAIC = 2171.49  
Saturated CAIC = 3443.56

Normed Fit Index (NFI) = 0.92  
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.95  
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.90  
Comparative Fit Index (CFI) = 0.93  
Incremental Fit Index (IFI) = 0.93  
Relative Fit Index (RFI) = 0.91

Critical N (CN) = 39.53

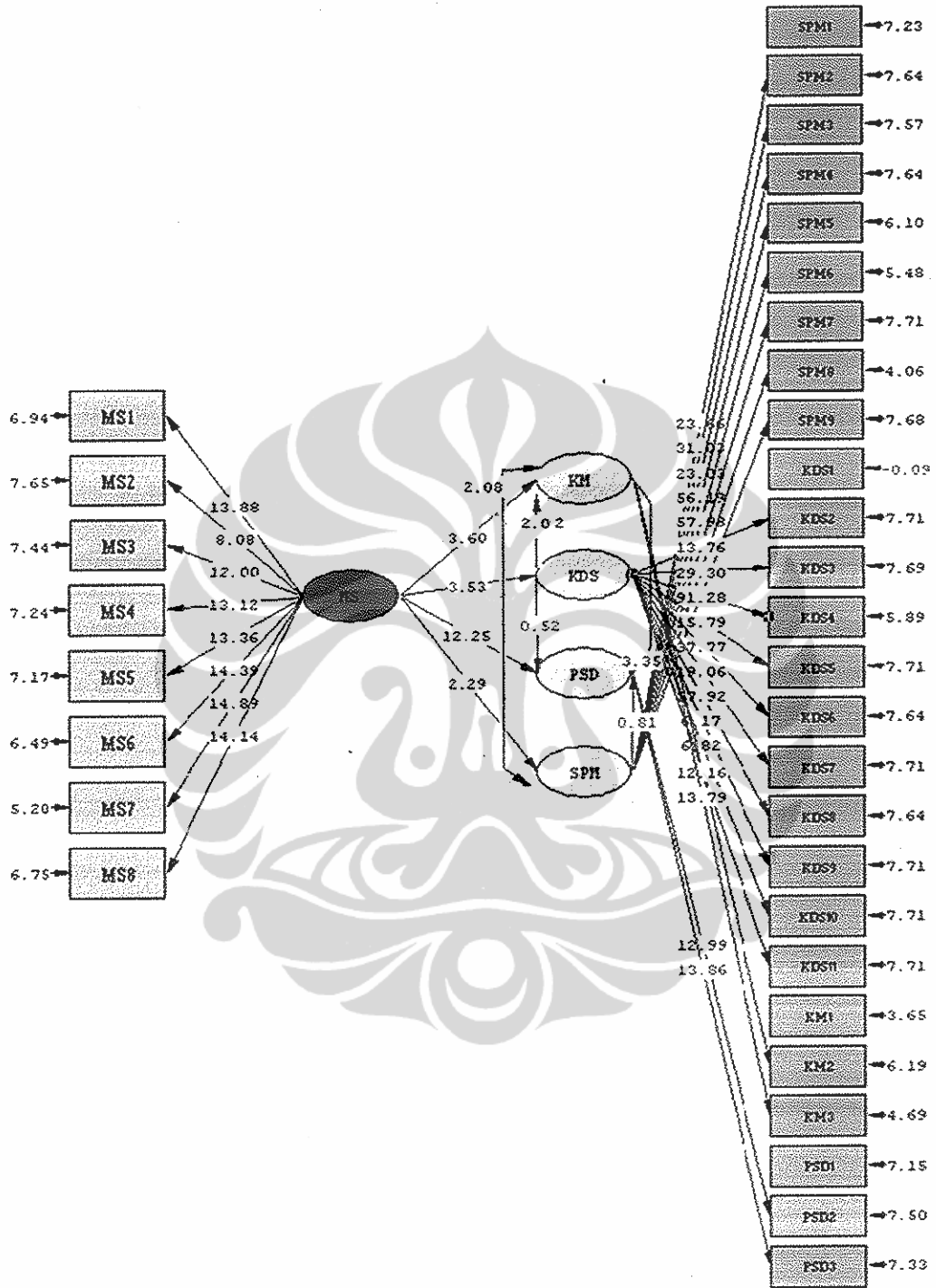
Root Mean Square Residual (RMR) = 0.087  
Standardized RMR = 0.077  
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.93  
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.91  
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.89

GAMBAR UNTUK STANDARDIZED LMDH MAJU  
(Lampiran 5)



Chi-Square= 979.43 , df=520, P-value= 0.89 , RMSEA= 0.051

GAMBAR UNTUK NILAI CR LMDH MAJU  
(Lampiran 5)



Chi-Square= 979.43 , df=520, P-value= 0.89 , RMSEA= 0.051

## LAMPIRAN 6

### STATISTIK LMDH BELUM MAJU

L I S R E L 8.70

BY

Karl G. Jöreskog & Dag Sörbom

This program is published exclusively by  
Scientific Software International, Inc.

7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100

Lincolnwood, IL 60712, U.S.A.

Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140

Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2004

Use of this program is subject to the terms specified in the  
Universal Copyright Convention.

Website: [www.ssicentral.com](http://www.ssicentral.com)

The following lines were read from file C:\Program Files\SPSS Evaluation\  
silvana belulm maju 30 mar.spj:

```
model tidak berkembang
Raw Data from file 'C:\Program Files\SPSS Evaluation\SILVANA BELUM MAJU TG 30
MAR.psf'
Latent Variables  MS SPM KM KDS PSD
Relationships
MS1-MS8 = MS
SPM1-SPM9 = SPM
KDS1-KDS11 = KDS
KM1-KM3 = KM
PSD1-PSD3 = PSD
SPM KM KDS PSD = MS
KM = SPM KDS
PSD = SPM KM KDS
Path Diagram
End of Problem

Sample Size = 120

model tidak berkembang
```



Number of Iterations = 24

LISREL Estimates (Maximum Likelihood)

### Measurement Equations

SPM1 = 0.75\*SPM, Errorvar.= 0.58 , R<sup>2</sup> = 0.56  
(0.087)  
6.72

SPM2 = 0.67\*SPM, Errorvar.= 0.75 , R<sup>2</sup> = 0.45  
(0.11) (0.11)  
7.28 7.07

SPM3 = 0.83\*SPM, Errorvar.= 0.26 , R<sup>2</sup> = 0.69  
(0.084) (0.044)  
9.15 5.96

SPM4 = 0.65\*SPM, Errorvar.= 0.59 , R<sup>2</sup> = 0.43  
(0.094) (0.083)  
7.06 7.13

SPM5 = 0.84\*SPM, Errorvar.= 0.27 , R<sup>2</sup> = 0.70  
(0.087) (0.047)  
9.24 5.86

SPM6 = 0.79\*SPM, Errorvar.= 0.41 , R<sup>2</sup> = 0.62  
(0.095) (0.063)  
8.66 6.42

SPM7 = 0.57\*SPM, Errorvar.= 0.83 , R<sup>2</sup> = 0.33  
(0.10) (0.11)  
6.10 7.34

SPM8 = 0.52\*SPM, Errorvar.= 0.72 , R<sup>2</sup> = 0.27  
(0.094) (0.097)  
5.53 7.43

SPM9 = 0.29\*SPM, Errorvar.= 1.03 , R<sup>2</sup> = 0.083  
(0.10) (0.14)  
3.03 7.64

KDS1 = 0.84\*KDS, Errorvar.= 0.32 , R<sup>2</sup> = 0.69  
(0.048)  
6.53

KDS2 = 0.81\*KDS, Errorvar.= 0.50 , R<sup>2</sup> = 0.57  
(0.085) (0.071)  
9.50 7.02

KDS3 = 0.73\*KDS, Errorvar.= 0.36 , R<sup>2</sup> = 0.59  
(0.074) (0.053)  
9.78 6.95

KDS4 = 0.86\*KDS, Errorvar.= 0.37 , R<sup>2</sup> = 0.67  
       (0.080)                   (0.056)  
       10.69                   6.66

KDS5 = 0.85\*KDS, Errorvar.= 0.41 , R<sup>2</sup> = 0.64  
       (0.082)                   (0.060)  
       10.33                   6.79

KDS6 = 0.77\*KDS, Errorvar.= 0.66 , R<sup>2</sup> = 0.47  
       (0.092)                   (0.091)  
       8.38                   7.24

KDS7 = 0.75\*KDS, Errorvar.= 0.33 , R<sup>2</sup> = 0.63  
       (0.073)                   (0.048)  
       10.28                   6.80

KDS8 = 0.86\*KDS, Errorvar.= 0.29 , R<sup>2</sup> = 0.72  
       (0.076)                   (0.045)  
       11.36                   6.35

KDS9 = 0.42\*KDS, Errorvar.= 1.07 , R<sup>2</sup> = 0.14  
       (0.10)                   (0.14)  
       4.14                   7.63

KDS10 = 0.42\*KDS, Errorvar.= 0.93 , R<sup>2</sup> = 0.16  
       (0.095)                   (0.12)  
       4.42                   7.61

KDS11 = 0.61\*KDS, Errorvar.= 0.99 , R<sup>2</sup> = 0.27  
       (0.10)                   (0.13)  
       5.93                   7.52

KM1 = 0.72\*KM, Errorvar.= 0.065, R<sup>2</sup> = 0.89  
                                  (0.12)  
                                  0.52

KM2 = 0.42\*KM, Errorvar.= 0.77 , R<sup>2</sup> = 0.19  
       (0.13)                   (0.11)  
       3.33                   7.06

KM3 = 0.48\*KM, Errorvar.= 0.43 , R<sup>2</sup> = 0.35  
       (0.13)                   (0.078)  
       3.74                   5.49

PSD1 = 0.92\*PSD, Errorvar.= 0.14 , R<sup>2</sup> = 0.84  
                                  (0.043)  
                                  3.13

PSD2 = 0.79\*PSD, Errorvar.= 0.40 , R<sup>2</sup> = 0.62  
       (0.077)                   (0.064)  
       10.53                   6.29

PSD3 = 0.87\*PSD, Errorvar.= 0.17 , R<sup>2</sup> = 0.75  
       (0.060)                   (0.037)  
       11.90                   4.65

MS1 = 0.95\*MS, Errorvar.= 0.056 , R<sup>2</sup> = 0.90  
       (0.052)                   (0.014)  
       13.80                   4.07

MS2 = 0.32\*MS, Errorvar.= 1.01 , R<sup>2</sup> = 0.10  
 (0.097) (0.13)  
 3.54 7.67

MS3 = 0.86\*MS, Errorvar.= 0.16 , R<sup>2</sup> = 0.74  
 (0.057) (0.023)  
 11.65 6.73

MS4 = 0.95\*MS, Errorvar.= 0.079 , R<sup>2</sup> = 0.91  
 (0.063) (0.020)  
 13.85 3.95

MS5 = 0.58\*MS, Errorvar.= 0.33 , R<sup>2</sup> = 0.33  
 (0.060) (0.044)  
 6.75 7.55

MS6 = 0.42\*MS, Errorvar.= 0.80 , R<sup>2</sup> = 0.17  
 (0.088) (0.11)  
 4.66 7.64

MS7 = 0.52\*MS, Errorvar.= 0.40 , R<sup>2</sup> = 0.27  
 (0.065) (0.053)  
 5.99 7.59

MS8 = 0.41\*MS, Errorvar.= 0.51 , R<sup>2</sup> = 0.17  
 (0.070) (0.067)  
 4.64 7.64

### Structural Equations

SPM = 0.0038\*MS, Errorvar.= 1.00 , R<sup>2</sup> = 0.00  
 (0.098) (0.22)  
 0.039 4.63

KM = 0.033\*SPM + 0.21\*KDS + 0.090\*MS, Errorvar.= 0.95 , R<sup>2</sup> = 0.054  
 (0.099) (0.099) (0.097) (0.27)  
 0.33 2.16 0.93 3.47

KDS = 0.020\*MS, Errorvar.= 1.00 , R<sup>2</sup> = 0.00040  
 (0.097) (0.18)  
 0.21 5.49

PSD = 0.0068\*SPM + 0.010\*KM + 0.058\*KDS + 0.15\*MS, Errorvar.= 0.97 , R<sup>2</sup> = 0.026  
 (0.100) (0.10) (0.10) (0.098) (0.16)  
 0.068 0.098 0.57 1.51 6.12

### Reduced Form Equations

SPM = 0.0038\*MS, Errorvar.= 1.00, R<sup>2</sup> = 0.00  
 (0.098)  
 0.039

KM = 0.086\*MS, Errorvar.= 0.99, R<sup>2</sup> = 0.0073  
 (0.099)  
 0.87

KDS = 0.020\*MS, Errorvar.= 1.00, R<sup>2</sup> = 0.00040  
 (0.097)  
 0.21

PSD = 0.15\*MS, Errorvar.= 0.98, R<sup>2</sup> = 0.022  
 (0.098)  
 1.51

**Goodness of Fit Statistics  
(Lampiran 6)**

Degrees of Freedom = 518  
Minimum Fit Function Chi Square = 940.55 (P = 0.41)  
Normal Theory Weighted Least Squares Chi Square = 960.20 (P = 0.45)  
Estimated Non centrality Parameter (NCP) = 555.20  
90 Percent Confidence Interval for NCP = (465.18 ; 652.98)

Minimum Fit Function Value = 8.74  
Population Discrepancy Function Value (F0) = 4.67  
90 Percent Confidence Interval for F0 = (3.91 ; 5.49)  
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.075  
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.060 ; 0.10)  
P Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.93

Expected Cross Validation Index (ECVI) = 10.31  
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (9.56 ; 11.13)  
ECVI for Saturated Model = 10.00  
ECVI for Independence Model = 36.21

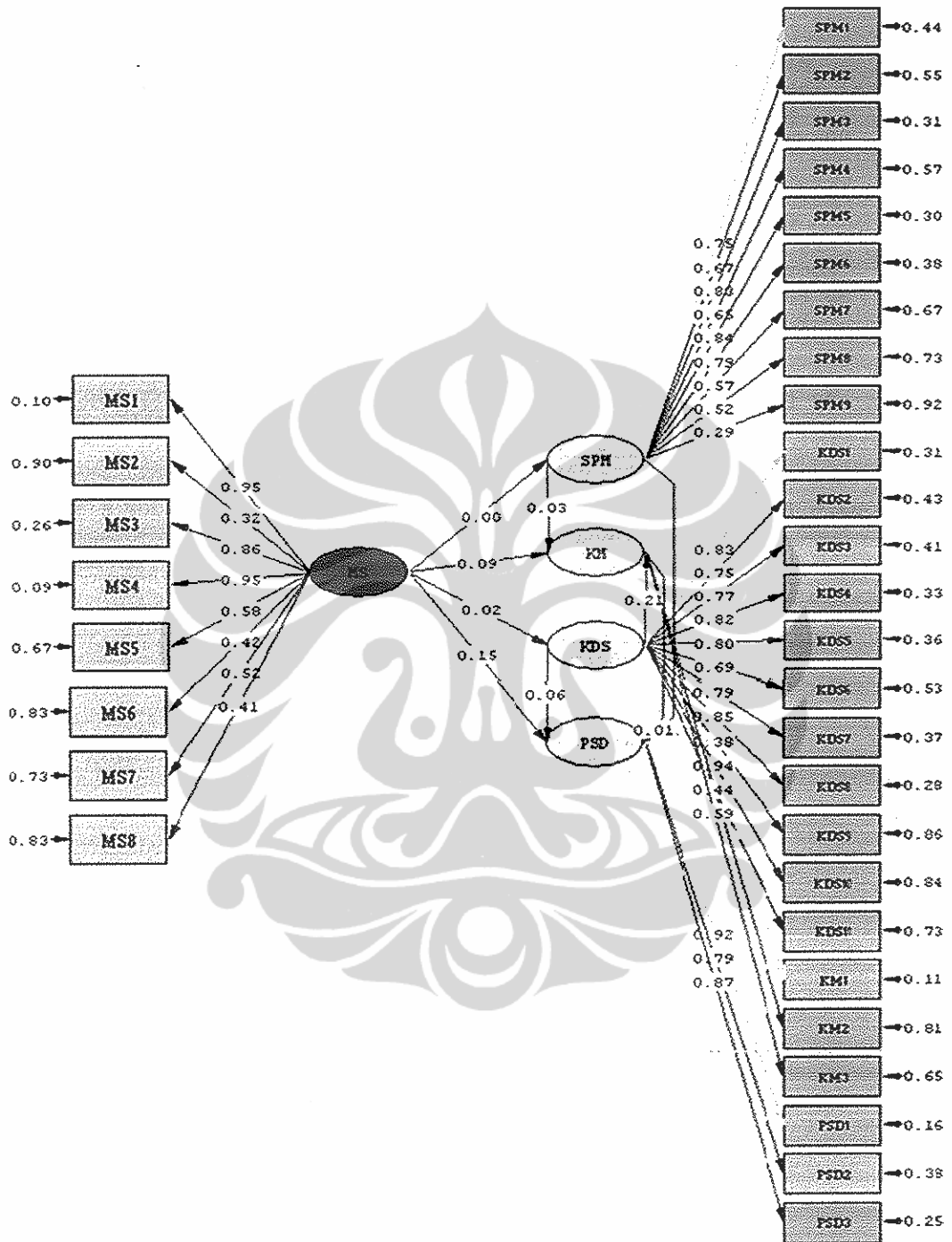
Chi Square for Independence Model with 561 Degrees of Freedom = 4240.74  
Independence AIC = 4308.74  
Model AIC = 1227.20  
Saturated AIC = 1190.00  
Independence CAIC = 4437.52  
Model CAIC = 1518.84  
Saturated CAIC = 3443.56

Normed Fit Index (NFI) = 0.92  
Non Normed Fit Index (NNFI) = 0.95  
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.90  
Comparative Fit Index (CFI) = 0.96  
Incremental Fit Index (IFI) = 0.96  
Relative Fit Index (RFI) = 0.91

Critical N (CN) = 69.14

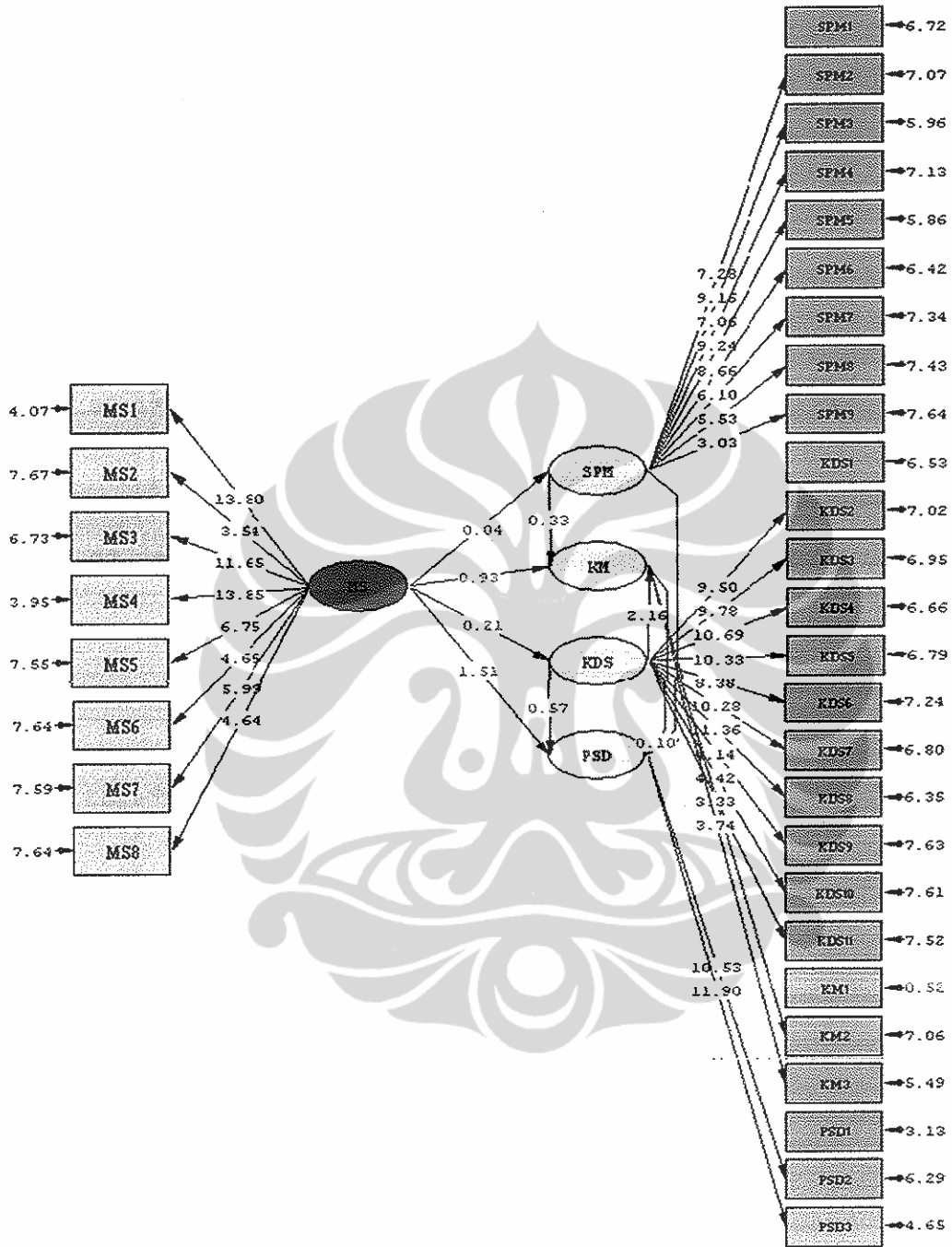
Root Mean Square Residual (RMR) = 0.097  
Standardized RMR = 0.098  
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.93  
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.91  
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.89

Gambar Standardized LMDH belum maju  
(Lampiran 6)



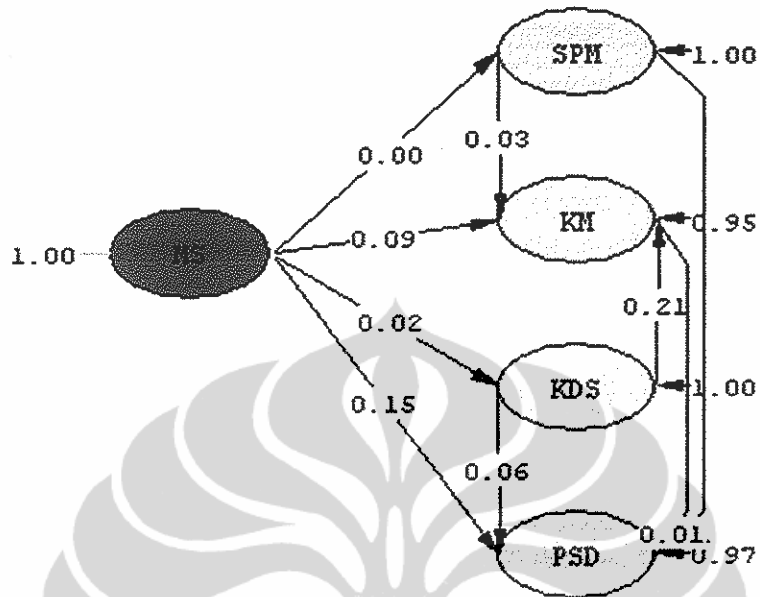
Chi-Square= 960.20, df=518, P-value= 0.93 , RMSEA= 0.075

Gambar CR LMDH belum maju  
(Lampiran 6)

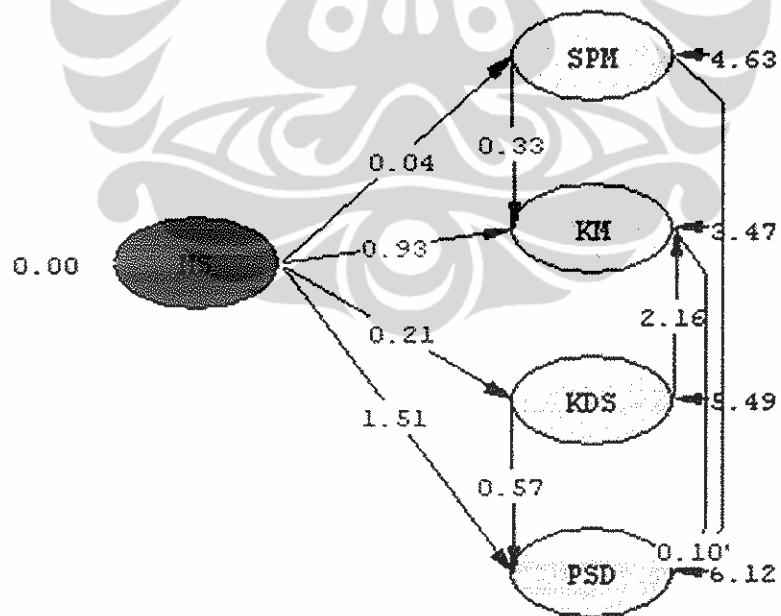


Chi-Square= 960.20, df=518, P-value= 0.93 , RMSEA= 0.075

Struktur Model Dengan Standardized  
(Lampiran 6)



Struktur Model Dengan CR



**LAMPIRAN 7**

**FOTO-FOTO PELAKSANAAN PENELITIAN**





# LMDH RIMBA MAKMUR



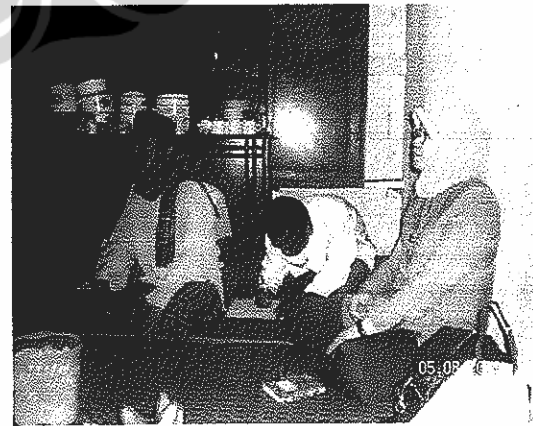
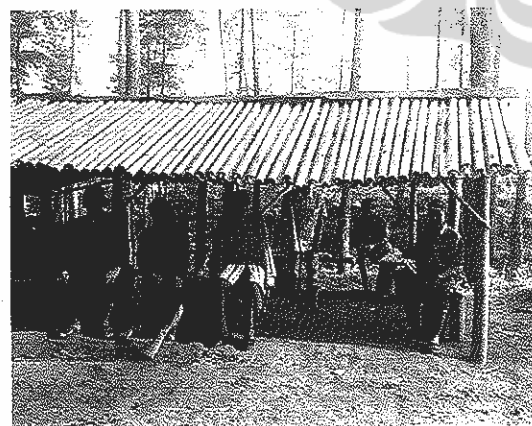
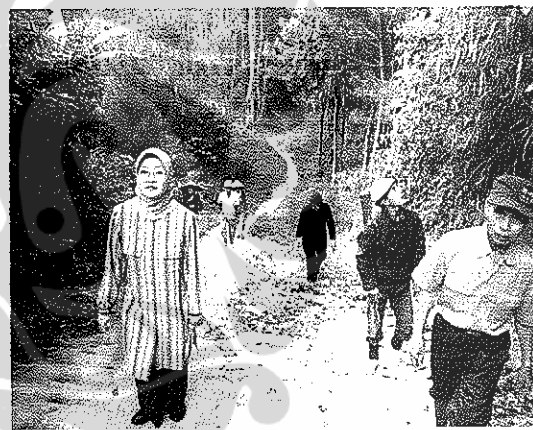
# LMDH RIMBA MEKAR



# LMDH TANI SEJATI



# LMDH JAYA ABADI



# LMDH AGUNG JAYA

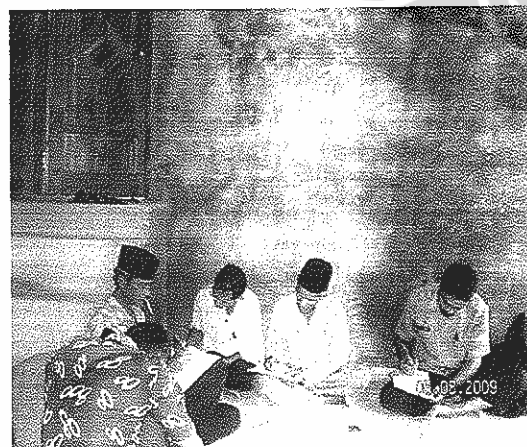


## HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

- Memegang teguh dan melaksanakan AD/ART
- Memunjung tinggi nama baik dan kehormatan lembaga
- Melaksanakan keseluruhan program kerja LMDH
- Menghadiri tiap-tiap rapat dan berperan aktif pada kegiatan LMDH
- Memelihara terwujudnya persatuan dan kesatuan antara sesama anggota



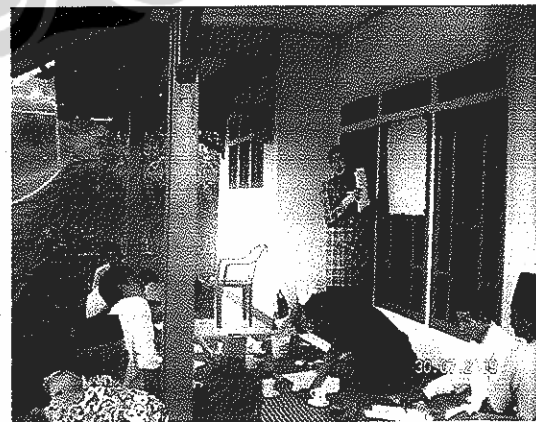
# LMDH WANA BOGA



# LMDH HARAPAN MUKTI

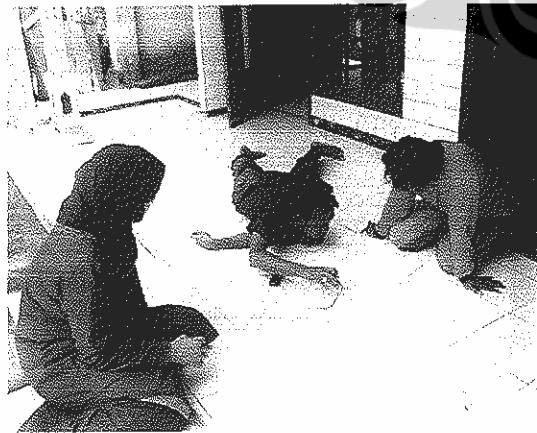


# LMDH KARYA BAKTI

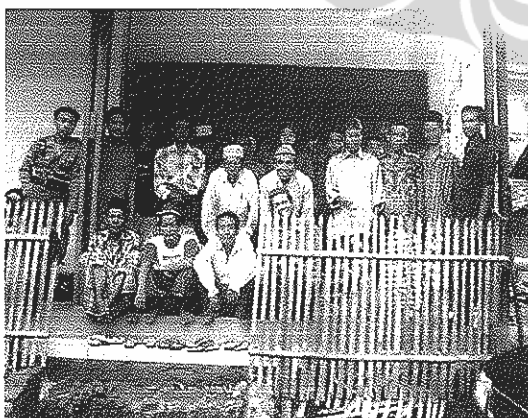




# LMDH LESTARI



# LMDH MANDIRI PUTRA



# LMDH MEKAR MAKMUR



# LMDH SEMPUR

